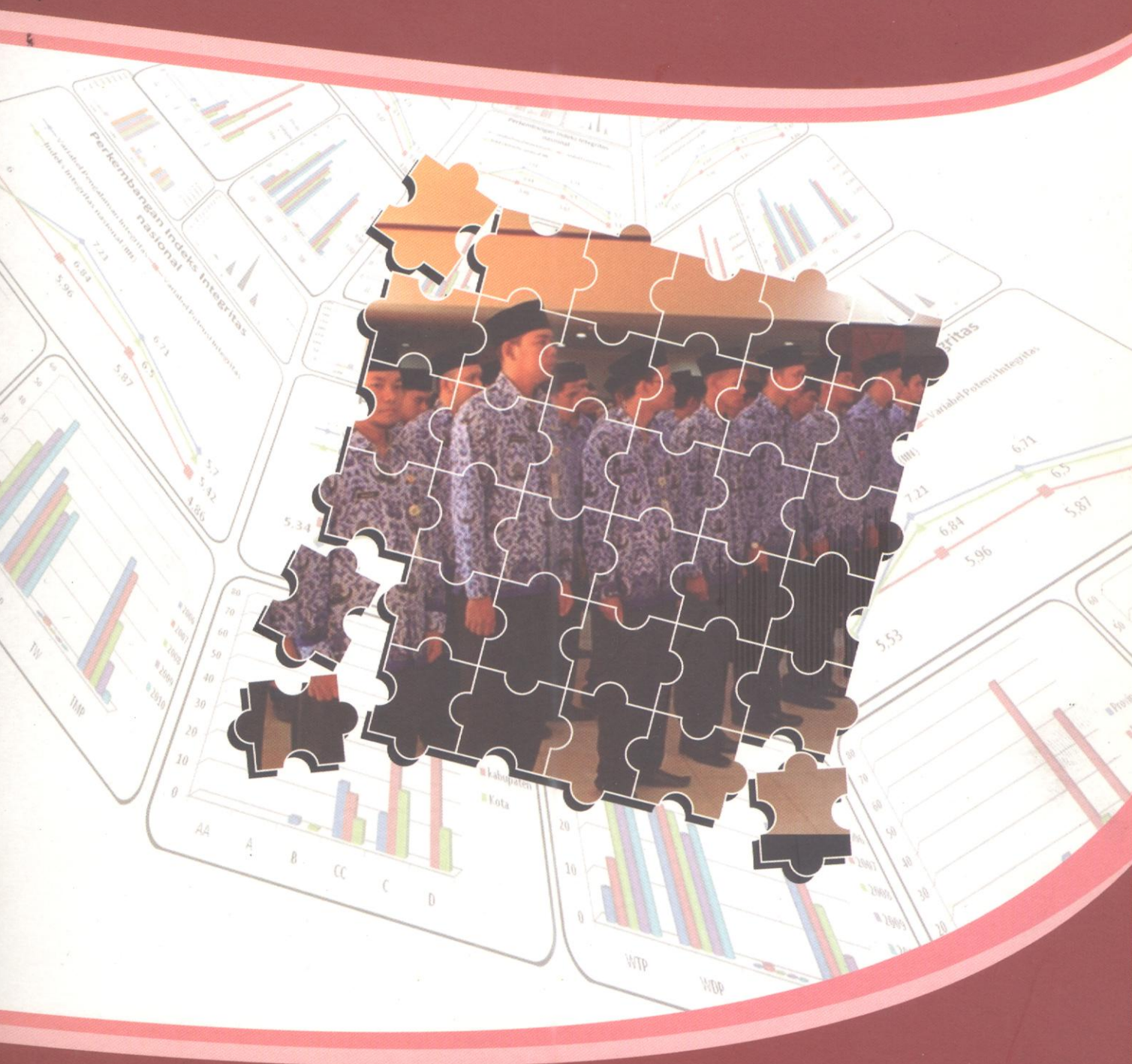


STATISTIK APARATUR INDONESIA 2013



STATISTIK APARATUR INDONESIA 2013

Penanggung Jawab :

Kepala PKP2A I Lembaga Administrasi Negara

Tim Penyusun :

Shafiera Amalia, S.IP.

Dr.H. Baban Sobandi, SE., M.Si.

Syarifudin Hidayat, Drs., M.Si.

Rosita Novi Andari, S.Sos.



Diterbitkan Oleh :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

BANDUNG

2013

STATISTIK APARATUR INDONESIA 2013

Penulis : Shafiera Amalia, *et.al.*
Desain Sampul : Irman Hermansyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, 2013

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
Termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit**

Hak Penerbitan pada:

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I
Lembaga Administrasi Negara

Alamat : Jl. Kiara Payung km. 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Tel/Fax : (022) 7790044 – 7790055

E-mail : admin@litbang-lan-bdg.info
info@bandung.lan.go.id

Web : www.litbang-lan-bdg.info
www.bandung.lan.go.id

ISBN : 978-979-3382-74-6

Tim Penyusun :

1. Shafiera Amalia, S.IP.
2. Dr.H. Baban Sobandi, SE., M.Si.
3. Syarifudin Hidayat, Drs., M.Si.
4. Rosita Novi Andari, S.Sos.

KATA PENGANTAR

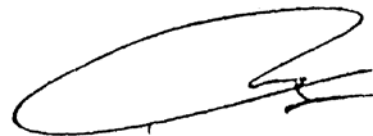
Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan ridhanya PKP2A I LAN dapat menyelesaikan buku **“Statistik Aparatur Indonesia 2013”**. Kehadiran publikasi ini merupakan suatu usaha untuk memenuhi ketersediaan data mengenai aparatur yang terintegrasi dan komprehensif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan perumusan kebijakan, maupun bagi keperluan akademis. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data terkait dengan aparatur.

Buku ini berisikan data statistik mengenai aparatur, dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia aparatur, fiskal/keuangan yang mendukung reformasi birokrasi dan aspek kinerja aparatur/reformasi birokrasi. Data yang disajikan dalam buku ini diperoleh dari berbagai instansi/lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidangnya.

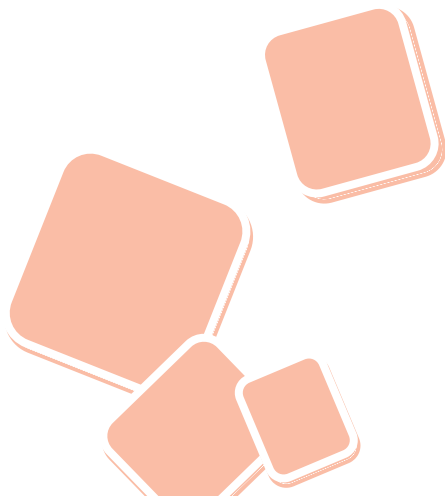
Publikasi ini merupakan lanjutan dari publikasi yang sama di tahun 2012. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan isi publikasi ini agar data yang disajikan lebih memadai. Walau demikian tentu masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karenanya, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk peningkatan kualitas publikasi ini di masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya buku ini.

Sumedang, November 2013
Kepala PKP2A I LAN



Dr. H. Gering Supriyadi, Drs., MM.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul		i
Kata Pengantar		iv
Daftar Isi		v
Daftar Tabel		vii
Daftar Gambar		xviii
Pendahuluan		1
A. Latar Belakang	1	
B. Tujuan	2	
C. Output	2	
D. Kegunaan dan Manfaat	2	
E. Teknik Pengumpulan Data	3	
Bagian I Kelembagaan		7
A. Kelembagaan Pemerintah	7	
B. Struktur Organisasi	8	
C. Ketersediaan Assessment Center di Lembaga Pemerintah	8	
Bagian II Ketatalaksanaan		91
A. Sistem Perencanaan Kerja	91	
B. Sistem Prosedur Kerja	91	
C. Sistem Pengawasan dan Pengendalian	93	
Bagian III Sumber Daya Manusia Aparatur		127
A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	127	
B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan	127	
C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil	128	
D. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil	129	
E. Pensiun Pegawai Negeri Sipil	129	
Bagian IV Keuangan/Fiskal yang Mendukung Reformasi Birokrasi (RB)		203
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	203	
B. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur	203	
C. Alokasi Belanja Negara untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	204	
D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	205	
E. Pendapatan Asli Daerah	205	

	F. Dana Perimbangan	205	
	G. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah	207	
Bab V	Kinerja Aparatur/Reformasi Birokrasi		233
	A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Instansi	233	
	B. Kualifikasi Penilaian LAKIP oleh Kemenpan	233	
	C. Integritas Sektor Publik	234	
	D. Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	234	
	E. Peringkat Doing Business Indonesia dan Negara ASEAN	235	
	F. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN	235	
	G. Peringkat dan Nilai Human Development Index Indonesia dan Negara ASEAN	236	



DAFTAR TABEL

Bagian I	Kelembagaan	
Tabel I.1	Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2012 - 2013	9
Tabel I.2	Nomenklatur Kementerian Tahun 2012 - 2013	9
Tabel I.3	Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2013	12
Tabel I.4	Nomenklatur Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2012 - 2013	12
Tabel I.5	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2012 - 2013	13
Tabel I.6	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tahun 2013	14
Tabel I.7	Nomenklatur Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri Tahun 2012 - 2013	14
Tabel I.8	Nomenklatur Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2012 - 2013	14
Tabel I.9	Nomenklatur Lembaga Non Struktural Tahun 2012 - 2013	14
Tabel I.10	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Negara Tahun 2012 - 2013	18
Tabel I.11	Jumlah Pemerintah Kabupaten Tahun 2009 - 2013	20
Tabel I.12	Jumlah Pemerintah Kota Tahun 2009 - 2013	21
Tabel I.13	Daerah Otonom Baru Tahun 1999 - 2013	22
Tabel I.14	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945	23
Tabel I.15	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945	25
Tabel I.16	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)	27
Tabel I.17	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	28
Tabel I.18	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian	30
Tabel I.19	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	31
Tabel I.20	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kejaksaan Agung)	33
Tabel I.21	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kepolisian RI)	35
Tabel I.22	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)	36

Tabel I.23	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)	37
Tabel I.24	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)	38
Tabel I.25	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)	39
Tabel I.26	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)	40
Tabel I.27	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kesekretariatan Mahkamah Agung)	42
Tabel I.28	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Panitera Mahkamah Agung)	43
Tabel I.29	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)	44
Tabel I.30	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)	45
Tabel I.31	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Non Struktural	46
Tabel I.32	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Kementerian Negara Tahun 2013	46
Tabel I.33	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2013	49
Tabel I.34	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Sekretariat Lembaga Negara Tahun 2013	51
Tabel I.35	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri Tahun 2013	51
Tabel I.36	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2013	52
Tabel I.37	Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Non Struktural Tahun 2013	52
Tabel I.38	Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu 2012 - 2013	53
Tabel I.39	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2012 - 2013	57
Tabel I.40	Jenis dan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun 2012 - 2013	58

Tabel I.41	Nomenklatur Lembaga Pusat/Daerah yang Memiliki Assessment Center Tahun 2013	88
Bagian II Ketatalaksanaan		
Tabel II.1	Jumlah Kementerian/Lembaga Pusat yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011	94
Tabel II.2	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011	94
Tabel II.3	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011	94
Tabel II.4	Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011	94
Tabel II.5	Jumlah Kementerian/LPND yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011	95
Tabel II.6	Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 – 2011	95
Tabel II.7	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 – 2011	95
Tabel II.8	Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011	95
Tabel II.9	Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen SOP Tahun 2013	96
Tabel II.10	Jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Telah Diterbitkan	98
Tabel II.11	Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan PTSP Tahun 2012 - 2013	99
Tabel II.12	Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Menerapkan e-Government Tahun 2012	101
Tabel II.13	Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Website Tahun 2012	101
Tabel II.14	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013	103
Tabel II.15	Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013	103
Tabel II.16	Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Menteri/Kepala K/L Mengenai SPIP Tahun 2010 – 2012	105
Tabel II.17	Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2010 – 2011	110
Tabel II.18	Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2009 – 2012	111
Tabel II.19	Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2011 – 2012	122
Bagian III Sumber Daya Manusia Aparatur		
Tabel III.1	Jumlah PNS Berstatus PNS Instansi Pusat dan PNS Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2012	130
Tabel III.2	Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	130

Tabel III.3	Jumlah PNS Pusat Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	130
Tabel III.4	Jumlah PNS Daerah Propinsi Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	131
Tabel III.5	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	131
Tabel III.6	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	132
Tabel III.7	Jumlah PNS Pusat Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	132
Tabel III.8	Jumlah PNS Daerah Propinsi Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	133
Tabel III.9	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	133
Tabel III.10	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	134
Tabel III.11	Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	134
Tabel III.12	Jumlah PNS Daerah Propinsi Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	135
Tabel III.13	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	136
Tabel III.14	Total Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012	136
Tabel III.15	Jumlah Umum PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012	137
Tabel III.16	Jumlah Umum PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012	137
Tabel III.17	Jumlah Umum PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012	137
Tabel III.18	Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2011 - 2012	138
Tabel III.19	Jumlah PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	138
Tabel III.20	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	139
Tabel III.21	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	139
Tabel III.22	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	140
Tabel III.23	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	140
Tabel III.24	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	141
Tabel III.25	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	141
Tabel III.26	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	142
Tabel III.27	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	142
Tabel III.28	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	142

Tabel III.29	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	143
Tabel III.30	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	143
Tabel III.31	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	143
Tabel III.32	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	144
Tabel III.33	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	144
Tabel III.34	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	145
Tabel III.35	Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2011 - 2012	146
Tabel III.36	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	146
Tabel III.37	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	147
Tabel III.38	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	147
Tabel III.39	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	148
Tabel III.40	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	148
Tabel III.41	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	149
Tabel III.42	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	149
Tabel III.43	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	150
Tabel III.44	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	150
Tabel III.45	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	150
Tabel III.46	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	151
Tabel III.47	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	151
Tabel III.48	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	151
Tabel III.49	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	152
Tabel III.50	Jumlah PNS Propinsi Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	152
Tabel III.51	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	153
Tabel III.52	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2009-2012	154

Tabel III.53	Pertumbuhan Jumlah Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2008 -2012	154
Tabel III.54	Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2008 - 2012	154
Tabel III.55	Pertumbuhan Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2008 - 2012	154
Tabel III.56	Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012	155
Tabel III.57	Rasio Mahasiswa per Dosen (Tenaga Edukatif) Tahun 2012	155
Tabel III.58	Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	155
Tabel III.59	Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	155
Tabel III.60	Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	156
Tabel III.61	Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	156
Tabel III.62	Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	156
Tabel III.63	Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	156
Tabel III.64	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	156
Tabel III.65	Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	157
Tabel III.66	Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	157
Tabel III.67	Pertumbuhan Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	157
Tabel III.68	Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	157
Tabel III.69	Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012	157
Tabel III.70	Jumlah Guru SD Menurut Usia Tahun 2011 - 2012	158
Tabel III.71	Jumlah Guru SMP Menurut Usia Tahun 2011 - 2012	158
Tabel III.72	Jumlah Guru SMA Menurut Usia Tahun 2011 - 2012	158
Tabel III.73	Jumlah Guru SMK Menurut Usia Tahun 2011 - 2012	159
Tabel III.74	Jumlah Guru SLB Menurut Usia Tahun 2012	159
Tabel III.75	Jumlah Guru TK Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2011 - 2012	159
Tabel III.76	Jumlah Guru SD Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2011 - 2012	159
Tabel III.77	Jumlah Guru SMP Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2011 - 2012	160
Tabel III.78	Jumlah Guru SMA Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2011 - 2012	160
Tabel III.79	Jumlah Guru SMK Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2011 - 2012	160
Tabel III.80	Jumlah Guru SLB Menurut Ijasah Tertinggi Tahun 2011 - 2012	160
Tabel III.81	Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	160
Tabel III.82	Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	161
Tabel III.83	Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	161
Tabel III.84	Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	161
Tabel III.85	Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	161
Tabel III.86	Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	161
Tabel III.87	Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	162

Tabel III.88	Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	162
Tabel III.89	Jumlah Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	162
Tabel III.90	Pertumbuhan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	162
Tabel III.91	Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	162
Tabel III.92	Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012	163
Tabel III.93	Perkembangan Rasio Siswa Per Guru Tahun 2008 - 2012	163
Tabel III.94	Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 -2013	163
Tabel III.95	Pertumbuhan Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2013	164
Tabel III.96	Jumlah Total PNS (Pusat-Daerah) yang Menduduki Jabatan Auditor Tahun 2011 - 2013	164
Tabel III.97	Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2011 - 2013	165
Tabel III.98	Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2011 - 2013	165
Tabel III.99	Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2011 - 2013	165
Tabel III.100	Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2012 - 2013	166
Tabel III.101	Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2013	166
Tabel III.102	Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2013	166
Tabel III.103	Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013	167
Tabel III.104	Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013	167
Tabel III.105	Jumlah Penyidik KPK Tahun 2009 - 2013	167
Tabel III.106	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenjang Tahun 2013	167
Tabel III.107	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013	167
Tabel III.108	Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013	168
Tabel III.109	Jumlah SDM Dittipidkor dan Jajarannya di Seluruh Indonesia Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2013	168
Tabel III.110	Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Jenjang Tahun 2013	168
Tabel III.111	Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013	169
Tabel III.112	Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013	169
Tabel III.113	Jumlah Umum PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012	169
Tabel III.114	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	170
Tabel III.115	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	170
Tabel III.116	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	171
Tabel III.117	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012	171
Tabel III.118	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	172
Tabel III.119	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	172

Tabel III.120	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	173
Tabel III.121	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012	173
Tabel III.122	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	173
Tabel III.123	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	174
Tabel III.124	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	174
Tabel III.125	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012	174
Tabel III.126	Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	174
Tabel III.127	Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	175
Tabel III.128	Jumlah PNS Daerah Propinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	176
Tabel III.129	Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	176
Tabel III.130	Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan Tahun 2009 - 2012	177
Tabel III.131	Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat Fungsional dan Teknis Tahun 2009 - 2012	177
Tabel III.132	Jumlah Keseluruhan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan yang Sudah Diakreditasi Tahun 2012	177
Tabel III.133	Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2010-2013	178
Tabel III.134	Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2010-2013	178
Tabel III.135	Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2010 - 2013	179
Tabel III.136	Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2010 - 2013	179
Tabel III.137	Gaji Pokok PNS Golongan I Tahun 2011 - 2013	180
Tabel III.138	Gaji Pokok PNS Golongan II Tahun 2011 - 2013	182
Tabel III.139	Gaji Pokok PNS Golongan III Tahun 2011 - 2013	184
Tabel III.140	Gaji Pokok PNS Golongan IV Tahun 2011 - 2013	186
Tabel III.141	Tunjangan Jabatan Struktural	189
Tabel III.142	Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2013	189
Tabel III.143	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) Askes Sosial Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2010 - 2012	195
Tabel III.144	Pertumbuhan Peserta Askes Sosial Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2010 - 2012	195
Tabel III.145	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) Askes Sosial Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2010 - 2012	196
Tabel III.146	Pertumbuhan Peserta Askes Sosial Menurut Golongan Kepegawaian	196
Tabel III.147	Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) Askes Sosial Menurut Kelompok Umur Tahun 2012	196

Tabel III.148	Jumlah Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2010 - 2012	197
Tabel III.149	Pertumbuhan Uang Pensiun PNS Per Kelompok	197
Tabel III.150	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2010 - 2012	198
Tabel III.151	Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2010 - 2012	198
Tabel III.152	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2010 - 2012	198
Tabel III.153	Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012	199
Tabel III.154	PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2012	200
Tabel III.155	Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2012	200
Bagian IV	Keuangan/Fiskal yang Mendukung Reformasi Birokrasi (RB)	
Tabel IV.1	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dalam Miliaran Rupiah)	209
Tabel IV.2	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan (Dalam Miliaran Rupiah)	211
Tabel IV.3	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Kesehatan (Dalam Miliaran Rupiah)	212
Tabel IV.4	Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur (Dalam Miliar Rupiah)	213
Tabel IV.5	Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010–2012	215
Tabel IV.6	Pertumbuhan Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010-2012	215
Tabel IV.7	Anggaran Lidik-Sidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun 2009 – 2012 (Dalam Milyar Rupiah)	215
Tabel IV.8	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2011 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	215
Tabel IV.9	Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2011 - 2013	215
Tabel IV.10	Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	216
Tabel IV.11	Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2011–2013	216
Tabel IV.12	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013	216
Tabel IV.13	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2013	217
Tabel IV.14	Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013	217
Tabel IV.15	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013	217
Tabel IV.16	Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	218
Tabel IV.17	Pertumbuhan Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 - 2013	218

Tabel IV.18	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013	218
Tabel IV.19	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013	218
Tabel IV.20	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013	219
Tabel IV.21	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013	219
Tabel IV.22	Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 - 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	219
Tabel IV.23	Pertumbuhan Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011–2013	219
Tabel IV.24	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013	220
Tabel IV.25	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013	220
Tabel IV.26	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011–2013	220
Tabel IV.27	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011–2013	221
Tabel IV.28	Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011–2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	221
Tabel IV.29	Pertumbuhan Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 –2013	221
Tabel IV.30	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011–2013	221
Tabel IV.31	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013	222
Tabel IV.32	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013	222
Tabel IV.33	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013	222
Tabel IV.34	Total Dana Bagi Hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2011–2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	223
Tabel IV.35	Pertumbuhan Total Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 - 2013	223
Tabel IV.36	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013	223
Tabel IV.37	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013	223
Tabel IV.38	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013	224
Tabel IV.39	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013	224
Tabel IV.40	Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	224
Tabel IV.41	Pertumbuhan Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)	225
Tabel IV.42	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja	225

	Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013	
Tabel IV.43	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013	225
Tabel IV.44	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011–2013	226
Tabel IV.45	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013	226
Tabel IV.46	Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 - 2013	226
Tabel IV.47	Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 - 2013	227
Tabel IV.48	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011–2013	227
Tabel IV.49	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011–2013	227
Tabel IV.50	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011–2013	228
Tabel IV.51	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013	228
Tabel IV.52	Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011–2013	228
Tabel IV.53	Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 - 2013	229
Tabel IV.54	Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011–2013	229
Tabel IV.55	Pertumbuhan Jumlah Pemda Propinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013	229
Tabel IV.56	Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011–2013	230
Tabel IV.57	Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013	230
Tabel IV.58	Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011–2013	230
Tabel IV.59	Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 - 2013	230
Bagian V	Kinerja Aparatur / Reformasi Birokrasi	
Tabel V.1	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004-2010	237
Tabel V.2	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2010-2012	237
Tabel V.3	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan	237

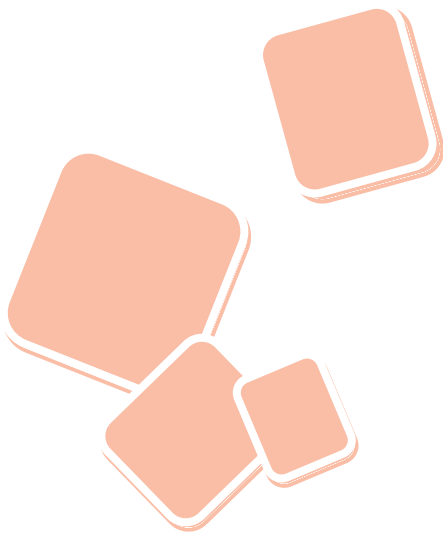
Tabel V.4	Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2010-2012 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009-2011	241
Tabel V.5	Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009-2011	242
Tabel V.6	Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Pusat Tahun 2011	253
Tabel V.7	Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	255
Tabel V.8	Nomenklatur Pemerintah Daerah Propinsi dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	256
Tabel V.9	Nomenklatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011	257
Tabel V.10	Perkembangan Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional Tahun 2008 - 2012	261
Tabel V.11	Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Secara Nasional Tahun 2010-2011	261
Tabel V.12	Peringkat Doing Business Negara ASEAN Tahun 2011 -2013	273
Tabel V.13	Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2008- 2012	274
Tabel V.14	Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2008 - 2012	274
Tabel V.15	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tahun 2009- 2013	274
Tabel V.16	Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh KPK Tahun 2009- 2013	275
Tabel V.17	Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Dittipidkor Polri Tahun 2009-2013	275
Tabel V.18	Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima oleh KPK Tahun 2008-2013	275
Tabel V.19	Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Diterima oleh KPK Tahun 2010-2013	276
Tabel V.20	Rangking (<i>Rank</i>) dan Nilai (<i>Value</i>) <i>Human Development Index</i> (HDI) Negara ASEAN Tahun 2010-2012	276
Tabel V.21	Nilai Komponen (<i>components</i>) <i>Human Development Index</i> (HDI) Negara ASEAN Tahun 2011 - 2012	277



DAFTAR GAMBAR

Bagian I	Kelembagaan	
Gambar I.1.	Peta Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat	19
Gambar I.2.	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas di sebutkan dalam UUD 1945	24
Gambar I.3.	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ruang lingkungnya di sebutkan dalam UUD 1945	26
Gambar I.4	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)	27
Gambar I.5	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah	29
Gambar I.6	Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang dibentuk untuk keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian	30
Gambar I.7.	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian	32
Gambar I.8.	Titelatur dan Eselonering pada Kejaksaan Agung	34
Gambar I.9.	Titelatur dan Eselonering pada Kejaksaan Tinggi	34
Gambar I.10.	Titelatur dan Eselonering pada Lembaga yang dipimpin pejabat setingkat menteri (Sekretariat Kabinet)	36
Gambar I.11.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)	37
Gambar I.12.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)	38
Gambar I.13.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)	39
Gambar I.14	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga	41

	Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)	
Gambar I.15	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)	44
Gambar I.16.	Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)	45



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini data mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu memproduksi dan mengkonsumsi data, baik pada tingkatan individu; organisasi swasta dan masyarakat; dan juga pada organisasi pemerintah. Pada organisasi pemerintah, data mutlak diperlukan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Data diperlukan dalam seluruh proses manajemen pemerintahan; data diperlukan dalam proses perumusan, implementasi hingga evaluasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Data juga diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan di seluruh sektor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan yang benar dan nyata; data merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Pentingnya ketersediaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai bahan pertimbangan agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien; agar pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat berhasil guna dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ketidakterersediaan data yang memadai akan menyebabkan kesalahan dalam merumuskan kebijakan atau merencanakan pembangunan, sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai dan hanya memboroskan sumber daya yang ada.

Melihat pentingnya data dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Regulasi ini mengemukakan dan mengharuskan dua hal, yaitu bahwa dalam setiap perencanaan pembangunan haruslah didasarkan pada data; dan yang kedua data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan haruslah data yang valid dan akurat. Hal ini dikarenakan walaupun telah tersedia data untuk proses perencanaan pembangunan, tetapi data tersebut tidak valid dan akurat karena kesalahan dalam mengumpulkan dan mengolah data, maka dapat terjadi kesalahan dan kegagalan dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan data yang memadai, valid dan akurat agar setiap kebijakan yang diproduksi oleh pemerintah dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai bagian dari aspek pemerintahan, pengelolaan (manajemen) dan pembangunan sumber daya aparatur mutlak memerlukan data yang memadai, valid dan akurat sebagai input utama dalam merumuskan berbagai kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur. Namun kenyataannya, belum tersedia data yang memadai, valid dan akurat mengenai sumber daya aparatur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan

yang terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur. Misalnya saja saat ini terjadi perbedaan data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh instansi pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

Data jumlah PNS ini hanya satu data mengenai sumber daya aparatur yang harus diperbaiki ketersediannya dan dijamin kevalidan dan keakuratannya. Masih banyak jenis data lain mengenai sumber daya aparatur yang diperlukan tetapi belum dikumpulkan dan dikelola dengan baik oleh instansi yang berwenang; atau bahkan jenis data tersebut belum ada, belum pernah dikumpulkan sama sekali oleh instansi yang berwenang. Kondisi inilah yang melatarbelakangi PKP2A I LAN untuk melaksanakan kegiatan penyusunan buku Statistik Aparatur Indonesia 2013. Buku ini merupakan kelanjutan dari buku yang sama pada tahun 2012 dengan berbagai penyempurnaan. Penyempurnaan dan penambahan dilakukan di antaranya terhadap jenis data yang disajikan. Selain itu, dalam buku ini juga ditampilkan pengolahan data sederhana untuk membantu pembaca melihat rasio dan/atau pertumbuhan dari setiap data yang disajikan. Diharapkan data yang tersedia semakin memadai untuk keperluan perumusan kebijakan aparatur maupun keperluan akademis.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya buku ini adalah untuk mengumpulkan dan menyusun data aparatur yang tersedia pada instansi yang berwenang dan menyajikannya dalam bentuk publikasi yang mudah dimengerti dan digunakan oleh berbagai stakeholder.

C. Isi Buku

Buku ini berisikan data mengenai aparatur yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu :

1. bagian I berisikan data kelembagaan;
2. bagian II berisikan data ketatalaksanaan;
3. bagian III berisikan data sumber daya manusia aparatur;
4. bagian IV berisikan data keuangan/fiskal yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. bagian V berisikan data kinerja aparatur/ reformasi birokrasi.

D. Kegunaan dan Manfaat

Adapun kegunaan dari buku ini yang utama adalah sebagai bahan bagi perumusan kebijakan perencanaan makro (RPJM) bidang aparatur oleh Bappenas. Selain itu, buku Statistik Aparatur 2012 ini juga dapat digunakan oleh berbagai stakeholder yang memerlukan data untuk proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan, program pembangunan dan pengelolaan sumber daya aparatur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data di bidang aparatur menggunakan teknik Studi pustaka (*desk research*) yang dilakukan di beberapa lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang aparatur. Diantaranya adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN); Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian PAN dan RB; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Lembaga Administrasi Negara (LAN); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri; Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN); Lembaga Transparency International, UNDP; PT Askes; dan PT Taspen.

Data yang ada pada instansi-instansi tersebut dikumpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Data kelembagaan yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Kementerian PAN dan RB; Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS). Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Data ketatalaksanaan yang ditampilkan dalam buku ini bersumber dari Kementerian PAN dan RB; Kementerian Dalam Negeri; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Sementara data sumber daya manusia aparatur yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN); Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Kesehatan; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri; BKKBN; LAN; PT Askes; dan PT Taspen. Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah dan berdasarkan database internal.
4. Data keuangan yang Mendukung Reformasi Birokrasi (RB) yang ditampilkan dalam buku ini bersumber dari Kementerian Keuangan; Badan Pusat Statistik (BPS); Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Instansi tersebut mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah dan berdasarkan database internal.
5. Data Kinerja Aparatur / Reformasi Birokrasi yang disajikan dalam buku ini bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kementerian PAN dan RB; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kemendagri; Lembaga Transparency International, dan UNDP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Kementerian PAN dan RB; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kemendagri mengumpulkan data berdasarkan laporan dari Kementerian /Lembaga; Pemerintah Daerah dan berdasarkan database internal. Sementara Lembaga Transparency International.

BAGIAN I

KELEMBAGAAN



Bab ini menyajikan data kelembagaan yang terdiri dari kelembagaan pemerintah, struktur organisasi dan ketersediaan *assessment center* di lembaga pemerintah. Kelembagaan pemerintah dibagi ke dalam dua jenis data yaitu data kelembagaan pemerintah pusat dan data kelembagaan pemerintah daerah. Struktur organisasi dibagi ke dalam empat jenis data yaitu data pemetaan titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga; jumlah jabatan struktural (eselon) di lembaga Negara; nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan instansi pembinaanya; serta nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan kementerian/lembaga. Sedangkan ketersediaan *assessment center* di lembaga pemerintah hanya terdiri dari satu jenis data yaitu nomenklatur lembaga pusat/pemerintah daerah yang telah memiliki *asesment center*.

A. Kelembagaan Pemerintah

Data mengenai kelembagaan pemerintah pusat yang disajikan dalam buku ini adalah data jumlah dan nomenklatur lembaga pemerintah pusat tahun 2012 dan 2013. Sehingga pembaca dapat melihat dinamika kelembagaan pemerintah pusat selama dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenpan dan RB, pada tahun 2012 tercatat ada sebanyak 173 lembaga negara, dan pada tahun 2013 mengalami penambahan menjadi 178 lembaga negara. Jumlah lembaga negara terbanyak adalah jenis lembaga non struktural. Data lengkap mengenai rekapitulasi jumlah lembaga negara tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel I.10.

Dari segi nomenklatur lembaga, ada beberapa lembaga negara yang berubah nomenklatur lembaganya. Misalnya adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional berubah menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG). Data mengenai nomenklatur lembaga negara dapat dilihat pada tabel I.1 sampai tabel I.9. Selain itu, perubahan terjadi pada struktur kelembagaan kementerian. Pada tahun 2013, Ada 17 kementerian yang memiliki wakil menteri. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel I.3.

Data mengenai kelembagaan pemerintah daerah yang disajikan dalam buku ini adalah data jumlah pemerintah daerah propinsi kabupaten/kota antara tahun 2009 sampai 2013. Pada tahun 2013 ini, terdapat penambahan jumlah propinsi dan kabupaten, yaitu menjadi 34 propinsi dan 410 kabupaten. Sementara jumlah pemerintah kota tetap antara tahun 2009 sampai 2013, yaitu sebanyak 98 pemerintah

kota. Data mengenai jumlah propinsi/kabupaten/ dan kota tersedia pada tabel I.11 dan tabel I.12. Penambahan jumlah propinsi dan kabupaten disebabkan dilaksanakannya kembali kebijakan pemekaran daerah. Pada periode tahun 2012-2013, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada 15 daerah pemekaran baru, yaitu 1 propinsi; 13 kabupaten; dan 1 kota. Data selengkapnya mengenai jumlah daerah otonom baru dapat dilihat pada tabel I.13.

B. Struktur Organisasi (struktur dan jabatan)

Data yang disajikan dalam bagian ini berupaya untuk menggambarkan struktur organisasi lembaga pemerintah pusat sehingga dapat diketahui titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga; jumlah jabatan struktural yang ada di lingkungan instansi pusat; jumlah, nomenklatur jabatan fungsional tertentu; dan nomenklatur jabatan fungsional umum di lingkungan instansi pusat. Sementara untuk data mengenai struktur organisasi pemerintah daerah masih belum tersedia dan perlu dibangun. Adapun data mengenai titelatur dan eselonering jabatan struktural di kementerian/lembaga dapat dilihat pada tabel I.14 sampai tabel I.31 dan gambar I.2 sampai gambar I.16. Data mengenai jumlah jabatan struktural yang ada di lingkungan instansi pusat dapat dilihat pada tabel I.32 sampai tabel I.37. Data mengenai jumlah, nomenklatur jabatan fungsional tertentu dan instansi pembinaanya dapat dilihat pada tabel I.38 dan tabel I.39. Dan data mengenai jenis dan nomenklatur jabatan fungsional umum yang ada di lingkungan pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel I.40.

C. Ketersediaan Assessment Center di Lembaga Pemerintah

Dewasa ini pengembangan *assessment center* / *assessment* kompetensi aparatur dirasa sangat penting untuk memperoleh aparatur publik yang berkualitas. Oleh karena itu, lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia berupaya untuk membangun dan mengembangkan *assessment center*. Kementerian PAN dan RB mencatat sampai tahun 2013, baru 15 instansi yang sudah membangun *assessment center*, yang terdiri dari 10 instansi pusat dan 5 pemerintah daerah. Melihat pentingnya pengembangan *assessment center* tersebut, harusnya kebijakan ini perlu memperoleh perhatian khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun data jumlah dan nomenklatur instansi pusat/pemerintah daerah yang telah memiliki *assessment center* dapat dilihat pada tabel I.41.



Tabel I.1 Nomenklatur Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Negara Tahun 2012	Lembaga Negara Tahun 2013	Pemegang Cabang Kekuasaan Negara	Pasal dalam UUD 1945
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Mengubah dan menetapkan UUD	Pasal 3
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	Dewan Perwakilan Rakyat	Membentuk Undang-Undang	Pasal 20
3.	Dewan Perwakilan Daerah	Dewan Perwakilan Daerah	Membentuk Undang-Undang	Pasal 22D
4.	Presiden	Presiden	Memegang kekuasaan pemerintahan	Pasal 4
5.	Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	Kekuasaan kehakiman	Pasal 24 C
6.	Mahkamah Agung	Mahkamah Agung	Kekuasaan kehakiman	Pasal 24A
7.	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan	Pemeriksaan keuangan negara	Pasal 23E
8.	Komisi Yudisial	-	Pengusulan pengangkatan hakim agung	Pasal 24B
	Jumlah Tahun 2012 = 8 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 7 Lembaga		

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.2 Nomenklatur Kementerian Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Kementerian	2012	2013
1.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang secara tegas di sebutkan dalam UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Dalam Negeri b. Kementerian Luar Negeri c. Kementerian Pertahanan
2.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya di sebutkan dalam UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral d. Kementerian Perindustrian 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia b. Kementerian Keuangan c. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral d. Kementerian Perindustrian e. Kementerian Perdagangan f. Kementerian Pertanian



Lanjutan Tabel I.2

No.	Jenis Kementerian	2012	2013
		e. Kementerian Perdagangan f. Kementerian Pertanian g. Kementerian Kehutanan h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan dan Perikanan j. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi k. Kementerian Pekerjaan Umum l. Kementerian Kesehatan m. Kementerian Pendidikan Nasional n. Kementerian Sosial o. Kementerian Agama p. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata q. Kementerian Komunikasi dan Informatika	g. Kementerian Kehutanan h. Kementerian Perhubungan i. Kementerian Kelautan dan Perikanan j. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi k. Kementerian Pekerjaan Umum l. Kementerian Kesehatan m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan n. Kementerian Sosial o. Kementerian Agama p. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif q. Kementerian Komunikasi dan Informatika
3.	Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah	a. Kementerian Riset dan Teknologi b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Kementerian Lingkungan Hidup d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	a. Kementerian Riset dan Teknologi b. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah c. Kementerian Lingkungan Hidup d. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak e. Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Lanjutan Tabel I.2

No.	Jenis Kementerian	2012	2013
4.		f. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal g. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional h. Kementerian Badan Usaha Milik Negara i. Kementerian Perumahan Rakyat j. Kementerian Pemuda dan Olahraga k. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian m. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat a. Kementerian Sekretariat Negara	f. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal g. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional h. Kementerian Badan Usaha Milik Negara i. Kementerian Perumahan Rakyat j. Kementerian Pemuda dan Olahraga k. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan l. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian m. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat n. Kementerian Sekretariat Negara
		Jumlah Tahun 2012 = 34 Kementerian	Jumlah Tahun 2013 = 34 Kementerian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



Tabel I.3 Nomenklatur Kementerian yang Memiliki Wakil Menteri Tahun 2013

No	Nomenklatur Kementerian
1.	Kementerian Pertanian
2.	Kementerian Pekerjaan Umum
3.	Kementerian Perhubungan
4.	Kementerian Perindustrian
5.	Kementerian Perdagangan
6.	Kementerian Keuangan
7.	Kementerian Pertahanan
8.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Kementerian Kesehatan
10.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
11.	Kementerian BUMN
12.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
13.	Kementerian Luar Negeri
14.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
15.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
17.	Kementerian Agama
Jumlah 17 Kementerian	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.4 Nomenklatur Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2012	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2013
1	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
3	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
5	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
6	Badan Pusat Statistik (BPS)	Badan Pusat Statistik (BPS)
7	Badan Standardisasi Nasional (BSN)	Badan Standardisasi Nasional (BSN)
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
9	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)	Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
10	Badan Intelijen Negara	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
11	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
12	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
13	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
14	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
15	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
16	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)



Lanjutan Tabel I.4

No	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2012	Lembaga Pemerintah Non Kementerian 2013
17	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Badan Pertahanan Nasional (BPN)
18	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (B POMM)
19	Badan Pertahanan Nasional (BPN)	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)
20	Badan Pengawasan Obat dan Makanan (B POMM)	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
21	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
22	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
23	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
24	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	Badan SAR Nasional (BASARNAS)
25	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Badan Narkotika Nasional (BNN)
26	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
27	Badan Narkotika Nasional (BNN)	Badan Informasi Geospasial (BIG)
28	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	
	Jumlah Tahun 2012 = 28 LPNK	Jumlah Tahun 2013 = 27 LPNK

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.5 Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 2012 - 2013

No	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2012	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara Tahun 2013
1	Sekretariat Mahkamah Agung	Sekretariat Mahkamah Agung
2	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Rakyat
3	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
4	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
5	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	Sekretariat Badan Pemeriksa Keuangan
6	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
7	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	-
	Jumlah Tahun 2012 = 7 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 6 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



Tabel I.6 Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara yang Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Tahun 2013

No	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara
1.	Sekretariat Komisi Yudisial
2.	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia
3.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4.	Sekretariat Ombudsman Republik Indonesia

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.7 Nomenklatur Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri Tahun 2012 - 2013

No	Nomenklatur Lembaga Tahun 2012	Nomenklatur Lembaga Tahun 2013
1.	Kejaksaan Agung Republik Indonesia	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
2.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3.	Tentara Nasional Republik Indonesia	Tentara Nasional Republik Indonesia
4.	Sekretariat Kabinet	Sekretariat Kabinet
5.		Badan Intelejen Negara
	Jumlah Tahun 2012 = 4 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.8 Nomenklatur Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2012	Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2013
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
	Jumlah Tahun 2012 = 2 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 2 Lembaga

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.9 Nomenklatur Lembaga Non Struktural Tahun 2012 - 2013

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
KOMISI		
1.	Komisi Hukum Nasional	Komisi Hukum Nasional
2.	Komisi Kepolisian Nasional	Komisi Kepolisian Nasional
3.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
4.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
5.	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
6.	Komisi Kejaksaan	Komisi Kejaksaan
7.	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional
8.	Komisi Nasional Lanjut Usia	Komisi Nasional Lanjut Usia
9.	Komisi Penyiaran Indonesia	-
10.	Komisi Banding Merek	Komisi Banding Merek
11.	Komisi Banding Paten	Komisi Banding Paten
12.	Komisi Informasi Pusat	Komisi Informasi Pusat
13.	Komisi Pengawas Haji Indonesia	Komisi Pengawas Haji Indonesia



Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
14.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
15.	Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum
16.	Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi	-
	Jumlah Tahun 2012 = 16 Komisi	Jumlah Tahun 2013 = 14 Komisi
DEWAN		
1.	Dewan Buku Nasional	Dewan Buku Nasional
2.	Dewan Gula Nasional	Dewan Gula Nasional
3.	Dewan Riset Nasional	Dewan Riset Nasional
4.	Dewan Koperasi Indonesia	Dewan Koperasi Indonesia
5.	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
6.	Dewan Kelautan Indonesia	Dewan Kelautan Indonesia
7.	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
8.	Dewan Pengupahan Nasional	Dewan Pengupahan Nasional
9.	Dewan Ketahanan Pangan	Dewan Ketahanan Pangan
10.	Dewan Energi Nasional	Dewan Energi Nasional
11.	Dewan Pers	Dewan Pers
12.	Dewan Pertimbangan Presiden	Dewan Pertimbangan Presiden
13.	Dewan Sumber Daya Air Nasional	Dewan Sumber Daya Air Nasional
14.	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)
15.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
16.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
17.	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
18.	Dewan Ketahanan Nasional	Dewan Ketahanan Nasional
19.	Dewan Nasional Perubahan Iklim	Dewan Nasional Perubahan Iklim
20.	Dewan Jaminan Sosial Nasional	Dewan Jaminan Sosial Nasional
21.	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
22.	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional	Dewan Penerbangan Antariksa Nasional
23.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
	Jumlah Tahun 2012 = 23 Dewan	Jumlah Tahun 2013 = 23 Dewan
BADAN		
1.	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu	Badan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu
2.	Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional	Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Pemukiman Nasional
3.	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4.	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
5.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas



Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
6.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
7.	Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
8.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Badan Pengawas Pemilihan Umum
9.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura
10.	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
11.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
12.	Badan Amil Zakat Nasional	Badan Amil Zakat Nasional
13.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	Badan Koordinasi Keamanan Laut
14.	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik
15.	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan	Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
16.	Badan Olahraga Professional	Badan Olahraga Professional
17.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Badan Nasional Pengelola Perbatasan
18.	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
19.	Badan Pertimbangan Kepegawaian	Badan Pertimbangan Kepegawaian
20.	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
21.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang
22.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
23.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
24.	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
25.	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
26.	Badan Benih Nasional	Badan Benih Nasional
	Jumlah Tahun 2012 = 26 Badan	Jumlah Tahun 2013 = 26 Badan
KOMITE		
1.	Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Komite Nasional Keselamatan Transportasi
2.	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
3.	Komite Akreditasi Nasional	Komite Akreditasi Nasional
4.	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
5.	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran	Komite Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran



Lanjutan Tabel I.9

No	Lembaga Non Struktural Tahun 2012	Lembaga Non Struktural Tahun 2013
6.	Komite Standar Akuntansi Pemerintah	Komite Standar Akuntansi Pemerintah
7.	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
8.	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
9.	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (<i>Avian Influenza</i>) dan Kesiapsiagaan Menghadapi <i>Pandemic Influenza</i>	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (<i>Avian Influenza</i>) dan Kesiapsiagaan Menghadapi <i>Pandemic Influenza</i>
10.	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun	Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
11.	Komite Olahraga Nasional Indonesia	Komite Olahraga Nasional Indonesia
12.	Komite Inovasi Nasional	Komite Inovasi Nasional
13.	Komite Anti Dumping Indonesia	Komite Anti Dumping Indonesia
14.	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
	Jumlah Tahun 2012 = 14 Komite	Jumlah Tahun 2013 = 14 Komite
LEMBAGA		
1.	Lembaga Sensor Film	Lembaga Sensor Film
2.	Lembaga Kerja Sama Tripartit	Lembaga Kerja Sama Tripartit
3.	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
4.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
5.	-	Lembaga Produktivitas Nasional
	Jumlah Tahun 2012 = 4 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga
TIM		
1.	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
2.	Jumlah Tahun 2012 = 1 Tim	Jumlah Tahun 2013 = 1 Tim
NOMENKLATUR LAIN		
1.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
2.	Ombudsman Republik Indonesia	-
3.	Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)	Unit Kerja Presiden Untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)
4.	Konsil Kedokteran Indonesia	Konsil Kedokteran Indonesia
5.	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
6.	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
	Jumlah Tahun 2012 = 6 Lembaga	Jumlah Tahun 2013 = 5 Lembaga
	Jumlah Total LNS Tahun 2012 = 90 LNS	Jumlah Total LNS Tahun 2013 = 88 LNS

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



Catatan :

1. Komisi Kepegawaian Negara sebagai amanat UU Nomor 43 Tahun 1999 pengganti UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sampai saat ini belum dibentuk.
2. Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sampai saat ini juga masih belum dibentuk.

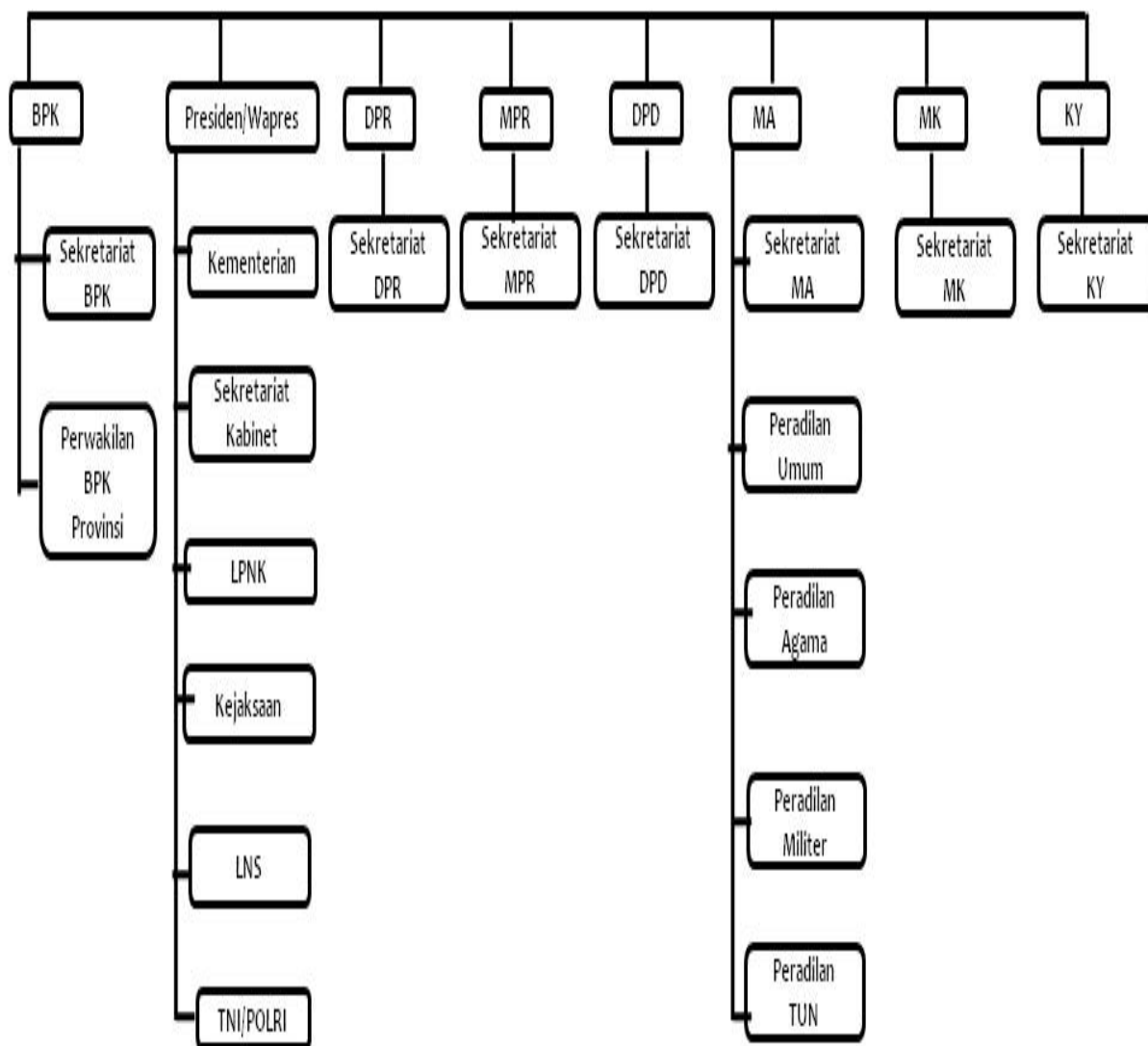
Tabel I.10 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Negara Tahun 2012 - 2013

No.	Jenis Lembaga Negara	2012	2013
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	8	7
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang		4
3.	Kementerian	34	34
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	28	27
5.	Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7	6
6.	Nomenklatur Kesekretariatan Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang		4
7.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	4	5
8.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2	2
9.	Lembaga Non Struktural		
	a. Komisi	16	14
	b. Dewan	23	23
	c. Badan	26	26
	d. Komite	14	14
	e. Lembaga	4	5
	f. Tim	1	1
	g. Nomenklatur lain	6	6
Total Lembaga		173	178

Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2013



Gambar I.1 Peta Kelembagaan Instansi Pemerintah Pusat



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel I.11 Jumlah Pemerintah Kabupaten Tahun 2009 - 2013

No.	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	18	18	18	18	18
2.	Sumatera Utara	25	25	25	25	25
3.	Sumatera Barat	12	12	12	12	12
4.	Riau	10	10	10	10	10
5.	Kepulauan Riau	5	5	5	5	5
6.	Jambi	9	9	9	9	9
7.	Sumatera Selatan	11	11	11	11	12
8.	Kepulauan Bangka Belitung	6	6	6	6	6
9.	Bengkulu	9	9	9	9	9
10.	Lampung	12	12	12	12	13
11.	DKI Jakarta	1	1	1	1	1
12.	Jawa Barat	17	17	17	17	18
13.	Banten	4	4	4	4	4
14.	Jawa Tengah	29	29	29	29	29
15.	DI Yogyakarta	4	4	4	4	4
16.	Jawa Timur	29	29	29	29	29
17.	Bali	8	8	8	8	8
18.	Nusa Tenggara Barat	8	8	8	8	8
19.	Nusa Tenggara Timur	20	20	20	20	21
20.	Kalimantan Barat	12	12	12	12	12
21.	Kalimantan Tengah	13	13	13	13	13
22.	Kalimantan Selatan	11	11	11	11	11
23.	Kalimantan Timur	10	10	10	10	7
24.	Sulawesi Utara	11	11	11	11	11
25.	Gorontalo	5	5	5	5	5
26.	Sulawesi Tengah	10	10	10	10	11
27.	Sulawesi Selatan	21	21	21	21	21
28.	Sulawesi Barat	5	5	5	5	6
29.	Sulawesi Tenggara	10	10	10	10	11
30.	Maluku	9	9	9	9	9
31.	Maluku Utara	7	7	7	7	8
32.	Papua	28	28	28	28	28
33.	Papua Barat	10	10	10	10	12
34.	Kalimantan Utara					4
Indonesia		399	399	399	399	410

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, 2013



Tabel I.12 Jumlah Pemerintah Kota Tahun 2009 - 2013

No.	Provinsi	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Aceh	5	5	5	5	5
2.	Sumatera Utara	8	8	8	8	8
3.	Sumatera Barat	7	7	7	7	7
4.	Riau	2	2	2	2	2
5.	Kepulauan Riau	2	2	2	2	2
6.	Jambi	2	2	2	2	2
7.	Sumatera Selatan	4	4	4	4	4
8.	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1	1
9.	Bengkulu	1	1	1	1	1
10.	Lampung	2	2	2	2	2
11.	DKI Jakarta	5	5	5	5	5
12.	Jawa Barat	9	9	9	9	9
13.	Banten	4	4	4	4	4
14.	Jawa Tengah	6	6	6	6	6
15.	DI Yogyakarta	1	1	1	1	1
16.	Jawa Timur	9	9	9	9	9
17.	Bali	1	1	1	1	1
18.	Nusa Tenggara Barat	2	2	2	2	2
19.	Nusa Tenggara Timur	1	1	1	1	1
20.	Kalimantan Barat	2	2	2	2	2
21.	Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1
22.	Kalimantan Selatan	2	2	2	2	2
23.	Kalimantan Timur	4	4	4	4	3
24.	Sulawesi Utara	4	4	4	4	4
25.	Gorontalo	1	1	1	1	1
26.	Sulawesi Tengah	1	1	1	1	1
27.	Sulawesi Selatan	3	3	3	3	3
28.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Tenggara	2	2	2	2	2
30.	Maluku	2	2	2	2	2
31.	Maluku Utara	2	2	2	2	2
32.	Papua	1	1	1	1	1
33.	Papua Barat	1	1	1	1	1
34.	Kalimantan Utara					1
Indonesia		98	98	98	98	98

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, 2013



Tabel I.13 Daerah Otonom Baru Tahun 1999 - 2013

No.	Provinsi	Jumlah Daerah Otonom Baru 1999 - 2008				Jumlah Daerah Otonom Baru 2012 - 2013			
		Prov.	Kab.	Kota	Total	Prov.	Kab.	Kota	Total
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0	10	3	13	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	12	2	14	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	4	1	5	0	0	0	0
4	Riau	0	6	1	7	0	0	0	0
5	Jambi	0	5	1	5	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	5	3	8	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	6	0	6	0	0	0	0
8	Lampung	0	6	1	7	0	1		1
9	Kep. Bangka Belitung	1	4	0	5	0	0	0	0
10	Kep. Riau	1	4	2	7	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	1	4	5	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Banten	1	0	3	4	0	0	0	0
15	Jawa Timur	0	0	1	1	0	0	0	0
16	Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	2	1	3	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	8	0	8	0	1	0	1
20	Kalimantan Barat	0	6	1	7	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	8	0	8	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	2	1	3	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	6	1	7	0	1	0	1
24	Sulawesi Utara	0	8	0	8	0	0	0	0
25	Sulawesi Tengah	0	6	0	6	0	1	0	1
26	Sulawesi Selatan	0	3	1	4	0	0	0	0
27	Sulawesi Tenggara	0	6	1	7	0	1	0	1
28	Gorontalo	1	4	0	5	0	0	0	0
29	Sulawesi Barat	1	2	0	3	0	1	0	1
30	Maluku	0	7	1	8	0	0	0	0
31	Maluku Utara	1	5	2	8	0	1	0	1
32	Papua	0	22	0	22	0	0	0	0
33	Papua Barat	1	7	1	9	0	2	0	2
34	Kalimantan Utara					1	4	1	6
	Total	7	156	32	203	1	13	1	15

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2013

Catatan : Tahun 2009 sampai 2011 diberlakukan kebijakan moratorium pemekaran daerah. Dalam RPJM 2010 – 2014 tidak ada pembentukan DOB usulan pemerintah (Moratorium).



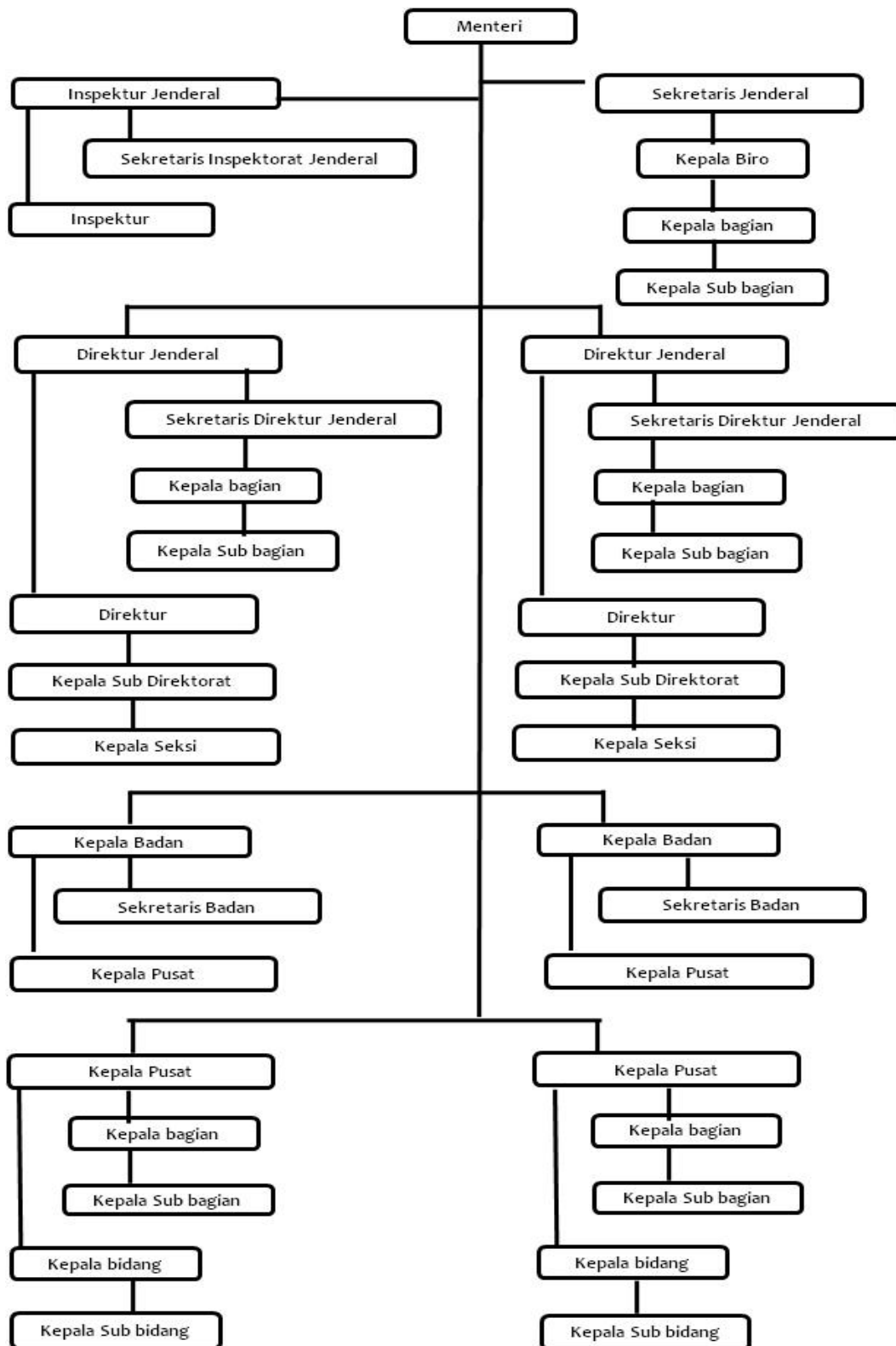
Tabel I.14 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Direktur jenderal c. Kepala badan d. Inspektur jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat f. Sekretaris inspektorat jenderal g. Inspektorat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Gambar 1.2 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Secara Tegas Disebutkan dalam UUD 1945



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



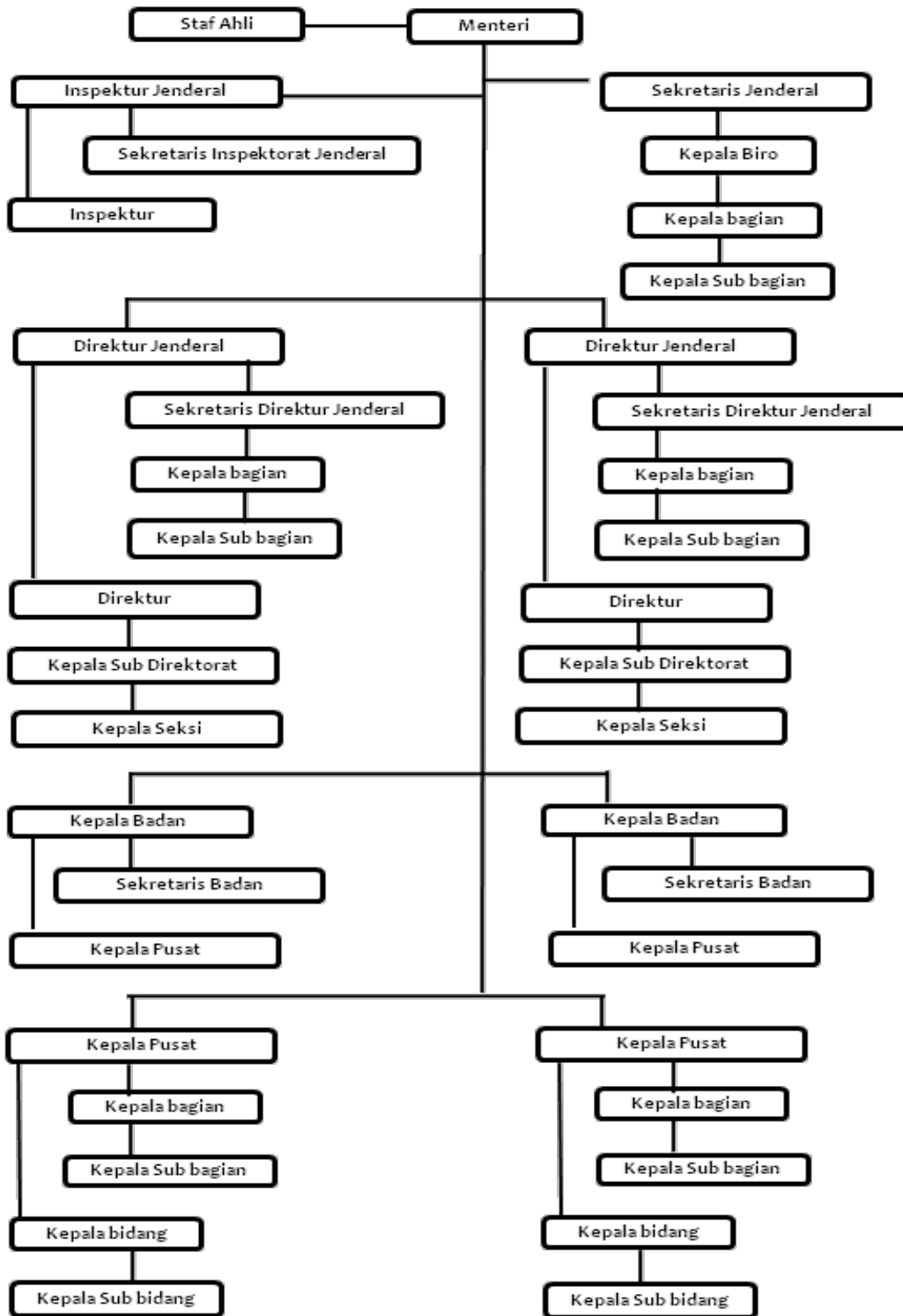
Tabel 1.15 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Direktur jenderal c. Kepala badan d. Inspektur jenderal e. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat f. Sekretaris inspektorat jenderal g. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Gambar 1.3 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Ruang Lingkupnya Disebutkan dalam UUD 1945



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

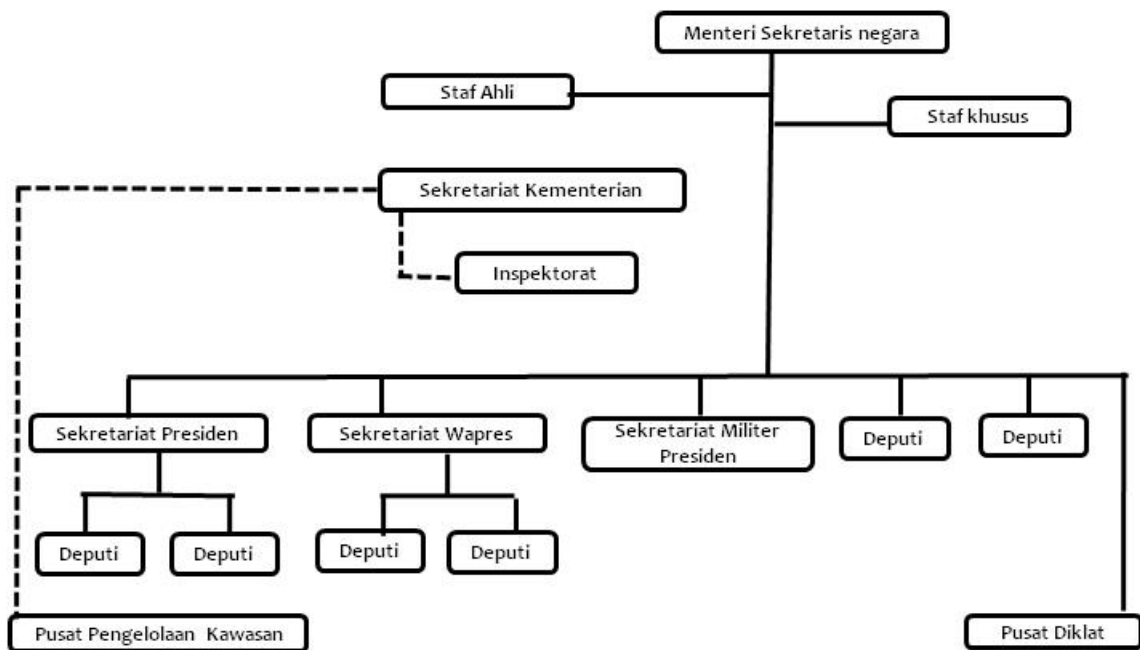


Tabel I.16 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan b. Sekretaris Wakil Presiden c. Sekretaris Militer d. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara e. Deputi di Lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Wakil Presiden, dan Sekretariat Negara f. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala istana d. Kepala unit
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.4 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah (Kementerian Kesekretariatan Negara)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



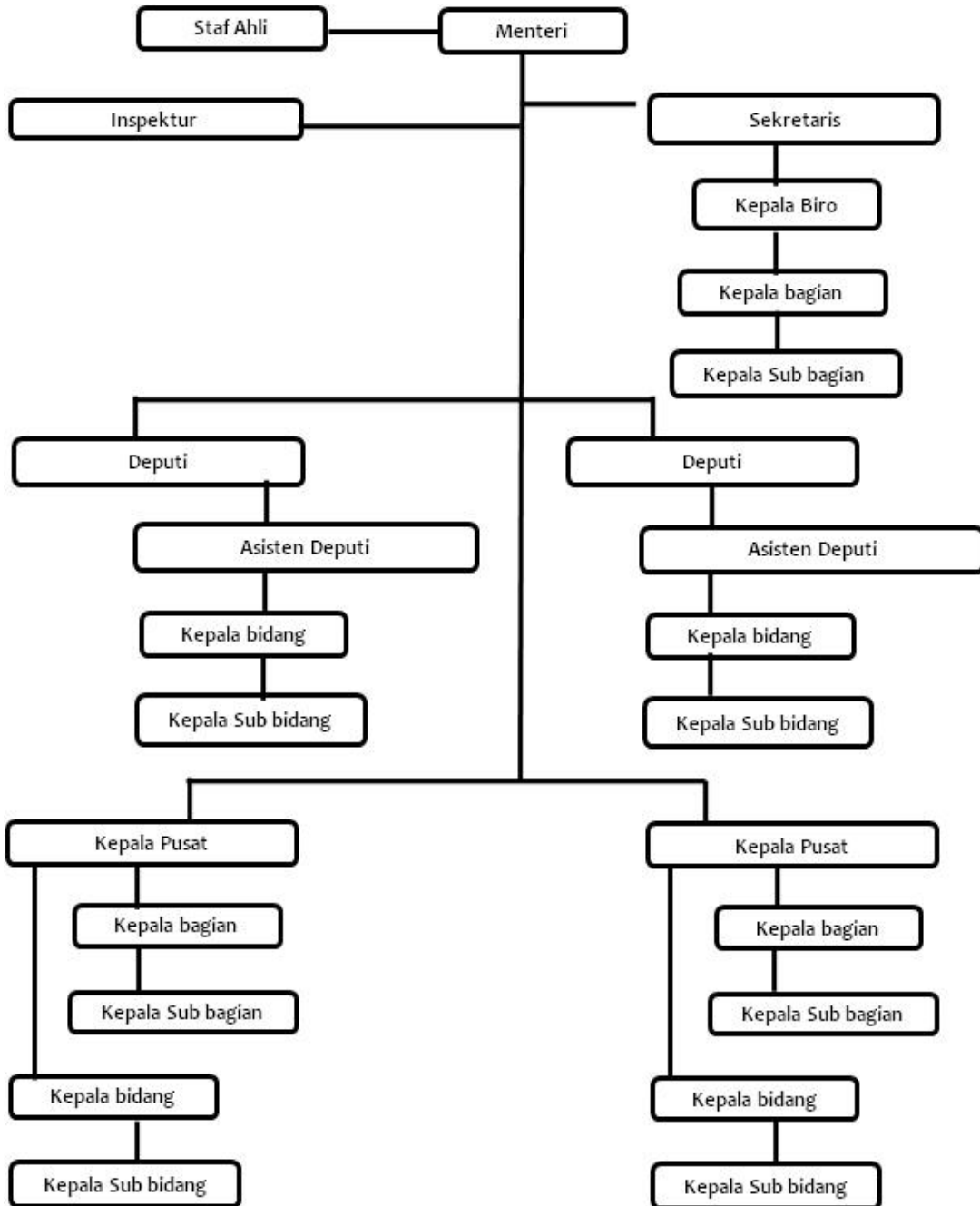
Tabel 1.17 Titelatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Kementerian b. Deputi c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Asisten deputi c. Kepala pusat c. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian e. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, , 2012



Gambar 1.5 Titeltatur dan Eselonering pada Kementerian yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Rangka Penajaman Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pemerintah



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

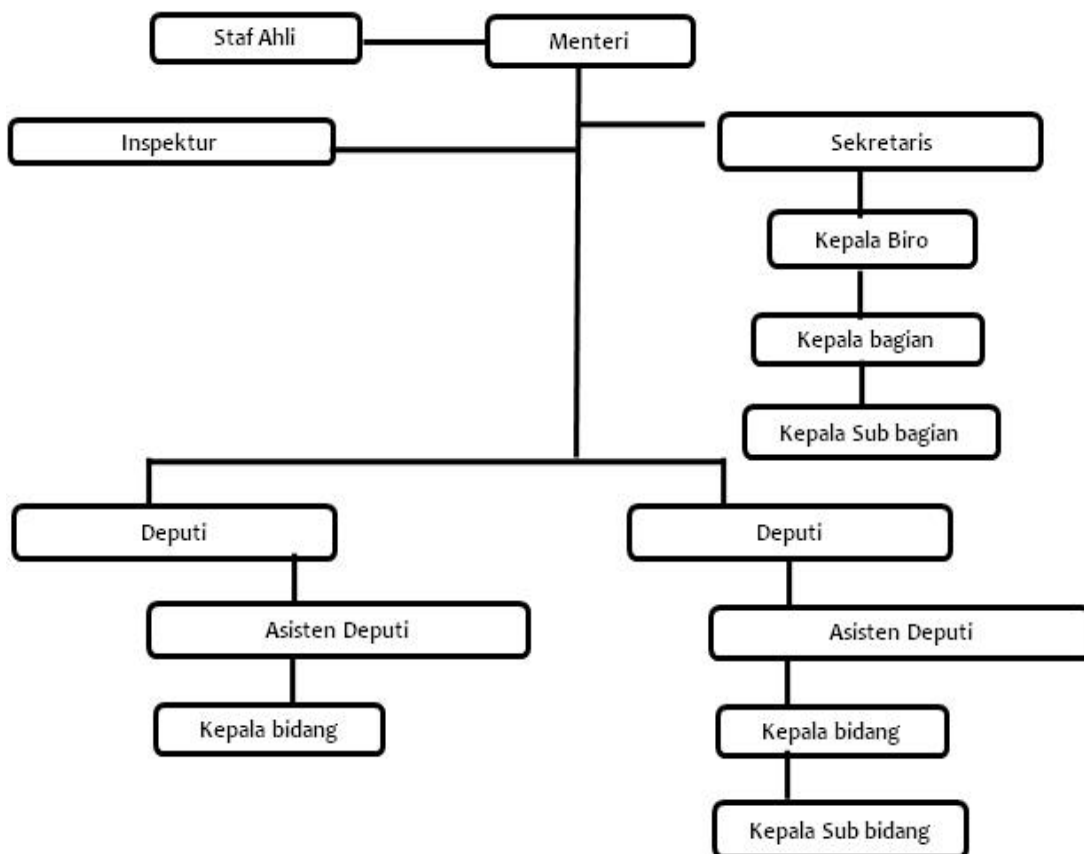


Tabel I.18 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Kementerian Koordinator b. Deputi c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Asisten deputi c. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.6 Titeltur dan Eselonering pada Kementerian yang Dibentuk untuk Keperluan Sinkronisasi dan Koordinasi Urusan Kementerian



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



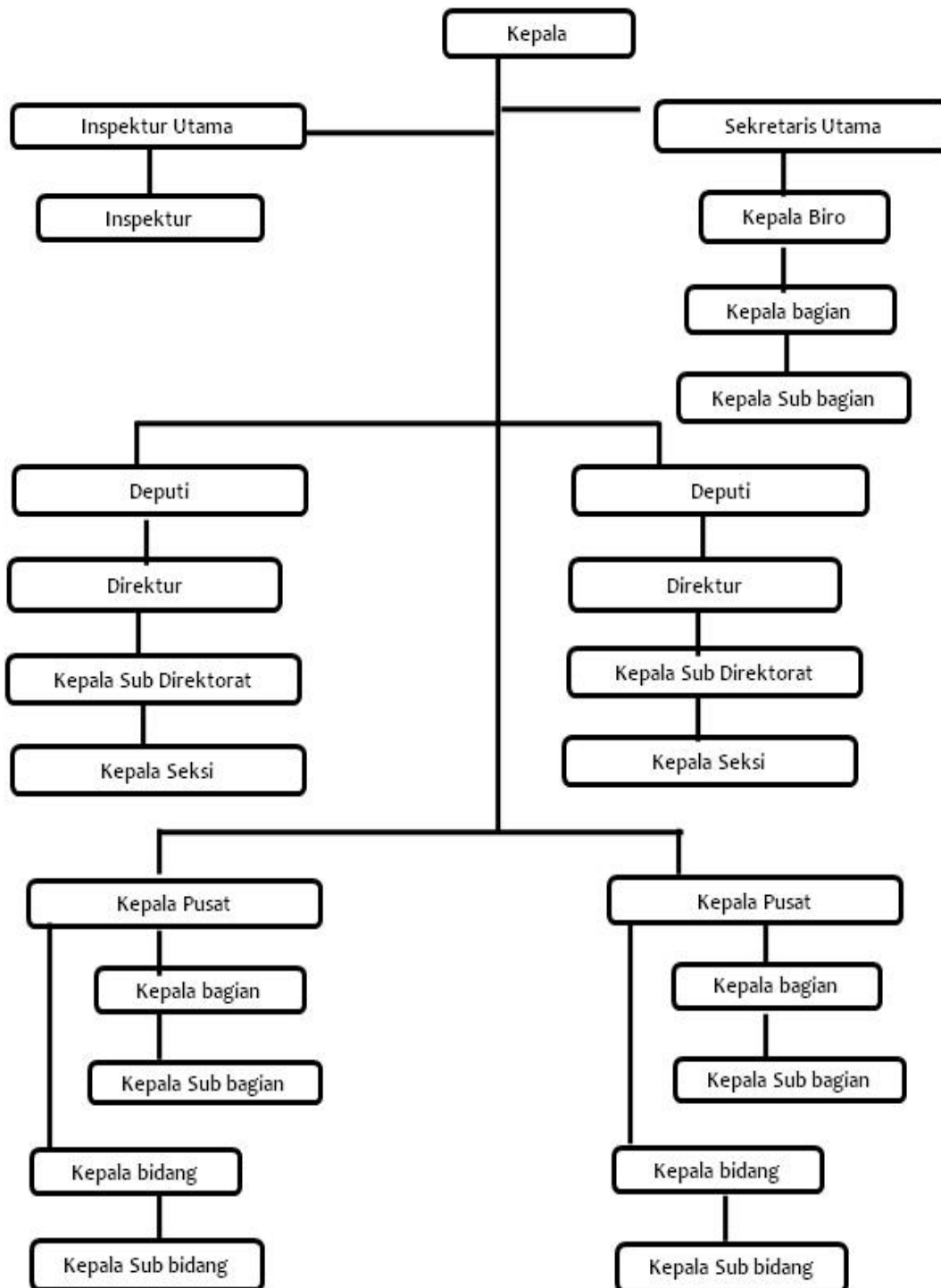
Tabel I.19 Titeltur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Kepala b. Gubernur (Lemhanas) c. Wakil gubernur (Lemhanas) d. Deputi e. Inspektur utama f. Sekretaris utama
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Direktur c. Kepala pusat d. Inspektur
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Gambar I.7 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



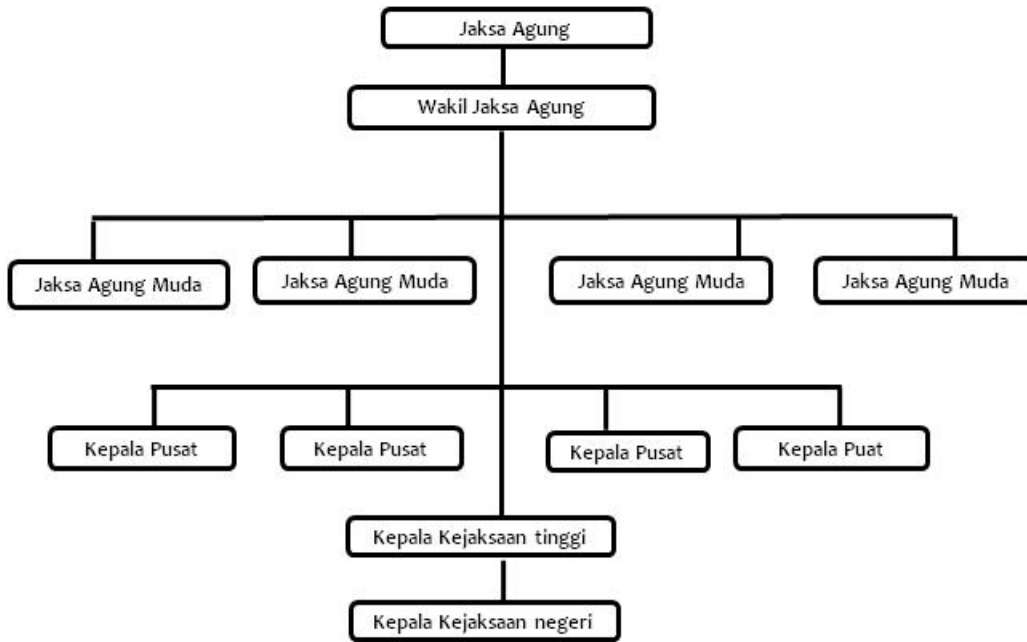
Tabel I.20 Titeltur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kejaksaan Agung)

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Wakil jaksa agung b. Jaksa agung muda c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Sekretaris jaksa agung muda b. Kepala biro c. Direktur d. Kepala Pusat e. Inspektur Instansi vertikal: a. Kepala kejaksaan tinggi b. Wakil kepala kejaksaan tinggi
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala subdirektorat d. Inspektur pembantu Instansi vertikal: a. Kepala kejaksaan negeri tipe a b. Kepala bagian pada kejaksaan tinggi c. Asisten pada kejaksaan tinggi d. Kepala kejaksaan negeri tipe b Di lingkungan kejaksaan tinggi, dibentuk juga jabatan tenaga pengkaji
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala seksi c. Kepala subbidang d. Pemeriksa Instansi vertikal: a. Kepala cabang kejaksaan negeri b. Kepala subbagian c. Kepala seksi
5.	Eselon V	Instansi vertikal: a. Kepala urusan b. Kepala subseksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

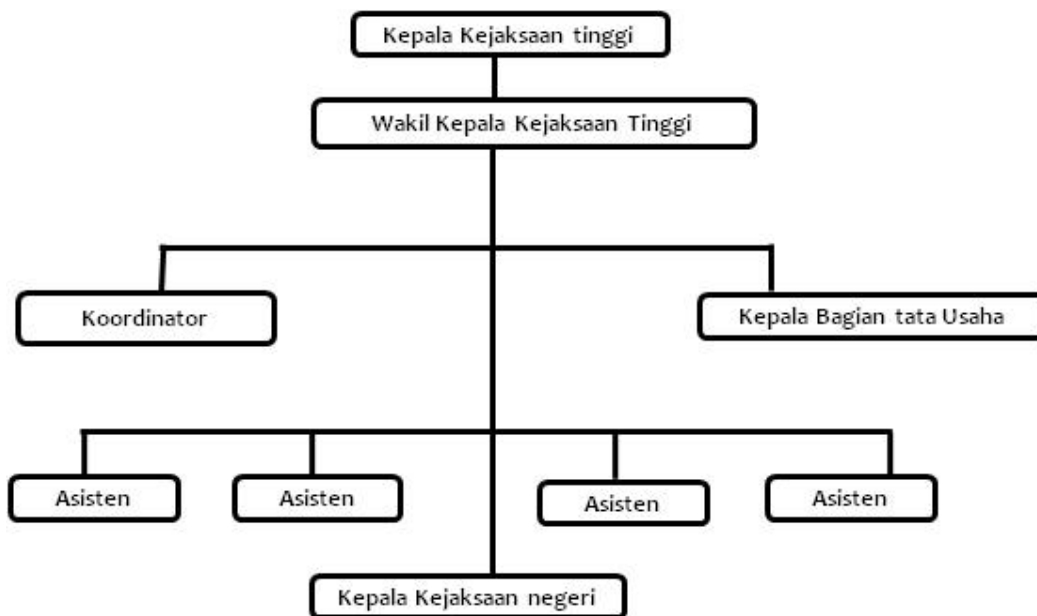


Gambar I.8 Titeltatur dan Eselonering pada Kejaksaan Agung



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.9 Titeltatur dan Eselonering pada Kejaksaan Tinggi



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel I.21 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Kepolisian RI)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (wakapolri); b. Inspektur (irwasum); c. Kepala badan; d. Deputi kapolri; e. Kepala badan; f. Wakil inspektur; g. Kepala sekolah staf dan pimpinan kepolisian; h. Gubernur (PTIK dan AKPOL); i. Kepala lembaga (Lemdiklat); j. Kepala divisi; k. Wakil kepala badan; l. Kepala korps (Korbrimob).
2.	Eselon II	a. Kapolda ; b. Wakil kepala divisi; c. Kepala biro; d. Kepala pusat ; e. Direktur; f. Insvektur wilayah; g. Kepala sekolah (Selapa dan secapa); h. Kepala rumah sakit polri; i. Kepala detasemen (Densus 88); j. Kepala bagian; k. Instruktur bidang.
3.	Eselon III	a. Kepala bagian; b. Kepala subdirektorat; c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian; b. Kepala seksi; c. Kepala subbidang
5.	Eselon V	a. Kepala urusan; b. Kepala Subseksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

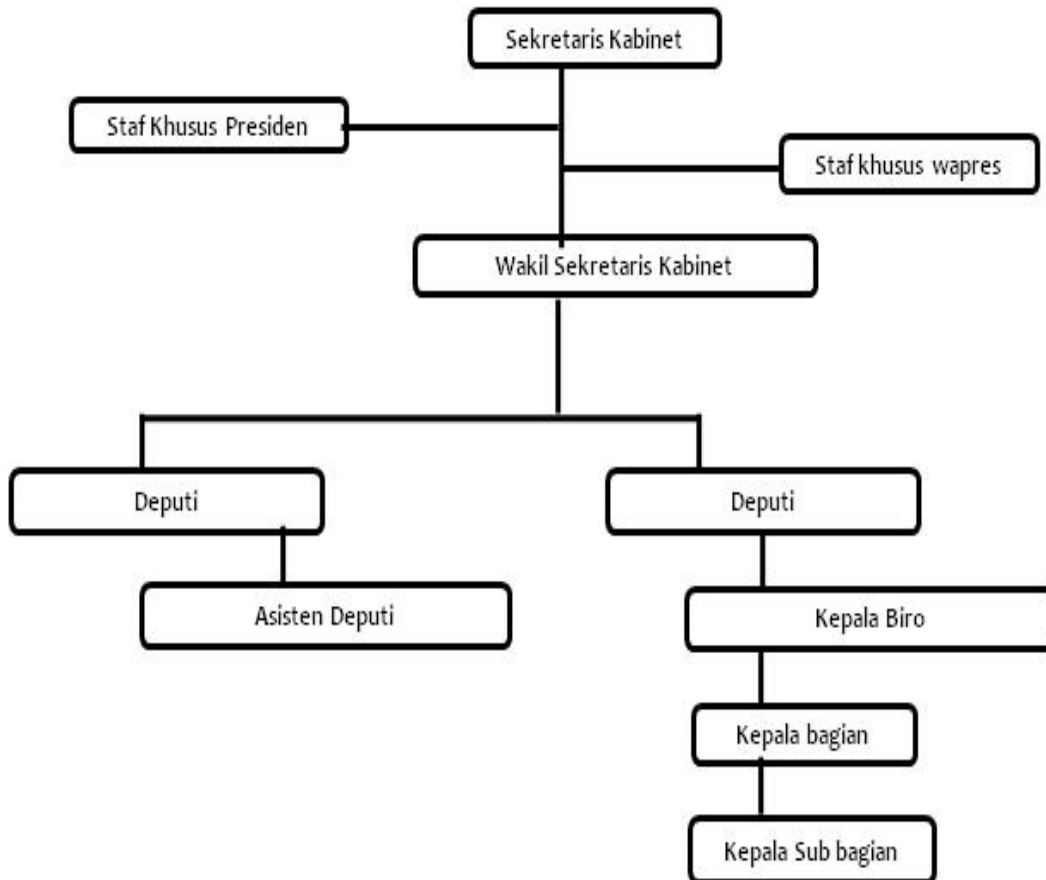


Tabel I.22 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Wakil Sekretaris Kabinet; b. Deputi ; c. Staf ahli
2.	Eselon II	a. Kepala biro
3.	Eselon III	a. Kepala bagian
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian.

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.10 Titeltatur dan Eselonering pada Lembaga yang Dipimpin Pejabat Setingkat Menteri (Sekretariat Kabinet)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

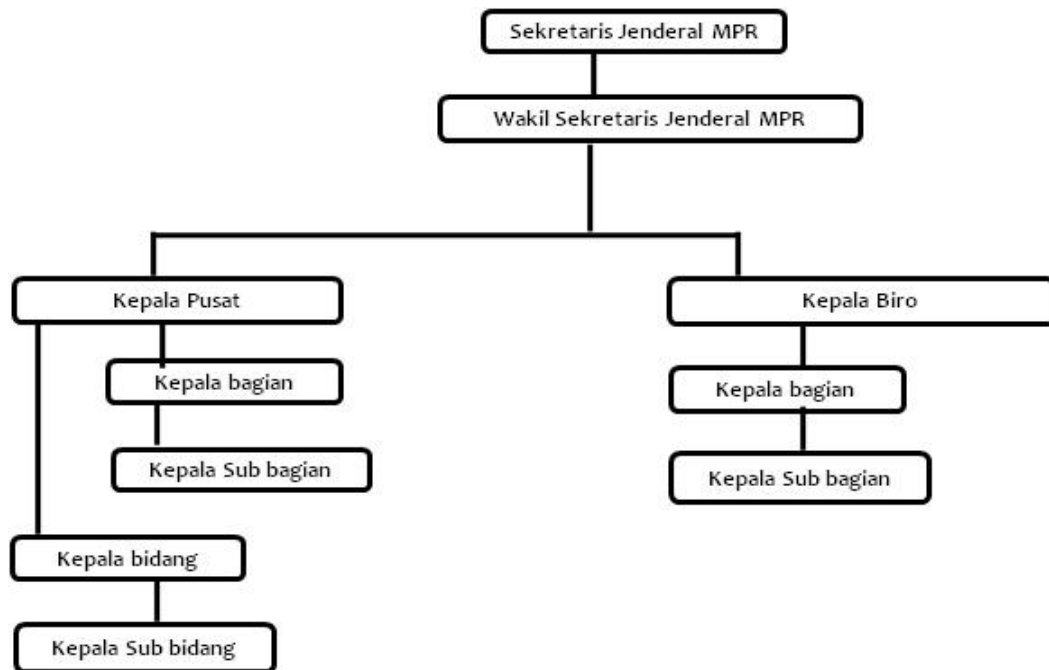


Tabel I.23 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris Jenderal MPR RI b. Wakil Sekretaris Jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.11 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

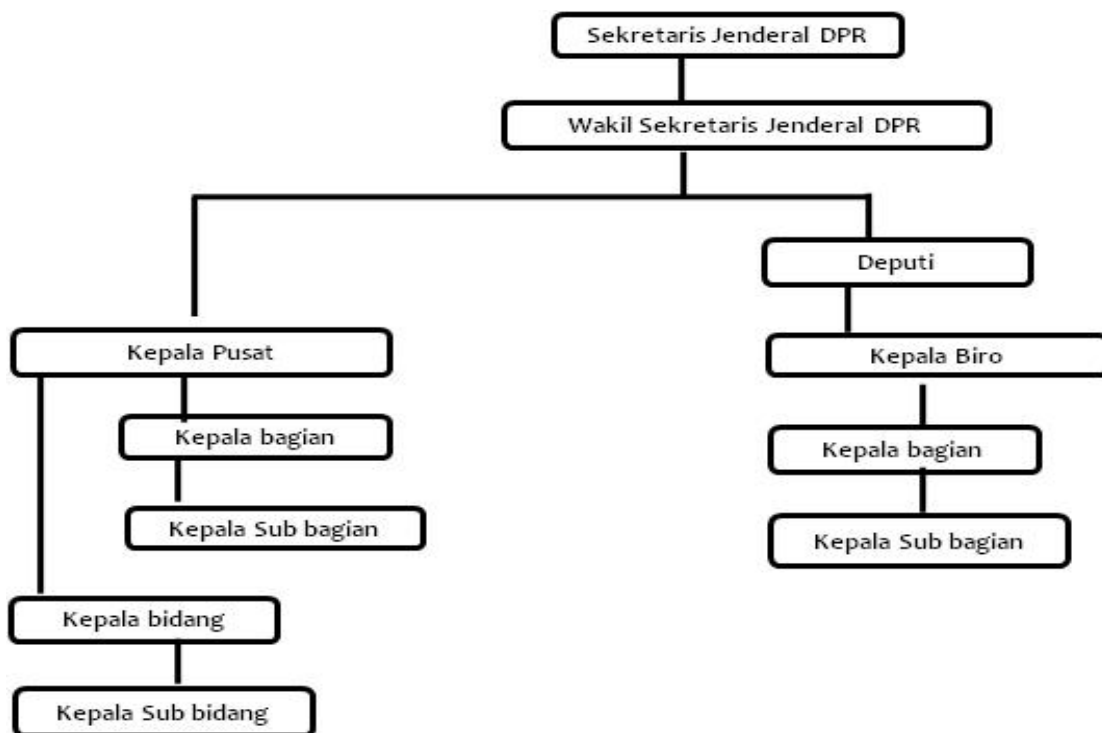


Tabel 1.24 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	a. Sekretariat Jenderal DPR RI b. Wakil sekretaris jenderal c. Deputi
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.12 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

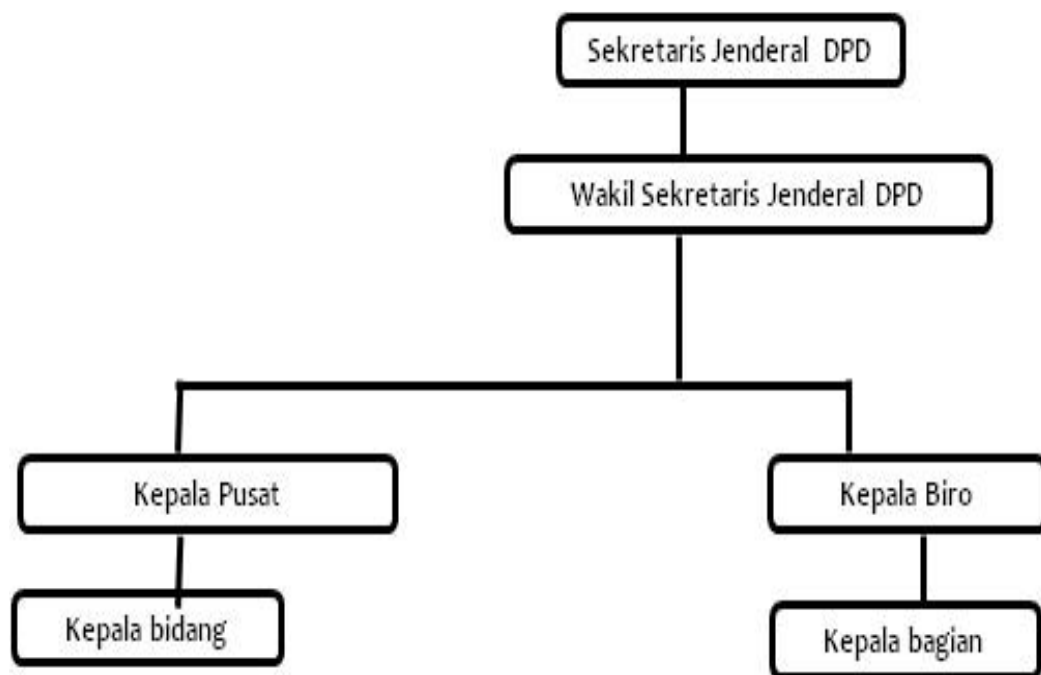


Tabel I.25 Titeltur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.13 Titeltur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



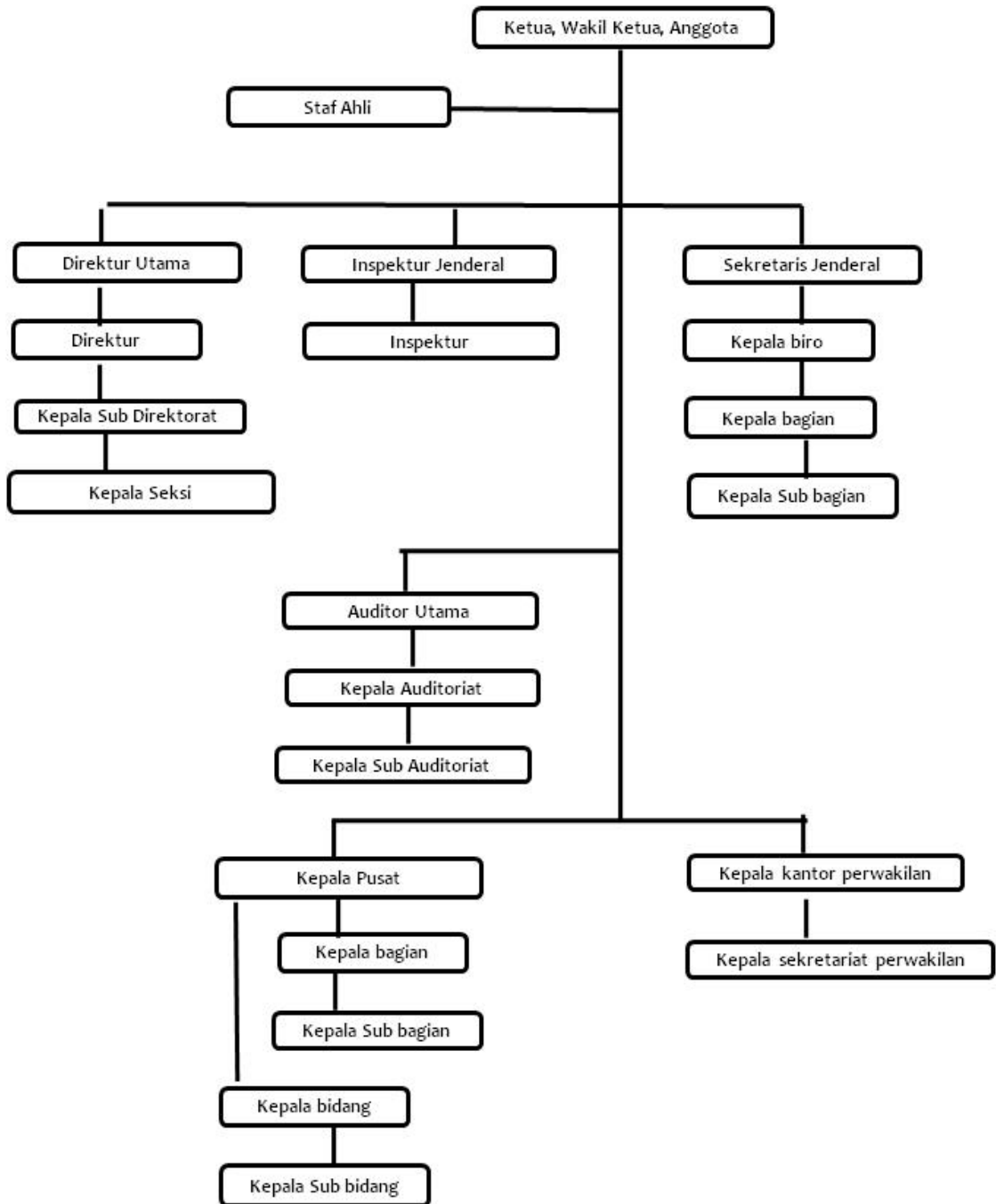
Tabel 1.26 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris jenderal b. Inspektur jenderal c. Direktur utama d. Auditor utama e. Staf ahli
2.	Eselon II	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala biro b. Inspektur c. Direktur d. Kepala pusat e. Kepala auditorat f. Kepala kantor perwakilan
3.	Eselon III	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala subdirektorat d. Kepala sekretariat perwakilan
4.	Eselon IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang c. Kepala seksi

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Gambar 1.14 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel 1.27 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Kesekretariatan Mahkamah Agung)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	<ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris b. Direktur jenderal c. Kepala badan
2.	Eselon II	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala biro b. Sekretaris direktorat jenderal c. Direktur d. Sekretaris badan e. Kepala pusat Inspektur <p>Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Tipe A, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Tinggi TUN b. Sekretaris pada Pengadilan Tinggi , Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan TUN Tipe A c. Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi TUN
3.	Eselon III	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala bagian b. Kepala bidang c. Kepala subdirektorat <p>Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Sekretaris Pada pengadilan Tinggi Tipe A, Pengadilan Tinggi b. Sekretaris Pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer Kelas A, Pengadilan TUN Tipe A c. Wakil Sekretaris Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus , Pengadilan Negeri Kelas IA, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan TUN Tipe A <p>Sekretaris pada Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Militer Kelas B, Pengadilan TUN tipe B</p>



Lanjutan Tabel I.27

No.	Eselonering	Titelatur
4.	Eselon IV	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang c. Kepala seksi Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala subbagian b. Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Agama Kelas IB c. Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri Kelas IB, Pengadilan Agama Kelas IA d. Kepala subbagian pada Pengadilan Agama Kelas IA, Pengadilan Militer Kelas B e. Sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas II f. Wakil sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas IB
5.	Eselon V	Instansi vertikal (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) : <ul style="list-style-type: none"> a. Wakil sekretaris pada Pengadilan Agama Kelas II b. Kepala subbagian pada Pengadilan Agama Kelas IB c. Kepala urusan pada Pengadilan Negeri Kelas II, Pengadilan Agama Kelas II

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel I.28 Titelatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Panitera Mahkamah Agung)

No.	Eselonering	Titelatur
1.	Eselon I	
2.	Eselon II	Sekretaris panitera
3.	Eselon III	Kepala bagian
4.	Eselon IV	Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

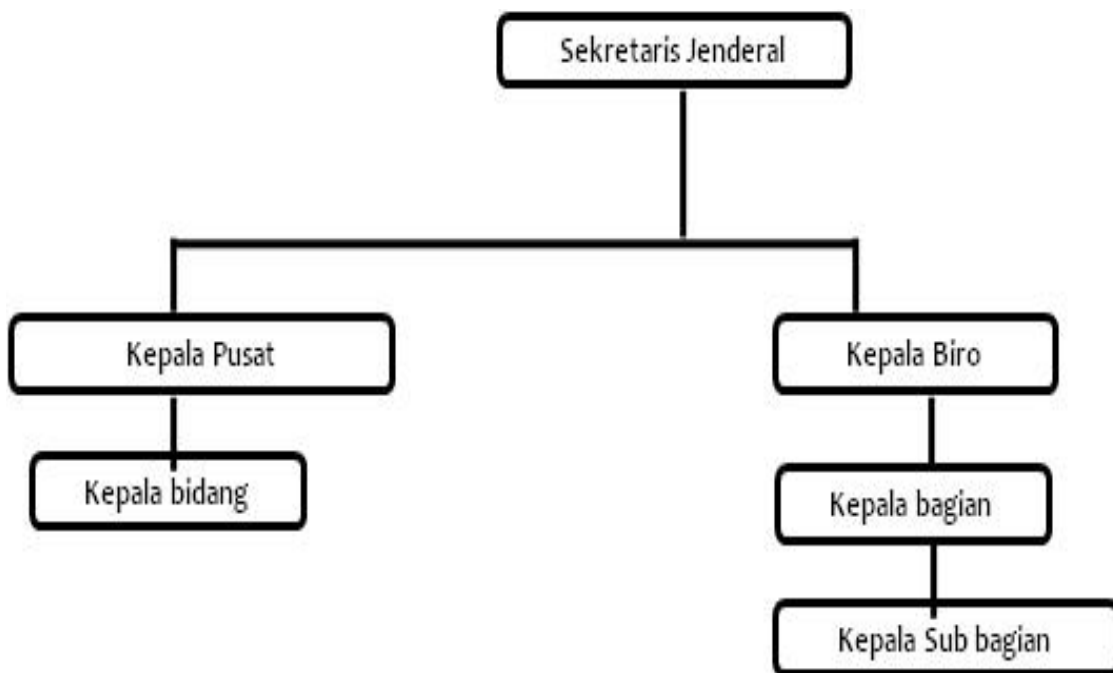


Tabel 1.29 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar 1.15 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

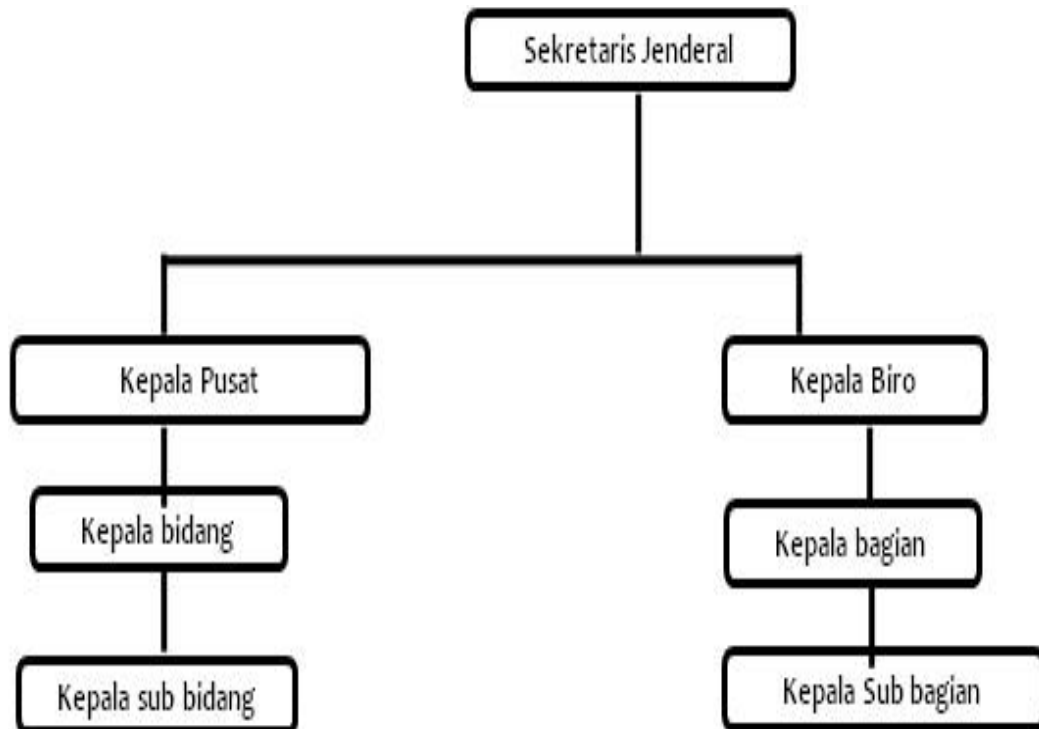


Tabel I.30 Titeltur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)

No.	Eselonering	Titeltur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal
2.	Eselon II	a. Kepala biro b. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Kepala bagian b. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Gambar I.16 Titeltur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial)



Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel I.31 Titeltatur dan Eselonering pada Kesekretariatan Lembaga Non Struktural

No.	Eselonering	Titeltatur
1.	Eselon I	a. Sekretaris jenderal b. Kepala pelaksana harian c. Deputi (khusus wantanas) d. Pembantu deputi (setinggi-tingginya Eselon I.b dan serendah-rendahnya eselon II.a) (khusus wantanas)
2.	Eselon II	a. Sekretaris , untuk sekretaris LNS eselon II; b. Kepala biro c. Inspektur d. Kepala pusat
3.	Eselon III	a. Sekretaris, untuk sekretariat LNS eselon III; b. Kepala bagian c. Kepala bidang
4.	Eselon IV	a. Kepala subbagian b. Kepala subbidang

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012

Tabel I.32 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Kementerian Negara Tahun 2013

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	8	7	39	-	85	-	56	-	
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	8	7	39	-	74	-	171	-	
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	8	7	31	-	68	-	152	-	
4.	Kementerian Sekretariat Negara	15	5	49	2	170	-	425	-	
5.	Kementerian Dalam Negeri	11	5	67	-	273	-	654	-	
6.	Kementerian Luar Negeri	10	4	54	-	208	-	688	-	
7.	Kementerian Pertahanan	9	5	52	-	174	-	492	-	
8.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	11	5	67	-	245	-	671	-	



Lanjutan Tabel I.32

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
9.	Kementerian Keuangan	11	5	93	-	383	-	1384	-	
10.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	9	5	46	-	181	-	417	-	
11.	Kementerian Perindustrian	9	3	44	-	149	-	372	-	
12.	Kementerian Perdagangan	9	4	53	-	187	-	407	-	
13.	Kementerian Pertanian	12	5	69	-	244	-	592	-	
14.	Kementerian Kehutanan	8	5	48	-	164	-	400	-	
15.	Kementerian Perhubungan	8	5	46	-	166	-	408	-	
16.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	10	4	56	-	211	-	517	-	
17.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9	5	54	-	182	-	439	-	
18.	Kementerian Pekerjaan Umum	8	5	50	-	212	-	515	-	
19.	Kementerian Kesehatan	8	5	52	-	189	-	457	-	
20.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	10	5	54	-	192	-	452	-	
21.	Kementerian Sosial	6	5	35	-	122	-	297	-	
22.	Kementerian Agama	10	5	45	-	152	-	440	-	
23.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7	4	37	-	126	-	312	-	
24.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	7	5	42	-	142	-	350	-	
25.	Kementerian Riset dan Teknologi	6	5	29	-	100	-	216	-	
26.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	8	5	38	-	112	-	245	-	



Lanjutan Tabel I.32

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
27.	Kementerian Lingkungan Hidup	8	5	39	-	117	-	256	-	
28.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	5	29	-	66	-	145	-	
29.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	7	5	34	-	77	-	93	-	
30.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	6	5	29	-	64	-	147	-	
31.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	2	5	-	-	-	-	-	-	
32.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	6	5	20	-	46	-	106	-	
33.	Kementerian Perumahan Rakyat	5	5	26	-	79	-	176	-	
34.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	6	4	29	-	87	-	194	-	
JUMLAH		281	169	1495	2	5047	-	12646	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Catatan : Belum termasuk jumlah eselon pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis (UPT).



Tabel I.33 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Tahun 2013

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Lembaga Administrasi Negara	7	-	15	-	31	-	35	-	
2.	Arsip Nasional Republik Indonesia	5	-	10	-	36	-	37	-	
3.	Badan Kepegawaian Negara	8	-	30	-	86	-	219	-	
4.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	4	-	9	-	22	-	25	-	
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	8	-	46	-	149	-	24	-	
6.	Badan Pusat Statistik	8	-	24	-	78	-	216	-	
7.	Badan Standardisasi Nasional	5	-	11	-	27	-	53	-	
8.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	4	-	13	-	29	-	23	-	
9.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	6	-	23	-	108	-	216	-	
10.	Lembaga Sandi Negara	5	-	13	-	30	-	42	-	
11.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8	-	29	-	77	-	181	-	
12.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	5	-	13	-	41	-	41	-	
13.	Badan Informasi Geospasial	5	-	12	-	29	-	18	-	
14.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	6	-	55	-	196	-	170	-	
15.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	8	-	28	-	116	-	193	-	
16.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	7	-	28	-	85	-	72	-	



Lanjutan Tabel I.33

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
17.	Badan Koordinasi Pananaman Modal	9	-	28	-	70	-	158	-	
18.	Badan Pertanahan Nasional	8	-	32	-	83	-	189	-	
19.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	1	-	5	-	16	-	39	-	
20.	Lembaga Ketahanan Nasional	5	-	20	-	59	-	110	-	
21.	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	5	-	15	-	43	-	92	-	
22.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	4	-	18	-	52	-	120	-	
23.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	6	-	20	-	49	-	101	-	
24.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6	-	15	-	33	-	66	-	
25.	Badan SAR Nasional	3	-	9	-	22	-	55	-	
26.	Badan Narkotika Nasional	8	-	24	-	49	-	87	-	
27.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5	-	12	-	23	-	16	-	
Jumlah		159	-	557	-	1639	-	2598	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Catatan : Belum termasuk jumlah eselon pada instansi vertikal dan unit pelaksana teknis (UPT).



Tabel I.34 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Sekretariat Lembaga Negara Tahun 2013

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Sekretariat Mahkamah Agung	7	-	30	-	97	-	278	-	
2.	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	1	7	-	26	-	48	-	
3.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	6	-	15	-	61	-	128	-	
4.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	1	1	9	-	35	-	79	-	
5.	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	12	5	34	-	76	-	227	-	
6.	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	1	-	5	-	10	-	21	-	
7.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	1	-	5	-	12	-	20	-	
JUMLAH		29	7	105	-	317	-	801	-	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.35 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri Tahun 2013

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Kejaksaan Agung	8	6	35	16	101		178	-	
2.	Kepolisian Negara RI	10	19	81	497	1119	1302	1445	763	
3.	Tentara Nasional Indonesia*	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Badan Intelijen Negara	10	5	80	-	166	-	67	-	
5.	Sekretariat Kabinet	5	5	15	-	55	-	151	-	
JUMLAH		33	35	211	513	1441	1302	1841	763	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Catatan : Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan Pasal 177 Perpres 10/2010 tentang Susunan Organisasi TNI, pelaksanaan ditetapkan oleh Panglima TNI tanpa melalui persetujuan Menneg PAN-RB.



Tabel I.36 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Pemerintah Lainnya Tahun 2013

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia*	-	1	4	3	15	11	54	-	
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia*	-	1	4	3	22	3	56	-	
JUMLAH			2	8	6	37	14	110		

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Catatan : Kesetaraan Eselon.

Tabel I.37 Rekapitulasi Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) di Lingkungan Lembaga Nonstruktural Tahun 2013

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
1.	Ombudsman Republik Indonesia	1	-	3	-	9	-	19	-	
2.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	-	4	-	10	-	26	-	
3.	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	1	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Komisi Pemilihan Umum	1	1	41	-	592	-	2143	-	
5.	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	-	-	1	-	4	-	10	-	
6.	Komisi Kejaksaan	-	-	1	-	3	-	6	-	
7.	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	-	-	1	-	3	-	6	-	
8.	Komisi Informasi Pusat	-	-	1	-	3	-	6	-	
9.	Dewan Gula Indonesia	-	-	-	-	1	-	3	-	
10.	Dewan Ketahanan Nasional	5	5	17	-	48	-	22	-	
11.	Dewan Kelautan Indonesia	-	-	-	1	-	3	-	8	
12.	Dewan Pers	-	-	1	-	3	-	6	-	
13.	Dewan Energi Nasional	1	-	3	-	8	-	18	-	



Lanjutan Tabel I.37

No.	Lembaga	Jumlah Jabatan Struktural (Eselon) Tahun 2013								
		I.a	I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Ket
14.	Dewan Pertimbangan Presiden	1	-	2	-	6	-	18	-	
15.	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	1	-	3	-	7	-	
16.	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	-	-	1	-	3	-	6	-	
17.	Badan Pengawas Pemilihan Umum	-	-	1	-	4	-	12	-	
18.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	1	-	4	-	11	-	28	-	
19.	Badan Pengatur Jalan Tol	-	-	1	-	5	-	11	-	
20.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	4	-	11	-	24	-	48	-	
21.	Lembaga Sensor Film	-	-	-	-	1		5	-	
22.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	-	-	1		4		9	-	
23.	Konsil Kedokteran Indonesia	-	-	1	-	4	-	12	-	
24.	Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan	-	-	1		2		6	-	
Jumlah		16	6	97	1	751	3	2427	8	

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.38 Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu 2012 - 2013

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2013
1.	Kementerian Dalam Negeri	1. Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah
2.	Kementerian Luar Negeri	2. Diplomat
3.	Kementerian Pertahanan	3. Kataloger
4.	Kementerian Hukum dan HAM	4. Pemeriksa merek 5. Pemeriksa paten 6. Perancang peraturan Perundang-undangan



Lanjutan Tabel I.38

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2013
5.	Kementerian Keuangan	7. Penilai pajak bumi dan bangunan 8. Pemeriksa bea dan cukai 9. Pemeriksa pajak 10. Penyuluh pajak
6.	Kementerian ESDM	11. Pengamat gunung api 12. Penyelidik bumi 13. Inspektur ketenagalistrikan 14. Inspektur tambang 15. Inspektur gas dan minyak bumi
7.	Kementerian Perindustrian	16. Penyuluh perindustrian dan perdagangan
8.	Kementerian Perdagangan	17. Penguji mutu barang 18. Penera
9.	Kementerian Pertanian	19. Medik veteriner 20. Paramedik veteriner 21. Pengawas benih tanaman 22. Pengawas bibit ternak 23. Pengawas mutu hasil pertanian 24. Pengawas mutu pakan 25. Pengendali organisme pengganggu tumbuhan 26. Penyuluh pertanian 27. Analisis pasar hasil pertanian
10.	Kementerian Kehutanan	28. Penyuluh kehutanan 29. Polisi kehutanan 30. Pengendali ekosistem hutan
11.	Kementerian Perhubungan	31. Pengendali frekuensi radio 32. Teknisi penerbangan 33. Pengawas keselamatan pelayaran 34. Penguji kendaraan bermotor
12.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	35. Pengendali hama dan penyakit ikan 36. Pengawas perikanan (penggabungan dengan pengawas benih ikan) 37. Penyuluh perikanan
13.	Kementerian Tenaga Kerja	38. Pengawas ketenagakerjaan 39. Instruktur 40. Mediator hubungan industrial pengantar kerja 41. Penggerak swadaya masyarakat
14.	Kementerian Pekerjaan umum	42. Teknik pengairan 43. Teknik penyehatan lingkungan 44. Teknik jalan dan jembatan 45. Teknik tata bangunan dan perumahan 46. Penata ruang



Lanjutan Tabel I.38

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2013
15.	Kementerian Kesehatan	47. Administrator kesehatan 48. Apoteker 49. Asisten apoteker 50. Bidan 51. Dokter 52. Dokter gigi 53. Epidemiolog kesehatan 54. Entomolog kesehatan 55. Fisioterapis 56. Fisikawan medis 57. Nutrisionis 58. Okupasi terapis 59. Ortosis prostetis 60. Penyuluh kesehatan masyarakat 61. Perawat 62. Perawat gigi 63. Perekam medis 64. Pranata laboratorium kesehatan 65. Psikolog klinis 66. Radiografer 67. Refraksionis optisen 68. Sanitarian 69. Teknisi elektromedis 70. Teknisi gigi 71. Terapis tranfusi darah 72. Terapis wicara 73. Dokter pendidik klinis 74. Pembimbing kesehatan kerja
16.	Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	75. Dosen 76. Guru 77. Penilik 78. Pamong belajar 79. Pengawas sekolah 80. Pengembangan teknologi pembelajaran 81. Pranata laboratorium pendidikan
17.	Kementerian Sosial	82. Pekerja sosial 83. Penyuluh sosial
18.	Kementerian Agama	84. Penghulu 85. Penyuluh agama
19.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	86. Pamong budaya
20.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	87. Adikara siaran 88. Teknisi siaran 89. Andalan siaran 90. Pranata hubungan masyarakat
21.	Kementerian Lingkungan Hidup	91. Pengendali dampak lingkungan 92. Pengawas lingkungan hidup
22.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	93. Perencana



Lanjutan Tabel I.38

No.	Instansi Pembina	Nama Jabatan Fungsional Tertentu 2013
23.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	94. Widyaiswara 95. Analis kebijakan
24.	Arsip Nasional (ANRI)	96. Arsiparis
25.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	97. Analis kepegawaian 98. Auditor kepegawaian 99. Asesor SDM aparatur
26.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	100. Pustakawan
27.	Badan Pusat Statistik (BPS)	101. Statistisi 102. Pranata komputer
28.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	103. Pengawas radiasi
29.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	104. Pranata nuklir
30.	Badan Intelijen Negara (BIN)	105. Agen
31.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	106. Sandiman 107. Operator transmisi sandi
32.	Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	108. Penyuluh keluarga berencana
33.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	109. Surveyor pemetaan
34.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	110. Auditor
35.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	111. Peneliti
36.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	112. Teknisi penelitian dan perekayasaanperekayasa
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	113. Pengawas farmasi dan makanan
38.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Giofisika (BMKG)	114. Pengamat meteorologi dan geofisika
39.	Kejaksaan Agung	115. Jaksa
40.	Sekneg	116. Penerjemah
41.	BPK	117. Pemeriksa
42.	LKPP	118. Pengelola pengadaan barang/jasa

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



Tabel I.39 Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2012-2013

No.	Instansi Pembina	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 2012	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 2013
1.	Kementerian Dalam Negeri	1	1
2.	Kementerian Luar Negeri	1	1
3.	Kementerian Pertahanan	1	1
4.	Kementerian Hukum dan Ham	3	3
5.	Kementerian Keuangan	4	4
6.	Kementerian ESDM	5	5
7.	Kementerian Perindustrian	1	1
8.	Kementerian Perdagangan	2	2
9.	Kementerian Pertanian	9	9
10.	Kementerian Kehutanan	3	3
11.	Kementerian Perhubungan	4	4
12.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	3	3
13.	Kementerian Tenaga Kerja	4	4
14.	Kementerian Pekerjaan umum	5	5
15.	Kementerian Kesehatan	27	28
16.	Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan	7	7
17.	Kementerian Sosial	2	2
18.	Kementerian Agama	2	2
19.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	1
20.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4	4
21.	Kementerian Lingkungan Hidup	2	2
22.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	1	1
23.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	2	2
24.	Arsip Nasional (ANRI)	1	1
25.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	1	3
26.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	1	1
27.	Badan Pusat Statistik (BPS)	2	2
28.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)	1	1
29.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	1
30.	Badan Intelijen Negara (BIN)	1	1
31.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)	2	2
32.	Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	1	1
33.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL)	1	1



Lanjutan Tabel I.39

No.	Instansi Pembina	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 2012	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu 2013
34.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	1	1
35.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)	1	1
36.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	2	2
37.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	1	1
38.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan GEOFISIKA (BMKG)	1	1
39.	Kejaksaan Agung	1	1
40.	Sekneg	1	1
41.	BPK	1	1
42.	LKPP		1
JUMLAH		115	118

Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2013

Tabel I.40 Jenis dan Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun 2012 - 2013

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
Kementerian Koordinator			
1.	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	1. Analis polhukam	1. Analis politik 2. Analis hukum 3. Analis keamanan 4. Analis hubungan kelembagaan ormas 5. Analis hubungan kelembagaan lembaga negara 6. Analis produk hukum
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2. Analis dampak ekonomi	7. Analis ekonomi 8. Penyuluh perekonomian 9. Analis kerjasama dan permodalan
3.	Kementerian Koordinator Bidang Kesra	3. Analis kesejahteraan rakyat	10. Analis kesejahteraan rakyat 11. Penyuluh kemasyarakatan



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
Kementerian Negara			
4.	Kementerian Dalam Negeri	4. Satpol PP (nama jabatan sedang di evaluasi) 5. Petugas pemadam kebakaran 6. Analis tatapraja 7. Analis kesbang linmas 8. Analis pendapatan daerah 9. Analis dampak politik, pertahanan dan keamanan	12. Pranata linmas 13. Pranata tatapraja 14. Analis pendapatan daerah 15. Pranata pemadam kebakaran 16. Analis sosial budaya masyarakat 17. Analis kelembagaan masyarakat 18. Analis bidang badan layanan umum 19. Analis kerjasama lintas sektor 20. Analis kerjasama pusat dan daerah 21. Analis penanganan masalah sosial 22. Analis pengaduan pemerintahan 23. Analis pengelolaan dana alokasi khusus 24. Analis pengelolaan dana alokasi umum 25. Analis pengelolaan dana bagi hasil pajak & SDA 26. Analis pengelolaan dana otsus dan dana transfer lainnya 27. Analis pengelolaan kekayaan daerah 28. Analis pengembangan pasar 29. Analis pengembangan perdesaan 30. Analis pengembangan wilayah 31. Analis pengembangan dan penataan batas antar negara 32. Analis organisasi 33. Evaluator 34. Konselor 35. Analis perlindungan hak-hak sipil dan HAM 36. Satpol PP 37. Pranata pembinaan P2UP



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
5.	Kementerian Luar Negeri	10. <i>Legal advisor</i> perlindungan WNI 11. Pengamat politik luar negeri 12. Atase perdagangan 13. Petugas komunikasi diplomatik	38. Atase 39. <i>Legal advisor</i> perlindungan WNI 40. Analisis politik luar negeri 41. Pranata komunikasi diplomatik 42. Pranata pembinaan diplomat
6.	Kementerian Pertahanan	14. Analisis Pertahanan Negara	43. Analisis pertahanan negara 44. Penyuluh pertahanan negara 45. Pranata pembinaan kataloger
7.	Kementerian Hukum dan HAM	15. Pemeriksa dokumen imigrasi 16. Petugas imigrasi 17. Komandan/petugas lapas 18. <i>Legal drafter</i>	46. Pranata lapas 47. Pranata imigrasi 48. PPNS 49. Konsultan hukum 50. Penyuluh hukum 51. Penyuluh narapidana 52. Pranata izin tinggal 53. Analisis operasi intelijen keimigrasian 54. Penyuluh HAM 55. Pranata sidik jari 56. Pemeriksa desain industri 57. Pranata pembinaan perancang peraturan Perundang-undangan 58. Pranata pembinaan pemeriksa merek dan paten
8.	Kementerian Keuangan	19. Bendaharawan 20. Penata laporan keuangan 21. Verifikator keuangan 22. Analisis pendapatan negara 23. Analisis belanja negara 24. Analisis kekayaan negara 25. Asisten akuntan 26. Penyusun anggaran / analisis anggaran 27. Bendahara (gaji, penerimaan, pengeluaran) 28. Bendahara rutin 29. Pengadministrasi barang milik negara (BMN) (Kemenkeu)	59. Analisis anggaran 60. Akuntan 61. Bendahara 62. Analisis pengelola barang milik negara (BMN) 63. Verifikator keuangan 64. Analisis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 65. Analisis penyelesaian LHP/TP/TGR 66. Analisis rencana program dan kegiatan 67. Bendahara penerima 68. Bendahara pengeluaran 69. Pembuat daftar gaji 70. Pemegang buku kas 71. Pemegang buku pajak 72. Penata laporan keuangan (Petugas SAI) 73. Perencana anggaran



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			74. Analis pinjaman dan obligasi 75. Pranata pembinaan pemeriksa bea dan cukai 76. Pranata pembinaan penilai pajak bumi dan bangunan, pemeriksa pajak, penyuluh pajak
9.	Kementerian ESDM	30. Analis sumber daya terbarukan 31. Analis potensi tambang	77. Analis pertambangan 78. Analis usaha energi 79. Analis keselamatan pertambangan dan energi 80. Pranata laboratorium sumber energi 81. Pengawas bengkel 82. Penyelidik sumber daya alam 83. Pranata pembinaan pengamat gunung api, penyelidik bumi, inspektur kelistrikan, inspektur tambang, inspektur minyak dan gas bumi
10.	Kementerian Perindustrian	32. Asesor industri 33. Analis industri	84. Asesor industri 85. Analis industri 86. Pengawas industri 87. Penilai mutu produk 88. Pranata pembinaan penyuluh perindustrian dan perdagangan
11.	Kementerian Perdagangan	34. Analis perdagangan dalam negeri 35. Analis perdagangan luar negeri 36. Atase perdagangan	89. Analis perdagangan 90. Atase perdagangan 91. Pengamat tera 92. Pranata laboratorium kemetrollogian 93. Pranata pembinaan penguji mutu barang, penera
12.	Kementerian Pertanian	37. Analis potensi pangan 38. Analis tanah 39. Pengembangan bibit pertanian	94. Pemeriksa perlindungan varietas tanaman 95. Pengawas pengelolaan lahan pertanian dan air irigasi 96. Pengawas pupuk dan pestisida 97. Analis ketahanan pangan 98. Karantinawan 99. Pengawas alat mesin pertanian 100. Analis peningkatan usaha pertanian dan agrobisnis



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			101. Analis pakan ternak 102. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Pertanian)
13.	Kementerian Kehutanan	40. Analis potensi hutan 41. Pengembangan bibit tanaman hutan/perkebunan	103. Analis potensi hutan 104. Pranata pengembangan bibit tanaman hutan/perkebunan 105. Pranata DAS 106. Analis biofisik 107. Analis hutan dan lahan (RHL) 108. Analis genetik 109. Analis pengembangan hutan 110. Analis perkebunrayaan 111. Pranata taman 112. Analis tanaman hias/tanaman koleksi 113. Pemelihara bibit tumbuhan 114. Pemelihara sarana kebun 115. Pengadministrasi karcis 116. Pengawas perkebunrayaan 117. Pengolah kompos 118. Perawat koleksi tumbuhan 119. Peregistrasi data koleksi tumbuhan 120. Teknisi bank biji 121. Teknisi herbarium 122. Teknisi pembibitan 123. Pawang gajah 124. Pemelihara kebun wanariset (1) 125. Pemelihara, perawat satwa/ tumbuhan 126. Penelaah data pengendalian bahan baku 127. Penelaah data pengolahan industri primer 128. Penelaah data pengujian mutu persuteraan alam 129. Penelaah data pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			130. Penelaah data pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu 131. Penelaah data sertifikasi dan akreditasi telur ulat sutera 132. Penelaah data sertifikasi mutu benih/bibit 133. Penelaah data sistem informasi perbenihan dan pembibitan tanaman hutan 134. Penelaah data statistik pengelolaan DAS 135. Penelaah data sumber benih 136. Penelaah data sumberdaya genetik 137. Penelaah data tanda legalitas hasil hutan 138. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Kehutanan)
14.	Kementerian Perhubungan	42. Pemandu lalu lintas udara 43. Mualim 44. Juru mesin 45. Pilot 46. Juru mudi 47. Pengawas lalu lintas angkutan darat 48. Pengawas lalu lintas perkereta apian 49. Pengawas lalu lintas laut	139. Pengawas lalu lintas udara 140. Pengawas lalu lintas darat 141. Pengawas lalu lintas laut 142. Pengawas perkeretaapian 143. Pilot 144. co pilot 145. Supir 146. Asisten Supir 147. Nakhoda 148. Masinis 149. Juru mesin 150. Auditor keselamatan 151. Anak buah kapal 152. Juru masak kapal 153. Juru minyak kapal 154. Kepala kamar mesin 155. Kerani kapal 156. Masinis kapal 157. Mualim kapal 158. Pembantu kamar mesin kapal



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			159. Analis HSE (kesehatan, keselamatan dan lingkungan) serta security kapal 160. Perwira instrumen kapal 161. Pramukapal 162. Investigator 163. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Perhubungan)
15.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	50. Penyuluh perikanan 51. Anak buah kapal 52. Analis alokasi usaha penangkapan ikan 53. Analis budidaya 54. Analis kebutuhan impor 55. Analis data spasial 56. Analis dan penyajian data statistik perikanan tangkap 57. Analis mutu hasil perikanan 58. Analis pasar dalam negeri 59. Analis pasar luar negeri 60. Analis pemeriksa keselamatan pelayaran 61. Analis pengelolaan kawasan konservasi 62. Analis pengelolaan sumber daya ikan 63. Analis pengembangan usaha pelabuhan perikanan 64. Analis potensi kelautan 65. Analis sarana kesyahbandaran 66. Analis sumber daya Pesisir dan lautan 67. Analisis bahan organisasi dan tata laksana 68. Kelasi 69. Juru mudi 70. Penyusun konsep bahan bimbingan teknis kelaikan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	164. Analis budidaya perikanan 165. Analis mutu hasil perikanan 166. Pranata kawasan konservasi 167. Analis kesyahbandaran 168. Analis kesehatan ikan dan lingkungan 169. Pengawas pelabuhan perikanan 170. Analis pasar ikan hias 171. Analis perlindungan dan pelestarian ikan 172. Analis alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan 173. Teknisi kapal perikanan 174. Analis konservasi kawasan 175. Analis perlindungan dan pelestarian ikan 176. Analis dampak perubahan iklim 177. Analis identifikasi pulau-pulau kecil 178. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Kelautan)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		71. Penyusun konsep bahan rumusan kelaikan alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	
		72. Penyusun konsep bahan rumusan rancang bangun alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	
		73. Petugas pelayanan penerbitan dokumen penangkapan ikan	
		74. Petugas pemantauan wilayah pesisir	
		75. Petugas pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana	
		76. Petugas tata laksana pelayanan dokumen penangkapan ikan	
		77. Syahbandar perikanan	
		78. Teknisi budidaya	
		79. Teknisi kelaikan alat penangkap perikanan teknisi kelayakan alat perikanan	
		80. Teknisi perawatan kapal pengawas	
		81. Verifikator gambar desain kapal perikanan	
		82. Kepala kamar mesin	
		83. Markonis	
		84. Masinis	
		85. Mekanisasi peralatan	
		86. Mualim kapal perikanan	
		87. Nahkoda kapal perikanan	
		88. Nahkoda kapal pengawas	
		89. Oiler	
		90. Operator aplikasi sistem PPKA	
		91. Pelaksana operasional kapal	
		92. Pembantu teknisi perawatan kapal	
		93. Penata keselamatan pelayaran	
		94. Penata usaha informasi pasar luar negeri teknis industri	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		95. Penata usaha jaringan distribusi	
		96. Penata usaha bimbingan penata usaha bimbingan teknis mikro, kecil, dan menengah	
		97. Penata usaha kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan	
		98. Penatalaksana tugas kesyahbandaran	
		99. Pencatatan dan pendokumentasi pendaftaran kapal perikanan	
		100. Pengadministrasi konservasi jenis ikan	
		101. Pengadministrasi konservasi kawasan	
		102. Pengadministrasi mitigasi bencana lingkungan	
		103. Pengadministrasi pemanfaatan kawasan dan jenis ikan	
		104. Pengadministrasi penanggulangan sumber daya pesisir dan laut	
		105. Pengadministrasi identifikasi pulau-pulau kecil	
		106. Pengadministrasi sarana pulau-pulau kecil	
		107. Pengadministrasi sumber daya kelautan	
		108. Pengadministrasi alat dan bahan laboratorium dan instalasi	
		109. Pengadministrasi bahan teknis budidaya	
		110. Pengadministrasi bahan teknis kesehatan ikan dan lingkungan	
		111. Pengadministrasi bahan teknis perbenihan	
		112. Pengadministrasi bahan teknis prasarana dan sarana budidaya	
		113. Pengadministrasi bahan teknis usaha budidaya	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		114. Pengadministrasi rencana tata ruang dan zonasi wilayah	
		115. Pengadministrasi rencana tata ruang laut nasional	
		116. Penggambar desain kapal perikanan	
		117. Penyiap bahan administrasi perusahaan penangkapan ikan	
		118. Penyiap bahan perumusan kebijakan pengawakan kapal perikanan	
		119. Penyiap bahan evaluasi dan laporan pemulihan sumber daya ikan perairan umum	
		120. Penyiap bahan evaluasi dan laporan pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan	
		121. Penyiap bahan evaluasi dan laporan produktivitas kapal penangkap ikan	
		122. Penyiap bahan evaluasi dan laporan tata kelola sumber daya ikan perairan umum	
		123. Penyiap bahan evaluasi pelabuhan perikanan samudera, nusantara, dan pelabuhan perikanan pantai	
		124. Penyiap bahan evaluasi labuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta	
		125. Penyiap bahan evaluasi pelayanan usaha penangkapan ikan	
		126. Penyiap bahan evaluasi pengembangan usaha penangkapan ikan	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		127. Penelaah gambar desain alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan	
		128. Pengevaluasi pemulihan sumber daya ikan laut teritorial dan perairan kepulauan	
		129. Penyiap bahan identifikasi sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	
		130. Penyiap bahan pedoman identifikasi sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	
		131. Penyiap bahan pedoman tata kelola sumberdaya daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	
		132. Penata usaha identifikasi dan evaluasi sentra pengelolaan produk	
		133. Penata usaha kemiteraan usaha mikro,kecil, dan menengah	
		134. Penata usaha kerja sama industri	
		135. Penata usaha kimia dan hayati	
		136. Penata usaha mikro biologi dan organoleptik	
		137. Penata usaha monitoring cemaran biologi	
		138. Penata usaha monitoring cemaran kimia	
		139. Penata usaha pelayanan usaha besar	
		140. Penata usaha pelayanan usaha mikro , kecil, dan menengah	
		141. Penata usaha pengamanan dan perlindungan akses pasar	
		142. Penata usaha pengembangan produk skala besar	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		143. Penata usaha peningkatan akses pasar	
		144. Pengelola sumber daya ikan	
		145. Pengelola informasi dan publikasi	
		146. Pengelola laboratorium	
		147. Pengelola pemanfaatan BMN	
		148. Pengidentifikasi hasil pengukuran dan dokumen kapal perikanan	
		149. Pengumpul dan pengolah data statistik perikanan tangkap	
		150. Penyiap bahan kebijakan tata kelola sumber daya ikan zona ekonomi eksklusif dan laut lepas	
		151. Penyiap bahan pemantauan dan evaluasi ketenagakerjaan perikanan	
		152. Penyiap bahan pemantauan dan evaluasi pengawakan kapal perikanan	
		153. Penyiap bahan pemantauan dan pengembangan kapal perikanan dan alat penangkap ikan	
		154. Penyiap bahan pemantauan pelayanan usaha penangkapan ikan	
		155. Penyiap bahan pemantauan pengembangan usaha penangkapan ikan	
		156. Penyiap bahan pemantauan produktivitas kapal penangkap ikan	
		157. Penyiap bahan pengembangan sistem informasi pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		158. Penyiap bahan pengembangan sistem informasi pelabuhan perikanan swasta, pangkalan pendaratan ikan	
		159. Penyiap bahan penyusun pedoman dan bimbingan bidan identifikasi dan kapasitas nelayan	
		160. Penyiap bahan penyusun pedoman dan bimbingan pengelolaan usaha	
		161. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis bidang kenelayanan	
		162. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang tata operasional pelabuhan perikanan	
		163. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang keselamatan pelayaran	
		164. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta	
		165. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengembangan prasarana pelabuhan pendaratan ikan	
		166. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengembangan prasarana pelabuhan perikanan	
		167. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang tata pemeliharaan dan rehabilitasi	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		168. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang kesyahbandaran	
		169. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	
		170. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang investasi usaha penangkapan ikan	
		171. Penyiap bahan penyusunan pedoman diversifikasi usaha	
		172. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan pembangunan pelabuhan pendaratan ikan dan pelabuhan swasta	
		173. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan pengendalian pembangunan pelabuhan perikanan samudera, nusantara, pantai	
		174. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan tata pemeliharaan dan rehabilitasi pelabuhan pendaratan ikan	
		175. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan kelaikan kapal	
		176. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimbingan teknis penerapan standar rancangan bangun dan konstruksi kapal	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		177. Penyiap bahan penyusunan pedoman bimtek pengembangan prasarana pelabuhan pendaratan ikan	
		178. Penyiap bahan penyusunan pedoman dan bimbingan kesyahbandaran	
		179. Penyiap bahan penyusunan pedoman identifikasi dan pengukuran kapal perikanan	
		180. Penyiap bahan penyusunan pedoman keselamatan pelayaran	
		181. Penyiap bahan penyusunan pedoman pencatatan dan dokumentasi kapal perikanan	
		182. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis pengembangan prasarana pelabuhan perikanan	
		183. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimbingan teknis tata operasional pelabuhan perikanan	
		184. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimtek investasi usaha penangkapan ikan	
		185. Penyiap bahan penyusunan pedoman, bimtek permodalan usaha penangkapan ikan	
		186. Penyiap bahan perumusan kebijakan ketenagakerjaan perikanan	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		187. Penyiap bahan urusan perifiaksi dokumen penangkapan ikan perorangan dan koperasi	
		188. Penyiap bahan urusan perifiaksi dokumen penangkapan ikan perusahaan berbadan hukum	
		189. Penyiap bahan pertifikasi alokasi usaha penangkapan ikan	
		190. Penyiap bahan pertifikasi pengusaha penangkapan ikan	
		191. Penyiap bahan penyusunan evaluasi dan laporan bidang permodalan usaha penangkapan ikan	
		192. Penyusun bahan teknis perbenihan	
		193. Penyusun bahan teknis prasarana dan sarana budidaya	
		194. Penyusun bahan teknis usaha budidaya	
		195. Penyusun bahan adaptasi dampak perubahan iklim	
		196. Penyusun bahan benda muatan kapal tenggelam	
		197. Penyusunan bahan bimbingan teknis industri pengolahan	
		198. Penyusunan bahan bimbingan teknis usaha mikro, kecil, dan menengah	
		199. Penyusunan bahan data dan informasi pulau-pulau kecil	
		200. Penyusunan bahan identifikasi pulau-pulau kecil	
		201. Penyusunan bahan implementasi IPTEK	
		202. Penyusun bahan informasi dan publikasi	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		203. Penyusun bahan informasi kesehatan ikan dan lingkungan	
		204. Penyusun bahan informasi perbenihan	
		205. Penyusun bahan jaringan pasar ikan hias	
		206. Penyusun bahan jasa kelautan	
		207. Penyusun bahan kelembagaan pasar hasil perikanan	
		208. Penyusun bahan kelembagaan pelaku pasar hasil perikanan	
		209. Penyusun bahan pemanfaatan jenis ikan	
		210. Penyusun bahan pemanfaatan kawasan	
		211. Penyusun bahan pemantauan dan evaluasi imfor	
		212. Penyusun bahan penanggulangan pencemaran sumber daya laut	
		213. Penyusun bahan penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir	
		214. Penyusun bahan perancangan konservasi jenis ikan	
		215. Penyusun bahan perlindungan dan pelestarian ikan	
		216. Penyusun bahan rencana tata ruang laut lintas wilayah dan perairan yurisdiksi	
		217. Penyusun bahan sarana pulau-pulau kecil	
		218. Penyusun bahan tata laksana penyusun bahan teknis budidaya	
		219. Penyusun bahan teknis kesehatan ikan dan lingkungan	



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
16.	Kementerian Tenaga Kerja	220. Penelaah standar keselamatan kerja	179. Analis keselamatan kerja 180. Analis kesehatan kerja 181. Analis pengawasan masyarakat 182. Analis <i>higiyene</i> industri 183. Penguji hiperkes 184. Penguji K3 185. Assessor K3 186. Penyuluh K3 187. Analis kawasan transmigrasi 188. Penyuluh kawasan transmigrasi 189. Pranata ketransmigrasian 190. Pengawas ketransmigrasian 191. Analis tenaga kerja perusahaan pemerintah 192. Analis tenaga kerja perusahaan swasta 193. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)
17.	Kementerian Pekerjaan Umum	221. Pengawas penyehat lingkungan 222. Pengawas tata bangunan dan perumahan 223. Pengawas pengairan 224. Juru gambar 225. Arsitek 226. Desain interior 227. Analis tataguna DAS	194. Pengawas jalan dan jembatan 195. Pengawas tata bangunan dan perumahan 196. Pengawas irigasi 197. Juru gambar 198. Arsitek 199. Desain interior 200. Pranata PAM 201. Pengawas keselamatan jalan 202. Analis investasi jalan tol 203. Analis jaringan jalan 204. Pranata pengadaan tanah 205. Pranat pengelolaan leger jalan 206. Pengawas bangunan 207. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinaanya Kementerian Pekerjaan Umum)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
18.	Kementerian Kesehatan		208. Dokter spesialis syaraf 209. Dokter spesialis kandungan 210. Dosen pendidik keperawatan 211. Binatu rumah sakit 212. Pemulasaran jenazah 213. Pengadministrasi poliklinik 214. Pengelola poliklinik 215. Pramu poliklinik 216. Pranata jasmani & mental 217. Pengemudi ambulan 218. Petugas pembinaan jasmani dan mental pegawai 219. Petugas kamar gelap 220. Analis kesehatan ibu dan anak 221. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Kesehatan)
19.	Kementerian Pendidikan Nasional/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	228. Pelindung /pengonservasi bahasa dan sastra 229. Perancang pengembang kompetensi kependidikan 230. Pengendali pengguna bahasa 231. Pengkaji bahasa 232. Penyuluh bahasa 233. Penyusun acuan bahasa 234. Penyusun pemetaan pendidikan 235. Perancang evaluasi kursus dan kesetaraan 236. Perancang program pendidikan 237. Perancang tes bahasa 238. Perancang sistem evaluasi pendidikan 239. Terminilog/ pengembang istilah	222. Analis bahasa dan sastra 223. Penyuluh bahasa 224. Analis kursus dan kesetaraan 225. Analis peserta didik dan kesetaraan 226. Analis kependidikan 227. Analis kebutuhan dunia kerja 228. Analis tenaga kependidikan 229. Analis kemahasiswaan 230. Analis kompetensi dan kualifikasi pendidikan 231. Pengawas bahasa/sastra 232. Analis istilah 233. Analis leksikograf/pekamus 234. Analis kursus dan kesetaraan 235. Analis sarana dan prasarana pendidikan 236. Analis kurikulum dan pembelajaran 237. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
20.	Kementerian Sosial	240. Analis dampak sosial	238. Analis dampak sosial 239. Analis kemasyarakatan 240. Pranata taman makam pahlawan (TMP), 241. Analis pemberdayaan masyarakat 242. Analis pengembangan model terapi & rehabilitasi 243. Fasilitator rehabilitasi 244. Analis program kerjasama lembaga masyarakat 245. Analis program pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah sosial 246. Penyuluh penanganan masalah sosial 247. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Sosial)
21.	Kementerian Agama	241. Pencatat nikah 242. Penasehat perkawinan 243. Analis kerukunan beragama 244. Analis penyelenggara haji	248. Analis kerukunan beragama 249. Pranata haji 250. Analis wakaf 251. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang intansi pembinanya Kementerian Agama)
22.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	245. Pemandu wisata 246. Analis potensi pengembangan wisata 247. Analis pengembangan ekonomi kreatif 248. Verifikator penyelenggaraan wisata	252. Pemandu wisata 253. Pengawas kepariwisataan 254. Analis perfilman 255. Analis seni pertunjukan 256. Analis kreasi dan produksi musik 257. Analis seni rupa 258. Pranata fotografi 259. Analis apresiasi karya seni 260. Analis film animasi 261. Analis komik 262. Analis tulisan fiksi 263. Analis arsitektur 264. Analis desain interior 265. Analis desain grafis 266. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
23.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	249. Analis sistem informatika 250. Pengendali teknologi informasi 251. Jurnalis 252. Juru Foto 253. Juru kamera	267. Analis informatika 268. Pengawas teknologi informasi 269. Penyuluh informatika 270. Jurnalis 271. Analis program pembangunan 272. Pengelola jaringan 273. Pengelola dan pemelihara piranti TI 274. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Komunikasi dan Informatika)
24.	Kementerian Riset Teknologi	254. Analis pemanfaatan teknologi 255. Analis pengembangan teknologi 256. Penyuluh koperasi 257. Analis koperasi 258. Pengawas koperasi	275. Analis pemanfaatan teknologi 276. Analis pengembangan teknologi 277. Pranata sumber daya iptek 278. Analis jaringan iptek 279. Pranata jaringan iptek 280. Analis revansi dan produktivitas iptek 281. Pranata revansi dan produktivitas iptek
25.	Kementerian Koperasi		282. Penyuluh koperasi 283. Analis koperasi 284. Pranata koperasi 285. Pengawas koperasi
26.	Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)	259. Laboran lingkungan hidup 260. Analis pemanasan global 261. Analis daya dukung lingkungan 262. Analis daya tampung lingkungan	286. Analis lingkungan hidup 287. Penyuluh lingkungan hidup 288. Analis konservasi dan rehabilitasi wilayah pesisir 289. Analis penanggulangan pencemaran sumber daya pesisir 290. Analis penanggulangan pencemaran sumber daya laut 291. Analis rehabilitasi 292. Analis reklamasi 293. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Lingkungan Hidup)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
27.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	263. Penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak 264. Analis anak	294. Pengawas perempuan dan anak 295. Penyuluh pemberdayaan perempuan dan anak 296. Analis perlindungan perempuan
28.	Kementerian PAN dan RB	265. Pengawas pelayanan publik 266. Analis ketataksanaan 267. Analis kelembagaan 268. Analis perencanaan SDM aparatur 269. Analis pengembangan SDM aparatur 270. Analis kesejahteraan SDM aparatur 271. Analis penegakan integritas SDM aparatur 272. Analis pengembangan database SDM aparatur 273. Analis kelembagaan / organisasi	297. Analis kelembagaan/ organisasi 298. Analis penegakan integritas SDM aparatur 299. Pengawas pelayanan publik
29.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	274. Analis pengembangan daerah terpencil 275. Pengawas pembangunan daerah terpencil	300. Analis pembangunan daerah terpencil 301. Penyuluh pembangunan daerah terpencil 302. Pengawas pembangunan daerah terpencil
30.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)	276. Analis program pembangunan	303. Analis program 304. Pengawas program pembangunan 305. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional)
31.	Kementerian BUMN	277. Pengawas perusahaan negara 278. Analis pengembangan perusahaan	306. Analis perusahaan negara 307. Pengawas perusahaan negara
32.	Kementerian Perumahan Rakyat	279. Analis penyusunan perencanaan wilayah 280. Analis penyusunan penyiapan lahan 281. Pengawas pelaksanan pembangunan fisik 282. Penyusun perencanaan wilayah	308. Analis perumahan 309. Pengawas perumahan 310. Pengawas rumah susun 311. Analis perencanaan wilayah perumahan 312. Analis penyusun penyiapan lahan



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		283. Perencanaan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan	313. Analis lembaga swadaya nasional 314. Analis lembaga swadaya daerah dan adat 315. Analis perumahan swadaya
33.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	284. Pelatih olahraga	316. Pelatih olahraga 317. Pengawas olahraga 318. Penyuluh olahraga
Lembaga Pemerintahan Non Kementerian			
34.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)	285. Analis tata negara 286. Analis kebutuhan diklat 287. Evaluator program diklat 288. Penyusun kurikulum diklat 289. <i>Training offices</i> /pengelola pelatihan 290. Pengadministrasi umum 291. Pengevaluasi diklat	319. Analis diklat 320. Pengawas diklat 321. Analis kebutuhan diklat 322. Pranata diklat 323. Analis diklat prajabatan dan ujian dinas 324. Analis akreditasi lembaga diklat 325. Pranata sistem informasi diklat aparatur (SIDA) 326. Analis diklat teknis 327. Analis diklat fungsional 328. Pranata sarana dan prasarana diklat 329. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Administrasi Negara)
35.	Arsip Nasional (ANRI)	292. Analis pengembangan sistem kearsipan	330. Penyuluh kearsipan 331. Pengawas kearsipan 332. Pranata laboratorium kearsipan 333. Pranata layanan kearsipan 334. Penata preservasi arsip 335. Pranata reproduksi arsip 336. Pranata restorasi arsip 337. Kurator arsip/dokumen dan tata naskah 338. Penata usaha surat dan kearsipan 339. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Arsip Nasional)
36.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	293. Analis jabatan 294. Auditor kepegawaian 295. Assesor kepegawaian 296. Pengadministrasi kepegawaian 297. Analis data	340. Analis jabatan 341. Sekretaris 342. Administrasi umum 343. Analis organisasi 344. Analis tata laksana



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
		298. Analis bahan	345. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Kepegawaian Negara)
37.	Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)	299. Analis pengembangan elektronik pustaka (<i>e library</i>) 300. Asisten pustakawan	346. Penyuluh perpustakaan 347. Asisten pustakawan 348. Pengawas perpustakaan 349. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Perpustakaan Nasional)
38.	Badan Pusat Statistik (BPS)		350. Penyuluh statistik 351. Pengawas statistik 352. Administrator jaringan komputer 353. Analis sistem 354. Operator data entry 355. Programmer 356. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pusat Statistik)
39.	Badan Standarisasi Nasional (BSN)	301. Analis kompetensi	358. Analis Standar Kompetensi 359. Pengawas Standar Kompetensi
40.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPATEN)	302. Perawat peralatan pengawas 303. Pemroses penerbitan izin 304. Pemroses penerbitan izin petugas fasilitas petugas radiasi	360. Analis radiasi 361. Perawat peralatan pengawasan 362. Penyuluh radiasi 363. Pengadministrasi penerbit izin 364. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawas Tenaga Nuklir)
41.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	305. Penelaah standar mutu bahan dan peralatan 306. Pengelola pengaman instalasi nuklir 307. Pengelola sistem jaminan mutu 308. Penyiap bahan program jaminan mutu 309. Penyiap bahan standar keselamatan	365. Analis standar mutu bahan dan peralatan 366. Penyuluh nuklir 367. Pranata standar keselamatan 368. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Tenaga Nuklir Nasional)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
42.	Badan Intelijen Negara (BIN)		369. Analis rahasia negara 370. Analis informasi 371. Analis intelijen 372. Analis kebutuhan perlengkapan intelijen 373. Pengadministrasi senjata api dan amunisi 374. Perawat senjata api 375. Pengawas gudang senjata 376. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Intelijen Negara)
43.	Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)		377. Analis persandian 378. Pranata alat persandian 379. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Sandi Negara)
44.	Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	310. Analis bina KB 311. Analis bahan kelangsungan hidup ibu 312. Analis bahan kelangsungan hidup bayi dan anak 313. Analis bahan pencegahan penyakit menular 314. Analis bahan penanggulangan intertilitas penyakit menular 315. Analis pencegahan kanker alat reproduksi 316. Analis jaminan pelayanan kb 317. Analis jaminan sarana KB 318. Analis kependudukan 319. Analis penyediaan sarana KB 320. Analis standarisasi pelayanan KB 321. Analis monitoring dan evaluasi pelayanan KB 322. Analis akses pelayanan KB 323. Analis kualitas pelayanan KB	380. Analis kependudukan 381. Pengawas kependudukan 382. Analis pembinaan KB 383. Analis layanan KB 384. Analis sarana KB 385. Analis standarisasi pelayanan KB 386. Pengawas pelayanan KB 387. Analis kehidupan keluarga 388. Analis penyakit menular 389. Analis kanker alat reproduksi 390. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
45.		324. Penyusun bahan 325. Penyusun bahan jaminan pelayanan KB 326. Penyusun bahan akses pelayanan KB 327. Penyusun bahan kualitas pelayanan KB 328. Penyusunan bahan kelangsungan hidup ibu 329. Penyusun bahan penanggulangan infertilitas	
46.	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	330. Analis penerbangan 331. Pengawas antariksa	391. Analis penerbangan 392. Pengawas antariksa
47.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTA NAL)		393. Analis peta wilayah 394. Pengawas status peta wilayah 395. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)
48.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP		396. Analis keuangan 397. Analis pembangunan 398. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)
49.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)		399. Analis penelitian 400. Pengawas penelitian dan HKI 401. Analis hasil penelitian 402. Pengelola pemanfaatan hasil penelitian 403. Pengolah data penelitian bidang IPSK 404. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
50.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)		405. Pranata laboratorium perekayasaan 406. Pengawas perekayasa 407. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)
51.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	332. Perencana penanaman modal 333. Analis permodalan asing	408. Analis penanaman modal 409. Pengawas penanaman modal 410. Analis pengembangan potensi daerah 411. Analis asosiasi dunia usaha
52.	Badan Pertanahan Nasional	334. Analis peta wilayah 335. Pengawas pertanahan	412. Analis peta wilayah 413. Pengawas pertanahan 414. Penyuluh pertanahan
53.	Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	336. Analis obat dan makanan	415. Analis obat dan makanan 416. Penyuluh obat dan makanan 417. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Pengawas Obat dan Makanan)
54.	Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS)	337. Analis program	418. Widyaiswara 419. Analis program 420. Pengawas Program Lemhanas
55.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	338. Analis cuaca	421. Analis cuaca 422. Pengawas cuaca 423. Analis bahan adaptasi dampak perubahan iklim 424. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika)
56.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	339. Analis tenaga kerja 340. Pengawas tenaga kerja 341. Program kebutuhan tenaga kerja	425. Analis tenaga kerja 426. Penyuluh tenaga kerja
57.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	342. Analis bencana alam 343. Penyuluh bencana alam 344. Petugas bencana alam	427. Analis bencana 428. Penyuluh bencana 429. Pranata bencana



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
58.	Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	345. Analis barang dan jasa 346. Pengadaan barang dan jasa	430. Analis barang dan jasa 431. Penyuluh barang dan jasa 432. Pranata barang dan jasa 433. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
59.	Badan SAR Nasional	347. Analis SAR 348. Penyuluh SAR	434. Analis SAR 435. Penyuluh SAR 436. Pranata SAR
60.	Badan Narkotika Nasional	349. Analis dampak narkotik 350. Penyuluh narkotik 351. Pengawas rehabilitasi narkotik	437. Analis narkoba 438. Penyuluh narkoba 439. Pengawas rehabilitasi narkoba 440. Analis laboratorium narkoba 441. Pembina mental 442. Instruktur vokasional 443. Analis intelijen taktis 444. Analis intelijen produk 445. Pranata pemetaan jaringan 446. Analis operasi pemutusan jaringan 447. Analis pemetaan jaringan 448. Penyidik 449. Analis sistem informasi dan jaringan 450. Petugas pengejaran 451. Petugas penindakan 452. Sipir 453. Pengawas barang bukti 454. Analis pengembangan model terapi & rehabilitasi 455. Analis manajemen monitoring & pengendalian kekambuhan dan wajib lapor 456. Fasilitator rehabilitasi 457. Petugas standarisasi dan sertifikasi
61.	Badan Nasional Penanggulangan Teroris	352. Analis dampak lingkungan 353. Penyuluh kemasyarakatan	458. Analis pengamanan lingkungan 459. Analis penangkalan 460. Analis kewaspadaan 461. Analis pengamanan objek vital, transportasi dan VVIP 462. Analis resosialisasi dan rehabilitasi



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
			463. Analis data intelijen 464. Analis pengembangan sistem operasi 465. Analis kerjasama aparat penegak hukum 466. Analis kerjasama luar negeri 467. Analis kerjasama regional 468. Analis kerjasama multilateral 469. Analis konvensi internasional 470. Analis resolusi badan Non PBB
Lembaga Setingkat Menteri			
62.	Kejaksaan Agung RI	354. Panitera pengadilan (MA) 355. Pengamanan barang bukti 356. Pengawasan dan pengamanan terdakwa	471. Panitera pengadilan (MA) 472. Pengawal tahanan 473. Pranata tilang 474. Penyidik pidana khusus 475. Penyidik pidana umum 476. Pemeriksa intelejen 477. Analis penuntutan 478. Pranata barang bukti 479. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Kejaksaan Agung RI)
63.	Kepolisian Negara RI	357. Analis gangguan keamanan 358. Penyuluh keamanan masyarakatan	480. Analis gangguan keamanan 481. Penyuluh keamanan masyarakat
64.	Sekretariat Negara (Setneg)		482. Analis pengaduan masyarakat 483. Analis media dan jurnalistik 484. Analis kerjasama teknik luar negeri 485. Pranata acara 486. Pranata acara kepresidenan 487. Pranata dekorasi 488. Pranata jamuan 489. Pranata upacara 490. Analis tanda jasa dan kehormatan 491. Koordinator pemandu wisata istana 492. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Sekretariat Negara (Sekneg)



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
65.	Sekretariat Kabinet (Setkab)	359. Analis program kebijakan pemerintah	493. Analis media dan jurnalistik 494. Tenaga peliputan 495. Penata acara 496. Petugas protokol 497. Ajudan sekretaris kabinet
Sekretariat Lembaga Negara			
66.	Sekretariat Jenderal MPR- RI	360. Analis pemerintahan daerah 361. Analis kebijakan pengembangan pemerintah daerah	498. Analis pemerintahan daerah 499. analis kebijakan pengembangan pemerintah daerah
67.	Sekretariat Jenderal DPR- RI	362. Transkriptor 363. Analis anggaran 364. Penyusun risalah	500. Trankriptor 501. Analis anggaran 502. Penyusun risalah 503. Penulis steno 504. Penyusun LAKIP 505. Pemeriksa anggaran
68.	Sekretariat Jenderal BPK		506. Analis pelanggaran 507. Analis akuntabilitas kinerja 508. Pranata pembinaan jabatan fungsional (tertentu yang instansi pembinaanya Sekretariat Jenderal BPK)
69.	Sekretariat Mahkamah Agung	365. Analis sengketa peradilan	509. Analis sengketa peradilan
70.	Sekretariat DPD-RI	366. Analis pemerintah daerah 367. Analis program daerah	510. Analis pemerintah daerah 511. Legislasi
71.	Sekretariat Mahkamah Konstitusi	368. Panitera pengadilan 369. Panitera muda	512. Panitera pengadilan 513. Panitera muda
72.	Sekretariat Komisi Yudisial	370. Analis keputusan pengadilan 371. Pengawas pengadilan	514. Pengawas pengadilan
Sekretariat Lembaga Non Struktural			
73.	Sekretariat Komisi Nasional HAM	372. Analis pelanggaran HAM 373. Penyuluh pelanggaran HAM	515. Analis pelanggaran HAM 516. Penyuluh pelanggaran HAM
74.	Sekretariat KPU Pusat/Provinsi/ Kab/Kota	374. Analis pemilihan umum 375. Penyuluh pemilihan umum 376. Pengawas pemilihan umum	517. Analis pemilihan umum 518. Penyuluh pemilihan umum 519. Pengawas pemilihan umum 520. Verifikator partai politik peserta pemilu 521. Verifikator perseorangan peserta pemilu



Lanjutan Tabel I.40

No.	Kementerian/ Lembaga	Nama Jabatan Fungsional Umum 2012	Nama Jabatan Fungsional Umum 2013
75.			522. Penyusun data dan dokumentasi kebutuhan sarana pemilu 523. Analis distribusi pemilu 524. Penyusun dokumentasi distribusi pemilu
76.	Badan Koordinasi Keamanan Laut	377. Analis keamanan laut 378. Penyuluh keamanan laut	525. Analis keamanan laut 526. Penyuluh keamanan laut
77.	PPATK	379. Analis PPATK 380. Penyuluh PPATK 381. Pengawas PPATK	527. Analis PPATK 528. Penyuluh PPATK 529. Pengawas PPATK 530. Pemeriksa transaksi keuangan
78.	Badan Pengelola Perbatasan		531. Analis wilayah/peta 532. Pengawas perbatasan

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel I.41 Nomenklatur Lembaga Pusat / Pemerintah Daerah yang Memiliki Assessment Center Tahun 2013

No	Instansi pusat/Pemerintah Daerah
1.	Badan Kepegawaian Negara (BKN)
2.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3.	Badan Pemeriksa Keuangan & Pembangunan (BPKP)
4.	Kementerian Keuangan
5.	Kementerian Kehutanan
6.	Kementerian Kesehatan
7.	Lembaga Administrasi Negara (LAN)
8.	Pemprov. Jawa Tengah
9.	Pemprov. DI Yogyakarta
10.	Badan Diklat Pemprov. Jawa Timur
11.	Pemprov. Nusa Tenggara Barat
12.	Pemprov. Nusa Tenggara Timur
13.	Kementerian Pekerjaan Umum (sedang dalam proses persiapan)
14.	Kementerian Nakertrans (sedang dalam proses persiapan)
15.	Kementerian Perdagangan (sedang dalam proses persiapan)

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

BAGIAN II

KETATALAKSANAAN



Pada bagian ini disajikan data ketatalaksanaan (*business process*) dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Data-data tersebut di antaranya adalah data mengenai sistem perencanaan kerja; sistem prosedur kerja; sistem pengawasan; dan sistem pelaporan.

A. Sistem Perencanaan Kerja

Bagian ini menyajikan data yang menggambarkan perencanaan kerja pemerintah, yaitu data ketersediaan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan ketersediaan dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Kedua dokumen ini harus dimiliki oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah karena berisikan target kinerja yang harus dicapai oleh organisasi pemerintah. Kementerian PAN dan RB mencatat, pada tahun 2011, baru 49 (57,76%) lembaga Negara; 20 (60,61%) propinsi; 54 (10,87%) kabupaten/kota yang telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU). Data ini perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan karena masih sedikit instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah yang belum memiliki dokumen IKU. Data mengenai jumlah lembaga pusat dan pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen IKU dapat dilihat pada tabel II.1 sampai II.4. Berbeda dengan kepemilikan dokumen IKU, sebagian besar instansi pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin). Dari data yang dimiliki oleh Kementerian PAN dan RB, pada tahun 2011 lembaga pusat yang telah menyusun Tapkin sebanyak 64 (78,05%) lembaga; dan 22 (66,67%) propinsi, 283 (56,94%) kabupaten/kota telah memiliki dokumen Tapkin. Data lengkap mengenai instansi yang telah menyusun dan memiliki dokumen Tapkin disajikan pada tabel II.5 sampai tabel II.8.

B. Sistem Prosedur Kerja

Prosedur merupakan tata cara kerja untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat diperlukan prosedur yang lengkap dan memadai, baik berupa dokumen maupun alat teknologi yang digunakan. Dalam publikasi ini, Data prosedur yang disajikan terdiri dari data Pemerintah Daerah yang telah menyusun dokumen Standar Operating Procedures (SOP); jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan; pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah; penerapan e-

government Pemerintah Pusat dan Daerah; dan data mengenai penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Pemerintah Pusat dan Daerah.

Data mengenai Daerah yang telah menyusun dokumen Standar Operating Procedures (SOP) dapat dilihat pada tabel II.9. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sampai pada tahun 2013 baru sebanyak 147 (27%) Pemerintah Daerah yang memiliki dokumen SOP. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Selain ketersediaan dokumennya, penting juga untuk memastikan dokumen SOP tersebut digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya sekedar dokumen yang disimpan. Untuk data jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan dapat dilihat pada tabel II.10. Antara tahun 2012 dan tahun 2013 ini belum ada penambahan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diterbitkan, masih sebanyak 13 Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah diterbitkan sebagai pedoman dan standar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan di Daerah. Standar ini diperlukan untuk menjamin setiap Daerah memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimum (SPM) berisikan indikator target setiap pelayanan yang harus dicapai oleh Daerah.

Data berikutnya yang disajikan dalam publikasi ini adalah ini data Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan PTSP Tahun 2012 -2013 pada tabel II.11. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2013 sudah sebanyak 467 (86%) Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki PTSP. Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjamin pelaksanaan pelayanan administrasi menjadi cepat, mudah dan murah. Data mengenai penerapan e-Government Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel II.12. Sementara data mengenai Pemerintah Daerah yang telah memiliki website dapat dilihat pada tabel II.13. Penggunaan *e-government* dalam tata kerja pemerintahan sebagian besar masih terbatas pada beberapa jenis, diantaranya adalah penyediaan website lembaga sebagai sarana publikasi informasi kepada masyarakat dan aplikasi untuk manajemen internal instansi pemerintah.

Data mengenai jumlah lembaga pemerintah pusat yang telah melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel II.14. Sampai tahun 2013, baru sebanyak 53 (32%) Lembaga Pusat yang memiliki LPSE. Sementara itu, data jumlah Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel II.15. Dari tabel tersebut terlihat bahwa sampai pada tahun 2013 sudah sebanyak 463 (88%) Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki LPSE. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu untuk dibangun dan dikembangkan di setiap instansi pemerintah untuk menjamin tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dilaksanakan secara adil, jujur dan bersaing. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini juga diharapkan dapat mengurangi praktek korupsi di lingkungan pemerintah.



C. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian jalannya pemerintahan diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan meminimalisir penyimpangan yang merugikan. Dalam publikasi ini disajikan data mengenai pelaksanaan Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu Lingkungan pengendalian; Penilaian risiko; Kegiatan pengendalian; Informasi dan komunikasi; dan Pemantauan pengendalian intern.

Pada tabel II.16 dan tabel II. 17 disajikan data jumlah dan nomenklatur pemerintah pusat yang telah memiliki peraturan menteri/kepala K/L mengenai SPIP tahun 2010 – 2012. Dari data tersebut terlihat bahwa antara tahun 2010 sampai tahun 2012 terdapat peningkatan lembaga pusat yang telah memiliki peraturan mengenai SPIP yaitu sebanyak 56 lembaga pada tahun 2010-2011 menjadi 87 lembaga pada tahun 2012. Sementara pada tabel II.18 dan tabel II.19 disajikan data jumlah dan nomenklatur pemerintah daerah yang telah memiliki dokumen peraturan daerah mengenai SPIP. Pada tahun 2013, semua daerah propinsi/kabupaten/kota telah memiliki peraturan daerah mengenai SPIP. Data ini menunjukkan perkembangan pelaksanaan SPIP yang cukup menggembirakan di pemerintah daerah. Namun, yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah implementasi peraturan daerah mengenai SPIP tersebut, jangan hanya sebatas memiliki dokumen aturan, tetapi tidak digunakan dengan maksimal untuk mengawasi jalannya pemerintahan.



Tabel II.1 Jumlah Kementerian/Lembaga Pusat yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011

Kementerian/LPND	2008	2009	2010	2011
Jumlah	76	77	81	82
Telah Memiliki	2	8	37	49
Persentase	2,63%	10,39%	45,68%	59,76%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.2 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 -2011

Pemerintah Provinsi	2008	2009	2010	2011
Jumlah	33	33	33	33
Telah Memiliki	1	2	19	20
Persentase	3,03%	6,06%	57,58%	60,61%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.3 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011

Pemerintah Kabupaten/Kota	2008	2009	2010	2011
Jumlah	472	472	497	497
Telah Memiliki	0	3	36	54
Persentase	0,00%	0,64%	7,24%	10,87%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.4 Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen IKU Tahun 2008 - 2011

Total Kementerian/LPND/Provinsi/Kab/ Kota	2008	2009	2010	2011
Jumlah	581	582	611	612
Telah Memiliki	3	13	92	123
Persentase	0,52%	2,23%	15,06%	20,10%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



Tabel II.5 Jumlah Kementerian/LPND yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011

Kementerian/LPND	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah	72	76	77	81	82
Telah Memiliki	39	36	54	54	64
Persentase	54%	47%	70%	67%	78,05%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.6 Jumlah Pemerintah Daerah Provinsi yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011

Pemerintah Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah	33	33	33	33	33
Telah Memiliki	22	20	20	23	22
Persentase	67%	61%	61%	70%	66,67%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.7 Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki dan Menyampaikan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah	440	472	472	497	497
Telah Memiliki	159	160	201	263	283
Persentase	36%	34%	43%	53%	56,94%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013

Tabel II.8 Jumlah Keseluruhan Kementerian/Lembaga Pusat dan Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2007 - 2011

Total Kementerian/LPND/Provinsi/Kab/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah	545	581	582	611	612
Telah Memiliki	220	216	275	340	369
Persentase	40%	37%	47%	56%	60,29%

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2013



Tabel II.9 Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Dokumen SOP Tahun 2013

Provinsi	Total Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Daerah yang Sudah Memiliki SOP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	0	4	1	5	21%
Sumatera Utara	34	0	6	4	10	29%
Sumatera Barat	20	0	4	2	6	30%
Riau	13	0	1	0	1	8%
Jambi	12	0	5	1	6	50%
Sumatera Selatan	17	1	5	2	8	47%
Bengkulu	11	1	2	0	3	27%
Lampung	16	0	3	0	3	19%
Bangka Belitung	8	0	4	1	5	63%
Kepulauan Riau	8	0	0	1	1	13%
DKI Jakarta	7	0	0	1	1	14%
Jawa Barat	28	0	7	3	10	36%
Jawa Tengah	36	0	11	1	12	33%
DI Yogyakarta	6	0	2	1	3	50%
Jawa Timur	39	0	13	5	18	46%
Banten	9	0	0	1	1	11%
Bali	10	0	4	1	5	50%
Nusa Tenggara Barat	11	1	2	0	3	27%
Nusa Tenggara Timur	23	0	3	0	3	13%
Kalimantan Barat	15	1	1	1	3	20%
Kalimantan Tengah	15	0	3	0	3	20%



Lanjutan Tabel II.9

Provinsi	Total Pemerintah Daerah	Daerah yang Sudah Memiliki SOP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%
Kalimantan Selatan	14	0	7	1	8	57%
Kalimantan Timur	11*	0	1	2	3	
Sulawesi Utara	16	1	3	1	5	31%
Sulawesi Tengah	13	1	1	1	3	23%
Sulawesi Selatan	25	0	10	1	11	44%
Sulawesi Tenggara	14	0	2	0	2	14%
Gorontalo	7	0	0	0	0	0%
Sulawesi Barat	7	1	1	0	2	29%
Maluku	12	0	1	2	3	25%
Maluku Utara	11	0	0	0	0	0%
Papua	30	0	0	0	0	0%
Papua Barat	14	0	0	0	0	0%
Kalimantan Utara**	6					
Total		7	106	34		
Total	542				147	27%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2013

Catatan :

*Untuk Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dihitung persentasenya karena pada tahun 2013 Kalimantan Timur sudah dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sementara data yang tersedia adalah data jumlah daerah yang sudah memiliki dokumen SOP sebelum Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan (15 daerah).

** Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia datanya.



Tabel II.10 Jenis Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Telah Diterbitkan

No.	Bidang SPM	Dasar Hukum
1.	Perumahan Rakyat	Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No. 22/PERMEN/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
2.	Pemerintah Dalam Negeri	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
3.	Sosial	Peraturan Menteri Sosial RI No. 129/huk /2008 tentang standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
4.	Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
5.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
6.	Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 19 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
7.	Keluarga Berencana dan Sejahtera	Peraturan Kepala badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 55/hk-010/b5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota
8.	Ketenagakerjaan	Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.PER. 15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.PER.04/MEN/IV/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.15/MEN/X/2010
9.	Pendidikan	Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 15/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
10.	Pekerjaan Umum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No.14/PRT/M/2010 Tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Ketahanan Pangan	Peraturan Menteri Pertanian RI No.65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
12.	Kesenian	Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI No.PM.106/HK.501/MKP/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian
13.	Komunikasi dan Informasi	Peraturan Menteri Kemkominfo RI No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2013



Tabel II.11 Data Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Menerapkan PTSP Tahun 2012 - 2013

Provinsi	Total (Prov-Kab-Kota) 2012	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2012					Total Pemda 2013	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%		Prov	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	18	5	24	100	24	1	18	5	24	100
Sumatera Utara	34	1	20	8	29	85	34	1	24	8	33	97
Sumatera Barat	20	0	11	7	18	90	20	0	12	7	19	95
Riau	13	1	10	2	13	100	13	1	10	2	13	100
Jambi	12	1	9	2	12	100	12	1	9	2	12	100
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100	17	1	11	4	16	94
Bengkulu	11	1	9	1	11	100	11	1	9	1	11	100
Lampung	15	1	12	2	15	100	16	1	12	2	15	94
Bangka Belitung	8	0	6	1	7	88	8	0	6	1	7	88
Kepulauan Riau	8	0	2	2	4	50	8	0	3	2	5	63
DKI Jakarta	7	1	0	5	6	86	7	1	0	5	6	86
Jawa Barat	27	1	16	9	26	96	28	1	17	9	27	96
Jawa Tengah	36	0	29	6	35	97	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100	39	1	29	9	39	100
Banten	9	0	4	4	8	89	9	1	4	4	9	100
Bali	10	1	8	1	10	100	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	0	7	2	9	82	11	1	7	2	10	91
Nusa Tenggara Timur	22	1	17	1	19	86	23	1	19	1	21	91
Kalimantan Barat	15	0	10	2	12	80	15	1	11	2	14	93
Kalimantan Tengah	15	0	13	1	14	93	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	14	100	14	1	11	2	14	100



Lanjutan Tabel II.11

Provinsi	Total (Prov-Kab-Kota) 2012	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2012					Total Pemda 2013	Daerah yang Sudah Menerapkan PTSP 2013				
		Prov	Kab	Kota	Total	%		Prov	Kab	Kota	Total	%
Kalimantan Timur	15	1	9	4	14	93	11*	1*	10*	4*	15	
Sulawesi Utara	16	1	11	4	16	100	16	1	11	4	16	100
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92	13	1	9	1	11	85
Sulawesi Selatan	25	0	19	3	22	88	25	0	19	3	22	88
Sulawesi Tenggara	13	0	9	2	11	85	14	1	9	2	12	86
Gorontalo	7	0	4	1	5	71	7	1	5	1	7	100
Sulawesi Barat	6	0	3	0	3	50	7	1	3	0	4	57
Maluku	12	0	2	2	4	33	12	0	4	2	6	50
Maluku Utara	10	0	1	1	2	20	11	0	1	1	2	18
Papua	30	1	5	1	7	23	30	1	6	1	8	27
Papua Barat	12	0	2	0	2	17	14	0	2	0	2	14
Kalimantan Utara**							6					
Total		18	330	96				26	345	96		
Total	530				444	84%	542				467	86%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2013

Catatan :

*Untuk Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat dihitung persentasenya karena pada tahun 2013 Kalimantan Timur sudah dimekarkan menjadi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sementara data yang tersedia adalah data jumlah daerah yang sudah melaksanakan PTSP sebelum Provinsi Kalimantan Timur dimekarkan (15 daerah).

** Provinsi Kalimantan Utara belum tersedia datanya.



Tabel II.12 Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Menerapkan e-Government Tahun 2012

No.	Jenis Lembaga Negara	Jumlah	Lembaga Pusat yang menerapkan e-Gov 2012	
			e-Gov 2012	%
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7	5	71%
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	4	1	25%
3.	Kementerian	34	31	91%
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	27	27	100%
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	5	5	100%
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2	2	100%
7.	Lembaga Non Struktural	89	87	98%
Total Lembaga		168	158	94%

Sumber : Kemenpan RB, 2013

Tabel II.13 Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Website Tahun 2012

Provinsi	Total Pemda 2012	Daerah yang Sudah Memiliki Website 2012				
		Prov.	Kab	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	16	5	22	92
Sumatera Utara	34	1	20	6	27	79
Sumatera Barat	20	1	11	7	19	95
Riau	13	1	9	2	12	92
Jambi	12	1	9	2	12	100
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100
Bengkulu	11	1	8	1	10	91
Lampung	15	1	11	2	14	93
Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100
DKI Jakarta*	6	1		5	6	86
Jawa Barat	27	1	17	9	27	100



Lanjutan Tabel II.13

Provinsi	Total Pemda 2012	Daerah yang Sudah Memiliki Website 2012				
		Prov	Kab	Kota	Total	%
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100
Banten	9	1	4	4	9	100
Bali	10	1	8	1	10	100
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	11	100
Nusa Tenggara Timur	22	1	16	1	18	82
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100
Kalimantan Selatan	14	1	11	2	14	100
Kalimantan Timur	15	1	7	4	12	80
Sulawesi Utara	16	1	8	4	13	81
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92
Sulawesi Selatan	25	1	20	3	24	96
Sulawesi Tenggara	13	1	5	2	8	62
Gorontalo	7	1	3	1	5	71
Sulawesi Barat	6	1	4		5	83
Maluku	12	1	3	1	5	42
Maluku Utara	10	1	5	2	8	80
Papua	30	1	18		19	63
Papua Barat	12	1	7	1	9	75
Kalimantan Utara**						
Total						
Total	530				473	89

Sumber : Kementerian PAN dan RB, diolah, 2013



Tabel II.14 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013

No.	Jenis Lembaga Negara	Jumlah	Lembaga Pusat yang Melaksanakan LPSE 2013	
			LPSE 2013	%
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	7	5	71%
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	4		0%
3.	Kementerian	34	27	79%
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	27	15	56%
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	5	4	80%
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya	2		0%
7.	Lembaga Non Struktural	89	2	2%
Total Lembaga		168	53	32%

Sumber : LKPP, diolah, 2013

Tabel II.15 Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Melaksanakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Tahun 2013

Provinsi	Jumlah Daerah	Daerah yang Sudah Melaksanakan LPSE 2013				
	Total (Prov-Kab-Kota)	Prov.	Kab.	Kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	18	5	24	100%
Sumatera Utara	34	1	25	8	34	100%
Sumatera Barat	20	1	12	7	20	100%
Riau	13	1	10	2	13	100%
Jambi	12	1	9	2	12	100%
Sumatera Selatan	16	1	11	4	16	100%
Bengkulu	11	1	9	1	11	100%
Lampung	15	1	12	1	14	93%



Lanjutan Tabel II.15

Provinsi	Jumlah Daerah	Daerah yang Sudah Melaksanakan LPSE 2013				
	Total (Prov-Kab-Kota)	Prov.	Kab	Kota	Total	%
Bangka Belitung	8	1	6	1	8	100%
Kepulauan Riau	8	1	5	2	8	100%
DKI Jakarta*	7	1				100%
Jawa Barat	27	1	16	9	26	96%
Jawa Tengah	36	1	29	6	36	100%
DI Yogyakarta	6	1	4	1	6	100%
Jawa Timur	39	1	29	9	39	100%
Banten	9	1	4	4	9	100%
Bali	10	1	8	1	10	100%
Nusa Tenggara Barat	11	1	8	2	11	100%
Nusa Tenggara Timur	22	1	13	1	15	68%
Kalimantan Barat	15	1	12	2	15	100%
Kalimantan Tengah	15	1	13	1	15	100%
Kalimantan Selatan	14	1	12	1	14	100%
Kalimantan Timur	15	1	10	4	15	100%
Sulawesi Utara	16	1	9	4	14	88%
Sulawesi Tengah	12	1	9	1	11	92%
Sulawesi Selatan	25	1	20	3	24	96%
Sulawesi Tenggara	13	1	10	2	13	100%
Gorontalo	7	1	5	1	7	100%
Sulawesi Barat	6	1	4		5	83%



Lanjutan Tabel II.15

Provinsi	Jumlah Daerah	Daerah yang Sudah Melaksanakan LPSE 2013				
	Total (Prov-Kab-Kota)	Prov.	Kab	Kota	Total	%
Maluku	12	1	2		3	25%
Maluku Utara	10	1	3	1	5	50%
Papua	30	1	3	1	5	17%
Papua Barat	12	1	3		4	33%
Total	530				463	88%

Sumber : LKPP, diolah, 2013

Catatan : LPSE Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di provinsi DKI Jakarta tidak melaksanakan LPSE.

Tabel II.16 Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Mengenai SPIP Tahun 2010 – 2012

No.	Kementerian / Lembaga	Peraturan Menteri / Kepala Lembaga Tahun 2010 -2011	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2012
Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara			
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2 Tahun 2010	
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	01A/PER-SEKJEN/2010	
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	23/K/I-XIII.2/11/2011	
4.	Mahkamah Agung	151A/KMA/SK/IX/2011	
5.	Mahkamah Konstitusi	10 Tahun 2011	
6.	Dewan Perwakilan Daerah	-	Peraturan No 03/2012
Lembaga Negara yang Diatur dalam UUD 1945 dan UU			
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi	-	06 Tahun 2012
2.	Ombusman Republik Indonesia	-	11 Tahun 2012
3.	Komisi Yudisial	2 Tahun 2011	



Lanjutan Tabel II.16

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2010 -2011	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2012
Kementerian			
1.	Kementerian Sekretariat Negara		No.11 Tahun 2012
2.	Kementerian Dalam Negeri	40 Tahun 2010	
3.	Kementerian Luar Negeri	12 Tahun 2011	
4.	Kementerian Pertahanan	21 tahun 2010	
5.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	M.HH-02.PW.02.03 Thn 2011	
6.	Kementerian Keuangan	152/KMK.09/2011	
7.	Kementerian Pertanian	23/Permentan/OT.140/5/2009	
8.	Kementerian Perindustrian	199/M-IND/4/2011	
9.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	17 TAHUN 2011	
10.	Kementerian Perhubungan	PM 78 Tahun 2011	
11.	Kementerian Pendidikan Nasional	Permen Nomor 47 Tahun 2011	
12.	Kementerian Kesehatan	238/Menkes/SK/IV/2009	
13.	Kementerian Agama	24 tahun 2011	
14.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PER.19/MEN/XII/2011	
15.	Kementerian Sosial	91 Tahun 2011	
16.	Kementerian Kehutanan	P.27/Menhut-II/2010	
17.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PER.20/MEN/2011 2011	
18.	Kementerian Pekerjaan Umum	02/IN/M/2011	
19.	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	PER-06/MENKO/POLHUKAM/11/2011	
20.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	-	13/M.Ekon/09/2012
21.	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	05 Tahun 2011	05 Tahun 2011



Lanjutan Tabel II.16

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2010 -2011	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2012
22.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	PM.97/UM.001/MPEK/2011	
23.	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	-	14/MBU/2012
24.	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	06/M/PER/XII/2011	
25.	Kementerian Lingkungan Hidup	114 Tahun 2011	
26.	Kementerian Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	12/Per/M.KUKM/XII/2011	
27.	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	Permen Nomor 9 Tahun 2012
28.	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	-	Permen Nomor 10 Tahun 2012 dan 12 Tahun 2012
29.	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	5 Tahun 2011	
30.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	26/PER/M.KOMINFO/12/2011	
31.	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	10 Tahun 2011	
32.	Kementerian Perdagangan	970/M-DAG/KEP/9/2011	
33.	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	22 tahun 2011	
34.	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	-	0022 Tahun 2012
Lembaga yang dipimpin Setingkat Menteri			
1.	Kejaksaan Agung	KEP-255/A/JA/12/2011	
2.	Badan Intelijen Negara	-	02 Tahun 2012
3.	Kepolisian RI	Kep-696/XII/2011	
4.	Sekretariat Kabinet	-	8 Tahun 2012



Lanjutan Tabel II.16

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2010 -2011	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2012
Lembaga Pemerintah Non Kementerian			
1.	Lembaga Sandi Negara	-	5 Tahun 2012
2.	Badan Pusat Statistik	26 Tahun 2011	
3.	Badan Pertanahan Nasional	18 Tahun 2010	
4.	Perpustakaan Nasional	-	No.4 Tahun 2012
5.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	HK.04.1.23.08.11.07430 Tahun 2011	
6.	Lembaga Ketahanan Nasional	-	04 Tahun 2012
7.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Perka BKPM No. 4 Tahun 2012
8.	Badan Narkotika Nasional	-	12 TAHUN 2012
9.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	173/PER/B3/2011	
10.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	KEP.03 Tahun 2011	
11.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1012/A/2011	
12.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	201/KA/XI/2011	
13.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	347 Tahun 2011	
14.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	367 Tahun 2011	
15.	Badan Standarisasi Nasional	13 Tahun 2011	
16.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	11 Tahun 2011	
17.	Lembaga Administrasi Negara	19 Tahun 2011	
18.	Arsip Nasional Republik Indonesia	10 Tahun 2011	
19.	Badan Kepegawaian Negara	175.11.KEP/2011	
20.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	KEP-882/K/SU/201	



Lanjutan Tabel II.16

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2010 -2011	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2012
21.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	203 tahun 2011	
22.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	PER.15/KA/XII/2011	
23.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Tahun 2011	
24.	Basarnas	PK.16 Tahun 2011	
25.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	-	PER-03/K.BNPT/9/2012
Lembaga Pemerintah Lainnya			
1.	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia		Peraturan Nomor 3/2012
2.	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia		97/PRTR/DIREKSI/TVRI/2012
Lembaga Non Struktural			
1.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	-	050/PRT/P/2012
2.	Dewan Ketahanan Nasional	-	Kep-87/Sesjen/XII/2012
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	-	002/TUA/X/2012
4.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	-	4 Tahun 2012
5.	Otorita Batam	-	12 TAHUN 2012
6.	Komisi Pemilihan Umum		No. 17 Tahun 2012
7.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	-	PER-12/1.01/PPATK/09/12
8.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	-	2 Tahun 2012
9.	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu		35/PER/BP-BPWS/IX/2012



Lanjutan Tabel II.16

No.	Kementerian /Lembaga	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2010 -2011	Peraturan Kepala Kementerian/Lembaga Tahun 2012
10.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	181.1.Tahun 2011	
11.	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan		8 Tahun 2012
12.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang		09/BPKS/2012

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2013

Tabel II.17 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Pemerintah Pusat yang Telah Memiliki Peraturan Kepala K/L Mengenai SPIP Tahun 2010 – 2012

No.	Jenis Lembaga Negara	2010 - 2011	2012
1.	Lembaga Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara	5	6
2.	Lembaga Negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang	1	3
3.	Kementerian	28	34
4.	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	19	25
5.	Lembaga yang dipimpin Pejabat Setingkat Menteri	2	4
6.	Lembaga Pemerintah Lainnya		2
7.	Lembaga Non Struktural	1	13
Total		56	87

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2013



Tabel II.18 Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2009 – 2012

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
1.	1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Pergub Nomor 09 Tahun 2010
2.	2. Kab. Aceh Barat	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
3.	3. Kab. Aceh Besar	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
4.	4. Kab. Aceh Selatan	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
5.	5. Kab. Aceh Singkil	Perbup Nomor 20 Tahun 2011
6.	6. Kab. Aceh Tengah	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
7.	7. Kab. Aceh Tenggara	Perbup Nomor 117 Tahun 2010
8.	8. Kab. Aceh Timur	Perbup Nomor 9 Tahun 2011
9.	9. Kab. Aceh Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
10.	10. Kab. Bireun	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
11.	11. Kab. Pidie	Perbup Nomor 3 Tahun 2010
12.	12. Kab. Simeulue	Perbup Nomor 10 Tahun 2011
13.	13. Kota Banda Aceh	Perwali Nomor 21 Tahun 2010
14.	14. Kota Sabang	Perwali Nomor 21 Tahun 2010
15.	15. Kota Langsa	Perwali Nomor 40 Tahun 2010
16.	16. Kota Lhokseumawe	Perwali Nomor 06 Tahun 2011
17.	17. Kab. Nagan Raya	Perbup Nomor 3 Tahun 2011
18.	18. Kab. Aceh Jaya	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
19.	19. Kab. Aceh Barat Daya	Perbup Nomor 16 Tahun 2011
20.	20. Kab. Gayo Lues	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
21.	21. Kab. Aceh Tamiang	Perbup Nomor 9 Tahun 2011
22.	22. Kab. Bener Meriah	Perbup Nomor 32 Tahun 2010
23.	23. Kota Subulussalam	Perwali Nomor 19 Tahun 2010
24.	24. Kab. Pidie Jaya	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
25.	1. Provinsi Sumatera Utara	Pergub Nomor 33/2011
26.	2. Kab. Asahan	Perbup Nomor 24 Tahun 2011
27.	3. Kab. Dairi	Perbup Nomor 06/2011
28.	4. Kab. Deli Serdang	Perbup Nomor 495/2011
29.	5. Kab. Tanah Karo	Perbup Nomor 05/2010
30.	6. Kab. Labuhan Batu	Perbup Nomor 58 Tahun 2011
31.	7. Kab. Langkat	Perbup Nomor 19 Tahun 2011
32.	8. Kab. Mandailing Natal	Perbup Nomor 57/2011
33.	9. Kab. Nias	Perbup Nomor 19 Tahun 2011
34.	10. Kab. Simalungun	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
35.	11. Kab. Tapanuli Selatan	Perbup Nomor 49/PR/2011
36.	12. Kab. Tapanuli Tengah	Perbup Nomor 04 Tahun 2010
37.	13. Kab. Tapanuli Utara	Perbup Nomor 04 Tahun 2010
38.	14. Kab. Toba Samosir	Perbup Nomor 37 Tahun 2011
39.	15. Kota Binjai	Perwali Nomor 061-4724/2010
40.	16. Kota Medan	Perwali Nomor 23/2011
41.	17. Kota Pematang Siantar	Perwali Nomor 12 Tahun 2011
42.	18. Kota Sibolga	Perwali Nomor 180/15/2011
43.	19. Kota Tanjung Balai	Perwali Nomor 13/2010
44.	20. Kota Tebing Tinggi	Perwali Nomor 07/2011
45.	21. Kota Padang Sidempuan	Perwali Nomor 16.B/PW/2010
46.	22. Kab. Pakpak Bharat	Perbup Nomor 7 Tahun 2011



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
47.	23.	Kab. Nias Selatan	Perbup Nomor 09 Tahun 2011
48.	24.	Kab. Humbang Hasundutan	Perbup Nomor 13/2010
49.	25.	Kab. Serdang Berdagai	Perbup Nomor 34 Tahun 2011
50.	26.	Kab. Samosir	Perbup Nomor 3/2011
51.	27.	cab. Batu bara	Perbup Nomor 12/2011
52.	28.	Kab. Labuhan Batu Utara	Perbup Nomor 06/2011
53.	29.	Kab. Labuhan Batu Selatan	Perbup Nomor 15/2011
54.	30.	Kab. Padang Lawas Utara	Perbup Nomor 08/2011
55.	31.	Kab. Padang Lawas	Perbup Nomor 08 Tahun 2010
56.	32.	Kab Nias Utara	Perbup Nomor 13/2011
57.	33.	Kab Nias Barat	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
58.	34.	Kota Gunung Sitoli	Perwali Nomor 7/2011
59.	1.	Provinsi Sumatera Barat	Pergub Nomor 40 Tahun 2009
60.	2.	Kab. Limapuluh Kota	Pergub Nomor 1 Tahun 2012
61.	3.	Kab. Agam	Pergub Nomor 04 Tahun 2012
62.	4.	Kab. Kepulauan Mentawai	Pergub Nomor 01 Tahun 2012
63.	5.	Kab. Padang Pariaman	Pergub Nomor 14 Tahun 2011
64.	6.	Kab. Pasaman	Perbup Nomor 18 Tahun 2010
65.	7.	Kab. Sijunjung	Perbup Nomor 8 Tahun 2011
66.	8.	Kab. Solok	Perbup Nomor 38 Tahun 2011
67.	9.	Kab. Pesisir Selatan	Pergub Nomor 162 Tahun 2011
68.	10.	Kab. Tanah Datar	Perbup Nomor 68 Tahun 2009
69.	11.	Kota Bukit Tinggi	Perwali Nomor 18 Tahun 2010
70.	12.	Kota Padang Panjang	Perwali Nomor 16 Tahun 2011
71.	13.	Kota Padang	Perwali Nomor 37 Tahun 2011
72.	14.	Kota Payakumbuh	Perwali Nomor 6 Tahun 2011
73.	15.	Kota Sawahlunto	Perwali Nomor 67 Tahun 2010
74.	16.	Kota Solok	Perwali Nomor 6 Tahun 2011
75.	17.	Kota Pariaman	Perwali Nomor 67 Tahun 2010
76.	18.	Kab. Pasaman Barat	Pergub Nomor 28 Tahun 2011
77.	19.	Kab. Dharmasraya	Pergub Nomor 11 Tahun 2012
78.	20.	Kab. Solok Selatan	Pergub Nomor 29 Tahun 2011
79.	1.	Provinsi Riau	Pergub Nomor 31 Tahun 2010
80.	2.	Kab. Bengkalis	Perbup Nomor 340/KPTS/XII/2010
81.	3.	Kab. Indragiri Hilir	Pergub Nomor 18 Tahun 2010
82.	4.	Kab. Indragiri Hulu	Perbup Nomor 36 Tahun 2010
83.	5.	Kab. Kampar	Perbup Nomor 28 Tahun 2010
84.	6.	Kab. Kuantan Singingi	Pergub Nomor 8 Tahun 2012
85.	7.	Kab. Pelalawan	Pergub Nomor 15 Tahun 2011
86.	8.	Kab. Rokan Hilir	Perbup Nomor 26 Tahun 2009
87.	9.	Kab. Rokan Hulu	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
88.	10.	Kab. Siak	Perbup Nomor 31 Tahun 2011
89.	11.	Kota Dumai	Perwali Nomor 23 Tahun 2010
90.	12.	Kota Pekanbaru	Perwali Nomor 24 Tahun 2010
91.	13.	Kab Kep. Meranti	Perbup Nomor 52 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
92.	1.	Provinsi Kepulauan Riau	Pergub Nomor 16 Tahun 2010
93.	2.	Kab. Bintan	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
94.	3.	Kab. Natuna	Pergub Nomor 19 tahun 2011
95.	4.	Kab. Karimun	Pergub Nomor 13 tahun 2011
96.	5.	Kota Batam	Perwali 10 tahun 2011
97.	6.	Kota Tanjung Pinang	Perwali Nomor 31 Tahun 2011
98.	7.	Kab. Lingga	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
99.	8.	Kab. Kepulauan Anambas	Perbup Nomor 15 Tahun 2011
100.	1.	Provinsi Jambi	Pergub Nomor 47 Tahun 2011
101.	2.	Kab. Batanghari	Perbup Nomor 26 Tahun 2012
102.	3.	Kab. Bungo	Perbup Nomor 3 Tahun 2011
103.	4.	Kab. Kerinci	Perbup Nomor 23 Tahun 2011
104.	5.	Kab. Merangin	Perbup Nomor 28 Tahun 2010
105.	6.	Kab. Muaro Jambi	Pergub Nomor 19 Tahun 2012
106.	7.	Kab. Sarolangun	Pergub Nomor 19 Tahun 2012
107.	8.	Kab. Tanjung Jabung Barat	Pergub Nomor 30 Tahun 2011
108.	9.	Kab. Tanjung Jabung Timur	Perbup Nomor 15 Tahun 2010,
109.	10.	Kab. Tebo	Perbup Nomor 14 Tahun 2012
110.	11.	Kota Jambi	Perbup Nomor 17 Tahun 2012
111.	12.	Kota Sungai Penuh	Perwali Nomor 22 Tahun 2010.
112.	1.	Provinsi Sumatera Selatan	Pergub Nomor 51 Tahun 2010
113.	2.	Kab. Lahat	Perbup Nomor 1 Tahun 2011
114.	3.	Kab. Musi Banyuasin	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
115.	4.	Kab. Musi Rawas	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
116.	5.	Kab. Muara Enim	Perbup Nomor 42 Tahun 2010
117.	6.	Kab. Ogan Komering Ilir	Perbup Nomor 2 Tahun 2011
118.	7.	Kab. Ogan Komering Ulu	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
119.	8.	Kota Palembang	Perwali Nomor 46 Tahun 2010
120.	9.	Kota Pagar Alam	Perwali Nomor 2 Tahun 2011
121.	10.	Kota Lubuk Linggau	Perwali Nomor 19 Tahun 2010
122.	11.	Kota Prabumulih	Perwali Nomor 2 Tahun 2011
123.	12.	Kab. Banyuasin	Perbup Nomor 633 Tahun 2010
124.	13.	Kab. Ogan Ilir	Perbup Nomor 3 Tahun 2011
125.	14.	Kab. OKU Timur	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
126.	15.	Kab. OKU Selatan	Perbup Nomor 15 Tahun 2012
127.	16.	Kab. Empat lawang	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
128.	1.	Provinsi Bengkulu	Pergub Nomor 9 Tahun 2010
129.	2.	Kab. Bengkulu Selatan	Perbup Nomor 19 Tahun 2009
130.	3.	Kab. Bengkulu Utara	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
131.	4.	Kab. Rejang Lebong	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
132.	5.	Kota Bengkulu	Perwali Nomor 30 Tahun 2009
133.	6.	Kab. Kaur	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
134.	7.	Kab. Seluma	Perbup Nomor 11 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
135.	8.	Kab. Mukomuko	Perbup Nomor 8 Tahun 2010
136.	9.	Kab. Lebong	Perbup Nomor 367 Tahun 2010
137.	10.	Kab. Kepahiang	Perbup Nomor 07 Tahun 2010
138.	11.	Kab. Bengkulu Tengah	Perbup Nomor 29 Tahun 2010
139.	1.	Provinsi Lampung	Pergub Nomor 12 Tahun 2010
140.	2.	Kab. Lampung Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
141.	3.	Kab. Lampung Selatan	Perbup Nomor 3 Tahun 2010
142.	4.	Kab. Lampung Tengah	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
143.	5.	Kab. Lampung Utara	Perbup Nomor 6 Tahun 2010
144.	6.	Kab. Lampung Timur	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
145.	7.	Kab. Tanggamus	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
146.	8.	Kab. Tulang Bawang	Perbup Nomor 6 Tahun 2010
147.	9.	Kab. Way Kanan	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
148.	10.	Kota Bandar Lampung	Perwali Nomor 22 Tahun 2010
149.	11.	Kota Metro	Perwali Nomor 4 Tahun 2010
150.	12.	Kab. Pesawaran	Perbup Nomor 2 Tahun 2010
151.	13.	Kab Tulang Bawang Barat	Perbup Nomor 4 Tahun 2010
152.	14.	Kab Mesuji	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
153.	15.	Kab Pringsewu	Perbup Nomor 6 Tahun 2010
154.	1.	Provinsi DKI Jakarta	Pergub Nomor 171 Tahun 2010
155.	1.	Provinsi Jawa Barat	Pergub Nomor 10 Tahun 2011
156.	2.	Kab. Bandung	Perbup Nomor 30 Tahun 2011
157.	3.	Kab. Bekasi	Perbup Nomor 35 Tahun 2011
158.	4.	Kab. Bogor	Perbup Nomor 49 Tahun 2011
159.	5.	Kab. Ciamis	Perbup Nomor 20 Tahun 2011 11
160.	6.	Kab. Cianjur	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
161.	7.	Kab. Cirebon	Perbup Nomor 14 Tahun 2011
162.	8.	Kab. Garut	Perbup Nomor 504 Tahun 2011
163.	9.	Kab. Indramayu	Perbup Nomor 15B Tahun 2011
164.	10.	Kab. Karawang	Perbup Nomor 43 Tahun 2010
165.	11.	Kab. Kuningan	Perbup Nomor 04 Tahun 2012
166.	12.	Kab. Majalengka	Perbup Nomor 15 Tahun 2012
167.	13.	Kab. Purwakarta	Perbup Nomor 28 Tahun 2011
168.	14.	Kab. Subang	Perbup Nomor 25 tahun 2011
169.	15.	Kab. Sukabumi	Perbup Nomor 24 Tahun 2010
170.	16.	Kab. Sumedang	Perbup Nomor 42 Tahun 2011
171.	17.	Kab. Tasikmalaya	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
172.	18.	Kota Bandung	Perwali Nomor 944 Tahun 2010
173.	19.	Kota Bekasi	Perwali Nomor 30 Tahun 2010
174.	20.	Kota Bogor	Perwali Nomor 2 Tahun 2011
175.	21.	Kota Cirebon	Perwali Nomor 12 September 2011
176.	22.	Kota Depok	Perwali Nomor 49 Tahun 2010
177.	23.	Kota Sukabumi	Perwali Nomor 16 Tahun 2011
178.	24.	Kota Cimahi	Perwali Nomor 20 Tahun 2011
179.	25.	Kota Tasikmalaya	Perwali Nomor 32 Tahun 2011



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
180.	26.	Kota Banjar	Perwali Nomor 22 Tahun 2011
181.	27.	Kab. Bandung Barat	Perbup Nomor 30 Tahun 2010
182.	1.	Provinsi Banten	Pergub Nomor 26 Tahun 2010
183.	2.	Kab. Lebak	34 Tahun 2011
184.	3.	Kab. Pandeglang	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
185.	4.	Kab. Serang	Perbup Nomor 45 Tahun 2010
186.	5.	Kab. Tangerang	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
187.	6.	Kota Cilegon	Perwali Nomor 4 Tahun 2012
188.	7.	Kota Tangerang	Perwali Nomor 41 Tahun 2010
189.	8.	Kota Serang	Perwali Nomor 22 Tahun 2011
190.	9.	Kota Tangerang Selatan	Perwali Nomor 69 Tahun 2011
191.	1.	Provinsi Jawa Tengah	Pergub Nomor 89 Tahun 2010
192.	2.	Kab. Banjarnegara	Perbup Nomor 351 Tahun 2010
193.	3.	Kab. Banyumas	Perbup Nomor 64 Tahun 2010
194.	4.	Kab. Batang	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
195.	5.	Kab. Blora	Perbup Nomor 84 Tahun 2010
196.	6.	Kab. Boyolali	Perbup Nomor 19 Tahun 2009
197.	7.	Kab. Brebes	Perbup Nomor 023.A Tahun 2010
198.	8.	Kab. Cilacap	Perbup Nomor 71 Tahun 2010
199.	9.	Kab. Demak	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
200.	10.	Kab. Grobogan	Perbup Nomor 15 Tahun 2011
201.	11.	Kab. Jepara	Perbup Nomor 37 Tahun 2009
202.	12.	Kab. Karanganyar	Perbup Nomor 18 Tahun 2010
203.	13.	Kab. Kebumen	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
204.	14.	Kab. Kendal	Perbup Nomor 36 Tahun 2010
205.	15.	Kab. Klaten	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
206.	16.	Kab. Kudus	Perbup Nomor 23 Tahun 2012
207.	17.	Kab. Magelang	Perbup Nomor 31 Tahun 2011
208.	18.	Kab. Pati	Perbup Nomor 12 Tahun 2011
209.	19.	Kab. Pekalongan	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
210.	20.	Kab. Pemasang	Perbup Nomor 69 Tahun 2007
211.	21.	Kab. Purbalingga	Perbup Nomor 88 Tahun 2011
212.	22.	Kab. Purworejo	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
213.	23.	Kab. Rembang	Perbup Nomor 21 Tahun 2011
214.	24.	Kab. Semarang	Perbup Nomor 74 Tahun 2011
215.	25.	Kab. Sragen	Perbup Nomor 79 Tahun 2009
216.	26.	Kab. Sukoharjo	Perbup Nomor 54 Tahun 2010
217.	27.	Kab. Tegal	Perbup Nomor 43 Tahun 2010
218.	28.	Kab. Temanggung	Perbup Nomor 59 Tahun 2010
219.	29.	Kab. Wonogiri	Perbup Nomor 23 Tahun 2011
220.	30.	Kab. Wonosobo	Perbup Nomor 37 Tahun 2010
221.	31.	Kota Magelang	Perwali Nomor 14 Tahun 2011
222.	32.	Kota Pekalongan	Perwali Nomor 10 Tahun 2010
223.	33.	Kota Salatiga	Perwali Nomor 34 Tahun 2011
224.	34.	Kota Semarang	Perwali Nomor 24 Tahun 2010
225.	35.	Kota Surakarta	Perwali Nomor 20 Tahun 2009
226.	36.	Kota Tegal	Perwali Nomor 02 Tahun 2011



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
227.	1.	Provinsi DI Yogyakarta	Pergub Nomor 52 Tahun 2010
228.	2.	Kab. Bantul	Perbup Nomor 10 Tahun 2011
229.	3.	Kab. Gunung Kidul	Perbup Nomor 6 Tahun 2011
230.	4.	Kab. Kulon Progo	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
231.	5.	Kab. Sleman	Perbup Nomor 35 Tahun 2010
232.	6.	Kota Yogyakarta	Perwali Nomor 61 Tahun 2010
233.	1.	Provinsi Jawa Timur	Pergub Nomor 66 thn 2010
234.	2.	Kab. Bangkalan	Perbup Nomor 29 thn 2010
235.	3.	Kab. Banyuwangi	Perbup Nomor 31 thn 2010
236.	4.	Kab. Blitar	Perbup Nomor 26 thn 2010
237.	5.	Kab. Bojonegoro	Perbup Nomor 41 thn 2010
238.	6.	Kab. Bondowoso	Perbup Nomor 18 thn 2010
239.	7.	Kab. Gresik	Perbup Nomor 36 th 2010
240.	8.	Kab. Jember	Perbup Nomor 22 thn 2010
241.	9.	Kab. Jombang	Perbup Nomor 10 thn 2010
242.	10.	Kab. Kediri	Perbup Nomor 26 thn 2010
243.	11.	Kab. Lamongan	Perbup Nomor 39 Tahun 2010
244.	12.	Kab. Lumajang	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
245.	13.	Kab. Madiun	Perbup Nomor 26 thn 2010
246.	14.	Kab. Magetan	Perbup Nomor 46 thn 2010
247.	15.	Kab. Malang	Perbup Nomor 21 Tahun 2010
248.	16.	Kab. Mojokerto	Perbup Nomor 52 Tahun 2010
249.	17.	Kab. Nganjuk	Perbup Nomor 38 Tahun 2010
250.	18.	Kab. Ngawi	Perbup Nomor 269 Tahun 2010
251.	19.	Kab. Pacitan	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
252.	20.	Kab. Pamekasan	Perbup Nomor 37 A thn 2010
253.	21.	Kab. Pasuruan	Perbup Nomor 32 Tahun 2010
254.	22.	Kab. Ponorogo	Perbup Nomor 30 thn 2010
255.	23.	Kab. Probolinggo	Perbup Nomor 22 Tahun 2010
256.	24.	Kab. Sampang	Perbup Nomor 23 th 2010
257.	25.	Kab. Sidoarjo	Perbup Nomor 23 Tahun 2010
258.	26.	Kab. Situbondo	Perbup Nomor 25 thn 2010
259.	27.	Kab. Sumenep	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
260.	28.	Kab. Trenggalek	Perbup Nomor 72 Tahun 2010
261.	29.	Kab. Tuban	Perbup Nomor 21 thn 2010
262.	30.	Kab. Tulungagung	Perbup Nomor 43 thn 2009
263.	31.	Kota Blitar	Perwali Nomor 18 thn 2010
264.	32.	Kota Kediri	Perwali Nomor 37 thn 2010
265.	33.	Kota Madiun	Perwali Nomor 23 Tahun 2010
266.	34.	Kota Malang	Perwali Nomor 39 thn 2010
267.	35.	Kota Mojokerto	Perwali Nomor 52 thn 2010
268.	36.	Kota Pasuruan	Perwali Nomor 11 Tahun 2011
269.	37.	Kota Probolinggo	Perwali Nomor 32 th 2010
270.	38.	Kota Surabaya	Perwali Nomor 51 th 2010
271.	39.	Kota Batu	Perwali Nomor 33 thn 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
272.	1.	Provinsi Kalimantan Barat	Pergub Nomor 30 Tahun 2010
273.	2.	Kab. Bengkayang	Perbup Nomor 28 Tahun 2010
274.	3.	Kab. Landak	Perbup Nomor 08 Tahun 2010
275.	4.	Kab. Kapuas Hulu	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
276.	5.	Kab. Ketapang	Perbup Nomor 17 Tahun 2010
277.	6.	Kab. Pontianak	Perbup Nomor 22 Tahun 2010
278.	7.	Kab. Sambas	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
279.	8.	Kab. Sanggau	Perbup Nomor 27 Tahun 2010
280.	9.	Kab. Sintang	Perbup Nomor 135 Tahun 2010
281.	10.	Kota Pontianak	Perwali Nomor 06 Tahun 2010
282.	11.	Kota Singkawang	Perwali Nomor 25 Tahun 2010
283.	12.	Kab. Sekadau	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
284.	13.	Kab. Melawi	Perbup Nomor 30 Tahun 2010
285.	14.	Kab. Kayong Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
286.	15.	Kab. Kubu Raya	Perbup Nomor 46 Tahun 2010
287.	1.	Provinsi Kalimantan Tengah	Pergub Nomor 41 Tahun 2009
288.	2.	Kab. Barito Selatan	Perbup Nomor 11 Tahun 2011
289.	3.	Kab. Barito Utara	Perbup Nomor 18 Tahun 2010
290.	4.	Kab. Kapuas	Perbup Nomor 15 Tahun 2010
291.	5.	Kab. Kotawaringin Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2011
292.	6.	Kab. Kotawaringin Timur	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
293.	7.	Kota Palangkaraya	Perbup Nomor 53 Tahun 2010
294.	8.	Kab. Barito Timur	Perbup Nomor 81 Tahun 2010
295.	9.	Kab. Murung Raya	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
296.	10.	Kab. Pulang Pisau	Perbup Nomor 09 Tahun 2010
297.	11.	Kab. Gunung Mas	Perbup Nomor 25 Tahun 2009
298.	12.	Kab. Lamandau	Perbup Nomor 17 Tahun 2011
299.	13.	Kab. Sukamara	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
300.	14.	Kab. Katingan	Perbup Nomor 24 Tahun 2010
301.	15.	Kab. Seruyan	Perbup Nomor 14 Tahun 2011
302.	1.	Provinsi Kalimantan Selatan	Pergub No.22 Tahun 2010
303.	2.	Kab. Banjar	Perbup No.18 Tahun 2010
304.	3.	Kab. Barito Kuala	Perbup No.12 Tahun 2010
305.	4.	Kab. Hulu Sungai Selatan	Perbup No.14 Tahun 2010
306.	5.	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perbup Nomor 1 Tahun 2011
307.	6.	Kab. Hulu Sungai Utara	Perbup No.11 Tahun 2010
308.	7.	Kab. Kota Baru	Perbup No.31 Tahun 2010
309.	8.	Kab. Tabalong	Perbup No.18 Tahun 2010
310.	9.	Kab. Tanah Laut	Perbup No.69 Tahun 2010
311.	10.	Kab. Tapin	Perbup No.09 Tahun 2010
312.	11.	Kota Banjarbaru	Perwali Nomor 2 Tahun 2011
313.	12.	Kota Banjarmasin	Perwali Nomor 28 Tahun 2010
314.	13.	Kab. Balangan	Perbup No.22 Tahun 2010
315.	14.	Kab. Tanah Bumbu	Perbup No.18 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
316.	1.	Provinsi Kalimantan Timur	Pergub Nomor 89 Tahun 2009
317.	2.	Kab. Berau	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
318.	3.	Kab. Bulungan	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
319.	4.	Kab. Kutai Kartanegara	Perbup Nomor 18 Juni 2012
320.	5.	Kab. Kutai Barat	Perbup Nomor 26 Oktober 2010
321.	6.	Kab. Kutai Timur	Perbup Nomor 02 Tahun 2011
322.	7.	Kab. Malinau	Perbup Nomor 20 Tahun 2010
323.	8.	Kab. Nunukan	Perbup Nomor 57 Tahun 2010
324.	9.	Kab. Paser	Perbup Nomor 25 Tahun 2010
325.	10.	Kota Balikpapan	Perwali Nomor 20 Tahun 2010
326.	11.	Kota Bontang	Perwali Nomor 20 Tahun 2010
327.	12.	Kota Samarinda	Perwali Nomor 31 Tahun 2010
328.	13.	Kota Tarakan	Perwali Nomor 66 Tahun 2009
329.	14.	Kab. Penajam Paser Utara	Perbup Nomor 31 Tahun 2012
330.	15.	Kab Tana Tidung	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
331.	1.	Provinsi Sulawesi Utara	Pergub Nomor 23 Tahun 2010
332.	2.	Kab. Bolaang Mongondow	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
333.	3.	Kab. Minahasa	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
334.	4.	Kab. Sangihe	Perbup Nomor 21 Tahun 2010
335.	5.	Kota Bitung	Perwali Nomor 29 Tahun 2010
336.	6.	Kota Manado	Perwali Nomor 58a Tahun 2011
337.	7.	Kab. Kepulauan Talaud	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
338.	8.	Kab. Minahasa Selatan	Perbup Nomor 128 Tahun 2011
339.	9.	Kota Tomohon	Perwali Nomor 24 Tahun 2011
340.	10.	Kab. Minahasa Utara	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
341.	11.	Kota Kotamobagu	Perwali Nomor 22 Tahun 2010
342.	12.	Kab. Bolaang Mangondow Utara	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
343.	13.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
344.	14.	Kab. Minahasa Tenggara	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
345.	15.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Perbup Nomor 6 Tahun 2010
346.	16.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Perbup Nomor 88 Tahun 2010
347.	1.	Provinsi Sulawesi Tengah	Pergub Nomor 74 Tahun 2009
348.	2.	Kab. Banggai	Perbup Nomor 47 Tahun 2009
349.	3.	Kab. Banggai Kepulauan	Perbup Nomor 35 Tahun 2009
350.	4.	Kab. Buol	Perbup Nomor 14 Tahun 2009
351.	5.	Kab. Toli Toli	Perbup Nomor 25 Tahun 2009
352.	6.	Kab. Donggala	Perbup Nomor 58 Tahun 2009
353.	7.	Kab. Morowali	Perbup Nomor 7 Tahun 2009
354.	8.	Kab. Poso	Perbup Nomor 60 Tahun 2009
355.	9.	Kota Palu	Perbup Nomor 39 Tahun 2009
356.	10.	Kab. Parigi Moutong	Perbup Nomor 18 Tahun 2009
357.	11.	Kab. Tojo Una Una	Perbup Nomor 21 Tahun 2009
358.	12.	Kab. Sigi	Perbup Nomor 12 Tahun 2009



Lanjutan Tabel II.18

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
359.	1. Provinsi Sulawesi Selatan	Pergub Nomor 62 Tahun 2010
360.	2. Kab. Bantaeng	Perbup Nomor 35 Tahun 2011
361.	3. Kab. Barru	Perbup Nomor 14 Tahun 2012
362.	4. Kab. Bone	Perbup Nomor 25 Tahun 2010
363.	5. Kab. Bulukumba	Perbup Nomor 31 Tahun 2010
364.	6. Kab. Enrekang	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
365.	7. Kab. Gowa	Perbup Nomor 36 Tahun 2010
366.	8. Kab. Jeneponto	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
367.	9. Kab. Luwu	Perbup Nomor 5 Tahun 2011
368.	10. Kab. Luwu Utara	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
369.	11. Kab. Maros	Perbup Nomor 17 Tahun 2011
370.	12. Kab. Pangkajene Kepulauan	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
371.	13. Kab. Pinrang	Perbup Nomor 20 Tahun 2010
372.	14. Kab. Kepulauan Selayar	Perbup Nomor 18 Tahun 2011
373.	15. Kab. Sidenreng Rappang	Perbup Nomor 19 tahun 2012
374.	16. Kab. Sinjai	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
375.	17. Kab. Soppeng	Perbup Nomor 25 Tahun 2010
376.	18. Kab. Takalar	Perbup Nomor 3 Tahun 2012
377.	19. Kab. Tana Toraja	Perbup Nomor 23 Tahun 2010
378.	20. Kab. Wajo	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
379.	21. Kota Pare pare	Perwali Nomor 23 Tahun 2010
380.	22. Kota Makassar	Perwali Nomor 33 Tahun 2010
381.	23. Kota Palopo	Perwali Nomor 14 Tahun 2010
382.	24. Kab. Luwu Timur	Perbup Nomor 42 Tahun 2011
383.	25. Kab. Tana Toraja Utara	Perbup Nomor 52 Tahun 2010
384.	1. Provinsi Sulawesi Barat	Pergub Nomor 9 Tahun 2010
385.	2. Kab. Majene	Perbup Nomor 17 tahun 2012
386.	3. Kab. Mamuju	Perbup Nomor 9 Tahun 2010
387.	4. Kab. Polewali Mandar	Perbup Nomor 22 Tahun 2010
388.	5. Kab. Mamasa	Perbup Nomor 7 Tahun 2012
389.	6. Kab. Mamuju Utara	Perbup Nomor 092 tahun 2011
390.	1. Provinsi Sulawesi Tenggara	Pergub Nomor 17 Tahun 2010
391.	2. Kab. Buton	Perbup Nomor 7 Tahun 2011
392.	3. Kab. Konawe	Perbup Nomor 21 Tahun 2010
393.	4. Kab. Kolaka	Perbup Nomor 2 Tahun 2010
394.	5. Kab. Muna	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
395.	6. Kota Kendari	Perwali Nomor 3 Tahun 2010
396.	7. Kota Bau bau	Perwali Nomor 29 Tahun 2010
397.	8. Kab. Konawe Selatan	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
398.	9. Kab. Bombana	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
399.	10. Kab. Wakatobi	Perbup Nomor 2A Tahun 2010
400.	11. Kab. Kolaka Utara	Perbup Nomor 800/146 Tahun 2010
401.	12. Kab. Konawe Utara	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
402.	13. Kab. Buton Utara	Perbup Nomor 23 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
403.	1.	Provinsi Bali	Pergub Nomor 27 Tahun 2010
404.	2.	Kab. Badung	Perbup Nomor 28 Tahun 2010
405.	3.	Kab. Bangli	Perbup Nomor 25 Tahun 2010
406.	4.	Kab. Buleleng	Perbup Nomor 37 Tahun 2010
407.	5.	Kab. Gianyar	Perbup Nomor 61 Tahun 2009
408.	6.	Kab. Jembrana	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
409.	7.	Kab. Karangasem	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
410.	8.	Kab. Klungkung	Perbup Nomor 18 Tahun 2010
411.	9.	Kab. Tabanan	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
412.	10.	Kota Denpasar	Perwali Nomor 20 Tahun 2010
413.	1.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
414.	2.	Kab. Bima	Perbup Nomor 5 Tahun 2010
415.	3.	Kab. Dompu	Perbup Nomor 30 Tahun 2010
416.	4.	Kab. Lombok Barat	Perbup Nomor 24 Tahun 2010
417.	5.	Kab. Lombok Tengah	Perbup Nomor 32 Tahun 2011 1
418.	6.	Kab. Lombok Timur	Perbup Nomor 31 Tahun 2010
419.	7.	Kab. Sumbawa	Perbup Nomor 43 Tahun 2010
420.	8.	Kota Mataram	Perwali Nomor 13 Tahun 2010
421.	9.	Kota Bima	Perwali Nomor 04 Tahun 2010
422.	10.	Kab. Sumbawa Barat	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
423.	11.	Kab. Lombok Utara	Perbup Nomor 7 Tahun 2010
424.	1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pergub Nomor 39 Tahun 2010
425.	2.	Kab. Alor	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
426.	3.	Kab. Belu	Perbup Nomor 23 Tahun 2010
427.	4.	Kab. Ende	Perbup Nomor 21 Tahun 2010
428.	5.	Kab. Flores Timur	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
429.	6.	Kab. Kupang	Perbup Nomor 15 Tahun 2010
430.	7.	Kab. Lembata	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
431.	8.	Kab. Manggarai	Perbup Nomor 24 Tahun 2010
432.	9.	Kab. Ngada	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
433.	10.	Kab. Sikka	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
434.	11.	Kab. Sumba Barat	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
435.	12.	Kab. Sumba Timur	Perbup Nomor 10 Tahun 2010
436.	13.	Kab. Timor Tengah Selatan	Perbup Nomor 11 Tahun 2010
437.	14.	Kab. Timor Tengah Utara	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
438.	15.	Kota Kupang	Perwali Nomor 11A Tahun 2010
439.	16.	Kab. Rote Ndao	Perbup Nomor 14 Tahun 2010
440.	17.	Kab. Manggarai Barat	Perbup Nomor 19 Tahun 2010
441.	18.	Kab. Nagekeo	Perbup Nomor 17 Tahun 2010
442.	19.	Kab. Sumba Barat Daya	Perbup Nomor 26 Tahun 2010
443.	20.	Kab. Sumba Tengah	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
444.	21.	Kab. Manggarai Timur	Perbup Nomor 22 Tahun 2010
445.	22.	Kab Sabu Raijua	Perbup Nomor 12 Tahun 2010
446.			
447.	1.	Provinsi Maluku	Pergub Nomor 02 Tahun 2010
448.	2.	Kab. Maluku Tenggara Barat	Perbup Nomor 02 Tahun 2010
449.	3.	Kab. Maluku Tengah	Perbup Nomor 40 Tahun 2010



Lanjutan Tabel II.18

No.	Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
450.	4. Kab. Maluku Tenggara	Perbup Nomor 02 Tahun 2010
451.	5. Kab. Buru	Perbup Nomor 14 Tahun 2011
452.	6. Kota Ambon	Perwali Nomor 14 Tahun 2011
453.	7. Kab. Seram Bagian Barat	Perbup Nomor 04 Tahun 2011
454.	8. Kab. Seram Bagian Timur	Perbup Nomor 36 Tahun 2011
455.	9. Kab. Kepulauan Aru	Perbup Nomor 04 Tahun 2010
456.	10. Kab. Maluku Barat Daya	Perbup PerBub No.08/2011
457.	11. Kota Tual	Perwali Nomor 04 Tahun 2010
458.	12. Kab. Buru Selatan	Perbup Nomor 15 Tahun 2011
459.	1. Provinsi Maluku Utara	Pergub Nomor 22 Tahun 2010
460.	2. Kab. Halmahera Tengah	Perbup Nomor 06 Tahun 2011
461.	3. Kab. Halmahera Barat	Perbup Nomor 08 Tahun 2010
462.	4. Kota Ternate	Perwali Nomor 07 Tahun 2011
463.	5. Kab. Halmahera Timur	Perbup Nomor 04 Tahun 2011
464.	6. Kota Tidore Kepulauan	Perwali Nomor 15 Tahun 2011
465.	7. Kab. Kepulauan Sula	Perbup Nomor 04 Tahun 2011
466.	8. Kab. Halmahera Selatan	Perbup Nomor 04 Tahun 2010
467.	9. Kab. Halmahera Utara	Perbup Nomor 7 tahun 2012
468.	10. Kab. Morotai	Perbup Nomor 10 Tahun 2012
469.	1. Provinsi Papua	Pergub Nomor 188.3/046 Tahun 2011
470.	2. Kab. Biak Numfor	Perbup Nomor 183 Tahun 2011
471.	3. Kab. Jayapura	Perbup Nomor 32 Tahun 2009
472.	4. Kab. Jayawijaya	Perbup Nomor 17 Tahun 2010
473.	5. Kab. Merauke	Perbup Nomor 10 Tahun 2012
474.	6. Kab. Mimika	Perbup Nomor 13 Tahun 2010
475.	7. Kab. Nabire	Perbup Nomor 15 Tahun 2011
476.	8. Kab. Paniai	Perbup Nomor 52 Tahun 2010
477.	9. Kab. Puncak Jaya	Perbup Nomor 58 Tahun 2010
478.	10. Kab. Kepulauan Yapen	Perbup Nomor No.6 Tahun 2011
479.	11. Kota Jayapura	Perwali Nomor 06 Tahun 2010
480.	12. Kab. Sarmi	Perbup Nomor 72 Tahun 2010
481.	13. Kab. Keerom	Perbup Nomor 8 Tahun 2011
482.	14. Kab. Yahukimo	Perbup Nomor 7 Tahun 2012
483.	15. Kab. Pegunungan Bintang	Perbup Nomor 700/154 Tahun 2010
484.	16. Kab. Tolikara	Perbup Nomor 4 Tahun 2012
485.	17. Kab. Boven Digoel	Perbup Nomor 11 Tahun 2012
486.	18. Kab. Mappi	Perbup Nomor 7 Tahun 2012
487.	19. Kab. Asmat	Perbup Nomor 16 Tahun 2010
488.	20. Kab. Waropen	Perbup Nomor 44 Tahun 2010
489.	21. Kab. Supiori	Perbup Nomor 10 Tahun 2011
490.	22. Kab. Mamberamo Raya	Perbup Nomor 06 Tahun 2010
491.	23. Kab. Mamberamo Tengah	Perbup Nomor 700/06/BUP-MT/2012
492.	24. Kab. Yalimo	Perbup Nomor 36 Tahun 2012
493.	25. Kab. Lanny Jaya	Perbup Nomor 52 Tahun 2012
494.	26. Kab. Nduga	Perbup Nomor 7 Tahun 2012
495.	27. Kab. Dogiyai	Perbup Nomor 05 Tahun 2011
496.	28. Kab. Puncak	Perbup Nomor 15 Tahun 2012



Lanjutan Tabel II.18

No.		Pemerintah Daerah	Peraturan Kepala Daerah
497.	29.	Kab. Intan Jaya	Perbup Nomor 8 Tahun 2011
498.	30.	Kab. Deiyai	Perbup Nomor 4 Tahun 2012
499.	1.	Provinsi Papua Barat	Pergub Nomor 900/10/V/2011
500.	2.	Kab. Sorong	Perbup Nomor 91 Tahun 2010
501.	3.	Kab. Manokwari	Perbup Nomor 41 Tahun 2011
502.	4.	Kab. Fak Fak	Perbup Nomor 14 tahun 2012
503.	5.	Kota Sorong	Perwali Nomor 04 Tahun 2010
504.	6.	Kab. Sorong Selatan	Perbup Nomor 02 Tahun 2011
505.	7.	Kab. Raja Ampat	Perbup Nomor 6 Tahun 2011
506.	8.	Kab. Teluk Bintuni	Perbup Nomor 06 Tahun 2011
507.	9.	Kab. Teluk Wondama	Perbup Nomor 06 Tahun 2011
508.	10.	Kab. Kaimana	Perbup Nomor 05 Tahun 2012
509.	11.	Kab Tambrauw	Perbup Nomor 48 Tahun 2010
510.	12.	Kab. Maybrat	Perbup Nomor 115 Tahun 2012

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2013

Tabel II.19 Rekapitulasi Jumlah Pemerintah Daerah yang Telah Memiliki Peraturan Kepala Daerah Mengenai SPIP Tahun 2011 – 2012

Provinsi	Total Pemda	Pemda yang memiliki Perda SPIP							
		2011				2012			
		Prov.	Kab/kota	Total	%	Prov.	Kab/kota	Total	%
Nanggroe Aceh Darussalam	24	1	23	24	100%	1	23	24	100%
Sumatera Utara	34	1	33	34	100%	1	33	34	100%
Sumatera Barat	20	1	14	15	75%	1	19	20	100%
Riau	13	1	12	13	100%	1	12	13	100%
Jambi	12	1	6	7	58%	1	11	12	100%
Sumatera Selatan	16	1	14	15	94%	1	15	16	100%
Bengkulu	11	1	10	11	100%	1	10	11	100%
Lampung	15	1	14	15	100%	1	14	15	100%
Bangka Belitung	8	1	6	7	88%	1	7	8	100%
Kepulauan Riau	8	1	7	8	100%	1	7	8	100%



Lanjutan Tabel II.19

Provinsi	Total Pemda	Pemda yang memiliki Perda SPIP							
		2011				2012			
		Prov.	Kab/kota	Total	%	Prov.	Kab/kota	Total	%
DKI Jakarta*	7	1	-	1	100%	1		1	100%
Jawa Barat	27	1	24	25	93%	1	26	27	100%
Jawa Tengah	36	1	34	35	97%	1	35	36	100%
DI Yogyakarta	6	1	5	6	100%	1	5	6	100%
Jawa Timur	39	1	38	1	100%	1	38	39	100%
Banten	9	1	7	8	89%	1	8	9	100%
Bali	10	1	9	10	100%	1	9	10	100%
Nusa Tenggara Barat	11	1	10	11	100%	1	10	11	100%
Nusa Tenggara Timur	22	1	21	22	100%	1	21	22	100%
Kalimantan Barat	15	1	14	15	100%	1	14	15	100%
Kalimantan Tengah	15	1	14	15	100%	1	14	15	100%
Kalimantan Selatan	14	1	13	14	100%	1	13	14	100%
Kalimantan Timur	15	1	12	13	87%	1	14	15	100%
Sulawesi Utara	16	1	15	16	100%	1	15	16	100%
Sulawesi Tengah	12	1	11	12	100%	1	11	12	100%
Sulawesi Selatan	25	1	21	22	88%	1	24	25	100%
Sulawesi Tenggara	13	1	12	13	100%	1	12	13	100%
Gorontalo	7	1	6	7	100%	1	6	7	100%
Sulawesi Barat	6	1	3	4	67%	1	5	6	100%



Lanjutan Tabel II.19

Provinsi	Total Pemda	Pemda yang memiliki Perda SPIP							
		2011				2012			
		Prov.	Kab/kota	Total	%	Prov.	Kab/kota	Total	%
Maluku	12	1	11	12	100%	1	11	12	100%
Maluku Utara	10	1	7	8	80%	1	9	10	100%
Papua	30	1	19	20	67%	1	29	30	100%
Papua Barat	12	1	8	9	75%	1	11	12	100%
Kalimantan Utara**									
Total	524			486	93%			524	100%

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2013

Catatan : Peraturan SPIP Provinsi DKI Jakarta dibuat oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta tidak membuat peraturan SPIP.

BAGIAN III

SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR

Bagian ini menyajikan data statistik sumber daya manusia aparatur dalam mendukung terlaksananya pemerintahan dan pembangunan. Sumber daya manusia aparatur yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah mereka yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Data yang disajikan meliputi Jumlah PNS secara umum, jumlah PNS berdasarkan pendidikan, berdasarkan usia, berdasarkan golongan ruang, berdasarkan jenis kelamin. Selain jumlah PNS disajikan data pula tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural, fungsional umum, fungsional tertentu. Ada beberapa jabatan fungsional tertentu yang disajikan datanya secara lebih spesifik, yaitu jabatan fungsional peneliti; guru; dosen; tenaga kesehatan; auditor; pemeriksa; penyidik; dan penyuluh KB. Sebelum mengakhiri bagian ini disajikan tentang diklat PNS, jumlah lembaga kediklatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta akreditasinya; dan data mengenai widyaiswara diklat. Untuk mengakhiri bagian ini disajikan tentang kesejahteraan PNS dan data mengenai pensiun PNS.

A. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Sub Bagian ini akan mengemukakan data jumlah PNS yang berstatus PNS pusat maupun daerah secara umum pada tahun 2011 - 2012, tidak diklasifikasikan berdasarkan jabatan. Jumlah umum PNS ini ditampilkan pada tabel Tabel III.1. Data mengenai jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut pendidikan disajikan pada tabel III.2, tabel III.3, tabel III.4 dan tabel III.5. Data tentang jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut kelompok umur disajikan pada tabel III.6, tabel III.7, tabel III.8, tabel III.9. Dan jumlah PNS pusat dan PNS daerah menurut golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.10, tabel III.11, tabel III.12 dan tabel III.13.

B. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

Data dalam sub bagian ini dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu data umum jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum; data jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural dengan variasinya; data

jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan variasinya; dan data jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum dengan variasinya.


Data umum jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum disajikan pada tabel III.14 sampai tabel III.17. Sementara itu, data mengenai jumlah umum dan pertumbuhan PNS yang menduduki jabatan struktural disajikan pada tabel III.18 dan tabel III.19. Data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut kelompok umur disajikan pada tabel III.20 sampai tabel III.23. Berikutnya data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut pendidikan disajikan pada tabel III.24 sampai tabel III.27. Sementara data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut jenis kelamin disajikan pada tabel III.28 sampai tabel III.31. Dan data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural menurut golongan/ruang disajikan pada tabel III.32 sampai tabel III.35.

Data mengenai jabatan fungsional tertentu yang disajikan dalam publikasi ini meliputi data umum mengenai jabatan fungsional tertentu dengan variasi kelompok umur; pendidikan; usia dan golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.36 sampai tabel III.53. Selain itu, dalam publikasi disajikan beberapa data jabatan fungsional tertentu secara spesifik, yaitu data mengenai jabatan fungsional peneliti; guru; dosen; tenaga kesehatan; auditor; pemeriksa; penyidik; dan penyuluh KB. Jabatan fungsional ini dipilih untuk mewakili jabatan fungsional yang memberikan pelayanan dasar dan berperan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Data mengenai peneliti dapat dilihat pada tabel III.54 sampai tabel III.55. Sementara data mengenai tenaga pendidikan dosen dan guru dapat dilihat pada tabel III.56 sampai tabel III.96. Data mengenai jabatan tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel III.97 sampai tabel III.98. Data mengenai jabatan auditor ditampilkan pada tabel III.99. Sementara data mengenai jabatan pemeriksa dengan variasinya ditampilkan pada tabel III. 100 sampai tabel III.107. Data mengenai jabatan penyidik KPK dan Polri dapat dilihat pada tabel III.108 sampai tabel III.112. Dan tabel mengenai jabatan penyuluh KB dengan variasinya ditampilkan pada tabel III.113 sampai pada tabel 115.

Data jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum juga disajikan dengan berbagai variasi, yaitu menurut kelompok umur; pendidikan; usia dan golongan/ruang. Data mengenai jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional umum disajikan pada tabel III.116 sampai tabel III.133.

C. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil

Data mengenai pendidikan dan pelatihan PNS yang ditampilkan dalam publikasi ini meliputi data jumlah PNS yang sudah mengikuti diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan; jumlah PNS yang pernah mengikuti diklat fungsional dan teknis; data program diklat di Instansi Pusat dan Daerah yang sudah diakreditasi; dan data widyaiswara diklat di Instansi Pusat maupun di Daerah. Untuk data mengenai jumlah PNS yang sudah mengikuti diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan dapat dilihat pada tabel III.134. Sementara data mengenai jumlah PNS yang pernah mengikuti diklat



fungsional dan teknis ditampilkan pada tabel III.135. Data mengenai program diklat di Instansi Pusat dan Daerah yang sudah diakreditasi ditampilkan pada tabel III.136. dan data mengenai jumlah dan pertumbuhan widyaiswara di instansi pusat dan daerah dapat dilihat pada tabel III.137 sampai tabel III.140.

D. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil

Data kesejahteraan PNS yang penting untuk disajikan adalah data mengenai gaji pokok pegawai; tunjangan jabatan; dan asuransi kesehatan PNS. Tabel III.141 sampai tabel III.144 menunjukkan data *time series* tahun 2011-2013 gaji pokok PNS golongan I sampai golongan IV. Sementara itu, tabel III.145 menjelaskan mengenai tunjangan jabatan struktural eselon I-IV dan tabel III.146 menjelaskan mengenai tunjangan jabatan fungsional tertentu. Dari tabel tersebut terlihat bahwa tunjangan jabatan untuk jabatan struktural selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan.

Selain data gaji dan tunjangan, kesejahteraan PNS juga dapat dilihat dari pemanfaatan asuransi kesehatan. Pada tabel III.147 sampai tabel III.151 ditampilkan data mengenai kepesertaan dalam asuransi kesehatan (askes). Data yang tersedia menunjukkan bahwa pada tahun 2012 peserta askes yang terbanyak (71,25%) adalah PNS aktif. Dari segi golongan/ruang, pada tahun 2012 peserta askes yang terbanyak (43,43%) adalah PNS golongan/ruang III. Sementara bila dilihat dari segi usia, pada tahun 2012 peserta askes yang terbanyak (9,66%) adalah berusia 50 s.d 54 tahun.

E. Pensiun Pegawai Negeri Sipil

Data yang ditampilkan dalam sub bagian pensiun PNS adalah data total uang pensiun PNS; data PNS yang pensiun menurut beberapa variasi. Data total uang pensiun PNS dan pertumbuhannya disajikan pada tabel III.152 dan tabel III.153. Sementara data mengenai PNS yang pensiun menurut kelompok dapat dilihat pada tabel III.154 dan tabel III.155. Data mengenai PNS yang pensiun menurut golongan/ruang ditampilkan pada tabel III.156 dan tabel III.157. Dan data mengenai PNS yang pensiun menurut jenis kelamin ditampilkan pada tabel III.158 dan tabel III.159.

Tabel III.1 Jumlah PNS Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2012

No.	Instansi	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Instansi Pusat	923761	20%	919235	20,22%	-0,49%
2.	Pemerintah Provinsi	316271	7%	313566	6,90%	-0,86%
3.	Pemerintah Kab/Kota	3330786	73%	3 314298	72,89%	-0,50%
	Total	4570818	100%	4547099	100%	-0,52%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.2 Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	83437	1,83%	79602	1,75%	-4,82%
2.	SLTP	123834	2,71%	119161	2,62%	-3,92%
3.	SLTA	1515080	33,15%	1477787	32,50%	-2,52%
4.	D1	75541	1,65%	72928	1,60%	-3,58%
5.	D II	692502	15,15%	674853	14,84%	-2,62%
6.	D III	430672	9,42%	428478	9,42%	-0,51%
7.	D IV	19049	0,42%	19864	0,44%	4,10%
8.	S 1	1514906	33,14%	1547306	34,03%	2,09%
9.	S 2	107619	2,35%	118648	2,61%	9,30%
10.	S 3	8178	0,18%	8472	0,19%	3,47%
	Total	4570818	100%	4547099	100%	-0,52%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.3 Jumlah PNS Pusat Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	14692	1,59%	14064	1,53%	-4,47%
2.	SLTP	24050	2,60%	23057	2,51%	-4,31%
3.	SLTA	291733	31,58%	285730	31,08%	-2,10%
4.	D1	14579	1,58%	14398	1,57%	-1,26%
5.	D II	45220	4,90%	43044	4,68%	-5,06%
6.	D III	81446	8,82%	80377	8,74%	-1,33%
7.	D IV	10744	1,16%	10863	1,18%	1,10%
8.	S 1	356131	38,55%	358491	39,00%	0,66%
9.	S 2	77170	8,35%	80944	8,81%	4,66%
10.	S 3	7996	0,87%	8267	0,90%	3,28%
	Total	923761	100%	919235	100%	-0,49%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.4 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	8421	2,6	7939	2,5	-6,07%
2.	SLTP	11025	3,4	10432	3,3	-5,68%
3.	SLTA	124795	39,4	122059	38,9	-2,24%
4.	D1	3660	1,1	3557	1,1	-2,90%
5.	D II	18710	5,9	17921	5,7	-4,40%
6.	D III	35031	11,	34608	11,	-1,22%
7.	D IV	1301	0,4	1375	0,4	5,38%
8.	S 1	105214	33,2	106256	33,8	0,98%
9.	S 2	8031	2,5	9333	2,9	13,95%
10.	S 3	83	0,03	86	0,03	3,49%
	Total	316271	100%	13566	100%	-0,86%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.5 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	60324	1,81%	57599	1,74%	-4,73%
2.	SLTP	88759	2,66%	85672	2,58%	-3,60%
3.	SLTA	1098552	32,98%	1069998	32,28%	-2,67%
4.	D1	57302	1,72%	54973	1,66%	-4,24%
5.	D II	628572	18,87%	613888	18,52%	-2,39%
6.	D III	314195	9,43%	313493	9,46%	-0,22%
7.	D IV	7004	0,21%	7626	0,23%	8,16%
8.	S 1	1053561	31,63%	1082559	32,66%	2,68%
9.	S 2	22418	0,67%	28371	0,86%	20,98%
10.	S 3	99	0,00%	119	0,00%	16,81%
	Total	3330786	100%	3314298	100%	-0,50%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.6 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	3677	0,08%	2970	0,07%	-23,80%
2.	21 - 25	159559	3,49%	142729	3,14%	-11,79%
3.	26 - 30	505241	11,05%	495061	10,89%	-2,06%
4.	31 - 35	581585	12,72%	582718	12,82%	0,19%
5.	36 - 40	587892	12,86%	581770	12,79%	-1,05%
6.	41 - 45	829290	18,14%	819195	18,02%	-1,23%
7.	46 - 50	942636	20,62%	946912	20,82%	0,45%
8.	51 - 55	740218	16,19%	749347	16,48%	1,22%
9.	56 - 60	213868	4,68%	218340	4,80%	2,05%
10.	61 - 65	6465	0,14%	7568	0,17%	14,57%
11.	65 +	387	0,01%	489	0,01%	20,86%
	Total	4570818	100%	4547099	100%	-0,52%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.7 Jumlah PNS Pusat Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	2509	0,27%	2006	0,22%	-25,07%
2.	21 - 25	48401	5,24%	44051	4,79%	-9,87%
3.	26 - 30	113999	12,34%	111876	12,17%	-1,90%
4.	31 - 35	131869	14,28%	131730	14,33%	-0,11%
5.	36 - 40	140085	15,16%	138734	15,09%	-0,97%
6.	41 - 45	162319	17,57%	162694	17,70%	0,23%
7.	46 - 50	155048	16,78%	156225	17,00%	0,75%
8.	51 - 55	132582	14,35%	132530	14,42%	-0,04%
9.	56 - 60	30276	3,28%	32022	3,48%	5,45%
10.	61 - 65	6286	0,68%	6885	0,75%	8,70%
11.	65 +	387	0,04%	482	0,05%	19,71%
	Total	923761	100%	919235	100%	-0,49%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.8 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	220	0,07%	177	0,06%	-24,3%
2.	21 - 25	8259	2,61%	7395	2,36%	-11,7%
3.	26 - 30	27471	8,69%	26841	8,56%	-2,3%
4.	31 - 35	35825	11,33%	36042	11,49%	0,6%
5.	36 - 40	37560	11,88%	37448	11,94%	-0,3%
6.	41 - 45	50023	15,82%	49282	15,72%	-1,5%
7.	46 - 50	71035	22,46%	70599	22,51%	-0,6%
8.	51 - 55	73028	23,09%	72585	23,15%	-0,6%
9.	56 - 60	12737	4,03%	13049	4,16%	2,4%
10.	61 - 65	113	0,04%	148	0,05%	23,6%
11.	65 +	-	0,00%	-	0,00%	0,0%
	Total	316271	100%	313566	100%	-0,9%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.9 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	948	0,03%	787	0,02%	-20,46%
2.	21 - 25	102899	3,09%	91283	2,75%	-12,73%
3.	26 - 30	363771	10,92%	356344	10,75%	-2,08%
4.	31 - 35	413891	12,43%	414946	12,52%	0,25%
5.	36 - 40	410247	12,32%	405588	12,24%	-1,15%
6.	41 - 45	616948	18,52%	607219	18,32%	-1,60%
7.	46 - 50	716553	21,51%	720088	21,73%	0,49%
8.	51 - 55	534608	16,05%	544232	16,42%	1,77%
9.	56 - 60	170855	5,13%	173269	5,23%	1,39%
10.	61 - 65	66	0,00%	535	0,02%	87,66%
11.	65 +	-	0,00%	7	0,00%	100,00%
	Total	3330786	100%	3314298	100%	-0,50%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.10 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	20654	0,45%	16090	0,35%	-28,37%
2.	Ib	13926	0,30%	17119	0,38%	18,65%
3.	Ic	42927	0,94%	36693	0,81%	-16,99%
4.	Id	26641	0,58%	29288	0,64%	9,04%
5.	Ila	424797	9,29%	371890	8,18%	-14,23%
6.	Ilb	386522	8,46%	405000	8,91%	4,56%
7.	Ilc	344966	7,55%	344023	7,57%	-0,27%
8.	Ild	182059	3,98%	184823	4,06%	1,50%
9.	IIla	696935	15,25%	668451	14,70%	-4,26%
10.	IIlb	561007	12,27%	575750	12,66%	2,56%
11.	IIlc	394642	8,63%	404004	8,88%	2,32%
12.	IIld	489196	10,70%	487044	10,71%	-0,44%
13.	IVa	855854	18,72%	863045	18,98%	0,83%
14.	IVb	103702	2,27%	113394	2,49%	8,55%
15.	IVc	19995	0,44%	22298	0,49%	10,33%
16.	IVd	5187	0,11%	6069	0,13%	14,53%
17.	IVe	1808	0,04%	2118	0,05%	14,64%
	Total	4570818	100%	4547099	100%	-0,52%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.11 Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	1665	0,18%	1396	0,15%	-19,3%
2.	Ib	2011	0,22%	2054	0,22%	2,1%
3.	Ic	5565	0,60%	5000	0,54%	-11,3%
4.	Id	6351	0,69%	5896	0,64%	-7,7%
5.	Ila	78033	8,45%	71615	7,79%	-9,0%
6.	Ilb	68383	7,40%	66636	7,25%	-2,6%
7.	Ilc	74457	8,06%	74937	8,15%	0,6%
8.	Ild	47578	5,15%	48814	5,31%	2,5%
9.	IIla	183572	19,87%	178540	19,42%	-2,8%
10.	IIlb	162472	17,59%	164568	17,90%	1,3%
11.	IIlc	91766	9,93%	95154	10,35%	3,6%
12.	IIld	90516	9,80%	91500	9,95%	1,1%
13.	IVa	71741	7,77%	72322	7,87%	0,8%
14.	IVb	24475	2,65%	24065	2,62%	-1,7%



Lanjutan Tabel III.11

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
15.	IVc	9658	1,05%	10351	1,13%	6,7%
16.	IVd	3854	0,42%	4444	0,48%	13,3%
17.	IVe	1664	0,18%	1943	0,21%	14,4%
	Total	923761	100%	919235	100%	-0,5%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.12 Jumlah PNS Daerah Provinsi Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	1644	0,52%	1318	0,42%	-24,73%
2.	Ib	1074	0,34%	1289	0,41%	16,68%
3.	Ic	4080	1,29%	3508	1,12%	-16,31%
4.	Id	1863	0,59%	2212	0,71%	15,78%
5.	IIa	36146	11,43%	31376	10,01%	-15,20%
6.	IIb	16254	5,14%	20347	6,49%	20,12%
7.	IIc	23307	7,37%	21753	6,94%	-7,14%
8.	IId	14603	4,62%	14433	4,60%	-1,18%
9.	IIIa	48938	15,47%	46790	14,92%	-4,59%
10.	IIIb	55556	17,57%	56239	17,94%	1,21%
11.	IIIc	29938	9,47%	29605	9,44%	-1,12%
12.	IIId	38921	12,31%	39627	12,64%	1,78%
13.	IVa	34842	11,02%	35304	11,26%	1,31%
14.	IVb	6622	2,09%	6980	2,23%	5,13%
15.	IVc	1799	0,57%	1962	0,63%	8,31%
16.	IVd	637	0,20%	754	0,24%	15,52%
17.	IVe	47	0,01%	69	0,02%	31,88%
	Total	316271	100%	313566	100%	-0,86%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.13 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	17345	0,52%	13376	0,40%	-29,67%
2.	Ib	10841	0,33%	13776	0,42%	21,31%
3.	Ic	33282	1,00%	28185	0,85%	-18,08%
4.	Id	18427	0,55%	21180	0,64%	13,00%
5.	IIa	310618	9,33%	268899	8,11%	-15,51%
6.	IIb	301885	9,06%	318017	9,60%	5,07%
7.	IIc	247202	7,42%	247333	7,46%	0,05%
8.	IId	119878	3,60%	121576	3,67%	1,40%
9.	IIIa	464425	13,94%	443121	13,37%	-4,81%
10.	IIIb	342979	10,30%	354943	10,71%	3,37%
11.	IIIc	272938	8,19%	279245	8,43%	2,26%
12.	IIId	359759	10,80%	355917	10,74%	-1,08%
13.	IVa	749271	22,50%	755419	22,79%	0,81%
14.	IVb	72605	2,18%	82349	2,48%	11,83%
15.	IVc	8538	0,26%	9985	0,30%	14,49%
16.	IVd	696	0,02%	871	0,03%	20,09%
17.	IVe	97	0,00%	106	0,00%	8,49%
	Total	3330786	100%	3314298	100%	-0,50%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.14 Total Jumlah PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012

No.	Jabatan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Jabatan Struktural	104032	2,28%	273403	6,01%	61,95%
2.	Jabatan Fungsional tertentu	2164171	47,35%	2034362	44,74%	-6,38%
3.	Jabatan Rangkap	2	0,00%	2290	0,05%	99,91%
4.	Jabatan Fungsional Umum	2302613	50,38%	2237044	49,20%	-2,93%
	Total	4570818	100%	4547099	100%	-0,52%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.15 Jumlah Umum PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012

No.	Jabatan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Jabatan Struktural	15918	1,72%	58919	6,41%	72,98%
2.	Jabatan Fungsional tertentu	285949	30,95%	268706	29,23%	-6,42%
3.	Jabatan Rangkap	1	0,00%	1838	0,20%	99,95%
4.	Jabatan Fungsional Umum	621893	67,32%	589772	64,16%	-5,45%
	Total	923761	100%	919235	100%	-0,49%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.16 Jumlah Umum PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012

No.	Jabatan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Jabatan struktural	10442	3,30%	25798	8,23%	59,52%
2.	Jabatan fungsional tertentu	71776	22,69%	64471	20,56%	-11,33%
3.	Jabatan rangkap	-	0,00%	22	0,01%	100,00%
4.	Jabatan fungsional umum	234053	74,00%	223275	71,21%	-4,83%
	Total	316271	100%	313566		-0,86%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.17 Jumlah Umum PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012

No.	Jabatan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Jabatan struktural	77672	2,33%	188686	5,69%	58,84%
2.	Jabatan fungsional tertentu	1806446	54,23%	1701185	51,33%	-6,19%
3.	Jabatan rangkap	1	0,00%	430	0,01%	99,77%
4.	Jabatan fungsional umum	1446667	43,43%	1423997	42,97%	-1,59%
	Total	3330786	100%	3314298	100%	-0,50%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.18 Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2011 - 2012

Instansi	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Pusat	15918	15%	58919	22%	72,98%
Provinsi	10442	10%	25798	9%	59,52%
Kab/Kota	77672	75%	188686	69%	58,84%
Total	104032	100%	273403	100%	61,95%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.19 Jumlah PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	21 - 25	181	0,17%	540	0,20%	66,48%
3.	26 - 30	1391	1,34%	4276	1,56%	67,47%
4.	31 - 35	4251	4,09%	12996	4,75%	67,29%
5.	36 - 40	8661	8,33%	24403	8,93%	64,51%
6.	41 - 45	17300	16,63%	45795	16,75%	62,22%
7.	46 - 50	31295	30,08%	80180	29,33%	60,97%
8.	51 - 55	37145	35,71%	94270	34,48%	60,60%
9.	56 - 60	3743	3,60%	10730	3,92%	65,12%
10.	61 - 65	57	0,05%	192	0,07%	70,31%
11.	65 +	8	0,01%	21	0,01%	61,90%
	Total	104032	100%	273403	100%	61,95%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.20 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	21 - 25	2	0,01%	9	0,02%	77,78%
3.	26 - 30	98	0,62%	707	1,20%	86,14%
4.	31 - 35	546	3,43%	2940	4,99%	81,43%
5.	36 - 40	1561	9,81%	6148	10,43%	74,61%
6.	41 - 45	2918	18,33%	11285	19,15%	74,14%
7.	46 - 50	4311	27,08%	15522	26,34%	72,23%
8.	51 - 55	5239	32,91%	18587	31,55%	71,81%
9.	56 - 60	1183	7,43%	3547	6,02%	66,65%
10.	61 - 65	52	0,33%	153	0,26%	66,01%
11.	65 +	8	0,05%	21	0,04%	61,90%
	Total	15918	100%	58919	100%	72,98%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.21 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	21 - 25	-	0,00%	12	0,05%	100,00%
3.	26 - 30	38	0,36%	122	0,47%	68,85%
4.	31 - 35	150	1,44%	524	2,03%	71,37%
5.	36 - 40	528	5,06%	1529	5,93%	65,47%
6.	41 - 45	1455	13,93%	3564	13,82%	59,18%
7.	46 - 50	3241	31,04%	7906	30,65%	59,01%
8.	51 - 55	4481	42,91%	10713	41,53%	58,17%
9.	56 - 60	546	5,23%	1409	5,46%	61,25%
10.	61 - 65	3	0,03%	19	0,07%	84,21%
11.	65 +	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Total	10442	100%	25798	100%	59,52%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.22 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	21 - 25	179	0,23%	519	0,28%	65,51%
3.	26 - 30	1255	1,62%	3447	1,83%	63,59%
4.	31 - 35	3555	4,58%	9532	5,05%	62,70%
5.	36 - 40	6572	8,46%	16726	8,86%	60,71%
6.	41 - 45	12927	16,64%	30946	16,40%	58,23%
7.	46 - 50	23743	30,57%	56752	30,08%	58,16%
8.	51 - 55	27425	35,31%	64970	34,43%	57,79%
9.	56 - 60	2014	2,59%	5774	3,06%	65,12%
10.	61 - 65	2	0,00%	20	0,01%	90,00%
11.	65 +	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Total	77672	100%	188686	100%	58,84%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.23 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	13	0,01%	69	0,03%	81,16%
2.	SLTP	55	0,05%	234	0,09%	76,50%
3.	SLTA	19110	18,37%	56118	20,53%	65,95%
4.	D1	315	0,30%	872	0,32%	63,88%
5.	D II	1640	1,58%	5011	1,83%	67,27%
6.	D III	4668	4,49%	12539	4,59%	62,77%
7.	D IV	909	0,87%	3602	1,32%	74,76%
8.	S 1	63050	60,61%	160338	58,65%	60,68%
9.	S 2	13886	13,35%	33807	12,37%	58,93%
10.	S 3	386	0,37%	813	0,30%	52,52%
	Total	104032	100%	273403	100%	61,95%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.24 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	1	0,01%	15	0,03%	93,3%
2.	SLTP	5	0,03%	39	0,07%	87,2%
3.	SLTA	1188	7,46%	8251	14,00%	85,6%
4.	D1	24	0,15%	123	0,21%	80,5%
5.	D II	90	0,57%	558	0,95%	83,9%
6.	D III	396	2,49%	1647	2,80%	76,0%
7.	D IV	199	1,25%	1750	2,97%	88,6%
8.	S 1	8587	53,95%	32245	54,73%	73,4%
9.	S 2	5089	31,97%	13574	23,04%	62,5%
10.	S 3	339	2,13%	717	1,22%	52,7%
	Total	15918	100%	58919	100%	73,0%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.25 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	1	0,01%	2	0,01%	50,0%
2.	SLTP	2	0,02%	11	0,04%	81,8%
3.	SLTA	620	5,94%	2090	8,10%	70,3%
4.	D1	6	0,06%	29	0,11%	79,3%
5.	D II	102	0,98%	234	0,91%	56,4%
6.	D III	297	2,84%	787	3,05%	62,3%
7.	D IV	67	0,64%	187	0,72%	64,2%
8.	S 1	7264	69,57%	17788	68,95%	59,2%
9.	S 2	2059	19,72%	4623	17,92%	55,5%
10.	S 3	24	0,23%	47	0,18%	48,9%
	Total	10442	100%	25798	100%	59,5%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.26 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	11	0,01%	52	0,03%	78,85%
2.	SLTP	48	0,06%	184	0,10%	73,91%
3.	SLTA	17302	22,28%	45777	24,26%	62,20%
4.	D1	285	0,37%	720	0,38%	60,42%
5.	D II	1448	1,86%	4219	2,24%	65,68%
6.	D III	3975	5,12%	10105	5,36%	60,66%
7.	D IV	643	0,83%	1665	0,88%	61,38%
8.	S 1	47199	60,77%	110305	58,46%	57,21%
9.	S 2	6738	8,67%	15610	8,27%	56,84%
10.	S 3	23	0,03%	49	0,03%	53,06%
	Total	77672	100%	188686	100%	58,84%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.27 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	76591	73,62%	202595	74,10%	62,20%
2.	Perempuan	27441	26,38%	70808	25,90%	61,25%
	Total	104032	100%	273403	100%	61,95%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.28 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	11632	73,07%	44563	75,63%	73,90%
2.	Perempuan	4286	26,93%	14356	24,37%	70,14%
	Total	15918	100%	58919	100%	72,98%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.29 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	7436	71,2%	18418	71,4%	59,63%
2.	Perempuan	3006	28,8%	7380	28,6%	59,27%
	Total	10442	100%	25798	100%	59,52%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.30 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	57523	74,06%	139614	74,0%	58,8%
2.	Perempuan	20149	25,94%	49072	26,0%	58,9%
	Total	77672	100%	188686	100%	58,8%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.31 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	2	0,00%	11	0,00%	81,82%
2.	Ib	3	0,00%	14	0,01%	78,57%
3.	Ic	2	0,00%	47	0,02%	95,74%
4.	Id	5	0,00%	22	0,01%	77,27%
5.	IIa	85	0,08%	386	0,14%	77,98%
6.	IIb	85	0,08%	464	0,17%	81,68%
7.	IIc	128	0,12%	508	0,19%	74,80%
8.	IId	238	0,23%	936	0,34%	74,57%
9.	IIIa	1955	1,88%	7874	2,88%	75,17%
10.	IIIb	7577	7,28%	26687	9,76%	71,61%
11.	IIIc	18429	17,71%	53189	19,45%	65,35%
12.	IIId	35393	34,02%	91712	33,54%	61,41%
13.	IVa	20845	20,04%	48704	17,81%	57,20%
14.	IVb	14396	13,84%	30825	11,27%	53,30%
15.	IVc	3840	3,69%	9518	3,48%	59,66%
16.	IVd	809	0,78%	2036	0,74%	60,27%



Lanjutan Tabel III.31

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
17.	IVe	240	0,23%	470	0,17%	48,94%
	Total	104032	100%	273403	100%	61,95%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.32 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	Ib	1	0,01%	-	0,00%	0,00%
3.	Ic	-	0,00%	3	0,01%	100,00%
4.	Id	1	0,01%	3	0,01%	66,67%
5.	Ila	3	0,02%	34	0,06%	91,18%
6.	Ilb	12	0,08%	96	0,16%	87,50%
7.	Ilc	12	0,08%	108	0,18%	88,89%
8.	Ild	20	0,13%	204	0,35%	90,20%
9.	IIla	153	0,96%	1596	2,71%	90,41%
10.	IIlb	614	3,86%	6272	10,65%	90,21%
11.	IIlc	2162	13,58%	10199	17,31%	78,80%
12.	IIld	4682	29,41%	19733	33,49%	76,27%
13.	IVa	3517	22,09%	9610	16,31%	63,40%
14.	IVb	3162	19,86%	7512	12,75%	57,91%
15.	IVc	800	5,03%	1861	3,16%	57,01%
16.	IVd	550	3,46%	1252	2,12%	56,07%
17.	IVe	229	1,44%	436	0,74%	47,48%
	Total	15918	100%	58919	100%	72,98%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.33 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	Ib	-	0,00%	1	0,00%	100,00%
3.	Ic	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
4.	Id	-	0,00%	-	0,00%	0,00%



Lanjutan Tabel III.33

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
5.	Ila	3	0,03%	7	0,03%	57,14%
6.	Ilb	-	0,00%	13	0,05%	100,00%
7.	Ilc	2	0,02%	23	0,09%	91,30%
8.	Ild	2	0,02%	38	0,15%	94,74%
9.	IIIa	44	0,42%	282	1,09%	84,40%
10.	IIIb	317	3,04%	1080	4,19%	70,65%
11.	IIIc	1090	10,44%	3256	12,62%	66,52%
12.	IIId	3737	35,79%	9596	37,20%	61,06%
13.	IVa	2751	26,35%	5987	23,21%	54,05%
14.	IVb	1940	18,58%	4058	15,73%	52,19%
15.	IVc	400	3,83%	1010	3,92%	60,40%
16.	IVd	152	1,46%	428	1,66%	64,49%
17.	IVe	4	0,04%	19	0,07%	78,95%
	Total	10442	100%	25798	100%	59,52%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.34 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	2	0,00%	11	0,01%	81,82%
2.	Ib	2	0,00%	13	0,01%	84,62%
3.	Ic	2	0,00%	44	0,02%	95,45%
4.	Id	4	0,01%	19	0,01%	78,95%
5.	IIa	79	0,10%	345	0,18%	77,10%
6.	IIb	73	0,09%	355	0,19%	79,44%
7.	IIc	114	0,15%	377	0,20%	69,76%
8.	IIId	216	0,28%	694	0,37%	68,88%
9.	IIIa	1758	2,26%	5996	3,18%	70,68%
10.	IIIb	6646	8,56%	19335	10,25%	65,63%
11.	IIIc	15177	19,54%	39734	21,06%	61,80%
12.	IIId	26974	34,73%	62383	33,06%	56,76%
13.	IVa	14577	18,77%	33107	17,55%	55,97%
14.	IVb	9294	11,97%	19255	10,20%	51,73%
15.	IVc	2640	3,40%	6647	3,52%	60,28%
16.	IVd	107	0,14%	356	0,19%	69,94%
17.	IVe	7	0,01%	15	0,01%	53,33%
	Total	77672	100%	188686	100%	58,84%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.35 Jumlah PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2011 - 2012

Instansi	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Pusat	285949	13%	268706	13%	-6,42%
Provinsi	71776	3%	64471	3%	-11,33%
Kab/Kota	1806446	83%	1701185	84%	-6,19%
Total	2164171	100%	2034362	100%	-6,38%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.36 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	230	0,01%	6	0,00%	-3733,33%
2.	21 - 25	32855	1,52%	6513	0,32%	-404,45%
3.	26 - 30	104672	4,84%	74566	3,67%	-40,37%
4.	31 - 35	169368	7,83%	139951	6,88%	-21,02%
5.	36 - 40	243399	11,25%	219771	10,80%	-10,75%
6.	41 - 45	463728	21,43%	446544	21,95%	-3,85%
7.	46 - 50	552333	25,52%	544991	26,79%	-1,35%
8.	51 - 55	402844	18,61%	406425	19,98%	0,88%
9.	56 - 60	188085	8,69%	188067	9,24%	-0,01%
10.	61 - 65	6279	0,29%	7082	0,35%	11,34%
11.	65 +	378	0,02%	446	0,02%	15,25%
	Total	2164171	100%	2034362	100%	-6,38%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.37 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	1	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	21 - 25	2957	1,03%	520	0,19%	-468,65%
3.	26 - 30	16619	5,81%	11491	4,28%	-44,63%
4.	31 - 35	35109	12,28%	29748	11,07%	-18,02%
5.	36 - 40	48769	17,06%	45856	17,07%	-6,35%
6.	41 - 45	63871	22,34%	63065	23,47%	-1,28%
7.	46 - 50	50107	17,52%	49890	18,57%	-0,43%
8.	51 - 55	41714	14,59%	40948	15,24%	-1,87%
9.	56 - 60	20281	7,09%	20272	7,54%	-0,04%
10.	61 - 65	6143	2,15%	6477	2,41%	5,16%
11.	65 +	378	0,13%	439	0,16%	13,90%
	Total	285949	100%	268706	100%	-6,42%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.38 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	10	0,01%	-	0,00%	0,00%
2.	21 - 25	1615	2,25%	179	0,28%	-802,23%
3.	26 - 30	2782	3,88%	1114	1,73%	-149,73%
4.	31 - 35	4151	5,78%	2668	4,14%	-55,58%
5.	36 - 40	6390	8,90%	5470	8,48%	-16,82%
6.	41 - 45	10965	15,28%	10088	15,65%	-8,69%
7.	46 - 50	18860	26,28%	18092	28,06%	-4,24%
8.	51 - 55	18195	25,35%	18044	27,99%	-0,84%
9.	56 - 60	8719	12,15%	8700	13,49%	-0,22%
10.	61 - 65	89	0,12%	116	0,18%	23,28%
11.	65 +	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Total	71776	100%	64471	100%	-11,33%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.39 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 - 20	219	0,01%	6	0,00%	-3550,00%
2.	21 - 25	28283	1,57%	5814	0,34%	-386,46%
3.	26 - 30	85271	4,72%	61961	3,64%	-37,62%
4.	31 - 35	130108	7,20%	107535	6,32%	-20,99%
5.	36 - 40	188240	10,42%	168445	9,90%	-11,75%
6.	41 - 45	388892	21,53%	373391	21,95%	-4,15%
7.	46 - 50	483366	26,76%	477009	28,04%	-1,33%
8.	51 - 55	342935	18,98%	347433	20,42%	1,29%
9.	56 - 60	159085	8,81%	159095	9,35%	0,01%
10.	61 - 65	47	0,00%	489	0,03%	90,39%
11.	65 +	-	0,00%	7	0,00%	100,00%
	Total	1806446	100%	1701185	100%	-6,19%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.40 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	179	0,01%	181	0,01%	1,10%
2.	SLTP	1551	0,07%	1509	0,07%	-2,78%
3.	SLTA	510413	23,58%	472427	23,22%	-8,04%
4.	D1	46367	2,14%	35037	1,72%	-32,34%
5.	D II	592493	27,38%	570645	28,05%	-3,83%
6.	D III	188977	8,73%	153483	7,54%	-23,13%
7.	D IV	3471	0,16%	3527	0,17%	1,59%
8.	S 1	757510	35,00%	735766	36,17%	-2,96%
9.	S 2	56172	2,60%	54742	2,69%	-2,61%
10.	S 3	7038	0,33%	7045	0,35%	0,10%
	Total	2164171	100%	2034362	100%	-6,38%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.41 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	42	0,01%	45	0,02%	6,67%
2.	SLTP	220	0,08%	217	0,08%	-1,38%
3.	SLTA	32385	11,33%	30791	11,46%	-5,18%
4.	D1	1353	0,47%	1275	0,47%	-6,12%
5.	D II	30200	10,56%	30150	11,22%	-0,17%
6.	D III	22900	8,01%	18550	6,90%	-23,45%
7.	D IV	2339	0,82%	2178	0,81%	-7,39%
8.	S 1	140396	49,10%	132110	49,17%	-6,27%
9.	S 2	49144	17,19%	46410	17,27%	-5,89%
10.	S 3	6970	2,44%	6980	2,60%	0,14%
	Total	285949	100%	268706	100%	-6,42%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.42 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	2	0,00%	2	0,00%	0,00%
2.	SLTP	73	0,10%	66	0,10%	-10,61%
3.	SLTA	13275	18,50%	11858	18,39%	-11,95%
4.	D1	2250	3,13%	2077	3,22%	-8,33%
5.	D II	16069	22,39%	15336	23,79%	-4,78%
6.	D III	12117	16,88%	9156	14,20%	-32,34%
7.	D IV	145	0,20%	147	0,23%	1,36%
8.	S 1	26538	36,97%	24517	38,03%	-8,24%
9.	S 2	1280	1,78%	1295	2,01%	1,16%
10.	S 3	27	0,04%	17	0,03%	-58,82%
	Total	71776	100%	64471	100%	-11,33%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.43 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	135	0,01%	134	0,01%	-0,75%
2.	SLTP	1258	0,07%	1226	0,07%	-2,61%
3.	SLTA	464753	25,73%	429778	25,26%	-8,14%
4.	D1	42764	2,37%	31685	1,86%	-34,97%
5.	D II	546224	30,24%	525159	30,87%	-4,01%
6.	D III	153960	8,52%	125777	7,39%	-22,41%
7.	D IV	987	0,05%	1202	0,07%	17,89%
8.	S 1	590576	32,69%	579139	34,04%	-1,97%
9.	S 2	5748	0,32%	7037	0,41%	18,32%
10.	S 3	41	0,00%	48	0,00%	14,58%
	Total	1806446	100%	1701185	100%	-6,19%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.44 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	931309	43,03%	883982	43,46%	-5,35%
2.	Perempuan	1232862	56,97%	1150078	56,54%	-7,20%
	Total	2164171	100%	2034060	100%	-6,40%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.45 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	156160	15,49%	157528	27,75%	0,87%
2.	Perempuan	852073	84,51%	410196	72,25%	-107,72%
	Total	1008233	100%	567724	100%	-77,59%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.46 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	37187	29,15%	24868	43,38%	-49,54%
2.	Perempuan	90369	70,85%	32464	56,62%	-178,37%
	Total	127556	100%	57332	100%	-122,49%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.47 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	737962	71,76%	701586	49,79%	-5,18%
2.	Perempuan	290420	28,24%	707418	50,21%	58,95%
	Total	1028382	100%	1409004	100%	27,01%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.48 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	-	0,00%	3	0,00%	100,00%
2.	Ib	2	0,00%	1	0,00%	-100,00%
3.	Ic	8	0,00%	12	0,00%	33,33%
4.	Id	10	0,00%	15	0,00%	33,33%
5.	IIa	45831	2,12%	36507	1,79%	-25,54%
6.	IIb	108689	5,02%	85647	4,21%	-26,90%
7.	IIc	104440	4,83%	83522	4,11%	-25,04%
8.	IId	73182	3,38%	62135	3,05%	-17,78%
9.	IIIa	189863	8,77%	153308	7,54%	-23,84%
10.	IIIb	214740	9,92%	205726	10,11%	-4,38%
11.	IIIc	219679	10,15%	211136	10,38%	-4,05%
12.	IIId	326128	15,07%	310912	15,28%	-4,89%
13.	IVa	796096	36,79%	791899	38,93%	-0,53%
14.	IVb	70532	3,26%	77554	3,81%	9,05%
15.	IVc	10393	0,48%	10949	0,54%	5,08%
16.	IVd	3197	0,15%	3499	0,17%	8,63%
17.	IVe	1381	0,06%	1537	0,08%	10,15%
	Total	2164171	100%	2034362	100%	-6,38%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.49 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	Ib	1	0,00%	1	0,00%	0,00%
3.	Ic	1	0,00%	1	0,00%	0,00%
4.	Id	1	0,00%	1	0,00%	0,00%
5.	Ila	2475	0,87%	2322	0,86%	-6,59%
6.	Ilb	7993	2,80%	8622	3,21%	7,30%
7.	Ilc	10519	3,68%	7571	2,82%	-38,94%
8.	Ild	9198	3,22%	8147	3,03%	-12,90%
9.	IIla	38862	13,59%	33664	12,53%	-15,44%
10.	IIlb	42335	14,81%	37693	14,03%	-12,32%
11.	IIlc	45796	16,02%	44815	16,68%	-2,19%
12.	IIld	44405	15,53%	42852	15,95%	-3,62%
13.	IVa	57180	20,00%	56443	21,01%	-1,31%
14.	IVb	15724	5,50%	14588	5,43%	-7,79%
15.	IVc	7583	2,65%	7803	2,90%	2,82%
16.	IVd	2606	0,91%	2781	1,03%	6,29%
17.	IVe	1270	0,44%	1402	0,52%	9,42%
	Total	285949	100%	268706	100%	-6,42%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.50 Jumlah PNS Provinsi Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
2.	Ib	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
3.	Ic	1	0,00%	1	0,00%	0,00%
4.	Id	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
5.	Ila	314	0,44%	191	0,30%	-64,40%
6.	Ilb	1033	1,44%	652	1,01%	-58,44%
7.	Ilc	3519	4,90%	1509	2,34%	-133,20%
8.	Ild	3166	4,41%	2335	3,62%	-35,59%
9.	IIla	5606	7,81%	4467	6,93%	-25,50%
10.	IIlb	7285	10,15%	6136	9,52%	-18,73%
11.	IIlc	8260	11,51%	7208	11,18%	-14,59%
12.	IIld	13329	18,57%	12788	19,84%	-4,23%
13.	IVa	26211	36,52%	25994	40,32%	-0,83%



Lanjutan Tabel III.50

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
14.	IVb	2154	3,00%	2186	3,39%	1,46%
15.	IVc	664	0,93%	710	1,10%	6,48%
16.	IVd	202	0,28%	246	0,38%	17,89%
17.	IVe	32	0,04%	48	0,07%	33,33%
	Total	71776	100%	64471	100%	-11,33%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.51 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	-	0,00%	3	0,00%	100,00%
2.	Ib	1	0,00%	-	0,00%	-
3.	Ic	6	0,00%	10	0,00%	40,00%
4.	Id	9	0,00%	14	0,00%	35,71%
5.	IIa	43042	2,38%	33994	2,00%	-26,62%
6.	IIb	99663	5,52%	76373	4,49%	-30,50%
7.	IIc	90402	5,00%	74442	4,38%	-21,44%
8.	IId	60818	3,37%	51653	3,04%	-17,74%
9.	IIIa	145395	8,05%	115177	6,77%	-26,24%
10.	IIIb	165120	9,14%	161897	9,52%	-1,99%
11.	IIIc	165623	9,17%	159113	9,35%	-4,09%
12.	IIId	268394	14,86%	255272	15,01%	-5,14%
13.	IVa	712705	39,45%	709462	41,70%	-0,46%
14.	IVb	52654	2,91%	60780	3,57%	13,37%
15.	IVc	2146	0,12%	2436	0,14%	11,90%
16.	IVd	389	0,02%	472	0,03%	17,58%
17.	IVe	79	0,00%	87	0,01%	9,20%
	Total	1806446	100%	1701185	100%	-6,19%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.52 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2009 - 2012

No	Jenjang Peneliti	2008	2009	2010	2011	2012
1	Peneliti Pertama	1801	2098	2020	2055	2191
2	Peneliti Muda	2154	2091	2091	2064	2177
3	Peneliti Madya	2660	2668	2613	2562	2633
4	Peneliti Utama	1034	1029	778	977	1074

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2013

Tabel III.53 Pertumbuhan Jumlah Peneliti Menurut Jenjang Tahun 2008 - 2012

No	Jenjang Peneliti	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Peneliti Pertama	14%	-4%	2%	6%
2	Peneliti Muda	-3%	0%	-1%	5%
3	Peneliti Madya	0%	-2%	-2%	3%
4	Peneliti Utama	0%	-32%	20%	9%

Sumber : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, diolah, 2013

Tabel III.54 Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2008 - 2012

No.	Lembaga	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Universitas	149014	137213	136763	123099	115232
2	Institut	10786	9442	9737	10444	8727
3	Sekolah Tinggi	52878	47116	53221	41697	42328
4	Akademi	24644	22622	21631	19568	16423
5	Politeknik	13035	12388	12038	12699	10234
Jumlah		250357	228781	233390	207507	192944

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.55 Pertumbuhan Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Lembaga Tahun 2008 - 2012

No.	Lembaga	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Universitas	-9%	0%	-11%	-7%
2	Institut	-14%	3%	7%	-20%
3	Sekolah Tinggi	-12%	11%	-28%	1%
4	Akademi	-9%	-5%	-11%	-19%
5	Politeknik	-5%	-3%	5%	-24%
Jumlah		-9%	2%	-12%	-8%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013



Tabel III.56 Jumlah Dosen (Tenaga Edukatif) Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2012

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun		Rasio
		2011/2012		
	Dosen tetap			
1.	< S1		824	0%
2.	S-1/D4		55686	29%
3.	S2		84330	44%
4.	S3		16523	9%
5.	Spesialis		2063	1%
6.	Profesi		2201	1%
	Tidak Tetap		31317	16%
	Jumlah		192944	100%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.57 Rasio Mahasiswa per Dosen (Tenaga Edukatif) Tahun 2012

No.	Lembaga	Tahun	
		2011/2012	
1.	Universitas		1355
2.	Institut		385
3.	Sekolah Tinggi		995
4.	Akademi		846
5.	Politeknik		572
	Rata - Rata		899

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.58 Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	43225	44254	58699	53993	47354
2	Non-PNS	190338	189501	218136	213583	227745
	Jumlah	233563	233755	276835	267576	275099

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.59 Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	2%	25%	-9%	-14%
2	Non-PNS	0%	13%	-2%	6%
	Jumlah	0%	16%	-3%	3%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013



Tabel III.60 Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	1002604	1079243	1106430	1056209	1072735
2	Non-PNS	442528	490083	521554	588716	477541
Jumlah		1385676	1445132	1569326	1627984	1550276

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.61 Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	7%	2%	-5%	2%
2	Non-PNS	10%	6%	11%	-23%
Jumlah		4%	8%	4%	-5%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.62 Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	322466	335513	343643	346898	358528
2	Non-PNS	299412	293523	293305	210007	155303
Jumlah		621878	629036	636948	556905	513831

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.63 Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	4%	2%	1%	3%
2	Non-PNS	-2%	0%	-40%	-35%
Jumlah		1%	1%	-14%	-8%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.64 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No	Status Kepegawaian	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	137876	149586	161027	162480	166868
2	Non-PNS	167976	164803	166136	102032	69040
Jumlah		305852	314389	327163	264512	235908

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013



Tabel III.65 Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No	Status Kepegawaian	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	8%	7%	1%	3%
2	Non-PNS	-2%	1%	-63%	-48%
Jumlah		3%	4%	-24%	-12%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.66 Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No	Status Kepegawaian	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	64375	70955	82782	78000	96188
2	Non-PNS	166412	175063	187619	97656	62994
Jumlah		230787	246018	270401	175656	159182

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.67 Pertumbuhan Jumlah Guru SMK Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No	Status Kepegawaian	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	9%	14%	-6%	19%
2	Non-PNS	5%	7%	-92%	-55%
Jumlah		6%	9%	-54%	-10%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.68 Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No.	Status Kepegawaian	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	8562	9635	10175	8936	7017
2	Non-PNS	7418	8412	8749	7166	3066
Jumlah		15980	18047	18924	16102	10083

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.69 Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Status Kepegawaian Tahun 2008 - 2012

No.	Status Kepegawaian	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	PNS	11%	5%	-14%	-27%
2	Non-PNS	12%	4%	-22%	-134%
Jumlah		11%	5%	-18%	-60%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013



Tabel III.70 Jumlah Guru SD Menurut Usia Tahun 2011 - 2012

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	<= 30	380456	23%	299413	19%	-27%
2	31-35	156673	10%	152945	10%	-2%
3	36-40	146005	9%	123372	8%	-18%
4	41-45	273807	17%	249275	16%	-10%
5	46-50	310528	19%	311457	20%	0%
6	51-55	229673	14%	255088	16%	10%
7	>=56	147783	9%	158726	10%	7%
Jumlah		1644925	100%	1550276	100%	-6%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.71 Jumlah Guru SMP Menurut Usia Tahun 2011 - 2012

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	<= 30	97961	18%	69790	14%	-40%
2	31-35	80223	14%	69374	14%	-16%
3	36-40	79920	14%	66392	13%	-20%
4	41-45	110830	20%	101834	20%	-9%
5	46-50	106763	19%	109622	21%	3%
6	51-55	59042	11%	67730	13%	13%
7	>=56	22166	4%	29089	6%	24%
Jumlah		556905	100%	513831	100%	-8%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.72 Jumlah Guru SMA Menurut Usia Tahun 2011 - 2012

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	<= 30	46204	17%	31279	13%	-48%
2	31-35	44118	17%	37033	16%	-19%
3	36-40	40089	15%	35143	15%	-14%
4	41-45	48302	18%	42648	18%	-13%
5	46-50	44712	17%	45374	19%	1%
6	51-55	28546	11%	29667	13%	4%
7	>=56	12541	5%	14764	6%	15%
Jumlah		264512	100%	235908	100%	-12%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013



Tabel III.73 Jumlah Guru SMK Menurut Usia Tahun 2011 - 2012

No.	Kelompok Umur	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	<= 30	37742	21%	28459	18%	-33%
2	31-35	32506	19%	28851	18%	-13%
3	36-40	28381	16%	25725	16%	-10%
4	41-45	28943	16%	26219	16%	-10%
5	46-50	26076	15%	26320	17%	1%
6	51-55	15088	9%	16001	10%	6%
7	>=56	6920	4%	7607	5%	9%
Jumlah		175656	100%	159182	100%	-10%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.74 Jumlah Guru SLB Menurut Usia Tahun 2012

No.	Kelompok Umur	Tahun	Rasio
		2011/2012	
1	<= 30	1361	13%
2	31-35	896	9%
3	36-40	1190	12%
4	41-45	2075	21%
5	46-50	2594	26%
6	51-55	1347	13%
7	>=56	620	6%
Jumlah		10083	100%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.75 Jumlah Guru TK Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2011 - 2012

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	< S1	212688	79%	195968	71%	-9%
2	>= S1	54888	21%	79131	29%	31%
Jumlah		267576	100%	275099	100%	3%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.76 Jumlah Guru SD Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2011 - 2012

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	< S1	1061227	65%	729281	47%	-46%
2	>= S1	583698	35%	820995	53%	29%
Jumlah		1644925	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013



Tabel III.77 Jumlah Guru SMP Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2011 - 2012

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	< S1	108793	20%	79434	15%	-37%
2	>= S1	448112	80%	434397	85%	-3%
Jumlah		556905	100%	513831	100%	-8%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.78 Jumlah Guru SMA Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2011 - 2012

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	< S1	17296	7%	13048	6%	-33%
2	>= S1	247216	93%	222860	94%	-11%
Jumlah		264512	100%	235908	100%	-12%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.79 Jumlah Guru SMK Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2011 - 2012

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	< S1	18445	11%	13349	8%	-38%
2	>= S1	157211	89%	145833	92%	-8%
Jumlah		175656	100%	159182	100%	-10%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.80 Jumlah Guru SLB Menurut Ijazah Tertinggi Tahun 2011 - 2012

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2010/2011		2011/2012		
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	
1	< S1	6079	38%	2856	28%	-113%
2	>= S1	10023	62%	7227	72%	-39%
Jumlah		16102	100%	10083	100%	-60%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.81 Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	7753	7770	9247	8541	8614
2	Perempuan	225810	225985	267588	259035	266485
Jumlah		233563	233755	276835	267576	275099

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

**Tabel III.82 Pertumbuhan Jumlah Guru TK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012**

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	0%	16%	-8%	1%
2	Perempuan	0%	16%	-3%	3%
Jumlah		0%	16%	-3%	3%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.83 Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	591701	635247	1430853	624241	584752
2	Perempuan	853431	934079	197131	1020684	965524
Jumlah		1445132	1569326	1627984	1644925	1550276

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.84 Pertumbuhan Jumlah Guru SD Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	7%	56%	-129%	-7%
2	Perempuan	9%	-374%	81%	-6%
Jumlah		8%	4%	1%	-6%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.85 Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	316755	318628	310338	248832	226305
2	Perempuan	305123	310408	326610	308073	287526
Jumlah		621878	629036	636948	556905	513831

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.86 Pertumbuhan Jumlah Guru SMP Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	1%	-3%	-25%	-10%
2	Perempuan	2%	5%	-6%	-7%
Jumlah		1%	1%	-14%	-8%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013



Tabel III.87 Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	159864	189200	165457	121930	107581
2	Perempuan	145988	125189	161706	142582	128327
Jumlah		305852	314389	327163	264512	235908

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.88 Pertumbuhan Jumlah Guru SMA Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	16%	-14%	-36%	-13%
2	Perempuan	-17%	23%	-13%	-11%
Jumlah		3%	4%	-24%	-12%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.89 Jumlah Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	139749	148826	159917	92948	82792
2	Perempuan	91038	97192	110484	82708	7,390
Jumlah		230787	246018	270401	175656	159182

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

Tabel III.90 Pertumbuhan Guru SMK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	6%	7%	-72%	-12%
2	Perempuan	6%	12%	-34%	-8%
Jumlah		6%	9%	-54%	-10%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.91 Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012

No.	Jenis Kelamin	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	5895	7008	7618	5326	3462
2	Perempuan	10085	11025	11306	10776	6621
Jumlah		15980	18033	18924	16102	10083

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

**Tabel III.92 Pertumbuhan Jumlah Guru SLB Menurut Jenis Kelamin Tahun 2008 - 2012**

No.	Jenis Kelamin	Tahun			
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Laki-laki	16%	8%	-43%	-54%
2	Perempuan	9%	2%	-5%	-63%
Jumlah		11%	5%	-18%	-60%

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diolah, 2013

Tabel III.93 Perkembangan Rasio Siswa Per Guru Tahun 2008 - 2012

No	Perkembangan Rasio	Tahun				
		2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
1	Siswa Per Guru TK		12	15	15	16
2	Siswa Per Guru SD	19	19	17	18	20
3	Siswa Per Guru SMP (termasuk kepala sekolah)	14	14	15	17	18
4	Siswa Per Guru SMA (termasuk kepala sekolah)	12	12	12	12	18
5	Siswa Per Guru SMK (termasuk kepala sekolah)	12	13	13	13	25
6	Siswa Per Guru SLB*					8

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013

- Untuk Perkembangan Rasio Siswa Per Guru SLB Tahun 2007/2008 sampai 2010/2011 tidak tersedia datanya.

Tabel III.94 Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2013

No	SDM Kesehatan	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Dokter spesialis	16574	3%	27333	4%	38895	4%
2.	Dokter umum	33172	5%	37364	5%	42398	5%
3.	Dokter gigi	10575	2%	11826	2%	13114	1%
4.	Perawat	230280	35%	235496	33%	296126	33%
5.	Bidan	120924	18%	126276	18%	136917	15%
6.	Kefarmasian	25439	4%	31223	4%	46764	5%
7.	Tenaga kesehatan lainnya	99631	15%	97904	14%	125609	14%
8.	Tenaga Nonnakes	124694	19%	139812	20%	194272	22%
	Total	661289	100%	707234	100%	894095	100%

Sumber : Profil Kesehatan, diolah, 2013



Tabel III.95 Pertumbuhan Jumlah PNS yang Menduduki Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2012 - 2013

No	SDM Kesehatan	2011/2012	2012/2013
1.	Dokter spesialis	39%	30%
2.	Dokter umum	11%	12%
3.	Dokter gigi	11%	10%
4.	Perawat	2%	20%
5.	Bidan	4%	8%
6.	Kefarmasian	19%	33%
7.	Tenaga kesehatan lainnya	-2%	22%
8.	Tenaga Nonnakes	11%	28%
	Total	6%	21%

Sumber : Profil Kesehatan, diolah, 2013

Tabel III.96 Jumlah Total PNS (Pusat-Daerah) yang Menduduki Jabatan Auditor Tahun 2011-2013

No.	Klasifikasi Auditor	Tahun				Pertumbuhan 2011 - 2012
		2011		2012		
		Jumlah	%	Jumlah	%	
Auditor Ahli						
1	Utama	8	0%	11	0%	27%
2	Madya	1223	16%	1233	15%	1%
3	Muda	2556	33%	2553	32%	0%
4	Pertama	1612	21%	1770	22%	9%
Auditor Terampil						
1	Penyelia	1171	15%	1110	14%	-5%
2	Pelaksana lanjutan	681	9%	658	8%	-3%
3	Pelaksana	586	7%	761	9%	23%
Jumlah Total Auditor		7837	100%	8096	100%	

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), diolah, 2013



Tabel III.97 Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2011 - 2013

No.	Jenjang	Tahun					
		2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pemeriksa pertama	3488	70%	3561	68%	3416	66%
2	Pemeriksa muda	1223	25%	1393	27%	1457	28%
3	Pemeriksa madya	253	5%	259	5%	279	5%
4	Pemeriksa utama	8	0,16%	7	0,13%	7	0,14%
Jumlah		4972	100%	5220	100%	5159	100%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2013

Tabel III.98 Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenjang Tahun 2011 - 2013

No.	Jenjang	Tahun	
		2011/2012	2012/2013
1	Pemeriksa pertama	2%	-4%
2	Pemeriksa muda	12%	4%
3	Pemeriksa madya	2%	7%
4	Pemeriksa utama	-14%	0%
Jumlah Pemeriksa		5%	-1%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2013

Tabel III.99 Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2011 - 2013

No.	Kategori Usia	Tahun					
		2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	>30 tahun	1718	35%	1445	28%	1443	28%
2	30 – 40 tahun	1982	40%	2347	45%	2332	45%
3	40 – 50 tahun	826	17%	947	18%	937	18%
4	>50 tahun	446	9%	481	9%	447	9%
Jumlah		4972	100%	5220	100%	5159	100%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2013



Tabel III.100 Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Usia Tahun 2012 - 2013

No.	Kategori Usia	Tahun	
		2011/2012	2012/2013
1	>30 tahun	-19%	0%
2	30 – 40 tahun	16%	-1%
3	40 – 50 tahun	13%	-1%
4	>50 tahun	7%	-8%
Jumlah Pemeriksa		5%	-1%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2013

Tabel III.101 Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2013

No.	Kategori Pendidikan	Tahun					
		2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	SLTA	236	5%	206	4%	183	4%
2	D III	611	12%	590	11%	543	11%
3	D IV	64	1%	74	1%	73	1%
4	S1	3319	67%	3460	66%	3370	65%
5	S2	739	15%	885	17%	983	19%
6	S3	3	0,06%	5	0,10%	7	0,14%
Jumlah		4972	100%	5220	100%	5159	100%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2013

Tabel III.102 Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2013

No.	Kategori Pendidikan	Tahun	
		2011/2012	2012/2013
1	SLTA	-15%	-13%
2	D III	-4%	-9%
3	D IV	14%	-1%
4	S1	4%	-3%
5	S2	16%	10%
6	S3	40%	29%
Jumlah Pemeriksa		5%	-1%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2013



Tabel III.103 Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013

No.	Kategori	Tahun					
		2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Laki-laki	2976	60%	3114	60%	3071	60%
2	Perempuan	1996	40%	2106	40%	2088	40%
Jumlah		4972	100%	5220	100%	5159	100%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2013

Tabel III.104 Pertumbuhan Jumlah Pemeriksa Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2013

No.	Kategori Jenis Kelamin	Tahun	
		2011/2012	2012/2013
1	Laki-laki	4%	-1%
2	Perempuan	5%	-1%
Jumlah Pemeriksa		5%	-1%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), diolah, 2013

Tabel III.105 Jumlah Penyidik KPK Tahun 2009 - 2013

No.	Penyidik KPK	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah	81	77	83	51	75
2	Pertumbuhan		-5%	7%	-63%	32%

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2013

Tabel III.106 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenjang Tahun 2013

No.	Jenjang	2013	
		Jumlah	%
1	Penyidik muda	57	76%
2	Penyidik madya	15	20%
3	Penyidik utama	3	4%
Jumlah		75	100%

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2013

Tabel III.107 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

No.	Pendidikan	2013	
		Jumlah	%
1	S1	70	93%
2	S2	5	7%
Jumlah		75	100%

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2013



Tabel III.108 Jumlah Penyidik KPK Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Jenjang	2013	
		Jumlah	%
1	Laki-laki	69	92%
2	Perempuan	6	8%
Jumlah		75	100%

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2013

Tabel III.109 Jumlah SDM Dittipidkor dan Jajarannya di Seluruh Indonesia Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2013

No.	Pangkat/Golongan	2013	
		Jumlah	%
Polisi			
1.	Brigjen	1	0,0%
2.	Komisaris Besar Polisi (KBP)	6	0,2%
3.	Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)	45	1,7%
4.	Komisaris Polisi (Kopol)	82	3,1%
5.	Ajun Komisaris Polisi (AKP)	197	7,5%
6.	Inspektur Polisi Tk.I (IPTU)	81	3,1%
7.	Inspektur Polisi Tk. II (IPDA)	125	4,7%
8.	Bintara (BA)	2076	78,8%
Pegawai Negeri Sipil (PNS)			
9.	Golongan IV		
10.	Golongan III	8	0,3%
11.	Golongan II	14	0,5%
12.	Golongan I	1	0,0%
Jumlah		2636	100%

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, diolah, 2013

Tabel III.110 Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Berdasarkan Jenjang Tahun 2013

No.	Jenjang	2013	
		Jumlah	%
PKB Terampil			
1.	Pelaksana	894	5%
2.	Pelaksana Lanjutan	1627	9%
3.	Penyelia	3300	19%
PKB Ahli			
4.	Pertama	4640	27%
5.	Muda	4234	24%
6.	Madya	2355	13%
Jumlah		17460	100%

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2013



Tabel III.111 Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

No.	Pendidikan	2013	
		Jumlah	%
1.	SMA	8519	49%
2.	D1 – D3	2269	13%
3.	S1	6346	36%
4.	S2	326	2%
5.	S3		
Jumlah		17460	100%

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2013

Tabel III.112 Jumlah Penyuluh KB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2013

No.	Jenis Kelamin	2013	
		Jumlah	%
1.	Laki-Laki	8122	47%
2.	Perempuan	9338	53%
Jumlah		17460	100%

Sumber : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah, 2013

Tabel III.113 Jumlah Umum PNS Pusat dan PNS Daerah yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Tahun 2011 - 2012

Instansi	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Pusat	621893	27%	589772	26%	-5,45%
Provinsi	234053	10%	223275	10%	-4,83%
Kab/Kota	1446667	63%	1423997	64%	-1,59%
Total	2302613	100%	2237044	100%	-1,59%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.114 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 – 20	3447	0,15%	2964	0,13%	-16,30%
2.	21 – 25	126523	5,49%	135675	6,06%	6,75%
3.	26 – 30	399178	17,34%	416211	18,61%	4,09%
4.	31 – 35	407966	17,72%	429725	19,21%	5,06%
5.	36 – 40	335832	14,58%	337430	15,08%	0,47%
6.	41 – 45	348262	15,12%	326437	14,59%	-6,69%
7.	46 – 50	359006	15,59%	321089	14,35%	-11,81%
8.	51 – 55	300229	13,04%	248096	11,09%	-21,01%
9.	56 – 60	22040	0,96%	19181	0,86%	-14,91%
10.	61 – 65	129	0,01%	219	0,01%	41,10%
11.	65 +	1	0,00%	17	0,00%	94,12%
	Total	2302613	100%	2237044	100%	-2,93%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.115 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 – 20	2508	0,40%	2006	0,34%	-25,02%
2.	21 – 25	45442	7,31%	43521	7,38%	-4,41%
3.	26 – 30	97282	15,64%	99676	16,90%	2,40%
4.	31 – 35	96214	15,47%	99000	16,79%	2,81%
5.	36 – 40	89755	14,43%	86568	14,68%	-3,68%
6.	41 – 45	95530	15,36%	87971	14,92%	-8,59%
7.	46 – 50	100629	16,18%	90322	15,31%	-11,41%
8.	51 – 55	85629	13,77%	72595	12,31%	-17,95%
9.	56 – 60	8812	1,42%	7914	1,34%	-11,35%
10.	61 – 65	91	0,01%	182	0,03%	50,00%
11.	65 +	1	0,00%	17	0,00%	94,12%
	Total	621893	100%	589772	100%	-5,45%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.116 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 – 20	210	0,09%	177	0,08%	-18,64%
2.	21 – 25	6644	2,84%	7204	3,23%	7,77%
3.	26 – 30	24651	10,53%	25605	11,47%	3,73%
4.	31 – 35	31524	13,47%	32850	14,71%	4,04%
5.	36 – 40	30642	13,09%	30448	13,64%	-0,64%
6.	41 – 45	37603	16,07%	35628	15,96%	-5,54%
7.	46 – 50	48934	20,91%	44597	19,97%	-9,72%
8.	51 – 55	50352	21,51%	43819	19,63%	-14,91%
9.	56 – 60	3472	1,48%	2935	1,31%	-18,30%
10.	61 – 65	21	0,01%	12	0,01%	-75,00%
11.	65 +	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Total	234053	100%	223275	100%	-4,83%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.117 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Kelompok Umur Tahun 2011 - 2012

No.	Usia	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	18 – 20	729	0,05%	781	0,05%	6,66%
2.	21 – 25	74437	5,15%	84950	5,97%	12,38%
3.	26 – 30	277245	19,16%	290930	20,43%	4,70%
4.	31 – 35	280228	19,37%	297875	20,92%	5,92%
5.	36 – 40	215435	14,89%	220414	15,48%	2,26%
6.	41 – 45	215129	14,87%	202838	14,24%	-6,06%
7.	46 – 50	209443	14,48%	186170	13,07%	-12,50%
8.	51 – 55	164248	11,35%	131682	9,25%	-24,73%
9.	56 – 60	9756	0,67%	8332	0,59%	-17,09%
10.	61 – 65	17	0,00%	25	0,00%	32,00%
11.	65 +	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
	Total	1446667	100%	1423997	100%	-1,59%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.118 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	83245	3,62%	79352	3,55%	-4,91%
2.	SLTP	122228	5,31%	117418	5,25%	-4,10%
3.	SLTA	985557	42,80%	949182	42,43%	-3,83%
4.	D1	28859	1,25%	37018	1,65%	22,04%
5.	D II	98369	4,27%	99189	4,43%	0,83%
6.	D III	237027	10,29%	262442	11,73%	9,68%
7.	D IV	14669	0,64%	12733	0,57%	-15,20%
8.	S 1	694344	30,15%	649368	29,03%	-6,93%
9.	S 2	37561	1,63%	29776	1,33%	-26,15%
10.	S 3	754	0,03%	566	0,03%	-33,22%
	Total	2302613	100%	2237044	100%	-2,93%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.119 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	14649	2,36%	14004	2,37%	-4,61%
2.	SLTP	23825	3,83%	22801	3,87%	-4,49%
3.	SLTA	258160	41,51%	246664	41,82%	-4,66%
4.	D1	13202	2,12%	13000	2,20%	-1,55%
5.	D II	14930	2,40%	12333	2,09%	-21,06%
6.	D III	58150	9,35%	60174	10,20%	3,36%
7.	D IV	8206	1,32%	6934	1,18%	-18,34%
8.	S 1	207147	33,31%	192672	32,67%	-7,51%
9.	S 2	22937	3,69%	20667	3,50%	-10,98%
10.	S 3	687	0,11%	523	0,09%	-31,36%
	Total	621893	100%	589772	100%	-5,45%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.120 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	8418	3,60%	7935	3,55%	-6,09%
2.	SLTP	10950	4,68%	10355	4,64%	-5,75%
3.	SLTA	110900	47,38%	108110	48,42%	-2,58%
4.	D1	1404	0,60%	1451	0,65%	3,24%
5.	D II	2539	1,08%	2351	1,05%	-8,00%
6.	D III	22617	9,66%	24665	11,05%	8,30%
7.	D IV	1089	0,47%	1041	0,47%	-4,61%
8.	S 1	71412	30,51%	63935	28,64%	-11,69%
9.	S 2	4692	2,00%	3411	1,53%	-37,55%
10.	S 3	32	0,01%	21	0,01%	-52,38%
	Total	234053	100%	223275	100%	-4,83%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.121 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Pendidikan Tahun 2011 - 2012

No.	Pendidikan	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	SD	60178	4,16%	57413	4,03%	-4,82%
2.	SLTP	87453	6,05%	84262	5,92%	-3,79%
3.	SLTA	616497	42,61%	594408	41,74%	-3,72%
4.	D1	14253	0,99%	22567	1,58%	36,84%
5.	D II	80900	5,59%	84505	5,93%	4,27%
6.	D III	156260	10,80%	177603	12,47%	12,02%
7.	D IV	5374	0,37%	4758	0,33%	-12,95%
8.	S 1	415785	28,74%	392761	27,58%	-5,86%
9.	S 2	9932	0,69%	5698	0,40%	-74,31%
10.	S 3	35	0,00%	22	0,00%	-59,09%
	Total	1446667	100%	1423997	100%	-1,59%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.122 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	1395276	60,60%	1297922	58,02%	-7,50%
2.	Perempuan	907337	39,40%	939122	41,98%	3,38%
	Total	2302613	100%	2237044	100%	-2,93%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.123 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	397140	63,86%	368122	62,42%	-7,88%
2.	Perempuan	224753	36,14%	221650	37,58%	-1,40%
	Total	621893	100%	589772	100%	-5,45%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.124 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	148835	63,59%	138115	61,86%	-7,76%
2.	Perempuan	85218	36,41%	85160	38,14%	-0,07%
	Total	234053	100%	223275	100%	-4,83%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.125 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Jenis Kelamin Tahun 2011 - 2012

No.	Jenis Kelamin	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Laki-laki	849301	58,71%	791685	55,60%	-7,28%
2.	Perempuan	597366	41,29%	632312	44,40%	5,53%
	Total	1446667	100%	1423997	100%	-1,59%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.126 Jumlah Total PNS (PNS Pusat dan PNS Daerah) yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	20652	0,90%	16076	0,72%	-28,46%
2.	Ib	13921	0,60%	17104	0,76%	18,61%
3.	Ic	42917	1,86%	36634	1,64%	-17,15%
4.	Id	26626	1,16%	29251	1,31%	8,97%
5.	IIa	378881	16,45%	334996	14,97%	-13,10%
6.	IIb	277748	12,06%	318879	14,25%	12,90%
7.	IIc	240398	10,44%	259992	11,62%	7,54%
8.	IId	108639	4,72%	121751	5,44%	10,77%
9.	IIIa	505117	21,94%	507263	22,68%	0,42%
10.	IIIb	338690	14,71%	343285	15,35%	1,34%



Lanjutan Tabel III.126

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
11.	IIIc	156534	6,80%	139562	6,24%	-12,16%
12.	IIId	127675	5,54%	83674	3,74%	-52,59%
13.	IVa	38912	1,69%	21802	0,97%	-78,48%
14.	IVb	18774	0,82%	4656	0,21%	-303,22%
15.	IVc	5762	0,25%	1612	0,07%	-257,44%
16.	IVd	1181	0,05%	427	0,02%	-176,58%
17.	IVe	186	0,01%	80	0,00%	-132,50%
	Total	2302613	100%	2237044	100%	-2,93%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.127 Jumlah PNS Pusat yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	1665	0,27%	1396	0,24%	-19,27%
2.	Ib	2009	0,32%	2053	0,35%	2,14%
3.	Ic	5564	0,89%	4996	0,85%	-11,37%
4.	Id	6349	1,02%	5892	1,00%	-7,76%
5.	IIa	75555	12,15%	69259	11,74%	-9,09%
6.	IIb	60378	9,71%	57918	9,82%	-4,25%
7.	IIc	63926	10,28%	67258	11,40%	4,95%
8.	IId	38360	6,17%	40463	6,86%	5,20%
9.	IIIa	144557	23,24%	143274	24,29%	-0,90%
10.	IIIb	119523	19,22%	120557	20,44%	0,86%
11.	IIIc	43808	7,04%	40037	6,79%	-9,42%
12.	IIId	41429	6,66%	28259	4,79%	-46,60%
13.	IVa	11044	1,78%	5800	0,98%	-90,41%
14.	IVb	5589	0,90%	1699	0,29%	-228,96%
15.	IVc	1275	0,21%	522	0,09%	-144,25%
16.	IVd	698	0,11%	315	0,05%	-121,59%
17.	IVe	164	0,03%	74	0,01%	-121,62%
	Total	621893	100%	589772	100%	-5,45%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013



Tabel III.128 Jumlah PNS Daerah Provinsi yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	1644	0,70%	1318	0,59%	-24,73%
2.	Ib	1074	0,46%	1288	0,58%	16,61%
3.	Ic	4079	1,74%	3507	1,57%	-16,31%
4.	Id	1863	0,80%	2212	0,99%	15,78%
5.	Ila	35829	15,31%	31178	13,96%	-14,92%
6.	Ilb	15221	6,50%	19682	8,82%	22,67%
7.	Ilc	19786	8,45%	20221	9,06%	2,15%
8.	Ild	11435	4,89%	12060	5,40%	5,18%
9.	IIla	43288	18,49%	42041	18,83%	-2,97%
10.	IIlb	47954	20,49%	49023	21,96%	2,18%
11.	IIlc	20588	8,80%	19139	8,57%	-7,57%
12.	IIld	21855	9,34%	17240	7,72%	-26,77%
13.	IVa	5880	2,51%	3318	1,49%	-77,22%
14.	IVb	2528	1,08%	731	0,33%	-245,83%
15.	IVc	735	0,31%	237	0,11%	-210,13%
16.	IVd	283	0,12%	78	0,03%	-262,82%
17.	IVe	11	0,00%	2	0,00%	-450,00%
	Total	234053	100%	223275	100%	-4,83%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.129 Jumlah PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Umum Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1.	Ia	17343	1,20%	13362	0,94%	-29,79%
2.	Ib	10838	0,75%	13763	0,97%	21,25%
3.	Ic	33274	2,30%	28131	1,98%	-18,28%
4.	Id	18414	1,27%	21147	1,49%	12,92%
5.	Ila	267497	18,49%	234559	16,47%	-14,04%
6.	Ilb	202149	13,97%	241279	16,94%	16,22%
7.	Ilc	156686	10,83%	172513	12,11%	9,17%
8.	Ild	58844	4,07%	69228	4,86%	15,00%
9.	IIla	317272	21,93%	321948	22,61%	1,45%
10.	IIlb	171213	11,83%	173705	12,20%	1,43%
11.	IIlc	92138	6,37%	80386	5,65%	-14,62%
12.	IIld	64391	4,45%	38175	2,68%	-68,67%
13.	IVa	21988	1,52%	12684	0,89%	-73,35%
14.	IVb	10657	0,74%	2226	0,16%	-378,75%
15.	IVc	3752	0,26%	853	0,06%	-339,86%



Lanjutan Tabel III.129

No.	Gol/ Ruang	2011		2012		Pertumbuhan 2011 - 2012
		Jumlah	%	Jumlah	%	
16.	IVd	200	0,01%	34	0,00%	-488,24%
17.	IVe	11	0,00%	4	0,00%	-175,00%
	Total	1446667	100%	1423997	100%	-1,59%

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, diolah, 2013

Tabel III.130 Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat PIM I, II, III, IV dan Prajabatan Tahun 2009 - 2012

No	Jenis diklat	2009		2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Diklat Prajabatan Gol. I/II	160410	61	144308	51	128364	50	43626	45
2	Diklat Prajabatan Gol. III	80727	31	114884	41	105729	41	35667	37
3	Diklatpim Tk. IV	12880	5	13071	5	13339	5	12284	13
4	Diklatpim Tk. III	6433	2	5883	2	5662	2	4615	5
5	Diklatpim tk. II	2325	1	2090	1	1910	1	1414	1
6	Diklatpim Tk. I	57	0	30	0	59	0	30	0
	Jumlah Total	262832	100	296467	100	269945	100	97636	100

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2013

Tabel III.131 Jumlah PNS yang Pernah Ikut Diklat Fungsional dan Teknis Tahun 2009 - 2012

No	Jenis diklat	2009		2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Diklat Fungsional	5116	27%	4181	26%	3631	24%	10225	12%
2	diklat teknis	13570	73%	12020	74%	11251	76%	77464	88%
	Jumlah Total	18686	100%	16201	100%	14882	100%	87689	100%

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2013

Tabel III.132 Jumlah Keseluruhan Program Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan yang Sudah Diakreditasi Tahun 2012

No	Program Diklat	Instansi Pusat 2012			Pemda 2012		
		A	B	C	A	B	C
1.	Prajab Gol. I dan II	5	32	3	4	27	2
2.	Prajab Gol. III	9	27	2	4	27	2
3.	Kepemimpinan TK.IV	6	28	2	3	28	2
4.	Kepemimpinan TK.III	7	26	2	4	26	2
5.	Kepemimpinan TK.II				2	1	
	Jumlah Total	27	113	9	17	109	8

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), 2013



Tabel III.133 Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2010 - 2013

NO.	KLASIFIKASI WI	2010		2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Widyaiswara Pertama									
1.	Gol. III/a	230	9%	223	9%	251	9%	269	10%
2.	Gol. III/b	160	6%	174	7%	180	7%	204	7%
Widyaiswara Muda									
3.	Gol. III/c	277	11%	314	12%	319	12%	349	13%
4.	Gol. III/d	398	16%	420	16%	417	16%	431	16%
Widyaiswara Madya									
5.	Gol. IV/a	649	25%	599	23%	563	21%	512	19%
6.	Gol. IV/b	353	14%	404	15%	457	17%	500	18%
7.	Gol. IV/c	224	9%	224	9%	228	9%	236	9%
Widyaiswara Utama									
8.	Gol. IV/d	212	8%	199	8%	189	7%	185	7%
9.	Gol. IV/e	45	2%	50	2%	51	2%	48	2%
	Total	2548	100%	2607	100%	2655	100%	2734	100%

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2013

Tabel III.134 Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Kementerian/Lembaga Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2010 - 2013

NO.	KLASIFIKASI WI	2010-2011	2011 - 2012	2012-2013
Widyaiswara Pertama				
1.	Gol. III/a	-3%	11%	7%
2.	Gol. III/b	8%	3%	12%
Widyaiswara Muda				
3.	Gol. III/c	12%	2%	9%
4.	Gol. III/d	5%	-1%	3%
Widyaiswara Madya				
5.	Gol. IV/a	-8%	-6%	-10%
6.	Gol. IV/b	13%	12%	9%
7.	Gol. IV/c	0%	2%	3%
Widyaiswara Utama				
8.	Gol. IV/d	-7%	-5%	-2%
9.	Gol. IV/e	10%	2%	-6%
	Total	2%	2%	3%

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2013



Tabel III.135 Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2010 - 2013

NO.	KLASIFIKASI WI	2010		2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Widyaiswara Pertama									
1.	Gol. III/a	15	2%	15	2%	17	2%	20	3%
2.	Gol. III/b	34	5%	38	6%	47	7%	54	7%
Widyaiswara Muda									
3.	Gol. III/c	68	10%	80	12%	84	12%	113	16%
4.	Gol. III/d	70	10%	76	11%	85	12%	101	14%
Widyaiswara Madya									
5.	Gol. IV/a	118	17%	110	16%	116	17%	121	17%
6.	Gol. IV/b	98	14%	97	14%	99	14%	108	15%
7.	Gol. IV/c	125	18%	113	16%	98	14%	85	12%
Widyaiswara Utama									
8.	Gol. IV/d	144	21%	138	20%	130	19%	107	15%
9.	Gol. IV/e	16	2%	18	3%	16	2%	16	2%
	Total	688	100%	685	100%	692	100%	725	100%

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2013

Tabel III.136 Pertumbuhan Jumlah Widyaiswara Pemerintah Daerah Menurut Jenjang dan Golongan Ruang Tahun 2010 - 2013

NO.	KLASIFIKASI WI	2010-2011	2011 - 2012	2012-2013
Widyaiswara Pertama				
1.	Gol. III/a	0%	12%	15%
2.	Gol. III/b	11%	19%	13%
Widyaiswara Muda				
3.	Gol. III/c	15%	5%	26%
4.	Gol. III/d	8%	11%	16%
Widyaiswara Madya				
5.	Gol. IV/a	-7%	5%	4%
6.	Gol. IV/b	-1%	2%	8%
7.	Gol. IV/c	-11%	-15%	-15%
Widyaiswara Utama				
8.	Gol. IV/d	-4%	-6%	-21%
9.	Gol. IV/e	11%	-13%	0%
	Total	0%	1%	5%

Sumber : Lembaga Administrasi Negara (LAN), diolah, 2013



Tabel III.137 Gaji Pokok PNS Golongan I Tahun 2011 - 2013

MKG	Golongan I/a			MKG	Golongan I/b		
	2011	2012	2013		2011	2012	2013
0	1.115.000,-	1.260.000,-	1.323.000,-	0			
1				1			
2	1.207.500,-	1.297.600,-	1.364.700,-	2			
3				3	1.276.000,-	1.372.700,-	1.444.800,-
4	1.240.900,-	1.336.400,-	1.407.600,-	4			
5				5	1.311.300,-	1.413.700,-	1.490.300,-
6	1.275.300,-	1.376.300,-	1.452.000,-	6			
7				7	1.404.600,-	1.455.900,-	1.537.200,-
8	1.310.500,-	1.417.400,-	1.497.700,-	8			
9				9	1.384.800,-	1.499.400,-	1.585.600,-
10	1.346.800,-	1.459.700,-	1.544.900,-	10			
11				11	1.423.100,-	1.544.100,-	1.635.600,-
12	1.384.000,-	1.305.300,-	1.593.500,-	12			
13				13	1.462.500,-	1.590.300,-	1.687.100,-
14	1.422.300,-	1.548.200,-	1.643.700,-	14			
15				15	1.503.000,-	1.637.700,-	1.740.200,-
16	1.461.600,-	1.594.400,-	1.695.500,-	16			
17				17	1.544.500,-	1.686.600,-	1.795.000,-
18	1.502.000,-	1.642.000,-	1.748.900,-	18			
19				19	1.587.200,-	1.737.000,-	1.851.600,-
20	1.543.600,-	1.691.000,-	1.804.000,-	20			
21				21	1.631.100,-	1.788.900,-	1.909.900,-
22	1.586.300,-	1.741.500,-	1.860.800,-	22			
23				23	1.676.200,-	1.842.300,-	1.970.000,-
24	1.630.100,-	1.793.500,-	1.919.400,-	24			
25				25	1.722.600,-	1.897.300,-	2.032.100,-
26	1.675.200,-	1.847.000,-	1.979.900,-	26			
27				27	1.770.200,-	1.953.900,-	2.096.100,-



Lanjutan Tabel III.137

MKG	Golongan I/c			MKG	Golongan I/d		
	2011	2012	2013		2011	2012	2013
0				0			
1				1			
2				2			
3	1.330.000,-	1.430.800,-	1.505.900,-	3	1.386.300,-	1.491.300,-	1.569.600,-
4				4			
5	1.366.800,-	1.473.500,-	1.553.300,-	5	1.424.600,-	1.535.800,-	1.619.000,-
6				6			
7	1.404.600,-	1.517.500,-	1.602.300,-	7	1.464.000,-	1.581.700,-	1.670.000,-
8				8			
9	1.443.400,-	1.562.800,-	1.652.700,-	9	1.504.500,-	1.628.900,-	1.722.600,-
10				10			
11	1.483.300,-	1.677.500,-	1.704.800,-	11	1.546.100,-	1.677.500,-	1.776.900,-
12				12			
13	1.524.400,-	1.657.500,-	1.758.500,-	13	1.588.900,-	1.727.600,-	1.832.800,-
14				14			
15	1.566.500,-	1.707.000,-	1.813.800,-	15	1.632.800,-	1.779.200,-	1.890.600,-
16				16			
17	1.609.900,-	1.758.000,-	1.871.000,-	17	1.677.900,-	1.832.300,-	1.950.100,-
18				18			
19	1.654.400,-	1.810.500,-	1.929.900,-	19	1.724.400,-	1.887.000,-	2.011.500,-
20				20			
21	1.700.100,-	1.864.500,-	1.990.700,-	21	1.772.000,-	1.943.400,-	2.074.900,-
22				22			
23	1.747.100,-	1.920.200,-	2.053.400,-	23	1.821.100,-	2.001.400,-	2.140.200,-
24				24			
25	1.795.500,-	1.977.500,-	2.118.100,-	25	1.871.400,-	2.061.200,-	2.207.600,-
26				26			
27	1.845.100,-	2.036.600,-	2.184.800,-	27	1.923.200,-	2.122.700,-	2.277.200,-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.



Tabel III.138 Gaji Pokok PNS Golongan II Tahun 2011 - 2013

MKG	Golongan II/a			MKG	Golongan II/b		
	2011	2012	2013		2011	2012	2013
0	1.505.400,-	1.624.700,-	1.714.100,-	0			
1	1.526.200,-	1.648.900,-	1.741.100,-	1			
2				2			
3	1.568.400,-	1.698.200,-	1.795.900,-	3	1.634.800,-	1.770.000,-	1.871.900
4				4			
5	1.611.800,-	1.748.900,-	1.852.500,-	5	1.680.000,-	1.822.900,-	1.930.900
6				6			
7	1.656.400,-	1.801.100,-	1.910.800,-	7	1.726.400,-	1.877.300,-	1.991.700
8				8			
9	1.702.200,-	1.854.900,-	1.971.000,-	9	1.774.200,-	1.933.300,-	2.054.400
10				10			
11	1.749.300,-	1.910.300,-	2.033.100,-	11	1.823.200,-	1.991.100,-	2.119.100
12				12			
13	1.797.600,-	1.967.300,-	2.097.100,-	13	1.873.700,-	1.967.300,-	2.185.800
14				14			
15	1.847.300,-	2.026.000,-	2.163.200,-	15	1.925.500,-	2.026.000,-	2.254.700
16				16			
17	1.898.400,-	2.086.500,-	2.231.300,-	17	1.978.700,-	2.174.800,-	2.325.700
18				18			
19	1.950.900,-	2.148.800,-	2.301.600,-	19	2.033.500,-	2.148.800,-	2.398.900
20				20			
21	2.004.900,-	2.213.000,-	2.374.100,-	21	2.089.700,-	2.306.600,-	2.474.500
22				22			
23	2.060.300,-	2.279.100,-	2.448.800,-	23	2.147.500,-	2.375.500,-	2.552.400
24				24			
25	2.117.300,-	2.347.100,-	2.526.000,-	25	2.206.900,-	2.446.400,-	2.632.800
26				26			
27	2.175.900,-	2.417.200,-	2.605.500,-	27	2.267.900,-	2.519.400,-	2.715.700
28				28			
29	2.236.100,-	2.489.400,-	2.687.600,-	29	2.330.600,-	2.594.700,-	2.801.300
30				30			
31	2.297.900,-	2.563.700,-	2.772.200,-	31	2.395.100,-	2.672.100,-	2.889.500
32				32			
33	2.361.400,-	2.640.200,-	2.859.500,-	33	2.461.300,-	2.751.900,-	2.980.500



Lanjutan Tabel III.138

MKG	Golongan II/c			MKG	Golongan II/d		
	2011	2012	2013		2011	2012	2013
0				0			
1				1			
2				2			
3	1.703.900,-	1.844.900,-	1.951.100,-	3	1.776.000,-	1.922.900,-	2.033.600
4				4			
5	1.751.000,-	1.900.000,-	2.012.500,-	5	1.825.100,-	1.980.300,-	2.097.700
6				6			
7	1.799.500,-	1.956.700,-	2.075.900,-	7	1.875.600,-	2.039.500,-	2.163.700
8				8			
9	1.849.200,-	2.015.100,-	2.141.300,-	9	1.927.400,-	2.100.400,-	2.231.900
10				10			
11	1.900.400,-	2.075.300,-	2.208.700,-	11	1.980.800,-	2.163.100,-	2.302.200
12				12			
13	1.952.900,-	2.137.200,-	2.278.300,-	13	2.035.500,-	2.277.700,-	2.374.700
14				14			
15	2.006.900,-	2.201.100,-	2.350.100,-	15	2.091.800,-	2.294.200,-	2.449.500
16				16			
17	2.062.400,-	2.266.800,-	2.424.100,-	17	2.149.700,-	2.362.700,-	2.526.600
18				18			
19	2.119.500,-	2.334.500,-	2.500.400,-	19	2.209.100,-	2.433.200,-	2.606.200
20				20			
21	2.178.100,-	2.404.200,-	2.579.200,-	21	2.270.200,-	2.505.900,-	2.688.300
22				22			
23	2.238.300,-	2.475.900,-	2.660.400,-	23	2.333.000,-	2.580.700,-	2.772.900
24				24			
25	2.300.200,-	2.549.900,-	2.744.200,-	25	2.397.500,-	2.657.700,-	2.860.300
26				26			
27	2.363.900,-	2.626.000,-	2.830.600,-	27	2.463.800,-	2.737.100,-	2.950.300
28				28			
29	2.429.200,-	2.704.400,-	2.919.800,-	29	2.532.000,-	2.818.800,-	3.013.300
30				30			
31	2.496.400,-	2.765.200,-	3.011.700,-	31	2.602.000,-	2.903.000,-	3.139.100
32				32			
33	2.565.400,-	2.868.300,-	3.106.600,-	33	2.674.000,-	2.989.600,-	3.238.000

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.



Tabel III.139 Gaji Pokok PNS Golongan III Tahun 2011 - 2013

MKG	Golongan III/a			MKG	Golongan III/b		
	2011	2012	2013		2011	2012	2013
0	1.902.300,-	2.064.100,-	2.186.400,-	0	1.982.800,-	2.151.400,-	2.278.900
1				1			
2	1.954.900,-	2.125.700,-	2.255.200,-	2	2.037.600,-	2.215.700,-	2.350.600
3				3			
4	2.009.000,-	2.189.200,-	2.326.300,-	4	2.094.000,-	2.281.800,-	2.424.700
5				5			
6	2.064.500,-	2.245.600,-	2.399.500,-	6	2.151.900,-	2.349.900,-	2.501.000
7				7			
8	2.121.600,-	2.321.900,-	2.475.100,-	8	2.211.400,-	2.420.100,-	2.579.800
9				9			
10	2.180.300,-	2.391.200,-	2.553.100,-	10	2.272.500,-	2.492.400,-	2.661.100
11				11			
12	2.240.600,-	2.462.600,-	2.633.500,-	12	2.335.400,-	2.566.800,-	2.744.900
13				13			
14	2.302.600,-	2.536.100,-	2.716.400,-	14	2.400.000,-	2.643.400,-	2.831.300
15				15			
16	2.366.300,-	2.611.900,-	2.802.000,-	16	2.466.400,-	2.722.300,-	2.920.500
17				17			
18	2.431.700,-	2.689.800,-	2.890.000,-	18	2.534.600,-	2.803.600,-	3.012.500
19				19			
20	2.499.000,-	2.770.100,-	2.981.300,-	20	2.604.700,-	2.887.300,-	3.107.400
21				21			
22	2.568.100,-	2.852.900,-	3.075.100,-	22	2.676.770,-	2.973.500,-	3.205.200
23				23			
24	2.639.100,-	2.938.000,-	3.172.000,-	24	2.750.700,-	3.062.300,-	3.306.200
25				25			
26	2.712.100,-	3.025.800,-	3.271.900,-	26	2.826.800,-	3.153.700,-	3.410.300
27				27			
28	2.787.100,-	3.116.100,-	3.374.900,-	28	2.905.000,-	3.247.900,-	3.517.700
29				29			
30	2.864.200,-	3.209.100,-	3.481.200,-	30	2.985.300,-	3.344.900,-	3.628.500
31				31			
32	2.943.400,-	3.305.000,-	3.590.900,-	32	3.067.900,-	3.444.800,-	3.742.800



Lanjutan Tabel III.139

MKG	Golongan III/c			MKG	Golongan III/d		
	2011	2012	2013		2011	2012	2013
0	2.066.600,-	2.242.400,-	2.375.300,-	0	2.154.100,-	2.337.300,-	2.475.700
1				1			
2	2.123.800,-	2.309.400,-	2.450.100,-	2	2.213.600,-	2.407.100,-	2.553.700
3				3			
4	2.182.500,-	2.378.300,-	2.527.200,-	4	2.274.900,-	2.478.900,-	2.634.100
5				5			
6	2.242.900,-	2.449.300,-	2.606.800,-	6	2.337.800,-	2.552.900,-	2.717.100
7				7			
8	2.304.900,-	2.522.500,-	2.688.900,-	8	2.402.400,-	2.629.200,-	2.802.700
9				9			
10	2.368.700,-	2.597.800,-	2.773.600,-	10	2.468.900,-	2.707.700,-	2.891.000
11				11			
12	2.434.200,-	2.675.300,-	2.861.000,-	12	2.537.100,-	2.788.500,-	2.982.000
13				13			
14	2.501.500,-	2.755.200,-	2.951.100,-	14	2.607.300,-	2.871.800,-	3.075.900
15				15			
16	2.570.700,-	2.837.500,-	3.044.000,-	16	2.679.400,-	2.957.500,-	3.172.800
17				17			
18	2.641.800,-	2.922.200,-	3.139.900,-	18	2.753.500,-	3.045.800,-	3.272.700
19				19			
20	2.714.800,-	3.009.500,-	3.238.800,-	20	2.829.700,-	3.136.800,-	3.375.800
21				21			
22	2.789.900,-	3.099.300,-	3.340.800,-	22	2.907.900,-	3.230.400,-	3.482.100
23				23			
24	2.867.100,-	3.191.900,-	3.446.000,-	24	2.988.400,-	3.326.900,-	3.591.800
25				25			
26	2.946.400,-	3.287.200,-	3.554.600,-	26	3.071.000,-	3.426.200,-	3.704.900
27				27			
28	3.027.800,-	3.385.300,-	3.666.500,-	28	3.155.900,-	3.528.500,-	3.821.600
29				29			
30	3.111.600,-	3.486.400,-	3.782.000,-	30	3.243.200,-	3.633.800,-	3.942.000
31				31			
32	3.197.600,-	3.590.500,-	3.901.100,-	32	3.332.900,-	3.742.300,-	4.066.100

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.



Tabel III.140 Gaji Pokok PNS Golongan IV Tahun 2011 - 2013

MKG	Golongan IV/a			Golongan IV/b		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
0	2.245.200,-	2.436.100,-	2.580.500,-	2.340.200,-	2.539.200,-	2.689.600,-
1						
2	2.307.300,-	2.508.900,-	2.661.700,-	2.404.900,-	2.615.000,-	2.774.300,-
3						
4	2.371.100,-	2.583.800,-	2.745.600,-	2.471.400,-	2.693.100,-	2.861.700,-
5						
6	2.436.700,-	2.660.900,-	2.832.000,-	2.539.700,-	2.773.500,-	2.951.800,-
7						
8	2.504.000,-	2.740.400,-	2.921.200,-	2.610.000,-	2.856.300,-	3.044.800,-
9						
10	2.573.300,-	2.822.200,-	3.013.200,-	2.682.100,-	2.941.600,-	3.140.700,-
11						
12	2.644.500,-	2.906.500,-	3.108.100,-	2.756.300,-	3.029.400,-	3.239.600,-
13						
14	2.717.600,-	2.993.200,-	3.206.000,-	2.832.600,-	3.119.900,-	3.341.700,-
15						
16	2.792.800,-	3.082.600,-	3.307.000,-	2.910.900,-	3.213.000,-	3.446.900,-
17						
18	2.870.000,-	3.174.700,-	3.411.200,-	2.991.400,-	3.308.900,-	3.555.500,-
19						
20	2.949.400,-	3.269.400,-	3.518.600,-	3.074.100,-	3.407.700,-	3.667.400,-
21						
22	3.030.900,-	3.367.100,-	3.629.400,-	3.159.100,-	3.509.500,-	3.782.900,-
23						
24	3.114.800,-	3.467.600,-	3.743.700,-	3.246.500,-	3.614.300,-	3.902.100,-
25						
26	3.200.900,-	3.571.100,-	3.861.600,-	3.336.300,-	3.722.200,-	4.025.000,-
27						
28	3.289.400,-	3.677.800,-	3.983.300,-	3.428.600,-	3.833.300,-	4.151.700,-
29						
30	3.380.400,-	3.787.600,-	4.108.700,-	3.523.400,-	3.947.800,-	4.282.500,-
31						
32	3.473.900,-	3.900.600,-	4.238.100,-	3.620.800,-	4.065.600,-	4.417.400,-



Lanjutan Tabel III.140

MKG	Golongan IV/c			Golongan IV/d		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013
0	2.439.100,-	2.646.600,-	2.803.400,-	2.542.300,-	2.758.500,-	2.922.000,-
1						
2	2.506.600,-	2.725.600,-	2.891.700,-	2.612.600,-	2.840.900,-	3.014.000,-
3						
4	2.575.900,-	2.807.000,-	2.982.800,-	2.648.900,-	2.925.700,-	3.108.900,-
5						
6	2.647.200,-	2.890.800,-	3.076.700,-	2.759.100,-	3.013.100,-	3.206.800,-
7						
8	2.720.400,-	2.977.100,-	3.173.600,-	2.835.400,-	3.103.100,-	3.307.800,-
9						
10	2.795.600,-	3.066.000,-	3.273.600,-	2.913.900,-	3.195.700,-	3.412.000,-
11						
12	2.872.900,-	3.157.600,-	3.376.700,-	2.994.400,-	3.291.100,-	3.519.500,-
13						
14	2.952.400,-	3.251.800,-	3.483.000,-	3.077.300,-	3.389.400,-	3.630.300,-
15						
16	3.034.000,-	3.348.900,-	3.592.700,-	3.162.400,-	3.490.600,-	3.744.700,-
17						
18	3.117.900,-	3.448.900,-	3.705.900,-	3.249.800,-	3.594.800,-	3.862.600,-
19						
20	3.204.200,-	3.551.900,-	3.822.600,-	3.339.700,-	3.702.100,-	3.984.300,-
21						
22	3.292.800,-	3.657.900,-	3.943.000,-	3.432.100,-	3.812.700,-	4.109.700,-
23						
24	3.383.800,-	3.767.200,-	4.067.100,-	3.527.000,-	3.926.500,-	4.239.200,-
25						
26	3.477.400,-	3.879.600,-	4.195.200,-	3.624.500,-	4.043.700,-	4.372.700,-
27						
28	3.573.600,-	3.995.500,-	4.327.400,-	3.724.800,-	4.164.500,-	4.510.400,-
29						
30	3.672.400,-	4.114.800,-	4.463.700,-	3.827.800,-	4.288.800,-	4.652.500,-
31						
32	3.774.000,-	4.237.600,-	4.604.200,-	3.933.600,-	4.416.900,-	4.799.000,-



Lanjutan Tabel III.140

MKG	Golongan IV/e		
	2011	2012	2013
0	2.649.900,-	2.875.200,-	3.045.600,-
1			
2	2.723.100,-	2.961.100,-	3.141.500,-
3			
4	2.798.400,-	3.049.500,-	3.240.400,-
5			
6	2.875.800,-	3.140.500,-	3.342.500,-
7			
8	2.955.400,-	3.234.300,-	3.447.800,-
9			
10	3.037.100,-	3.330.900,-	3.556.400,-
11			
12	3.121.100,-	3.430.300,-	3.668.400,-
13			
14	3.207.400,-	3.532.800,-	3.783.900,-
15			
16	3.296.100,-	3.638.200,-	3.903.100,-
17			
18	3.387.300,-	3.746.900,-	4.026.000,-
19			
20	3.481.000,-	3.858.700,-	4.152.800,-
21			
22	3.577.200,-	3.973.900,-	4.283.600,-
23			
24	3.676.200,-	4.092.600,-	4.418.500,-
25			
26	3.777.800,-	4.214.800,-	4.557.700,-
27			
28	3.882.300,-	4.340.600,-	4.701.200,-
29			
30	3.989.700,-	4.470.200,-	4.849.300,-
31			
32	4.100.000,-	4.603.700,-	5.002.000,-

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012; dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013;

Catatan : MKG kepanjangannya adalah Masa Kerja Golongan.



Tabel III.141 Tunjangan Jabatan Struktural

No	Jabatan	Tunjangan Jabatan PNS		
		Keppres No.99/2000	Perpres No.3/2006	Perpres No.26/2007
1.	Eselon IA	4.500.000,-	4.500.000,-	5.500.000,-
2.	Eselon IB	3.500.000,-	3.500.000,-	4.375.000,-
3.	Eselon IIA	2.500.000,-	2.500.000,-	3.250.000,-
4.	Eselon IIB	1.500.000,-	1.500.000,-	2.025.000,-
5.	Eselon IIIA	600.000,-	900.000,-	1.260.000,-
6.	Eselon IIIB	450.000,-	675.000,-	980.000,-
7.	Eselon IVA	240.000,-	360.000,-	540.000,-
8.	Eselon IVB	210.000,-	315.000,-	490.000,-
9.	Eselon VA	150.000,-	225.000,-	360.000,-

Sumber : Badan Kepegawaian Negara, 2012

Tabel III.142 Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu Tahun 2013

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
1.	Peneliti	Rp.5.200.000,-	Rp. 1.100.000,-	No. 100 Tahun 2012
2.	Widyaiswara	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 59 Tahun 2007
3.	Perawat	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
4.	Pengawas Ketenagakerjaan	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 51 Tahun 2007
5.	Pengamat Meteorologi Dan Geofisika	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 56 Tahun 2007
6.	Penyuluh Kehutanan	A.Rp. 1.260.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 360.000,-	No. 19 Tahun 2013
7.	Pranata Hubungan Masyarakat	A.Rp. 650.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 29 Tahun 2007
8.	Pekerja Sosial	A.Rp. 790.000,- T.Rp. 525.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 61 Tahun 2007
9.	Teknisi Penerbangan	Rp.500.000,-	Rp. 260.000,-	No. 69 Tahun 2007
10.	Penguji Mutu Barang	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 70 Tahun 2007
11.	Jaksa	Rp.2.500.000,-	Rp. 600.000,-	No. 158 Tahun 2000
12.	Pemeriksa Bea Dan Cukai	A.Rp. 1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007
13.	Pranata Komputer	A.Rp. 1.200.000,- T.Rp. 425.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 39 Tahun 2007
14.	Teknisi Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
15.	Andalan Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007
16.	Adikara Siaran	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 68 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.142

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
17.	Polisi Kehutanan	A.Rp. 1.380.000,- T.Rp. 840.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 18 Tahun 2013
18.	Instruktur	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 58 Tahun 2007
19.	Pranata Nuklir	A.Rp. 1.400.000,- T.Rp. 450.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 55 Tahun 2007
20.	Pengawas Radiasi	A.Rp. 1.400.000,- T.Rp. 450.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 57 Tahun 2007
21.	Agen (BIN)	A.Rp. 1.100.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 48 Tahun 2007
22.	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan	Rp.450.000,-	Rp. 220.000,-	No. 31 Tahun 2007
23.	Arsiparis	A.Rp. 700.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 46 Tahun 2007
24.	Stastisi	A.Rp. 900.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 40 Tahun 2007
25.	Penera	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 70 Tahun 2007
26.	Pengendali Ekosistem Hutan	A.Rp. 600.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 34 Tahun 2007
27.	Operator Transmisi Sandi	A.Rp. 957.000,- T.Rp. 495.000,-	A.Rp. 264.000,- T.Rp. 197.000,-	No. 105 Tahun 2006
28.	Sandiman	Rp.1.500.000,-	Rp. 300.000,-	No. 79 Tahun 2008
29.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	A.Rp.5.000.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 60 Tahun 2007
30.	Perekayasa	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 31Tahun 2007
31.	Pemeriksa Paten	Rp.1.100.000,-	Rp. 300.000,-	No. 41 Tahun 2007
32.	Pemeriksa Merek	A.Rp.900.000,- T.Rp. 525.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 41 Tahun 2007
33.	Pemeriksa Pajak	A.Rp.1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007
34.	Guru	Rp. 389.000,-	Rp. 286.000,-	No. 108 Tahun 2007
35.	Penggerak Swadaya Masyarakat	A.Rp.500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 63 Tahun 2007
36.	Auditor	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 425.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 66 Tahun 2007
37.	Pengawas Sekolah	Rp. 725.000,-	Rp. 485.000,-	No. 108 Tahun 2007
38.	Pengamat Gunung Api	A.Rp.400.000,- T.Rp. 260.000,-	A.Rp. 260.000,- T.Rp. 230.000,-	No. 67 Tahun 2007
39.	Dokter	Rp.1.230.000,-	Rp. 278.000,-	No. 54 Tahun 2007
40.	Dokter Gigi	Rp.1.230.000,-	Rp. 278.000,-	No. 54 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.142

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
41.	Diplomat	Rp.1.400.000,-	Rp. 400.000,-	No. 54 Tahun 2007
42.	Pustakawan	A.Rp.700.000,- T.Rp. 350.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 47 Tahun 2007
43.	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	A.Rp.1.000.000,- T.Rp. 550.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 53 Tahun 2007
44.	Penyuluh KB	A.Rp.500.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 64 Tahun 2007
45.	Penyuluh Pertanian	A.Rp.1.500.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
46.	Pamong Belajar	Rp. 345.000,-	Rp. 225.000,-	No. 108 Tahun 2007
47.	Dosen	A.Rp.1.350.000,- T.Rp. 5.500.000,-	A.Rp. 375.000,- T.Rp. 1.350.000,-	No. 65 Tahun 2007
48.	Penyuluh Agama	A.Rp.500.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 50 Tahun 2007
49.	Analisis Kepegawaian	A.Rp.1.080.000,- T.Rp. 600.000,-	A.Rp. 480.000,- T.Rp. 330.000,-	No. 17 Tahun 2013
50.	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	A.Rp.660.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
51.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	A.Rp.1.140.000,- T.Rp. 660.000,-	A.Rp. 510.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
52.	Pengawas Benih Tanaman	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
53.	Pengawas Benih Ikan/Perikanan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
54.	Medik Veteriner	Rp.1.560.000,-	Rp. 540.000,-	No. 16 Tahun 2013
55.	Paramedik Veteriner	Rp.810.000,-	Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
56.	Pengawas Bibit Ternak	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 360.000,-	No. 16 Tahun 2013
57.	Pamong Budaya	A.Rp.530.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 74 Tahun 2007
58.	Penyelidik Bumi	Rp.1.200.000,-	Rp. 300.000,-	No. 38 Tahun 2007
59.	Teknik Pengairan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
60.	Teknik Jalan dan Jembatan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
61.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007
62.	Teknik Penyehatan Lingkungan	A.Rp.1.050.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 275.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 36 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.142

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
63.	Pengawas Perikanan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 32 Tahun 2007
64.	Pengawas Farmasi dan Makanan	A.Rp.1.400.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 325.000,- T.Rp. 260.000,-	No. 52 Tahun 2007
65.	Apoteker	Rp.1.230.000,-	Rp. 278.000,-	No. 54 Tahun 2007
66.	Asisten Apoteker	Rp.440.000,-	Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
67.	Pranata Laboratorium Kesehatan	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
68.	Pengantar Kerja	A.Rp.500.000,- T.Rp. 325.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 62 Tahun 2007
69.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007
70.	Epidemiolog Kesehatan	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
71.	Entomolog Kesehatan	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
72.	Sanitarian	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
73.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 43 Tahun 2007
74.	Administrator Kesehatan	Rp.715.000,-	Rp. 253.000,-	No. 54 Tahun 2007
75.	Perencana	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 44 Tahun 2007
76.	Perawat Gigi	Rp.440.000,-	Rp. 183.000,-	No. 54 Tahun 2007
77.	Nutrisionis	A.Rp.715.000,- T.Rp. 440.000,-	A.Rp. 253.000,- T.Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007
78.	Bidan	A.Rp.850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 9 Tahun 2010
79.	Penilik	Rp.345.000,-	Rp.225.000,-	No. 108 Tahun 2007
80.	Inspektur Ketenagalistrikan	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
81.	Inspektur Tambang	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
82.	Inspektur Minyak dan Gas	Rp.1.050.000,-	Rp. 325.000,-	No. 71 Tahun 2007
83.	Pengendali Dampak Lingkungan	A.Rp.975.000,- T.Rp. 400.000,-	A.Rp. 310.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 35 Tahun 2007
84.	Radiografer	Rp.440.000,-	Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007



Lanjutan Tabel III.142

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
85.	Surveyor Pemetaan	A.Rp.920.000,- T.Rp. 300.000,-	A.Rp. 270.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 37 Tahun 2007
86.	Perekam Medis	Rp.440.000,-	Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007
87.	Teknisi Elektromedis	Rp.440.000,-	Rp. 197.000,-	No. 54 Tahun 2007
88.	Penguji Kendaraan Bermotor	Rp.440.000,-	Rp.200.000,-	No. 107 Tahun 2006
89.	Fisioterapis	A.Rp850.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
90.	Pengawas Mutu Pakan	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 720.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 16 Tahun 2013
91.	Penghulu	Rp.500.000,-	Rp. 260.000,-	No. 73 Tahun 2007
92.	Pengendali Frekuensi Radio			No. 33 Tahun 2008
93.	Refraksionis Optisien	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
94.	Terapis Wicara	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
95.	Ortotis Prostetis	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
96.	Okupasi Terapis	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
97.	Penyuluh Pajak			
98.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	A.Rp.1.175.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 500.000,- T.Rp. 300.000,-	No. 39 Tahun 2009
99.	Penerjemah	Rp.1.300.000,-	Rp. 375.000,-	No. 73 Tahun 2007
100.	Teknisi Transfusi Darah	Rp. 500.000,-	Rp. 220.000,-	No. 34 Tahun 2008
101.	Teknisi Gigi	Rp. 500.000,-	Rp. 240.000,-	No. 34 Tahun 2008
102.	Penata Ruang	Rp.1.260.000,-	Rp. 540.000,-	No. 20 Tahun 2013
103.	Penyuluh Sosial	Rp.700.000,-	Rp. 300.000,-	No. 11 Tahun 2009
104.	Psikolog Klinis	Rp.850.000,-	Rp. 300.000,-	No. 42 Tahun 2009
105.	Fisikawan Medis	Rp.850.000,-	Rp. 300.000,-	No. 42 Tahun 2009
106.	Dokter Pendidik Klinis	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 42 Tahun 2009
107.	Penyuluh Perikanan	A.Rp.1.200.000,- T.Rp. 500.000,-	A.Rp. 300.000,- T.Rp. 220.000,-	No. 61 Tahun 2010
108.	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Rp.1.320.000,-	Rp. 540.000,-	No. 22 Tahun 2013
109.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Rp.900.000-	Rp. 300.000,-	No. 4 Tahun 2012



Lanjutan Tabel III.142

No.	Jabatan Fungsional	Nilai Tunjangan		No. Keppres
		Tertinggi	Terendah	
110.	Pranata Laboratorium Pendidikan	A.Rp.1.260.000,- T.Rp. 780.000,-	A.Rp. 540.000,- T.Rp. 360.000,-	No. 21 Tahun 2013
111.	Jurusita	A.Rp.285.000,- T.Rp. 245.000,-	A.Rp. 250.000,- T.Rp. 215.000,-	No. 25 Tahun 2007
112.	Pranata Hubungan Industrial	Rp.500.000,-	Rp. 270.000,-	No. 42 Tahun 2007
113.	Petugas pemasyarakatan	Rp.300.000,-	Rp. 220.000,-	No. 72 Tahun 2007
114.	Perekasaya	Rp.1.400.000,-	Rp. 325.000,-	No. 31 Tahun 2007
115.	Kataloger			
116.	Mediator Hubungan Industrial	N/A	N/A	N/A
117.	Pengawas Keselamatan Pelayaran	N/A	N/A	N/A
118.	Analisis Kebijakan	N/A	N/A	N/A
119.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	N/A	N/A	N/A
120.	Assesor	N/A	N/A	N/A
121.	Auditor Kepegawaian	N/A	N/A	N/A
122.	Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi	N/A	N/A	N/A
123.	Pembimbing Kesehatan Kerja	N/A	N/A	N/A

Sumber : Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Tertentu, diolah, 2013



Tabel III.143 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) Askes Sosial Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2010 - 2012

No	Jenis Kepesertaan	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	PNS aktif	11394610	68,8%	11661743	70,7%	11675627	71,25%
2.	Penerimaan pensiun PNS	3281112	19,8%	3042573	18,5%	3002292	18,32%
3.	Penerimaan pensiun TNI/POLRI	1190673	7,2%	1148666	7%	1135526	6,93%
4.	Veteran/perintis kemerdekaan	658628	4%	582790	3,5%	531151	3,24%
5.	PTT (dokter/bidan)	31667	0,2%	41313	0,25%	36442	0,22%
6.	Jamkesmen	2335	0,01%	2763	0,02%	2792	0,02%
7.	Jamkestama			2483	0,02%	2444	0,01%
	Jumlah	16559025	100%	16482231	100%	16386274	100%

Sumber : PT. Askes Persero, 2013

Tabel III.144 Pertumbuhan Peserta Askes Sosial Menurut Jenis Kepesertaan Tahun 2010 - 2012

No.	Jenis Kepesertaan	2010-2011	2011 - 2012
1.	PNS aktif	2,3%	0,1%
2.	Penerimaan pensiun PNS	-7,8%	-1,3%
3.	Penerimaan pensiun TNI/POLRI	-3,7%	-1,2%
4.	Veteran/perintis kemerdekaan	-13,0%	-9,7%
5.	PTT (dokter/bidan)	23,3%	-13,4%
6.	Jamkesmen	15,5%	1,0%
7.	Jamkestama	100,0%	-1,6%
	Jumlah	-0,5%	-0,6%

Sumber : PT. Askes Persero, diolah, 2013



Tabel III.145 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) Askes Sosial Menurut Golongan Kepegawaian Tahun 2010 - 2012

No	Jenis Kepesertaan	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Golongan I	973060	5,8%	926519	5,6%	860498	5,25%
2.	Golongan II	4956703	29,9%	4776021	28,9%	4661560	28,45%
3.	Golongan III	7488245	45,2%	7198795	43,6%	7117330	43,43%
4.	Golongan IV	3141017	18,9%	3580996	21,7%	3746886	22,87%
	Jumlah	16559025	100%	16482331	100%	16386274	100%

Sumber : PT. Askes Persero, 2013

Tabel III.146 Pertumbuhan Peserta Askes Sosial Menurut Golongan Kepegawaian

No.	Jenis Kepesertaan	2010-2011	2011 - 2012
1.	Golongan I	-5,0%	-7,7%
2.	Golongan II	-3,8%	-2,5%
3.	Golongan III	-4,0%	-1,1%
4.	Golongan IV	12,3%	4,4%
	Jumlah	-0,5%	-0,6%

Sumber : PT. Askes Persero, diolah, 2013

Tabel III.147 Jumlah Peserta (Peserta+Keluarga) Askes Sosial Menurut Kelompok Umur Tahun 2012

No	Kelompok Umur	2012	
		Jumlah	%
1.	0-4	421796	2,57%
2.	5-9	734897	4,48%
3.	10-14	908526	5,54%
4.	15-19	1200469	7,33%
5.	20-24	1315190	8,03%
6.	25-29	515647	3,15%
7.	30-34	880114	5,37%
8.	35-39	945435	5,77%
9.	40-44	1247245	7,61%
10.	45-49	1578682	9,63%
11.	50-54	1582975	9,66%
12.	55-59	1249798	7,63%
13.	60-64	980968	5,99%



Lanjutan Tabel III.144

No.	Kelompok Umur	2012	
		Jumlah	%
14.	65-69	749167	4,57%
15.	70-74	878480	5,36%
16.	75-79	470252	2,87%
17.	80-84	400590	2,44%
18.	>85	326043	1,99%
	Jumlah	16386274	100,00%

Sumber : PT. Askes Persero, 2013

Tabel III.148 Jumlah Uang Pensiun PNS Per Kelompok Tahun 2010 - 2012

No.	Kelompok Pensiun	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	1.535.706.061.466	45	1.710.719.286.964	43	1.867.776.496.400	42
2.	Pejabat negara	9.820.334.172	0	9.878.118.729	0	9.546.104.600	0
3.	ABRI	293.588.487.693	9	302.282.977.025	8	300.936.204.100	7
4.	Veteran/ dahor	153.681.754.153	5	161.530.171.172	4	162.196.750.100	4
5.	PKRI/KNIP	1.627.824.604	0	1.643.755.035	0	1.663.623.200	0
6.	Sipil daerah	1.405.183.215.979	41	1.781.204.939.633	45	2.107.479.238.900	47
	JUMLAH	3.399.607.678.067	100	3.967.259.248.558	100	4.449.598.417.300	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2013

Tabel III.149 Pertumbuhan Uang Pensiun PNS Per Kelompok

No.	Kelompok Pensiun	2010-2011	2011 - 2012
1.	Sipil pusat	10%	8%
2.	Pejabat negara	1%	-3%
3.	ABRI	3%	0%
4.	Veteran/ dahor	5%	0%
5.	PKRI/KNIP	1%	1%
6.	Sipil daerah	21%	15%
	JUMLAH	14%	11%

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2013



Tabel III.150 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2010 - 2012

No	Kelompok Pensiun	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sipil pusat	1001614	45%	987862	43%	1001029	42%
2	Pejabat negara	5425	0%	5491	0%	5507	0%
3	ABRI	242942	11%	229648	10%	217157	9%
4	Veteran/dahor	181689	8%	178069	8%	170206	7%
5	PKRI/KNIP	1257	0%	1152	0%	1068	0%
6	Sipil Daerah	805424	36%	888979	39%	963686	41%
	JUMLAH	2238351	100%	2291201	100%	2358653	100%

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2013

Tabel III.151 Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Tahun 2010 - 2012

No.	Kelompok Pensiun	2010-2011	2011 - 2012
1.	Sipil pusat	-1%	1%
2.	Pejabat negara	1%	0%
3.	ABRI	-6%	-6%
4.	Veteran/ dahor	-2%	-5%
5.	PKRI/KNIP	-9%	-8%
6.	Sipil daerah	9%	8%
	JUMLAH	2%	3%

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2013

Tabel III.152 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2010 - 2012

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2010		2011		2012	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	1	130551	6%	121607	5%	113262	4,8%
		2	283937	13%	274811	12%	283668	12,0%
		3	373198	17%	371840	16%	377757	16,0%
		>= 4	213928	10%	219604	10%	226342	9,6%
2.	Pejabat negara	>= 4	5425	0%	5491	0%	5507	0,2%
3.	ABRI	1	46935	2%	44363	2%	41981	1,8%
		2	159533	7%	151070	7%	143132	6,1%
		3	22188	1%	20644	1%	19277	0,8%
		>= 4	14286	1%	13571	1%	12767	0,5%
4.	Veteran/ dahor	1	16676	1%	16029	1%	0	
		2	8473	0%	7869	0%	0	
		3	26779	1%	24909	1%	0	
		4	129761	6%	129262	6%	170206	7,2%



Lanjutan Tabel III.152

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2010		2011		2012	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
5.	PKRI/KNIP	1	1257	0%	1152	0%	1,06	0,0%
		2	0		0			
		3	0		0			
		>= 4	0		0			
6.	Sipil daerah	1	55904	2%	53019	2%	50485	2,1%
		2	218958	10%	230707	10%	283668	12,0%
		3	244859	11%	269039	12%	377757	16,0%
		>= 4	285703	13%	336214	15%	226342	9,6%
Total			2238351	100%	2291201	100%	2358653	100,0%

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2013

Tabel III.153 Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Golongan/Ruang Tahun 2011 - 2012

No.	Kelompok Pensiun	GOL	2011	2012
1.	Sipil pusat	1	-7%	-7%
		2	-3%	3%
		3	0%	2%
		>= 4	3%	3%
2.	Pejabat negara	>= 4	1%	0%
3.	ABRI	1	-6%	-6%
		2	-6%	-6%
		3	-7%	-7%
		>= 4	-5%	-6%
4.	Veteran/ dahor	1	-4%	
		2	-8%	
		3	-8%	
		4	0%	24%
5.	PKRI/KNIP	1	-9%	-8%
		2		
		3		
		>= 4		
6.	Sipil daerah	1	-5%	-5%
		2	5%	19%
		3	9%	29%
		>= 4	15%	-49%
			2%	3%

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2013



Tabel III.154 PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2012

No.	Kelompok Pensiun	Jenis Kelamin	2010		2011		2013	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Sipil pusat	L	466525	21	455598	20	463655	20
		P	535089	24	532264	23	537374	23
2.	Pejabat negara	L	3310	0,2	3353	0,1	3349	0,1
		P	2115	0,1	2138	0,1	2158	0,1
3.	ABRI	L	75332	3	67581	3	60208	3
		P	167610	7	162067	7	156949	7
4.	PKRI/KNIP	L	311	0,01	273	0,01	243	0,01
		P	946	0,04	879	0,04	825	0,03
5.	Veteran/ dahor	L	84818	4	83772	4	79256	3
		P	96871	4	94297	4	90950	4
6.	Sipil daerah	L	458550	20	505553	22	539540	23
		P	346874	15	383426	17	424146	18
Total			2238351	100	2291201	100	2358653	100

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2013

Tabel III.155 Pertumbuhan PNS yang Pensiun Menurut Kelompok Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 - 2012

No.	Kelompok Pensiun	Jenis Kelamin	2010-2011	2011 - 2012
1.	Sipil pusat	L	-2%	2%
		P	-1%	1%
2.	Pejabat negara	L	1%	-0.1%
		P	1%	1%
3.	ABRI	L	-11%	-12%
		P	-3%	-3%
4.	PKRI/KNIP	L	-14%	-12%
		P	-8%	-7%
5.	Veteran/ dahor	L	-1%	-6%
		P	-3%	-4%
6.	Sipil daerah	L	9%	6%
		P	10%	10%
Total			2%	3%

Sumber : PT. Taspen Persero, diolah, 2013



BAGIAN IV

KEUANGAN YANG MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI (RB)

Bagian ini menyajikan data keuangan yang mendukung reformasi birokrasi. Aspek keuangan memang bukan merupakan dimensi yang terkait langsung dengan aparatur. Namun, aspek keuangan sangat mempengaruhi kinerja aparatur, sehingga banyak data mengenai keuangan yang juga harus disajikan untuk dapat melengkapi analisis mengenai aparatur dan kinerjanya. Data mengenai keuangan yang ditampilkan dalam bagian ini di antaranya adalah data mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara; alokasi belanja negara untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; anggaran belanja negara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi; anggaran pendapatan dan belanja daerah; pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan alokasi belanja pemerintah daerah.

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Sub bagian pertama dalam bagian ini menampilkan data anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV.1. Tabel tersebut menunjukkan data APBN antara tahun 2011 sampai tahun 2013. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pendapatan negara dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2011 sekitar 1.104 miliar rupiah menjadi sekitar 1.529 miliar rupiah pada tahun 2013. Demikian pula untuk belanja negara. Belanja negara dari tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.229 miliar rupiah pada tahun 2011 menjadi 1.683 miliar rupiah pada tahun 2013.

B. Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Sub bagian berikutnya menampilkan data alokasi Belanja Negara untuk sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Data anggaran sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dipilih karena ketiga sektor tersebut merupakan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komponen anggaran pendidikan mencakup 3 (tiga) hal diantaranya Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional). Untuk Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dan Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Sedangkan, untuk Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan

nasional) cukup bervariasi di setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya, data mengenai alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan disajikan pada Tabel IV.2.

Sementara itu, tabel IV.3 memuat informasi mengenai Alokasi Belanja Negara pada Sektor Kesehatan baik yang berasal dari Belanja Pemerintah Pusat maupun melalui transfer daerah. Untuk Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat, pada tahun 2005 hingga tahun 2007 mengalami kenaikan realisasi di setiap tahunnya, yang semula sekitar 28 milyar pada tahun 2010 menjadi 44 milyar pada tahun 2012. Selain itu, data menunjukkan rasio anggaran kesehatan terhadap total APBN antara tahun 2010 sampai 2012 adalah 3% - 3,4%. Dari data tersebut terlihat bahwa peningkatan anggaran kesehatan lebih disebabkan karena peningkatan jumlah APBN.

Tabel berikutnya berisi informasi mengenai data alokasi Belanja Negara dalam hal infrastruktur, dimana Kementerian Negara/Lembaga menjadi penyumbang terbesar dalam pemakaian belanja Negara bila dibandingkan dengan total pemakaian belanja Negara untuk Non Kementerian/Lembaga. Berdasarkan data pada tahun 2010 hingga tahun 2012, dari 14 (empat belas) Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum menempati urutan pertama dalam hal penggunaan alokasi belanja Negara untuk sektor infrastruktur, sedangkan Pengembangan Otorita Batam menempati urutan terendah dalam penggunaan alokasi Belanja Negara untuk sektor infrastruktur. Meskipun demikian, baik Kementerian Negara/ Lembaga Non Kementerian Negara/Lembaga cukup fluktuatif dalam penggunaan Belanja Negara di sektor infrastruktur, kadang mengalami peningkatan ataupun penurunan untuk masing-masing instansi. Untuk lebih lengkapnya, pada Tabel IV.4. disajikan data Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur secara lebih terinci.

C. Alokasi Belanja Negara untuk Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sub Bagian ini menampilkan data mengenai alokasi belanja Negara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Data ini ditampilkan karena korupsi saat ini merupakan salah satu masalah bangsa yang harus diselesaikan. Selain itu, penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, perlu disajikan sejumlah data terkait upaya pemberantasan korupsi, termasuk anggarannya sebagai bahan analisis untuk pengambilan kebijakan terkait pemberantasan korupsi. Saat ini ada dua lembaga Negara yang diberi kewenangan terkait upaya pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Dengan demikian, disajikan data anggaran pemberantasan korupsi dari dua lembaga tersebut pada tabel IV.5 sampai tabel IV.7. Dari data yang ditampilkan terlihat bahwa antara tahun 2010 sampai 2012 anggaran di kedua lembaga ini meningkat. Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012 naik sekitar 12% dari anggaran tahun 2011. Sementara anggaran Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada tahun 2012 naik sekitar 91% dari tahun 2011. Diharapkan dengan meningkatnya anggaran yang disediakan, maka lembaga tersebut lebih leluasa bekerja dalam mengungkap berbagai kasus korupsi yang terjadi.



D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Data berikutnya yang disajikan adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2011 -2013 yang ditampilkan dalam Tabel IV.8 sampai Tabel IV.11. Tabel IV.8 dan tabel IV.9 menunjukkan data jumlah dan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Provinsi, sementara tabel IV.10 dan tabel IV.11 menampilkan data jumlah dan pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah kabupaten/kota. Dilihat dari data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 total Anggaran Pendapatan dan Belanja seluruh Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Total APBD Provinsi tahun 2013 naik sebesar 18% dari tahun 2012 dan Total APBD Kabupaten/Kota tahun 2013 naik sebesar 15% dari tahun 2012. Dengan adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah ini diharapkan juga adanya peningkatan dalam hal ketersediaan fasilitas publik dan kualitas pelayanan publik.

E. Pendapatan Asli Daerah

Sub bagian berikutnya menampilkan data Jumlah Pemerintah daerah berdasarkan persentase Kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan. Dalam penyajian data, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar Kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 terlihat bahwa sebagian besar PAD pemerintah daerah Provinsi/kabupaten/kota memberikan Kontribusi yang kecil terhadap total keseluruhan pendapatan pemerintah daerah kabupaten/kota tersebut. Pada tahun 2013, ada sebanyak 474 kab/kota yang memiliki kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapan. Hal ini menunjukkan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota belum mampu untuk mengoptimalkan potensi daerahnya sebagai sumber pendapatan asli daerah. Sementara itu, dilihat dari Total PAD Pemerintah Provinsi maupun PAD Pemerintah Kabupaten/Kota, dari tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan kenaikan jumlah PAD yang cukup signifikan. Total PAD Pemerintah Provinsi pada tahun 2013 naik sekitar 19% dari tahun 2012, dan Total PAD Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2013 naik sekitar 22% dari tahun 2012. Untuk lebih jelasna dapat dilihat pada tabel IV.16.

F. Dana Perimbangan

Setelah menampilkan data mengenai kategorisasi pemerintah daerah berdasarkan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah pada bagian sebelumnya, berikut disajikan data mengenai kategorisasi pemerintah daerah berdasarkan rasio dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) terhadap total pendapatan daerah. Data ini dapat membantu menjelaskan sejauhmana ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.



Tabel IV.18 sampai tabel IV.21 menunjukkan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase kontribusi DAU terhadap Anggaran Pendapatan dan pada tabel IV.22 menunjukkan total alokasi untuk Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemerintah Daerah baik DAU Provinsi maupun DAU Kabupaten/Kota. Dalam penyajian data, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DAU terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tabel IV.18 dan tabel IV.20 dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2013 Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan kontribusi besar, yaitu antara 50%-75% dari pendapatan sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada tahun 2013, ada sebanyak 363 kab/kota yang memiliki kontribusi DAU antara 50%-75% terhadap anggaran pendapatan, meningkat 3% dari tahun 2012 yang sebanyak 353 kab/kota. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah kabupaten/kota belum mandiri karena masih tergantung dari dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber utama pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Tabel IV.24 sampai tabel IV.28 berikut menampilkan data mengenai Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase kontribusi DAK terhadap Anggaran Pendapatan dan total jumlah alokasi untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Pemerintah Daerah baik DAK Provinsi maupun DAK Kabupaten/Kota. Sama seperti dalam menampilkan data mengenai DAU, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan.

Dari tabel IV.24 dan tabel IV.26 terlihat bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan daerah tidak besar, anggaran pendapatan sebagian besar pemerintah kabupaten/kota hanya disumbang kurang dari 50% dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tidak ada perubahan trend jumlah pemerintah provinsi/kab/kota berdasarkan kategori kontribusi DAK terhadap anggaran pendapatan.

Tabel berikutnya, yaitu tabel IV.30 sampai tabel IV.34 menunjukkan kontribusi dana bagi hasil (DBH) bagi anggaran pendapatan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota. Sama seperti dalam menampilkan data mengenai DAU dan DAK, dirumuskan tiga kategori untuk melihat seberapa besar kontribusi DBH terhadap anggaran pendapatan daerah. Tiga kategori yang dimaksud pertama adalah Daerah yang memiliki kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan; kedua, Daerah yang memiliki kontribusi DBH antara 50%-75% dari anggaran pendapatan; dan ketiga Daerah yang memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan.

Tabel IV.30 dan tabel IV.33 menunjukkan bahwa dana bagi hasil (DBH) hanya menyumbang kurang dari 25% dari anggaran pendapatan sebagian besar pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Pada tahun 2013, sebanyak 23 provinsi memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan dan 394 kab/kota memiliki kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum (DAU) merupakan dana transfer yang memberikan kontribusi tinggi bagi anggaran pendapatan pemerintah daerah.



G. Alokasi Belanja Pemerintah Daerah

Data pada sub bagian ini menjelaskan alokasi belanja pemerintah daerah untuk belanja pegawai; belanja sektor pendidikan; belanja sektor kesehatan dan belanja sektor infrastruktur. Dalam menyajikan data mengenai alokasi belanja pemerintah daerah, juga dirumuskan beberapa kategorisasi untuk melihat perbandingan antara belanja pemda untuk belanja pegawai, belanja sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor infrastruktur dengan total belanja pemerintah daerah.

Sementara itu, Untuk melihat belanja pegawai pemda dirumuskan tiga kategori, yaitu pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai lebih dari 75% dari total anggaran belanja; pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai antara 50%-75% dari total anggaran belanja; dan kategori pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai kurang dari 50% dari total anggaran belanja. Sementara itu, untuk melihat belanja sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dirumuskan dua kategori, yaitu pemerintah daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan/kesehatan/ infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari total anggaran belanja; dan pemerintah daerah yang memiliki belanja sektor pendidikan/ kesehatan/ infrastruktur kurang dari 20% dari total anggaran belanja.

Tabel IV.36 sampai tabel IV.41 menunjukkan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase Anggaran Belanja Pegawai terhadap Total Anggaran Belanja serta Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota. Bila dilihat dari total dana belanja pegawai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota antara tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami kenaikan. Pada tahun 2013, total dana belanja pegawai pemerintah provinsi naik sekitar 9% dari tahun 2012. Dan total dana belanja pegawai pemerintah kab/kota naik sekitar 12,4% dari tahun 2012. Sementara itu, dilihat dari tabel IV.36 dan tabel IV.38 tampak bahwa antara tahun 2011 - 2013 belanja pegawai dari sebagian besar pemerintah provinsi dibawah 50% dari total belanja daerah, dan belanja pegawai dari sebagian besar pemerintah kabupaten/kota antara 50% - 75% dari total belanja daerah. Pada tahun 2013, terjadi perubahan signifikan dalam jkategorisasi jumlah pemda kab/kota berdasarkan persentase belanja pegawai terhadap anggaran belanja. Pada tahun 2012, masih ada 1 kab/kota yang memiliki belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja, 305 kab/kota memiliki belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja, dan 185 kab/kota memiliki belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja. Sementara pada tahun 2013, tidak ada kab/kota yang memiliki belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja, sebanyak 276 kab/kota memiliki belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja, atau menurun 10,5% dari tahun 2012. Dan sebanyak 215 kab/kota memiliki belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja, atau meningkat 14% dari tahun 2012.

Berikutnya tabel IV.42 sampai tabel IV.45 menunjukkan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja serta Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari tabel IV.44 terlihat bahwa sebagian besar pemerintah kabupaten/kota sudah memiliki anggaran belanja untuk sektor pendidikan lebih dari 20% dari total belanja. Pada tahun 2013, 423 kabupaten/kota sudah memiliki belanja sector pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja, meningkat 0,9% dari tahun 2012. Hal ini disebabkan adanya aturan yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk membiayai sektor



pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan tampak dari peningkatan total dana alokasi sektor pendidikan secara umum dari seluruh provinsi/kabupaten/kota seperti diperlihatkan pada tabel IV.46.

Tidak seperti anggaran belanja untuk sektor pendidikan, anggaran belanja untuk sektor kesehatan kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tabel IV.48 sampai tabel IV.51 menunjukkan hanya sedikit pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki anggaran kesehatan lebih dari 20% dari total anggaran belanjanya. Padahal, pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas juga merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2013, jumlah pemerintah provinsi yang memiliki belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja adalah sebanyak 33 provinsi (100%), tidak ada perubahan dari tahun 2013. Sementara itu, tidak ada perubahan trend yang signifikan pada pemerintah kabupaten/kota. Pada tahun 2013, 486 kab/kota memiliki belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja, dan hanya 5 kab/kota yang memiliki belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja. Sementara itu, tabel IV.52 menunjukkan total dana belanja sektor kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota. Data tersebut menunjukkan bahwa total dana belanja sektor kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota mengalami peningkatan selama tahun 2007 hingga tahun 2011.

Tabel berikutnya yaitu tabel IV.54 sampai tabel IV.58 menunjukkan Jumlah Pemda (Provinsi/Kab/Kota) berdasarkan persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja dan Total Dana Belanja sektor infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota. Tabel IV.58 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun total anggaran pemerintah daerah untuk sektor infrastruktur semakin meningkat. Pada tahun 2013, total anggaran infrastruktur pemerintah provinsi meningkat 20% dari tahun 2012 dan total anggaran infrastruktur pemerintah kab/kota meningkat 30,2% dari tahun 2012. Dengan meningkatnya Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah daerah diharapkan dapat berbanding lurus dengan ketersediaan dan kelayakan fasilitas publik saat ini khususnya dalam hal infrastruktur. Walaupun bila dilihat dari persentase anggaran untuk sektor infrastruktur, hanya sedikit pemerintah daerah yang telah mengalokasikan anggarannya lebih dari 20% untuk sektor infrastruktur seperti dapat dilihat pada tabel IV.54 dan tabel IV.56. Pada tahun 2013, jumlah pemerintah provinsi yang memiliki belanja infrastruktur sama dengan/lebih dari 20% adalah 10 provinsi, meningkat dari tahun 2012 yang hanya 6 propinsi. Demikian pula dengan pemerintah kab/kota, pada tahun 2013 jumlah pemerintah kab/kota yang memiliki belanja infrastruktur sama dengan/lebih dari 20% adalah 121 kab/kota, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 84 kab/kota.



Tabel IV.1 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (dalam Miliaran Rupiah)

Rincian/Description	2011	2012	2013
Pendapatan dan hibah/revenue and grants	1 104 902	1 311387	1529673
Penerimaan dalam negeri/domestic revenue	1 101 162	1310562	1525189
Penerimaan pajak/tax revenue	850 255	1032570	1192994
Pajak dalam negeri/ domestic taxes	827 246	989637	1134289
Pajak perdagangan internasional/internasional trade taxes	23 009	42933	58705
Penerimaan Bukan Pajak/Non Tax Revenue	250 907	277992	332195
Penerimaan sumber daya alam/natural resources revenue	163 119	177264	197205
Bagian Laba BUMN/Profit Transfer from SOE	27 590	28001	33500
Penerimaan bukan pajak lainnya/other non-tax revenue	45 167	53492	77991
Pendapatan badan layanan umum (BLU)	15 031	19235	23499
Hibah / grants	3 740	825	4484
Pengeluaran / expenditures	1 229 558	1435407	1683011
Pengeluaran pemerintah pusat/central government expenditures	836 578	964997	1154381
Belanja pegawai/personel expenditures	180 825	215862	241606
Belanja barang/material expenditures	137 850	188002	200735
Belanja modal/capital expenditures	135 854	151975	184364
Pembayaran bunga utang/interest payments subsidi	115 209	122217	113244
Subsidi/subsidies	187 624	208850	317219
Subsidi BBM/Oil subsidy	136 614	168560	274743
Subsidi non BBM/Non-Oil subsidy	51 010	40290	42476
Belanja hibah/grants	771	1797	3621
Bantuan social/social expenditures	63 184	47764	73609
Belanja lainnya/Other expenditures	15 261	28530	19983
Pengeluaran untuk daerah/Expenditure for regions	392 980	470410	528630
Dana pertimbangan/Balance funds	334 324	399986	444798
Dana bagi hasil/revenue sharing	83 558	100055	101962
Dana alpkasi umum/general allocation funds	225 533	273815	311139
Dana alokasi khusus/Specific allocation funds	25 233	26116	31697



Lanjutan Tabel IV.1

Rincian/description	2011	2012	2013
Dana otonomi khusus dan penyeimbang/ <i>Special autonomous region and balancing funds</i>	58 656	70424	83832
Keseimbangan Primer/Primary Balance	-9 447	-1802	-40094
Surplus/Defisit anggaran/Overall balance	-124 656	-124020	-153338
Pembiayaan bersih/Financing Net	124 656	124020	153338
Pembiayaan dalam negeri/Domestic financing	125 266	125912	172792
Perbankan dalam negeri/ <i>Domestic bank financing</i>	12 657	8947	14307
Nonperbankan dalam negeri/ <i>domestic non-banking financing</i>	112 609	116965	158485
Pembiayaan Luar Negeri/Foreign financing	-610	-1892	-19454
Pinjaman bruto luar negeri/ <i>Gross drawing</i>	58 933	54282	45919
Penerusan pinjaman/ <i>subsidiary loan agreement</i>	-11 725	-8914	-6968
Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri/ <i>Amortizations</i>	-47 818	-47260	-58405

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013



Tabel IV.2 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Pendidikan (dalam Miliaran Rupiah)

Komponen Anggaran Pendidikan	2010	2011	2012
1. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat	96.480,30	105.356,40	102.518,30
2. Anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah	127.749,10	158.966,50	186.439,50
a. DAK bidang pendidikan	9.334,90	10.041,30	10.041,30
b. BA pendidikan yang dialokasikan dalam DAU-Non gaji	11.365,70	11.276,60	10.838,60
c. BA pendidikan yang dialokasikan dalam DAU-Gaji pendidik	84.557,40	93.013,10	103.016,90
d. BA pendidik yang dialokasikan dalam DBH	748,5	882,4	815,6
e. BA pendidik yang dialokasikan dalam dana otsus	2.309,90	2.706,40	3.285,80
f. Dana tambahan penghasilan guru PNSD	5.800,00	3.696,20	2.898,90
g. Tunjangan profesi guru	10.994,90	18.537,70	30.559,80
h. Dana insentif daerah	1.387,80	1.387,80	1.387,80
i. Dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) Pendidikan	1.250,00	613	-
j. Bantuan operasional sekolah	-	16.812,00	23.594,80
3. Anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan (dana pengembangan pendidikan nasional)	1.000,00	2.617	1.000,00
4. Anggaran pendidikan (1+2+3)	225.229,30	266.940,60	289.957,80
5. Total belanja negara	1.126.146,50	1.320.751,30	1.435.406,70
Rasio anggaran pendidikan (4:5) x 100%	20	20,2	20,2

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012



Tabel IV.3 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Kesehatan (dalam Miliaran Rupiah)

Komponen Anggaran Kesehatan	2010	2011	2012
	Realisasi APBN	APBN	APBN
1. Anggaran kesehatan melalui belanja pemerintah pusat	28.176,30	40.135,20	44.195,20
A. Melalui kementerian negara/lembaga	26.230,10	37.827,40	41.519,00
1. Kementerian Kesehatan	22.445,40	17.657,10	29.915,80
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan	410	928,8	1.104,10
3. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	797,5	2.413,20	2.593,70
4. Kementerian Pendidikan Nasional	9,7	-	393,7
5. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26,2	108,8	128,2
6. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	3,4	3,5	36,2
7. Kementerian ESDM	54,1	-	-
8. Kementerian PU	1.699,30	6.148,50	6.438,70
9. Kementerian Lingkungan Hidup	29,6	75	81,9
10. Kementerian Ristek	18,5	24,6	22
11. Kementerian Pertanian	529,9	194	362,1
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan	206,5	35,7	51,7
13. Kementerian Lainnya	-	238,4	390,8
Total anggaran K/L	330.492,60	432.779,30	508.359,60
B. Melalui Non-Kementrian Negara / lembaga BA 999	1.946,20	2.307,80	2.676,30
1. Subsidi untuk air bersih	-	50	30
2. Askes PNS (belanja pegawai)	1.946,20	2.257,80	2.646,30
2. Anggaran kesehatan melalui transfer daerah	3.407,30	3.677,40	3.814,15
1. DAK Kesehatan	2.829,80	3.000,80	3.005,90
2. Dana otonomi khusus kesehatan Papua dan Papua Barat	577,5	676,6	808,6
3. Total anggaran kesehatan (1+2)	31.583,60	43.812,60	48.009,70
4. Total belanja negara	1.056.510,30	1.229.558,50	1.418.497,70
Rasio anggaran kesehatan = (3:4) x 100%	3	3,6	3,4

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012



Tabel IV.4 Alokasi Belanja Negara untuk Sektor Infrastruktur (dalam Miliar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012
	Realisasi APBN	APBN-P	APBN
1. Kementerian negara/lembaga (miliar rupiah)	75.385,70	129.721,00	142.634,80
1. Kementerian Pekerjaan Umum	32.107,90	56.535,30	62.563,10
2. Kementerian Perhubungan	15.420,10	23.134,60	28.117,70
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5.534,10	15.674,90	15.804,70
4. Kementerian Dalam Negeri	13.403,30	16.792,70	17.134,40
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.380,80	5.559,20	5.993,30
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika	2.196,70	3.452,30	3.246,00
7. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	913,9	3.462,00	4.604,10
8. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	1.040,00	1.263,40	1.018,30
9. Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi NAD dan Nias			
10. Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana	239,4	938,9	995,1
11. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	636,9	1.286,10	1.606,90
12. Badan SAR Nasional	512,6	1.329,20	1.111,70
13. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu		292,5	299,6
14. Pengembangan Otorita Batam			140
2. Non K/L (Miliar Rupiah)	23.985,20	22.051,70	18.837,50
1. Resiko Kenaikan Harga Tanah	352,8	610	500
2. Investasi Pemerintah Untuk Infrastruktur	3.610,50	4.571,6	6.008,90
3. PSO	1.373,90	1.849,40	2.045,70
4. Kredit Program KPRSH dan Rusunami	416	696,2	
5. Dana Alokasi Khusus	4.493,10	6.051,00	6.327,40



Lanjutan Tabel IV.4

Uraian	2010	2011	2012
	Realisasi APBN	APBN-P	APBN
6. Tambahkan Otonomi Khusus Infrastruktur	1.400,00	1.400,00	1.000,00
7. Dana Kontijensi PLN		889	623,3
8. Dana Kontijensi PDAM		15	10
9. Pinjaman pada PT PLN	7.500,00		
10. Dana Bergulir Perdagangan Tanah	2.300,00	3.850,00	900
11. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang	398,9	392,2	392,2
12. Pengembangan Otorita Batam	140	140	
13. Merauke <i>Integrated Food And Energy Estate</i>		87,3	
14. PMN untuk PT SMI	1.000,00		
15. PMN untuk PT PII	1.000,00	1.500,00	1.000.0
16. Pengembangan Kawasan Bintan dan Karimun			30
Total	99.370,90	151.772,70	161.472,30

Sumber : Kementerian Keuangan, 2012

Tabel IV.5 Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010 – 2012

No.	Unit	2010		2011		2012	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1.	Penindakan	10.450.000.000	4	13.436.007.908	5	20.330.373.611	6
2.	Pencegahan	16.200.000.000	6	23.153.313.020	8	33.895.906.560	10
3.	INDA	45.760.000.000	17	38.332.733.130	13	48.110.046.038	14
4.	PIPM	2.520.000.000	1	2.992.808.186	1	2.296.253.903	1
5.	Setjen	189.900.000.000	72	218.282.764.314	74	231.927.718.776	69
	Total	264.830.000.000	100	296.197.626.558	100	336.560.298.888	100

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2013

Catatan :

Inda : Informasi dan Data

PIPM : Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Persentase (%) yang dimaksudkan di atas adalah % anggaran setiap unit terhadap total anggaran yang dimiliki oleh KPK.



Tabel IV.6 Pertumbuhan Realisasi Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2010 - 2012

No.	Unit	2010-2011	2011-2012
1.	Penindakan	22%	34%
2.	Pencegahan	30%	32%
3.	INDA	-19%	20%
4.	PIPM	16%	-30%
5.	Setjen	13%	6%
	Total	11%	12%

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah, 2013

Catatan :

Inda : Informasi dan Data

PIPM : Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat

Tabel IV.7 Anggaran Lidik-Sidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Tahun 2009 – 2012 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Kategori	2009	2010	2011	2012
1.	Total Anggaran	1,553	1,335	1,356	14,378
2.	Pertumbuhan	-	-16%	2%	91%

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, 2013

Tabel IV.8 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2011 – 2013 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total Anggaran	2011	2012	2013
1.	Pendapatan	119.039.549	162.757.943,8	198.011.520,0
2.	Belanja	127.918.631	174.016.403,9	212.918.920,7

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.9 Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Tahun 2011 - 2013

No	Total Anggaran	2011-2012	2012-2013
1.	Pendapatan	27%	18%
2.	Belanja	26%	18%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



**Tabel IV.10 Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013
(dalam Jutaan Rupiah)**

No.	Total Anggaran	2011	2012	2013
1.	Pendapatan	359.537.250	414.701.201	485.552.562
2.	Belanja	386.037.182	443.358.982	524.762.020

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

**Tabel IV.11 Pertumbuhan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Tahun 2011
– 2013**

No	Total Anggaran	2011-2012	2012-2013
1.	Pendapatan	13%	15%
2.	Belanja	13%	16%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

**Tabel IV.12 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap
Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013**

No	Kategori Kontribusi PAD	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	7	21%	8	24%	9	27%
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	17	52%	15	45%	15	45%
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	9	27%	10	30%	9	27%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.13 Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2012 – 2013

No	Kategori Kontribusi PAD	2011-2012	2012-2013
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	13%	11%
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	-13%	0%
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	10%	-11%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.14 Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Kontribusi PAD	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	489	100%	479	98%	474	97%
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	0	0%	10	2%	16	3%
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	2	0%	2	0%	1	0,2%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.15 Pertumbuhan Jumlah Pemda Kabupaten/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi PAD Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Kontribusi PAD	2011-2012	2012-2013
1.	Kontribusi PAD kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	-2%	-1%
2.	Kontribusi PAD antara 25%-50% dari anggaran pendapatan	100%	38%
3.	Kontribusi PAD lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	0%	-100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.16 Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total PAD	2011	2012	2013
1.	PAD Provinsi	59.597.218	75.070.594	92.449.998
2.	PAD Kabupaten/Kota	30.796.040	37.458.350	47.878.219

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.17 Pertumbuhan Total PAD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 - 2013

No.	Total PAD	2011-2012	2012-2013
1.	PAD Provinsi	21%	19%
2.	PAD Kabupaten/Kota	18%	22%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.18 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Kontribusi DAU	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0%	0	0%	0	0%
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	9	27%	0	0%	6	18%
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	24	73%	33	100%	27	82%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.19 Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Kontribusi DAU	2011-2012	2012-2013
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0%	0%
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0%	100%
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	27%	-22%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.20 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Kontribusi DAU	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	34	7%	80	16%	63	13%
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	385	78%	353	72%	363	74%
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	72	15%	58	12%	65	13%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.21 Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAU Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Kontribusi DAU	2011-2012	2012-2013
1.	Kontribusi DAU lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	58%	-27%
2.	Kontribusi DAU antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	-9%	3%
3.	Kontribusi DAU kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	-24%	11%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.22 Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 - 2013 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DAU	2011	2012	2013
1.	DAU Provinsi	21.951.716	27.052.242	30.960.353
2.	DAU Kabupaten/ Kota	203.764.809	246.257.685	289.864.359

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.23 Pertumbuhan Total DAU Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 –2013

No.	Total DAU	2011-2012	2012-2013
1.	DAU Provinsi	19%	13%
2.	DAU Kabupaten/ Kota	17%	15%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.24 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Kontribusi DAK	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0%	0	0%	0	0%
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0%	0	0%	0	0%
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	33	100%	33	100%	33	100%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.25 Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Kontribusi DAK	2011-2012	2012-2013
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0%	0%
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0%	0%
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	0%	0%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.26 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Kontribusi DAK	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0	0%	0	0%	0	0%
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0	0%	0	0%	0	0%
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	491	100%	491	100%	491	100%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.27 Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi DAK Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Kontribusi DAK	2011-2012	2012-2013
1.	Kontribusi DAK lebih dari 75% dari anggaran pendapatan	0%	0%
2.	Kontribusi DAK antara 50%-75% dari anggaran pendapatan	0%	0%
3.	Kontribusi DAK kurang dari 50% dari anggaran pendapatan	0%	0%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.28 Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DAK	2011	2012	2013
1.	DAK Provinsi	1.211.645	1.335.813	1.821.376
2.	DAK Kabupaten/ Kota	23.974.796	24.602.958	5.740.728

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.29 Pertumbuhan Total DAK Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013

No.	Total DAK	2011-2012	2012-2013
1.	DAK Provinsi	9%	27%
2.	DAK Kabupaten/ Kota	3%	-329%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.30 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Kontribusi DBH	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	2	6%	0	0%	8	24%
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	3	9%	5	15%	2	6%
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	28	85%	28	85%	23	70%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.31 Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Kontribusi DBH	2011-2012	2012-2013
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	0%	100%
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	40,0%	-150%
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	0,0%	-22%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.32 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Kontribusi DBH	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	23	5%	15	3%	67	14%
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	39	8%	37	8%	30	6%
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	429	87%	439	89%	394	80%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.33 Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Anggaran Pendapatan Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Kontribusi DBH	2011-2012	2012-2013
1.	Kontribusi DBH lebih dari 50% dari anggaran pendapatan	-53%	78%
2.	Kontribusi DBH antara 25-50% dari anggaran pendapatan	-5%	-23%
3.	Kontribusi DBH kurang dari 25% dari anggaran pendapatan	2%	-11%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.34 Total Dana Bagi Hasil Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2011 –2013 (dalam Jutaan Rupiah)

No.	Total DBH	2011	2012	2013
1.	DBH Provinsi	24.290.622,04	25.781.660	44.850.478
2.	DBH Kabupaten/Kota	65.694.702,18	56.102.460	99.208.376

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.35 Pertumbuhan Total Dana Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 -2013

No.	Total DBH	2011-2012	2012-2013
1.	DBH Provinsi	6%	43%
2.	DBH Kabupaten/Kota	-17%	43%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.36 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja Pegawai	2011		2012		2013	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0%	0	0%	0	0%
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	0	0%	0	0%	0	0%
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	33	100%	33	100%	33	100%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.37 Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja Pegawai	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0%	0%
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	0%	0%
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	0%	0%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.38 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja Pegawai	2011		2012		2013	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	0	0%	1	0%	0	0%
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	308	63%	305	62%	276	56%
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	183	37%	185	38%	215	44%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.39 Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Pegawai Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Belanja Pegawai	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja pegawai lebih dari 75% dari anggaran belanja	100,0%	0%
2.	Belanja pegawai antara 50%-75% dari anggaran belanja	-1,0%	-10,5%
3.	Belanja pegawai kurang dari 50% dari anggaran belanja	1,1%	14,0%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.40 Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013 (dalam Jutaan Rupiah)

No	Total Belanja Pegawai	2011	2012	2013
1.	Belanja Pegawai Provinsi	31.557.445,83	35.522.392	39.019.039.81
2.	Belanja Pegawai Kabupaten / Kota	197.519.916,36	225.835.150.06	257.798.873.2

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.41 Pertumbuhan Total Dana Belanja Pegawai Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2011 – 2013 (Dalam Jutaan Rupiah)

No	Total Belanja Pegawai	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja Pegawai Provinsi	11,2%	9,0%
2.	Belanja Pegawai Kabupaten / Kota	12,5%	12,4%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.42 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2011		2012		2013	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	1	3%	1	3%	1	3%
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	32	97%	32	97%	32	97%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.43 Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	0,0%	0,0%
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	0,0%	0,0%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.44 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2011		2012		2013	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	433	88%	419	85%	423	86%
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	58	12%	72	15%	68	14%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.45 Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Pendidikan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Pendidikan	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja sektor pendidikan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	-3,3%	0,9%
2.	Belanja sektor pendidikan kurang dari 20% dari anggaran belanja	19,4%	-5,9%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.46 Total Dana Belanja sektor pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 - 2013

No	Total Belanja Sektor Pendidikan	2011	2012	2013
1.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi	15.086.335,50	15.855.881,82	18.644.391,12
2.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten/ Kota	141.577.318,34	154.368.108,18	175.778.032,3

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.47 Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 - 2013

No	Total Belanja Sektor Pendidikan	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Provinsi	5%	15%
2.	Belanja Sektor Pendidikan Pemerintah Kabupaten/ Kota	8%	12%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.48 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2011		2012		2013	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	1	3%	0	0%	0	0%
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	32	97%	33	100%	33	100%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.49 Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	0%	0%
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	3,03%	0,00%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.50 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2011		2012		2013	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	4	1%	6	1%	5	1%
2.	Belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	487	99%	485	99%	486	99%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.51 Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Kesehatan	2011-2012	2012-2013
1.	belanja sektor kesehatan sama dengan/lebih dari 20% dari anggaran belanja	33%	-20,00%
2.	belanja sektor kesehatan kurang dari 20% dari anggaran belanja	-0,4%	0,21%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.52 Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 – 2013

No	Total Belanja Sektor Kesehatan	2011	2012	2013
1.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Provinsi	11.886.141,76	14.155.893,77	17.512.928,42
2.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Kabupaten/ Kota	36.393.365,56	41.944.815,43	51.388.353,8

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.53 Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota (dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 - 2013

No	Total Belanja Sektor Kesehatan	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Provinsi	16,0%	19,2%
2.	Belanja Sektor Kesehatan Pemerintah Kabupaten/ Kota	13,2%	18,4%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.54 Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	9	27,3%	6	18,2%	10	30%
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	24	72,7%	27	81,8%	23	70%
	Jumlah	33	100%	33	100%	33	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.55 Pertumbuhan Jumlah Pemda Provinsi Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	-50%	40%
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	11,1%	-17,4%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



Tabel IV.56 Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 – 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2011		2012		2013	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	78	15,9%	84	17,1%	121	24,6%
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	413	84,1%	407	82,9%	370	75,4%
	Jumlah	491	100%	491	100%	491	100%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.57 Pertumbuhan Jumlah Pemda Kab/Kota Berdasarkan Persentase Anggaran Belanja Sektor Infrastruktur Terhadap Total Anggaran Belanja Tahun 2011 - 2013

No	Kategori Belanja untuk Sektor Infrastruktur	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja sektor infrastruktur sama dengan/ lebih dari 20% dari anggaran belanja	7,1%	30,6%
2.	Belanja sektor infrastruktur kurang dari 20% dari anggaran belanja	-1,5%	-10,0%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.58 Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 – 2013

No	Total Belanja Sektor Infrastruktur	2011	2012	2013
1.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Provinsi	18.361.047,82	26.190.879	32.770.774,27
2.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/ Kota	50.210.361,14	64.400.934	92.269.679,81

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013

Tabel IV.59 Pertumbuhan Total Dana Belanja Sektor Infrastruktur Provinsi/ Kabupaten/Kota (Dalam Jutaan Rupiah) Tahun 2011 - 2013

No	Total Belanja Sektor Infrastruktur	2011-2012	2012-2013
1.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Provinsi	29,9%	20,1%
2.	Belanja Sektor Infrastruktur Pemerintah Kabupaten/ Kota	22,0%	30,2%

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah, 2013



BAGIAN V

KINERJA APARATUR / REFORMASI BIROKRASI

Bagian ini menyajikan data mengenai kinerja aparatur/ reformasi birokrasi yang dilihat dari beberapa indikator, baik indikator nasional maupun indikator internasional. Untuk indikator kinerja aparatur / reformasi birokrasi dalam skala nasional adalah opini BPK terhadap Laporan Keuangan Instansi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; Hasil Penilaian LAKIP oleh Kemenpan; Integritas Sektor Publik; dan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk indikator kinerja aparatur / reformasi birokrasi dalam skala internasional adalah Peringkat *Doing Business*; Indeks Persepsi Korupsi; dan Peringkat dan Nilai *Human Development Index*.

A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Instansi

Tabel V.1 sampai tabel V.5 menyajikan data kualifikasi hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Opini tertinggi BPK yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kemudian Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dari tahun 2010–2012, terjadi peningkatan jumlah K/L yang mendapatkan opini WTP dari BPK dan semakin menurunnya jumlah K/L yang mendapatkan opini WDP bahkan TMP. Hal ini menunjukkan semakin baiknya hasil laporan keuangan pemerintah pusat.

Peningkatan jumlah lembaga pemerintah yang memperoleh opini WTP bukan saja terjadi pada lembaga pusat, tetapi juga pada pemerintah daerah. Jika pada tahun 2009 terdapat 15 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, pada tahun 2011 terdapat 67 (13%) pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP. Opini WTP merupakan prestasi tertinggi dalam penilaian kualitas laporan keuangan instansi, walaupun bukan berarti lembaga atau pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini yang baik bebas dari penyimpangan.

B. Kualifikasi Penilaian LAKIP oleh Kemenpan

Penilaian LAKIP oleh Kemenpan merupakan salah satu indikator kinerja aparatur. Subbagian ini menampilkan data Penilaian LAKIP lembaga pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2011. Untuk kualifikasi hasil penilaian Kemenpan terhadap LAKIP pemerintah pusat tahun 2011 dapat dilihat dari tabel V.6 dan untuk kualifikasi

hasil penilaian Kemenpan terhadap LAKIP pemerintah daerah tahun 2011 dapat dilihat dari tabel V.7 sampai table V.9 Pada tahun 2011, Kemenpan memberikan nilai A untuk 2 K/L, nilai B untuk 17 K/L, nilai CC untuk 49 K/L, dan nilai C untuk 14 k/L. Sementara itu, untuk LAKIP pemerintah daerah, Kemenpan memberikan nilai dari B untuk 2 Provinsi dan 1 kota; nilai CC untuk 17 Provinsi, 14 kabupaten dan 7 kota; nilai C untuk 11 Provinsi 73 kabupaten dan 20 kota; dan nilai D untuk 53 kabupaten dan 12 kota.

Dari data yang ada, tidak satupun institusi pemerintah, baik di Pusat maupun di Daerah yang mendapatkan nilai AA. Bahkan di Daerah, tidak satupun institusi pemerintah yang mendapatkan nilai A. hal ini tentu harus menjadi kajian serius mengingat LAKIP merupakan pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap apa yang telah dilakukannya

C. Integritas Sektor Publik

Integritas sektor publik merupakan survey yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur persepsi masyarakat tentang pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Adapun responden dalam survey ini adalah para pengguna layanan langsung dari layanan yang disediakan oleh instansi tersebut. Skala penilaian dimulai dari 1 sampai dengan 10, dimana semakin mendekati 10, maka semakin baik integritas sektor publik. Integritas Sektor Publik Tingkat nasional pada Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat dari 3 kategori yaitu variabel pengalaman integritas, variabel potensi integritas dan indeks integritas nasional (IIN). Data mengenai kategori tersebut dapat dilihat pada tabel V.10. Dari data tersebut terlihat bahwa indeks integritas nasional (IIN) dari tahun 2008 sampai 2012 nilainya fluktuatif berkisar antara nilai 5-6. Hal ini menunjukkan bahwa menurut responden pengguna layanan, integritas sektor publik nasional Indonesia masih kurang baik dan perlu untuk ditingkatkan.

D. Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja sesuai dengan amanah dari PP Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. EKPPD meliputi pengukuran dan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten /kota dalam wilayah provinsi dan juga pemerintahan propinsi. Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD. EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja aparatur, terutama aparatur pemerintah daerah.

Aspek penilaian EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan dan tataran pelaksanaan kebijaksanaan daerah. Pada tataran pengambil kebijakan, aspek penilaiannya adalah : ketentraman dan ketertiban umum daerah; keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah serta



antarpemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah; keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah; efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD; efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; Efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan; ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan; intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah; transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil; intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah; efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD; Pengelolaan potensi daerah; terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sementara tataran pengambil kebijakan, aspek penilaiannya adalah : kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan; ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan; tingkat capaian SPM; penataan kelembagaan daerah; pengelolaan kepegawaian daerah; Perencanaan pembangunan daerah; pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan barang milik daerah; dan Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat. Pada tabel V.11 ditampilkan data mengenai peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi, kabupaten dan pemerintah kota tahun 2010 dan 2011.

E. Peringkat *Doing Business* Indonesia dan Negara ASEAN

Doing Business report merupakan laporan yang menyediakan penilaian objektif mengenai regulasi berusaha yang berdampak pada kemudahan berusaha di negara-negara yang disurveinya. Selain itu, laporan ini dapat menjadi pedoman untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi, membuat perbandingan antar negara dan mengidentifikasi reformasi yang telah dilakukan. Pada tabel V.12. disajikan peringkat *Doing Business* di Indonesia dan negara ASEAN lain sebagai perbandingan. Pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat 126, sementara pada tahun 2012, peringkat *Doing Business* Indonesia turun menjadi 129. Dan pada tahun 2013, peringkat *Doing Business* Indonesia naik sedikit menjadi 128.

F. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Negara ASEAN

Indeks persepsi korupsi merupakan pengukuran terhadap tingkat korupsi di suatu negara yang dilakukan secara berkala oleh lembaga Transparency International. Indeks ini merupakan indeks gabungan, sebuah hasil polling dari berbagai polling, kumpulan pendapat ahli terkait dengan korupsi dan survei bisnis yang dilakukan oleh sejumlah lembaga independen dan terkemuka. Indeks ini mencerminkan pendapat seluruh dunia, termasuk pendapat pakar yang bertempat tinggal di negara-negara yang dievaluasi.



Tabel V.13 menampilkan skor Indeks persepsi korupsi Indonesia dan negara ASEAN, sementara pada tabel V.14. ditampilkan data mengenai peringkat Indeks persepsi korupsi Indonesia dan Negara ASEAN sebagai perbandingan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa skor Indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat tetapi peringkatnya turun. Pada tahun 2010, Indonesia memperoleh skor 2,8 dengan peringkat 110. Sementara pada tahun 2012, Indonesia memperoleh skor 3,2 dengan peringkat 118. Penurunan peringkat ini menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan dalam memberantas korupsi masih kalah jauh dengan Negara lain.

Selain menampilkan data *outcomes* yang berupa pengukuran indeks persepsi korupsi, sub bagian ini juga menampilkan data *output* (hasil) upaya pemberantasan korupsi ya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Data tersebut ditampilkan pada tabel V.15 sampai tabel V.17. Setelah itu, pada tabel V.18 ditampilkan data laporan gratifikasi yang diterima oleh KPK tahun 2008-2013 dan pada tabel V.19 disajikan data jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima oleh KPK Tahun 2010-2013.

G. Peringkat dan Nilai *Human Development Index* Indonesia dan Negara ASEAN

Human Development Index atau indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran yang dilakukan oleh UNDP secara berkala untuk melihat perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM ini digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih khusus dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dan aparatur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel V.20 menampilkan data mengenai Rangkaian (*Rank*) dan Nilai (*Value*) *Human Development Index* (HDI) Negara ASEAN 2010-2012 Sementara itu, tabel V.21 menampilkan Nilai Komponen (*Components*) *Human Development Index* (HDI) Negara ASEAN 2011-2012. Dari tabel tersebut terlihat bahwa rangkaian indeks pembangunan manusia Indonesia menurun, tahun 2010 Indonesia menempati peringkat 108, tetapi pada tahun 2012, Indonesia menempati peringkat 121. Penurunan ini perlu diperhatikan oleh pemerintah dan dicari solusi untuk meningkatkan kembali indeks pembangunan manusia Indonesia, yang berarti juga akan meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara riil.



Tabel V.1 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004 - 2010

No.	LKPP	Opini
1.	Tahun 2004	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
2.	Tahun 2005	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
3.	Tahun 2006	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
4.	Tahun 2007	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
5.	Tahun 2008	<i>Disclaimer</i> /Tidak menyatakan pendapat (TMP)
6.	Tahun 2009	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
7.	Tahun 2010	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
8.	Tahun 2011	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)
9.	Tahun 2012	<i>Qualified Opinion</i> /Wajar dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, BPK

Tabel V.2 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2010 - 2012

No.	Opini	2010		2011		2012	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	WTP	52	63%	66	76%	68	74%
2.	WDP	29	35%	18	21%	22	24%
3.	TW	0	0%	0	0%	0	0%
4.	TMP	2	2%	3	3%	2	2%
	Jumlah	83	100%	87	100%	92	100%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 2013

Tabel V.3 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun 2010 - 2012

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP
2.	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP
3.	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP
4.	Mahkamah Agung	WDP	WDP	WTP
5.	Kejaksaan Agung	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
6.	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP
7.	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WTP - DPP	WTP - DPP
8.	Kementerian Luar Negeri	WDP	WTP - DPP	WTP
9.	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WTP - DPP
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11.	Kementerian Keuangan	WDP	WTP	WTP
12.	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP
13.	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP
14.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP-DPP	WTP	WTP
15.	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP
16.	Kementerian Pendidikan Nasional	TMP	TMP	WDP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
17.	Kementerian Kesehatan	TMP	WDP	WTP-DPP
18.	Kementerian Agama	WDP	WTP - DPP	WTP-DPP
19.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP
20.	Kementerian Sosial	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
21.	Kementerian Kehutanan	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
22.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP - DPP	WTP - DPP
23.	Kementerian Pekerjaan Umum	WDP	WDP	WTP - DPP
24.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	WTP	WTP	WTP
25.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP
26.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP
27.	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata/Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WDP	WDP	WDP
28.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP
29.	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP
30.	Kementerian Lingkungan Hidup	WDP	WTP - DPP	WTP - DPP
31.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP - DPP
32.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	WTP	WTP	WTP
33.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	WTP	WTP	WDP
34.	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP
35.	Lembaga Sandi Negara	WTP-DPP	WTP - DPP	WTP
36.	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
37.	Badan Pusat Statistik	WDP	WTP	WTP
38.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP
39.	Badan Pertahanan Nasional	WDP	WDP	WTP - DPP
40.	Perpustakaan Nasional	WTP	WTP	WTP
41.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP
42.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	WTP-DPP	WTP - DPP	WTP - DPP
43.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	WTP-DPP	WTP	TMP
44.	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP
45.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP
46.	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP
47.	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggi	WDP	WDP	WTP-DPP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
48.	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP - DPP	WTP
49.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP
50.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP
51.	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP
52.	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP
53.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP-DPP	WTP	WTP
54.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WDP
55.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP
56.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WDP
57.	Lembaga Penerbangan dan Antartika Nasional	WTP	WTP	WDP
58.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional/ Badan Informasi Geospasial	WDP	WTP	WDP
59.	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP
60.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP-DPP	WDP	WDP
61.	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP
62.	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP
63.	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP
64.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP
65.	Kementerian Perdagangan	WTP-DPP	WTP	WTP
66.	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WDP
67.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP
68.	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP
69.	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP
70.	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP
71.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WDP	WTP	WTP
72.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP-DPP	WTP	WTP
73.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP-DPP	WTP	WTP
74.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WTP	WTP
75.	Badan SAR Nasional	WDP	WTP-DPP	WTP
76.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WDP	WTP
77.	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura		WDP	WDP
78.	Ombudsman Republik Indonesia		WTP	WTP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
79.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan		TMP	WDP
80.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam		TMP*)	
81.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme			WDP
82.	Sekretariat Kabinet			WTP
83.	Badan Pengawas Pemilihan Umum			WDP
84.	Lembaga Penyiaran Publik RRI			WDP
85.	Lembaga Penyiaran Publik TVRI			WDP
86.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang			TMP
87.	APP 61 (Pembayar Bunga Utang)	*	*	*
88.	APP 62 (Subsidi dan Transfer Lainnya)	*	*	*
89.	APP 69 (Belanja Lain-Lain)	*	*	*
90.	APP 70 (Dana Perimbangan)	*	*	*
91.	APP 71 (Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian)	*	*	*
92.	APP 96 (Cicilan Pokok Utang LN)	*	*	*
93.	APP 97 (Cicilan Pokok Utang DN)	*	*	*
94.	APP 98 (Penerusan Pinjaman)	*	*	*
95.	APP 99 (Penyertaan Modal Negara)	*	*	*
96.	BA 999.01 - Pengolaan Utang	WTP	WTP	
97.	BA 999.02 - Hibah	WDP	WDP	
98.	BA 999.03 - Penyertaan Modal Negara	WTP-DPP	WTP-DPP	
99.	BA 999.04 - Penerusan Pinjaman	WDP	WTP	
100.	BA 999.05 - Transfer ke Daerah	WTP-DPP	WTP	
101.	BA 999.06 - Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya	*	*	*
102.	BA 999.07 - Belanja Subsidi	WDP	WTP	
103.	BA 999.08 - Belanja Lain-Lain	WDP	WTP-DPP	
104.	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP
105.	Badan Rehabilitas dan Rekontruksi NAD-Nias	****	****	****
106.	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	TMP
107.	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP
108.	Pusat Investasi Pemerintah	WTP	*****	*****
109.	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	WTP	*****	*****
110.	Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) 1431 H/2010 M	TMP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.3

No.	Kementerian/Lembaga	2010	2011	2012
111.	Laporan Keuangan Konsolidasi Tahun Anggaran 2010 Pada <i>projek management office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP)</i> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta	WTP		
112.	Laporan Keuangan Loan ABD 2575-INO Pada <i>Rural Infrastructure Support to the PNPM Mandiri Project 2</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010	WTP	WTP	WTP
113.	Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Gas Bumi (BPMIGAS) Untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2008	*****		
114.	Loan ABD 2654-INO Pada <i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2011		WTP	WTP
115.	Loan ABD 2768-INO Pada <i>Urban Sanitation dan Rural Infrastructure (USRI) support to PNPM Project</i> Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum 2012			WTP
116.	PT. Jamsostek		WTP-DPP	

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2013

Catatan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP –DPP : Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Tabel V.4 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 - 2011

No.	Opini	2009		2010		2011	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	WTP	15	3%	34	7%	67	13%
2.	WDP	330	65%	341	66%	349	67%
3.	TW	48	10%	26	5%	8	2%
4.	TMP	111	22%	115	22%	96	18%
	Jumlah	504	100%	516	100%	520	100%

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2013



Tabel V.5 Kualifikasi Hasil Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009 - 2011

No.	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
1.	1.	Prov. Aceh	WDP	WDP
2.	2.	Kab. Aceh Barat	WDP	WDP
3.	3.	Kab. Aceh Barat Daya	WDP	WDP
4.	4.	Kab. Aceh Besar	WDP	WDP
5.	5.	Kab. Aceh Jaya	WDP	WDP
6.	6.	Kab. Aceh Selatan	WDP	WDP
7.	7.	Kab. Aceh Singkil	WDP	WDP
8.	8.	Kab. Aceh Tamiang	WDP	WDP
9.	9.	Kab. Aceh Tengah	WTP	WTP
10.	10.	Kab. Aceh Tenggara	WDP	WDP
11.	11.	Kab. Aceh Timur	WDP	WDP
12.	12.	Kab. Aceh Utara	TMP	TMP
13.	13.	Kab. Bener Meriah	WDP	WDP
14.	14.	Kab. Bireuen	TMP	WDP
15.	15.	Kab. Gayo Lues	WDP	WDP
16.	16.	Kab. Nagan Raya	WTP	WTP
17.	17.	Kab. Pidie	WDP	WDP
18.	18.	Kab. Pidie Jaya	WDP	WDP
19.	19.	Kab. Simeulue	TW	TW
20.	20.	Kota Banda Aceh	WTP	WTP
21.	21.	Kota Langsa	WTP	WTP
22.	22.	Kota Lhokseumawe	WTP	WDP
23.	23.	Kota Sabang	WTP	WTP
24.	24.	Kota Subulussalam	WDP	WDP
25.	1.	Prov. Sumatera Utara	WDP	WDP
26.	2.	Kab. Asahan	WDP	TMP
27.	3.	Kab. Batubara	TMP	TMP
28.	4.	Kab. Dairi	WDP	WDP
29.	5.	Kab. Deli Serdang	TMP	TMP
30.	6.	Kab. Humbang Hasundutan	WDP	WDP
31.	7.	Kab. Karo	WDP	WDP
32.	8.	Kab. Labuhanbatu	WDP	WDP
33.	9.	Kab. Labuhanbatu Selatan		WDP
34.	10.	Kab. Labuhanbatu Utara		TMP
35.	11.	Kab. Langkat	TMP	TMP
36.	12.	Kab. Mandailing Natal	WDP	WDP
37.	13.	Kab. Nias	TMP	TMP
38.	14.	Kab. Nias Barat		TMP
39.	15.	Kab. Nias Selatan	TMP	TMP
40.	16.	Kab. Nias Utara		TMP
41.	17.	Kab. Padang Lawas	TMP	TMP
42.	18.	Kab. Padang Lawas Utara	TMP	TMP
43.	19.	Kab. Pakpak Bharat	WDP	WDP
44.	20.	Kab. Samosir	WDP	WDP
45.	21.	Kab. Serdang Bedagai	WDP	WDP
46.	22.	Kab. Simalungun	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
47.	23.	Kab. Tapanuli Selatan	TW	TW	WDP
48.	24.	Kab. Tapanuli Tengah	WDP	WDP	TMP
49.	25.	Kab. Tapanuli Utara	WDP	WDP	WDP
50.	26.	Kab. Toba Samosir	WDP	WDP	WDP
51.	27.	Kota Binjai	TW	TW	WDP
52.	28.	Kota Gunung Sitoli		WDP	WDP
53.	29.	Kota Medan	TMP	WDP	WTP
54.	30.	Kota Padangsidimpuan	WDP	WDP	WDP
55.	31.	Kota Pematangsiantar	TMP	WDP	WDP
56.	32.	Kota Sibolga	WDP	WDP	WTP DPP
57.	33.	Kota Tanjung Balai	WDP	WDP	WDP
58.	34.	Kota Tebing Tinggi	WDP	WDP	WDP
59.	1.	Prov. Sumatera Barat	TMP	WDP	WDP
60.	2.	Kab. Agam	WDP	WDP	WDP
61.	3.	Kab. Dharmasraya	WDP	WDP	WDP
62.	4.	Kab. Kep. Mentawai	WDP	WDP	WDP
63.	5.	Kab. Lima Puluh Kota	WDP	WDP	WDP
64.	6.	Kab. Padang Pariaman	WDP	WDP	WDP
65.	7.	Kab. Pasaman	WDP	WDP	WDP
66.	8.	Kab. Pasaman Barat	TMP	WDP	WDP
67.	9.	Kab. Pesisir Selatan	WDP	WDP	WDP
68.	10.	Kab. Sijunjung	WDP	WDP	WDP
69.	11.	Kab. Solok	WDP	WDP	WDP
70.	12.	Kab. Solok Selatan	TMP	TMP	TMP
71.	13.	Kab. Tanah Datar	WTP	WDP	WDP
72.	14.	Kota Bukittinggi	WDP	WDP	WDP
73.	15.	Kota Padang	WDP	WDP	WDP
74.	16.	Kota Padang Panjang	WDP	WDP	WDP
75.	17.	Kota Pariaman	WDP	WDP	WDP
76.	18.	Kota Payakumbuh	WDP	WDP	WDP
77.	19.	Kota Sawahlunto	WDP	WDP	WDP
78.	20.	Kota Solok	WDP	WDP	WDP
79.	1.	Prov. Riau	WDP	WTP	WDP
80.	2.	Kab. Bengkalis	WDP	WDP	TMP
81.	3.	Kab. Indragiri Hilir	WDP	WDP	WDP
82.	4.	Kab. Indragiri Hulu	TMP	TW	WDP
83.	5.	Kab. Kampar	WDP	WDP	WDP
84.	6.	Kab. Kepulauan Meranti		WDP	WDP
85.	7.	Kab. Kuantan Singingi	WDP	WDP	WTP DPP
86.	8.	Kab. Pelalawan	WDP	WDP	WDP
87.	9.	Kab. Rokan Hilir	WDP	WDP	WDP
88.	10.	Kab. Rokan Hulu	WDP	WDP	WDP
89.	11.	Kab. Siak	WDP	WDP	WTP DPP
90.	12.	Kota Dumai	WDP	WDP	WDP
91.	13.	Kota Pekanbaru	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
92.	1.	Prov. Jambi	WDP	WDP	WDP
93.	2.	Kab. Batang Hari	WDP	WDP	WDP
94.	3.	Kab. Bungo	WDP	WDP	WDP
95.	4.	Kab. Kerinci	TMP	WDP	WDP
96.	5.	Kab. Merangin	WDP	WDP	WDP
97.	6.	Kab. Muaro Jambi	WDP	WDP	WDP
98.	7.	Kab. Sarolangun	WDP	WDP	WDP
99.	8.	Kab. Tanjung Jabung Barat	WDP	WDP	WDP
100.	9.	Kab. Tanjung Jabung Timur	WDP	WDP	WDP
101.	10.	Kab. Tebo	WDP	WDP	WDP
102.	11.	Kota Jambi	WDP	WDP	WDP
103.	12.	Kota Sungai Penuh	WTP	WDP	WDP
104.	1.	Prov. Sumatera Selatan	WDP	WDP	WDP
105.	2.	Kab. Banyuasin	TW	WDP	WTP DPP
106.	3.	Kab. Empat Lawang	TW	WDP	WDP
107.	4.	Kab. Lahat	WDP	WDP	WDP
108.	5.	Kab. Muara Enim	WDP	WDP	WDP
109.	6.	Kab. Musi Banyuasin	WDP	WDP	WDP
110.	7.	Kab. Musi Rawas	WDP	WDP	WDP
111.	8.	Kab. Ogan Ilir	WDP	WDP	WDP
112.	9.	Kab. Ogan Komering Ilir	WDP	WDP	WTP
113.	10.	Kab. Ogan Komering Ulu	TW	WDP	WDP
114.	11.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	WDP	WDP	WDP
115.	12.	Kab. Ogan Komering ulu Timur	WDP	WDP	WDP
116.	13.	Kota Lubuklinggau	WDP	WDP	WTP
117.	14.	Kota Pagaralam	WDP	WDP	WDP
118.	15.	Kota Palembang	WDP	WDP	WTP
119.	16.	Kot Prabumulih	WDP	WDP	WDP
120.	1.	Prov. Bengkulu	WDP	WDP	WTP
121.	2.	Kab. Bengkulu Selatan	WDP	WDP	WDP
122.	3.	Kab. Bengkulu Tengah	WDP	WTP	WTP
123.	4.	Kab. Bengkulu Utara	WDP	WDP	WDP
124.	5.	Kab. Kaur	WTP	WTP	WTP
125.	6.	Kab. Kapahiang	TMP	WDP	WDP
126.	7.	Kab. Lebong	TMP	TMP	WDP
127.	8.	Kab. Mukomuko	WDP	WDP	WTP
128.	9.	Kab. Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP
129.	10.	Kab. Seluma	WDP	WDP	TW
130.	11.	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WTP
131.	1.	Prov. Lampung	WDP	WDP	WTP DPP
132.	2.	Kab. Lampung Barat	WDP	WTP	WTP DDP
133.	3.	Kab. Lampung Selatan	WDP	WTP	WTP DDP
134.	4.	Kab. Lampung Tengah	TMP	WDP	WDP
135.	5.	Kab. Lampung Timur	TMP	TMP	TMP
136.	6.	Kab. Lampung Utara	WDP	TMP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
137.	7.	Kab. Mesuji		WDP	TMP
138.	8.	Kab. Pesawaran	WDP	WDP	WDP
139.	9.	Kab. Pringsewu		TMP	WDP
140.	10.	Kab. Tanggamus	WDP	WDP	WDP
141.	11.	Kab. Tulang Bawang	WDP	WDP	WDP
142.	12.	Kab. Tulang Bawang Barat		WDP	WTP
143.	13.	Kab. Way Kanan	WDP	WTP	WTP
144.	14.	Kota Bandar Lampung	WDP	WTP	WTP DPP
145.	15.	Kota Metro	WDP	WTP	WTP
146.	1.	Prov. Bangka Belitung	WDP	WDP	WDP
147.	2.	Kab. Bangka	WDP	WDP	WTP
148.	3.	Kab. Bangka Barat	WDP	WDP	WDP
149.	4.	Kab. Bangka Selatan	WDP	WDP	WDP
150.	5.	Kab. Bangka Tengah	WDP	WDP	WTP DPP
151.	6.	Kab. Belitung	WDP	WDP	WDP
152.	7.	Kab. Belitung Timur	WDP	WDP	WDP
153.	8.	Kota Pangkalpinang	WDP	WDP	WDP
154.	1.	Prov. Kepulauan Riau	WDP	WTP	WTP
155.	2.	Kab. Bintan	WDP	WDP	WTP
156.	3.	Kab. Karimun	WDP	WDP	WDP
157.	4.	Kab. Kepulauan Anambas	TMP	WDP	WDP
158.	5.	Kab. Lingga	WDP	WDP	WDP
159.	6.	Kab. Natuna	WDP	WDP	WDP
160.	7.	Kota Batam	WDP	WDP	WDP
161.	8.	Kota Tanjungpinang	WDP	WDP	WDP
162.	1.	Prov. DKI Jakarta	WDP	WDP	WTP DPP
163.	1.	Prov. Jawa Barat	WDP	WDP	WTP
164.	2.	Kab. Bandung	WDP	WDP	WDP
165.	3.	Kab. Bandung Barat	TMP	TMP	WDP
166.	4.	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP
167.	5.	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP
168.	6.	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WDP
169.	7.	Kab. Cianjur	TMP	WDP	WDP
170.	8.	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP
171.	9.	Kab. Garut	TMP	WDP	WDP
172.	10.	Kab. Indramayu	WDP	WDP	WDP
173.	11.	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP
174.	12.	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP
175.	13.	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WDP
176.	14.	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP
177.	15.	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP
178.	16.	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP
179.	17.	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP
180.	18.	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP
181.	19.	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
182.	20.	Kota Banjar	WDP	WDP	WTP
183.	21.	Kota Bekasi	TMP	WDP	WDP
184.	22.	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP
185.	23.	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP
186.	24.	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP
187.	25.	Kota Depok	WDP	WDP	WTP DPP
188.	26.	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP
189.	27.	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP
190.	1.	Prov. Jawa Tengah	WDP	WDP	WTP DPP
191.	2.	Kab. Banjarnegara	WDP	WDP	WDP
192.	3.	Kab. Banyumas	WDP	WDP	WTP
193.	4.	Kab. Batang	WDP	WDP	WDP
194.	5.	Kab. Blora	WDP	WDP	WDP
195.	6.	Kab. Boyolali	WDP	WDP	WTP
196.	7.	Kab. Brebes	WDP	WDP	WDP
197.	8.	Kab. Cilacap	WDP	WDP	WDP
198.	9.	Kab. Demak	WDP	TMP	WDP
199.	10.	Kab. Grobogan	WDP	WDP	WDP
200.	11.	Kab. Jepara	WDP	WTP	WTP
201.	12.	Kab. Karanganyar	WDP	WDP	WDP
202.	13.	Kab. Kebumen	WDP	WDP	WTP
203.	14.	Kab. Kendal	WDP	WDP	WDP
204.	15.	Kab. Klaten	WDP	WDP	WDP
205.	16.	Kab. Kudus	WDP	WDP	WDP
206.	17.	Kab. Magelang	WDP	WDP	WDP
207.	18.	Kab. Pati	WDP	WDP	WDP
208.	19.	Kab. Pekalongan	WDP	WDP	WDP
209.	20.	Kab. Pemasang	WDP	WDP	WDP
210.	21.	Kab. Purbalingga	WDP	WDP	WDP
211.	22.	Kab. Purworejo	WDP	WDP	WDP
212.	23.	Kab. Rembang	WDP	WDP	WDP
213.	24.	Kab. Semarang	WDP	WDP	WTP
214.	25.	Kab. Sragen	WDP	WDP	WDP
215.	26.	Kab. Sukoharjo	WDP	WDP	WDP
216.	27.	Kab. Tegal	WDP	WDP	WDP
217.	28.	Kab. Temanggung	WDP	WDP	WDP
218.	29.	Kab. Wonogiri	WDP	WDP	WDP
219.	30.	Kab. Wonosobo	WDP	WDP	WDP
220.	31.	Kota Magelang	WDP	WDP	WDP
221.	32.	Kota Pekalongan	WDP	WDP	WDP
222.	33.	Kota Salatiga	WDP	WDP	WDP
223.	34.	Kota Semarang	WDP	WDP	WDP
224.	35.	Kota Surakarta	WDP	WTP	WTP
225.	36.	Kota Tegal	WDP	WDP	WTP
226.	1.	Prov. D.I Yogyakarta	WDP	WTP	WTP DPP
227.	2.	Kab. Bantul	WDP	WDP	WDP
228.	3.	Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
229.	4.	Kab. Kulon Progo	WDP	WDP	WDP
230.	5.	Kab. Sleman	WDP	WDP	WTP DPP
231.	6.	Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP DPP
232.	1.	Prov. Jawa Timur	WDP	WTP	WTP DPP
233.	2.	Kab. Bangkalan	WDP	WTP	WTP
234.	3.	Kab. Banyuwangi	WDP	WDP	WDP
235.	4.	Kab. Blitar	WDP	WDP	WDP
236.	5.	Kab. Bojonegoro	WDP	WDP	WDP
237.	6.	Kab. Bondowoso	WDP	WDP	WTP DPP
238.	7.	Kab. Gresik	WDP	WDP	WDP
239.	8.	Kab. Jember	WDP	WDP	WDP
240.	9.	Kab. Jombang	WDP	WDP	WDP
241.	10.	Kab. Kediri	WDP	WDP	WDP
242.	11.	Kab. Lamongan	WDP	WDP	WDP
243.	12.	Kab. Lumajang	WDP	WDP	WDP
244.	13.	Kab. Madiun	WDP	WDP	WDP
245.	14.	Kab. Magetan	WDP	WDP	WDP
246.	15.	Kab. Malang	WDP	WDP	WDP
247.	16.	Kab. Mojokerto	WDP	WDP	TMP
248.	17.	Kab. Nganjuk	WDP	WDP	WDP
249.	18.	Kab. Ngawi	WDP	WDP	WDP
250.	19.	Kab. Pacitan	WDP	WTP	WTP DPP
251.	20.	Kab. Pamekasan	WDP	WDP	WTP DPP
252.	21.	Kab. Pasuruan	WDP	WDP	WDP
253.	22.	Kab. Ponogoro	WDP	WDP	WDP
254.	23.	Kab. Probolinggo	WDP	WDP	WDP
255.	24.	Kab. Sampang	WDP	WDP	WDP
256.	25.	Kab. Sidoarjo	TMP	WDP	WDP
257.	26.	Kab. Situbondo	WDP	WDP	WDP
258.	27.	Kab. Sumenep	WDP	WDP	WDP
259.	28.	Kab. Trenggalek	WDP	WDP	WDP
260.	29.	Kab. Tuban	WDP	WDP	WTP DPP
261.	30.	Kab. Tulungagung	WDP	WTP	WTP DPP
262.	31.	Kota Batu	TMP	TMP	WDP
263.	32.	Kota Blitar	WDP	WTP	WTP DPP
264.	33.	Kota Kediri	WDP	WDP	WDP
265.	34.	Kota Madiun	WDP	WDP	WDP
266.	35.	Kota Malang	WDP	WDP	WTP DPP
267.	36.	Kota Mojokerto	WDP	WTP	WTP DPP
268.	37.	Kota Pasuruan	WDP	WDP	WDP
269.	38.	Kota Probolinggo	WDP	WDP	WTP DPP
270.	39.	Kota Surabaya	TW	WDP	WDP
271.	1.	Prov. Banten	WDP	WDP	WDP
272.	2.	Kab. Lebak	WDP	WDP	WDP
273.	3.	Kab. Pandeglang	TMP	TMP	WDP
274.	4.	Kab. Serang	WDP	WDP	WTP DPP
275.	5.	Kab. Tangerang	WTP	WTP	WTP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
276.	6.	Kota Cilegon	WDP	TMP	WDP
277.	7.	Kota Serang	WDP	WDP	WDP
278.	8.	Kota Tangerang	WTP	WTP	WTP
279.	9.	Kota Tangerang Selatan	WDP	WTP	WTP
280.	1.	Prov. Bali	WDP	WDP	WDP
281.	2.	Kab. Badung	WDP	WDP	WTP DPP
282.	3.	Kab. Bangli	WDP	WDP	WDP
283.	4.	Kab. Buleleng	WDP	TMP	WDP
284.	5.	Kab. Gianyar	WDP	WDP	WDP
285.	6.	Kab. Jembrana	TW	TW	WDP
286.	7.	Kab. Karangasem	WDP	TMP	WDP
287.	8.	Kab. Klungkung	WDP	WDP	WDP
288.	9.	Kab. Tabanan	WDP	WDP	WDP
289.	10.	Kota Denpasar	WDP	WDP	WDP
290.	1.	Prov. Nusa Tenggara Barat	WDP	TMP	WTP
291.	2.	Kab. Bima	WDP	WDP	TMP
292.	3.	Kab. Dompu	TMP	TMP	TMP
293.	4.	Kab. Lombok Barat	WDP	WDP	WDP
294.	5.	Kab. Lombok Tengah	WDP	WDP	WDP
295.	6.	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP
296.	7.	Kab. Lombok Utara	WDP	WDP	WDP
297.	8.	Kab. Sumbawa	WDP	WDP	WDP
298.	9.	Kab. Sumbawa Barat	WDP	WDP	WDP
299.	10.	Kota Bima	TMP	TMP	WDP
300.	11.	Kota Mataram	WDP	WDP	WDP
301.	1.	Prov. Nusa Tenggara Timur	WDP	WDP	WDP
302.	2.	Kab. Alor	TMP	TMP	TMP
303.	3.	Kab. Belu	WDP	WDP	WDP
304.	4.	Kab. Ende	TMP	TMP	WDP
305.	5.	Kab. Flores Timur	WDP	WDP	WDP
306.	6.	Kab. Kupang	TMP	TMP	TMP
307.	7.	Kab. Lembata	TMP	TMP	TMP
308.	8.	Kab. Manggarai	TMP	WDP	WDP
309.	9.	Kab. Manggarai Barat	TMP	TMP	WDP
310.	10.	Kab. Manggarai Timur	TMP	TMP	TMP
311.	11.	Kab. Nagekeo	TMP	TMP	WDP
312.	12.	Kab. Ngada	TMP	TMP	TMP
313.	13.	Kab. Rote Ndao	TMP	TMP	TMP
314.	14.	Kab. Sabu Raijua		WDP	WDP
315.	15.	Kab. Sikka	TMP	TMP	WDP
316.	16.	Kab. Sumba Barat	TMP	TMP	WDP
317.	17.	Kab. Sumba Darat Daya	TMP	WDP	WDP
318.	18.	Kab. Sumba Tengah	TMP	WDP	WDP
319.	19.	Kab. Sumba Timur	TMP	TMP	WDP
320.	20.	Kab. Timor Tengah Selatan	TMP	TMP	WDP
321.	21.	Kab. Timor Tengah Utara	TMP	TMP	TMP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
322.	22.	Kota Kupang	WDP	WDP	WDP
323.	1.	Prov. Kalimantan Barat	WDP	WDP	WDP
324.	2.	Kab. Bengkayang	TMP	WDP	WDP
325.	3.	Kab. Kapuas hulu	TMP	WDP	WDP
326.	4.	Kab. Kayong Utara	TMP	WDP	WDP
327.	5.	Kab. Ketapang	WDP	WDP	WDP
328.	6.	Kab. Kubu Raya	TW	TW	WDP
329.	7.	Kab. Landak	TW	WDP	WDP
330.	8.	Kab. Melawi	TW	TW	TW
331.	9.	Kab. Pontianak	WDP	WDP	WDP
332.	10.	Kab. Sambas	WDP	WDP	WDP
333.	11.	Kab. Sanggau	WDP	WDP	WDP
334.	12.	Kab. Sekadau	TMP	WDP	WDP
335.	13.	Kab. Sintang	WDP	WDP	WDP
336.	14.	Kota Pontianak	WDP	WDP	WTP DPP
337.	15.	Kota Singkawang	TW	WDP	WDP
338.	1.	Prov. Kalimantan Tengah	TW	WDP	WDP
339.	2.	Kab. Barito Selatan	TW	TW	WDP
340.	3.	Kab. Barito Timur	TW	TMP	WDP
341.	4.	Kab. Barito Utara	TW	TMP	WDP
342.	5.	Kab. Gunung Mas	TW	WDP	WDP
343.	6.	Kab. Kapuas	WDP	WDP	WDP
344.	7.	Kab. Katingan	WDP	TMP	WDP
345.	8.	Kab. Kotawaringin Barat	TW	WDP	TW
346.	9.	Kab. Kotawaringin Timur	TW	TW	WDP
347.	10.	Kab. Lamandau	TW	WDP	WDP
348.	11.	Kab. Murung Raya	TW	TW	WDP
349.	12.	Kab. Pulang Pisang	TW	TW	WDP
350.	13.	Kab. Seruyan	TMP	TMP	WDP
351.	14.	Kab. Sukamara	TW	WDP	WTP DPP
352.	15.	Kota Palangkaraya	TW	WDP	WDP
353.	1.	Prov. Kalimantan Selatan	WDP	WDP	WDP
354.	2.	Kab. Balangan	WDP	WDP	WDP
355.	3.	Kab. Banjar	TW	TW	WDP
356.	4.	Kab. Barito Kuala	TW	WDP	WDP
357.	5.	Kab. Hulu Sungai Selatan	WDP	WDP	WDP
358.	6.	Kab. Hulu Sungai Tengah	WDP	WDP	WDP
359.	7.	Kab. Hulu Sungai Utara	WDP	WDP	WDP
360.	8.	Kab. Kotabaru	WDP	WDP	WDP
361.	9.	Kab. Tabalong	WDP	WDP	TMP
362.	10.	Kab. Tanah Bumbu	WDP	WDP	WDP
363.	11.	Kab. Tanah Laut	WDP	WDP	WDP
364.	12.	Kab. Tapih	WDP	WDP	WDP
365.	13.	Kota Banjarbaru	WDP	WDP	WDP
366.	14.	Kota Banjarmasin	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
367.	1.	Prov. Kalimantan Timur	TW	WDP	WDP
368.	2.	Kab. Berau	TW	WDP	WDP
369.	3.	Kab. Bulungan	TW	TW	WDP
370.	4.	Kab. Kutai Barat	TW	TW	WDP
371.	5.	Kab. Kutai Kartanegara	TMP	TMP	TMP
372.	6.	Kab. Kutai Timur	TMP	TW	TW
373.	7.	Kab. Malinau	WDP	TW	WDP
374.	8.	Kab. Nunukan	TW	TW	WDP
375.	9.	Kab. Paser	TW	TW	WDP
376.	10.	Kab. Penajam Paser Utara	TW	TW	WDP
377.	11.	Kab. Tana Tidung	TMP	TMP	TMP
378.	12.	Kab. Balikpapan	WDP	WDP	WDP
379.	13.	Kota Bontang	WDP	WDP	WDP
380.	14.	Kota Samarinda	TW	TMP	TMP
381.	15.	Kota Tarakan	WDP	WDP	WDP
382.	1.	Prov Sulawesi Utara	WTP	WTP	WDP
383.	2.	Kab. Bolaang Mongondow	WDP	TW	TMP
384.	3.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	WDP	TMP	TMP
385.	4.	Kab. Bolaang Mongondow Timur	WDP	TMP	TMP
386.	5.	Kab. Bolaang Mongondow Utara	WDP	TW	TMP
387.	6.	Kab. Kepulauan Sangihe	TW	TW	TMP
388.	7.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	WDP	TW	WDP
389.	8.	Kab. Kepulauan Taulad	TMP	TW	TMP
390.	9.	Kab. Minahasa	WDP	WDP	WDP
391.	10.	Kab. Minahasa Selatan	TW	TMP	TMP
392.	11.	Kab. Minahasa Tenggara	TMP	TMP	TMP
393.	12.	Kab. Minahasa Utara	WDP	TMP	TMP
394.	13.	Kota Bitung	WDP	WDP	WTP DPP
395.	14.	Kota Kotamobagu	WDP	TW	TW
396.	15.	Kota Manado	TW	TMP	TW
397.	16.	Kota Tomohon	TW	TMP	TMP
398.	1.	Prov. Sulawesi Tengah	TMP	WDP	WDP
399.	2.	Kab. Banggai	WDP	WDP	WDP
400.	3.	Kab. Banggai Kepulauan	TMP	WDP	WTP DPP
401.	4.	Kab. Buol	TMP	TMP	WDP
402.	5.	Kab. Donggala	WDP	WDP	WTP DPP
403.	6.	Kab. Morowali	TMP	WDP	WDP
404.	7.	Kab. Parigi Moutong	TMP	TMP	WDP
405.	8.	Kab. Poso	WDP	WDP	WDP
406.	9.	Kab. Sigi	TMP	WDP	WTP DPP
407.	10.	Kab. Tojo Una-Una	WDP	WDP	WDP
408.	11.	Kab. tolitoli	TMP	WDP	WDP
409.	12.	Kota Palu	TMP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
410.	1.	Prov. Sulawesi Selatan	WDP	WTP	WTP
411.	2.	Kab. Bantaeng	WDP	WDP	WDP
412.	3.	Kab. Barru	WDP	TMP	WDP
413.	4.	Kab. Bone	WDP	WDP	WDP
414.	5.	Kab. Bulukumba	WDP	WDP	WDP
415.	6.	Kab. Enrekang	WDP	WDP	WDP
416.	7.	Kab. Gowa	WDP	WDP	WTP
417.	8.	Kab. Jeneponto	WDP	WDP	TMP
418.	9.	Kab. Kep. Selayar	WDP	TMP	TMP
419.	10.	Kab. Luwu	WDP	WDP	WDP
420.	11.	Kab. Luwu Timur	WDP	WDP	WTP
421.	12.	Kab. Luwu Utara	WDP	WTP	WDP
422.	13.	Kab. Maros	TMP	TMP	WDP
423.	14.	Kab. Pangkajene dan kepulauan	WDP	WDP	WDP
424.	15.	Kab. Pinrang	WDP	WDP	WDP
425.	16.	Kab. sindereng Rappang	WDP	WDP	WDP
426.	17.	Kab. Sinjai	WDP	WDP	WDP
427.	18.	Kab. Soppeng	WDP	WDP	WDP
428.	19.	Kab. Takalar	WDP	TMP	TMP
429.	20.	Kab. Tana Toraja	WDP	WDP	TMP
430.	21.	Kab. Toraja Utara	WDP	WDP	WDP
431.	22.	Kab. Wajo	WDP	WDP	WDP
432.	23.	Kota Makassar	WDP	WDP	WDP
433.	24.	Kota Palopo	TMP	TMP	TMP
434.	25.	Kota Pare-Pare	WDP	WDP	TMP
435.	1.	Prov. Sulawesi Tenggara	TMP	WDP	WDP
436.	2.	Kab. Bombana	TMP	TMP	TMP
437.	3.	Kab. Buton	WDP	WTP	WDP
438.	4.	Kab. Buton Utara	TMP	TMP	TMP
439.	5.	Kab. Kolaka	TW	WDP	WDP
440.	6.	Kab. Kolaka Utara	WDP	WDP	WDP
441.	7.	Kab. Konawe	TMP	TMP	WDP
442.	8.	Kab. Konawe Selatan	TMP	TMP	WDP
443.	9.	Kab. Konawe Utara	TMP	TMP	TMP
444.	10.	Kab. Muna	TMP	TMP	WDP
445.	11.	Kab. Wakatobi	TW	WDP	WDP
446.	12.	Kota Bau-Bau	TMP	TMP	WDP
447.	13.	Kota Kendari	WDP	WDP	WDP
448.	1.	Prov. Gorontalo	WDP	WDP	WDP
449.	2.	Kab. Boalemo	WDP	WDP	WDP
450.	3.	Kab. Bone Bolango	WDP	WDP	WDP
451.	4.	Kab. Gorontalo	WTP	WTP	WDP
452.	5.	Kab. Gorontalo Utara	WDP	WDP	WDP
453.	6.	Kab. Pohuwato	WDP	WDP	WDP
454.	7.	Kota Gorontalo	WDP	WDP	WDP



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
455.	1.	Prov. Sulawesi Barat	WDP	WDP	WDP
456.	2.	Kab. Majene	WDP	WDP	WDP
457.	3.	Kab. Mamasa	WDP	WDP	WDP
458.	4.	Kab. Mamuju	WDP	WDP	WDP
459.	5.	Kab. Mamuju Utara	WDP	WDP	WDP
460.	6.	Kab. Polewali Mandar	WDP	WDP	WDP
461.	1.	Prov. Maluku	TMP	TMP	TMP
462.	2.	Kab. Buru	TMP	TMP	TMP
463.	3.	Kab. Buru Selatan	TMP	***	**
464.	4.	Kab. Kepulauan Aru	TMP	***	TMP
465.	5.	Kab. Maluku Barat Daya	TMP	TMP	TMP
466.	6.	Kab. Maluku Tengah	TMP	TMP	TMP
467.	7.	Kab. Maluku Tenggara	TMP	TMP	WDP
468.	8.	Kab. Maluku Tenggara Barat	TMP	TMP	TMP
469.	9.	Kab. Seram Bagian Barat	TMP	TMP	***
470.	10.	Kab. Seram Bagian Timur	TMP	TMP	TMP
471.	11.	Kota Ambon	TMP	TMP	TMP
472.	12.	Kota Tual	TMP	TMP	TMP
473.	1.	Prov. Maluku Utara	TW	TMP	TMP
474.	2.	Kab. Halmahera Barat	TW	TMP	TMP
475.	3.	Kab. Halmahera Selatan	TW	TMP	WDP
476.	4.	Kab. Halmahera Tengah	TW	TMP	TMP
477.	5.	Kab. Halmahera Timur	TW	TMP	TMP
478.	6.	Kab. Halmahera Utara	TW	TMP	TMP
479.	7.	Kab. Kepulauan Sula	TW	TMP	TMP
480.	8.	Kab. Pulau Morotai		TMP	TMP
481.	9.	Kota Ternate	TW	TMP	WDP
482.	10.	Kota Tidore Kepulauan	WDP	WDP	WDP
483.	1.	Prov. Papua	WDP	TMP	TMP
484.	2.	Kab. Asmat	WDP	WDP	WDP
485.	3.	Kab. Baik Numfor	WDP	TMP	TMP
486.	4.	Kab. Boven Digoel	TMP	TMP	TMP
487.	5.	Kab. Deiyai		*	TMP
488.	6.	Kab. Dogiyai	TMP	TMP	TMP
489.	7.	Kab. Intan Jaya		*	TMP
490.	8.	Kab. Jayapura	WDP	WDP	WDP
491.	9.	Kab. Jayawijaya	TMP	WDP	WDP
492.	10.	Kab. Keerom	TMP	TMP	TMP
493.	11.	Kab. Kepulauan Yapen	TMP	TMP	WDP
494.	12.	Kab. Lanny Jaya		TMP	TMP
495.	13.	Kab. Memberamo Raya	TMP	**	TMP
496.	14.	Kab. Memberamo Tengah		*	**
497.	15.	Kab. Mappi	TMP	TMP	TMP
498.	16.	Kab. Marauke	TMP	TMP	TMP
499.	17.	Kab. Mimika	WDP	WDP	WDP
500.	18.	Kab. Nabire	TMP	TMP	TW



Lanjutan Tabel V.5

No.		Kabupaten/Kota	2009	2010	2011
501.	19.	Kab. Nduga		TMP	TMP
502.	20.	Kab. Paniai	TMP	TMP	TMP
503.	21.	Kab. Pegunungan Bintang	WDP	TMP	TW
504.	22.	Kab. Puncak		*	TMP
505.	23.	Kab. Puncak Jaya	TMP	TMP	WDP
506.	24.	Kab. Sarmi	TMP	TMP	TMP
507.	25.	Kab. Supiori	TMP	TMP	TMP
508.	26.	Kab. Tolikara	TMP	TMP	TMP
509.	27.	Kab. Waropen	TMP	**	**
510.	28.	Kab. Yahukimo	TMP	TMP	TMP
511.	29.	Kab. Yalimo		TMP	TMP
512.	30.	Kota Jayapura	WDP	WDP	WDP
513.	1.	Prov. Papua Barat	TMP	TMP	TMP
514.	2.	Kab. Fakfak	TMP	TMP	TMP
515.	3.	Kab. Kaimana	TMP	WDP	TMP
516.	4.	Kab. Monokwari	WDP	TMP	TMP
517.	5.	Kab. Maybrat		TMP	TMP
518.	6.	Kab. Raja Ampat	TMP	WDP	TMP
519.	7.	Kab. Sorong	TMP	TMP	TMP
520.	8.	Kab. Sorong Selatan	TMP	WDP	WDP
521.	9.	Kab. Tambrau		TMP	TMP
522.	10.	Kab. Teluk Bintuni	TMP	TMP	WDP
523.	11.	Kab. Teluk Wondama	TMP	TMP	TMP
524.	12.	Kota Sorong	WDP	TW	TMP

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , 2013

Catatan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WTP –DPP : Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelasan

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

Tabel V.6 Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Pusat Tahun 2011

No.	Kementerian/lembaga	Kriteria
NILAI A		
1.	Komisi Pemberantasan Korupsi	A
2.	Badan Pemeriksa Keuangan	A
	Jumlah	2
NILAI B		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	B
2.	Sekretariat Negara	B
3.	Kementerian Dalam Negeri	B
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	B
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	B
6.	Kementerian Keuangan	B
7.	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	B
8.	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS	B
9.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	B



Lanjutan Tabel V.6

No.	Kementerian/lembaga	Kriteria
10.	Kementerian Hukum dan HAM	B
11.	Kementerian Pekerjaan Umum	B
12.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	B
13.	Kementerian Perdagangan	B
14.	Kementerian Pertanian	B
15.	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	B
16.	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	B
17.	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	B
	Jumlah	17
NILAI CC		
1.	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	CC
2.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	CC
3.	Sekretariat kabinet	CC
4.	Kementerian Agama	CC
5.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	CC
6.	Kementerian Kehutanan	CC
7.	Kementerian Kesehatan	CC
8.	Kementerian Komunikasi dan Informatika	CC
9.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	CC
10.	Kementerian Lingkungan Hidup	CC
11.	Kementerian Luar Negeri	CC
12.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	CC
13.	Kementerian Pembangunan Daerah tertinggal	CC
14.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	CC
15.	Kementerian Pemuda dan Olahraga	CC
16.	Kementerian Perhubungan	CC
17.	Kementerian Perindustrian	CC
18.	Kementerian Pertahanan	CC
19.	Kementerian Perumahan Rakyat	CC
20.	Kementerian Riset dan Teknologi	CC
21.	Kementerian Sosial	CC
22.	Markas Besar TNI	CC
23.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	CC
24.	Mahkamah Agung	CC
25.	Sekretariat Jenderal MPR	CC
26.	Kementerian Perindustrian	CC
27.	Kementerian Pertahanan	CC
28.	Kementerian Perumahan Rakyat	CC
29.	Kementerian Riset dan Teknologi	CC
30.	Kementerian Sosial	CC
31.	Markas Besar TNI	CC
32.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	CC
33.	Mahkamah Agung	CC
34.	Sekretariat Jenderal MPR	CC
35.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat	CC
36.	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah	CC
37.	Arsip Nasional Republik Indonseia	CC
38.	Badan Kepegawaian Negara	CC
39.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	CC



Lanjutan Tabel V.6

No.	Kementerian/lembaga	Kriteria
40.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	CC
41.	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	CC
42.	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	CC
43.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	CC
44.	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	CC
45.	Badan Narkotika Nasional	CC
46.	Badan Pengawas Obat dan Makanan	CC
47.	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	CC
48.	Badan Pegusahaan BATAM	CC
49.	Badan Pusat Statistik	CC
50.	Badan Standarisasi Nasional	CC
51.	Badan Tenaga Nuklir Nasional	CC
52.	Lembaga Administrasi Negara	CC
53.	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonseia	CC
54.	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	CC
55.	Lembaga Ketahanan Nasional	CC
56.	Lembaga Sandi Negara	CC
57.	Perpustakaan Nasional RI	CC
58.	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	CC
	Jumlah	49
NILAI C		
1.	Kejaksaan Agung	C
2.	Badan Intelijen Negara	C
3.	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	C
4.	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	C
5.	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	C
6.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	C
7.	Badan Pertanahan Nasional	C
8.	Badan SAR Nasional	C
9.	Dewan Ketahanan Nasional	C
10.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	C
11.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	C
12.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	C
13.	Sekretariat Jenderal Dewan Jaminan Sosial Nasional	C
14.	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum	C
	Jumlah	14

Sumber : Kementerian PAN RB, 2012

Tabel V.7 Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

Daerah	Hasil Penilaian LAKIP 2011						Total
	AA	A	B	CC	C	D	
Provinsi			2	17	11		30
kabupaten				14	73	53	140
Kota			1	7	20	12	40

Sumber : Kementerian PAN RB, 2012



Tabel V.8 Nomenklatur Pemerintah Daerah Propinsi dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

No	Provinsi	Kriteria
1.	Jawa Tengah	B
2.	Kalimantan Timur	B
	Jumlah	2
1.	Bali	CC
2.	DI Yogyakarta	CC
3.	DKI Jakarta	CC
4.	Jawa Barat	CC
5.	Jawa Timur	CC
6.	Kalimantan Barat	CC
7.	Kalimantan Selatan	CC
8.	Kepulauan Riau	CC
9.	Maluku	CC
10.	Nusa Tenggara Barat	CC
11.	Nusa Tenggara Timur	CC
12.	Riau	CC
13.	Sulawesi Tengah	CC
14.	Sulawesi Utara	CC
15.	Sumatera Barat	CC
16.	Sumatera Selatan	CC
17.	Sumatera Utara	CC
	Jumlah	17
1.	Aceh	C
2.	Banten	C
3.	Bengkulu	C
4.	Gorontalo	C
5.	Jambi	C
6.	Kalimantan Tengah	C
7.	Kepulauan Bangka Belitung	C
8.	Lampung	C
9.	Papua	C
10.	Sulawesi Barat	C
11.	Sulawesi Selatan	C
	Jumlah	11
	Rata Rata	CC

Sumber : Kementerian PAN dan RB, 2012



Tabel V.9 Nomenklatur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kualifikasi Hasil Penilaian Kemenpan terhadap LAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Kriteria
1.	Kota Sukabumi	B
	Jumlah	1
1.	Kab. Batang Hari	CC
2.	Kab. Bengkayang	CC
3.	Kab. Bima	CC
4.	Kab. Bogor	CC
5.	Kab. Boyolali	CC
6.	Kab. Garut	CC
7.	Kab. Gunung Kidul	CC
8.	Kab. Karimun	CC
9.	Kab. Kerinci	CC
10.	Kab. Musi Banyuasin	CC
11.	Kab. Pacitan	CC
12.	Kab. Pandeglang	CC
13.	Kab. Pangkajene Kepulauan	CC
14.	Kab. Sleman	CC
15.	Kota Banjar Baru	CC
16.	Kota Bekasi	CC
17.	Kota Bitung	CC
18.	Kota Blitar	CC
19.	Kota Cilegon	CC
20.	Kota Malang	CC
21.	Kota Tegal	CC
	Jumlah	21
1.	Kab. Aceh Tengah	C
2.	Kab. Bandung	C
3.	Kab. Balangan	C
4.	Kab. Bangka	C
5.	Kab. Banjar	C
6.	Kab. Bengkulu Selatan	C
7.	Kab. Bintan	C
8.	Kab. Bone Bolango	C
9.	Kab. Buru	C
10.	Kab. Dairi	C
11.	Kab. Donggala	C
12.	Kab. Ende	C
13.	Kab. Enrekang	C
14.	Kab. Kampar	C
15.	Kab. Kapuas	C
16.	Kab. Karang Anyar	C
17.	Kab. Karawang	C
18.	Kab. Katingan	C
19.	Kab. Kaur	C
20.	Kab. Kediri	C
21.	Kab. Ketapang	C
22.	Kab. Klaten	C
23.	Kab. Kota Waringin Timur	C



Lanjutan Tabel V.9

No	Kabupaten/kota	Kriteria
24.	Kab. Kudus	C
25.	Kab. Kulon Progo	C
26.	Kab. Kutai Barat	C
27.	Kab. Lahat	C
28.	Kab. Lampung Selatan	C
29.	Kab. Lampung Utara	C
30.	Kab. Landak	C
31.	Kab. Langkat	C
32.	Kab. Lombok Timur	C
33.	Kab. Madiun	C
34.	Kab. Magelang	C
35.	Kab. Malinau	C
36.	Kab. Maluku Tengah	C
37.	Kab. Maluku Tenggara	C
38.	Kab. Manggarai	C
39.	Kab. Manggarai Timur	C
40.	Kab. Merauke	C
41.	Kab. Minahasa Utara	C
42.	Kab. Muna	C
43.	Kab. Musi Rawas	C
44.	Kab. Ogan Komering Ilir	C
45.	Kab. Ogan Komering Ulu	C
46.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	C
47.	Kab. Padang Pariaman	C
48.	Kab. Parigi Moutong	C
49.	Kab. Pasaman	C
50.	Kab. Pasaman Barat	C
51.	Kab. Pati	C
52.	Kab. Pesisir Selatan	C
53.	Kab. Pidie Jaya	C
54.	Kab. Polewali Mandar	C
55.	Kab. Purbalingga	C
56.	Kab. Rokan Hulu	C
57.	Kab. Samosir	C
58.	Kab. Sanggau	C
59.	Kab. Selayar	C
60.	Kab. Sinjai	C
61.	Kab. Situbondo	C
62.	Kab. Sragen	C
63.	Kab. Sumenep	C
64.	Kab. Tabanan	C
65.	Kab. Tanah Datar	C
66.	Kab. Tanah Laut	C
67.	Kab. Tangerang	C
68.	Kab. Tanjung Jabung Timur	C
69.	Kab. Tebo	C
70.	Kab. Temanggung	C
71.	Kab. Timor Tengah Selatan	C



Lanjutan Tabel V.9

No	Kabupaten/kota	Kriteria
72.	Kab. Toujo Una-Una	C
73.	Kab. Trenggalek	C
74.	Kota Banda aceh	C
75.	Kota Banjarmasin	C
76.	Kota Batam	C
77.	Kota Bogor	C
78.	Kota Bukit Tinggi	C
79.	Kota Cimahi	C
80.	Kota Denpasar	C
81.	Kota Dumai	C
82.	Kota Madiun	C
83.	Kota Makassar	C
84.	Kota Medan	C
85.	Kota Metro	C
86.	Kota Pariaman	C
87.	Kota Probolinggo	C
88.	Kota Singkawang	C
89.	Kota Tanah Bumbu	C
90.	Kota Tanjung Pinang	C
91.	Kota Tarakan	C
92.	Kota Ternate	C
93.	Kota Yogyakarta	C
	Jumlah	93
		D
1.	Kab. Aceh Barat	D
2.	Kab. Aceh Barat Daya	D
3.	Kab. Aceh Jaya	D
4.	Kab. Aceh Selatan	D
5.	Kab. Asahan	D
6.	Kab. Banggai	D
7.	Kab. Bangka Tengah	D
8.	Kab. Barito Selatan	D
9.	Kab. Batang	D
10.	Kab. Bau-Bau	D
11.	Kab. Bekasi	D
12.	Kab. Belitung	D
13.	Kab. Belitung Timur	D
14.	Kab. Belu	D
15.	Kab. Berau	D
16.	Kab. Bireuen	D
17.	Kab. Bojonegoro	D
18.	Kab. Boolang Mongondow	D
19.	Kab. Bulukumba	D
20.	Kab. Cianjur	D
21.	Kab. Jayapura	D
22.	Kab. Karo	D
23.	Kab. Kepahiang	D
24.	Kab. Kepulauan Aru	D
25.	Kab. Kota Waringin Barat	D



Lanjutan Tabel V.9

No	Kabupaten/Kota	Kriteria
26.	Kab. Kuantan Singingi	D
27.	Kab. Kuningan	D
28.	Kab. Kupang	D
29.	Kab. Kutai Kartanegara	D
30.	Kab. Lingga	D
31.	Kab. Lombok Tengah	D
32.	Kab. Luwu Timur	D
33.	Kab. Wanokwari	D
34.	Kab. Melawi	D
35.	Kab. Muara Enim	D
36.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	D
37.	Kab. Pidie	D
38.	Kab. Pringsewu	D
39.	Kab. Sangihe	D
40.	Kab. Seluma	D
41.	Kab. Seram Bagian Timur	D
42.	Kab. Siak	D
43.	Kab. Sidengreng Rapang	D
44.	Kab. Sigi	D
45.	Kab. Sorong	D
46.	Kab. Sumba Tengah	D
47.	Kab. Sumbawa	D
48.	Kab. Sumedang	D
49.	Kab. Tanah Toraja	D
50.	Kab. Timor Tengah Utara	D
51.	Kab. Toli Toli	D
52.	Kab. Tulang Bawang	D
53.	Kab. Tulang Bawang Barat	D
54.	Kota Ambon	D
55.	Kota Mataram	D
56.	Kota Pagar Alam	D
57.	Kota Pakpak Barat	D
58.	Kota Palu	D
59.	Kota Payakumbuh	D
60.	Kota Prabumulih	D
61.	Kota Salatiga	D
62.	Kota Sibolga	D
63.	Kota Sorong	D
64.	Kota Sungai Penuh	D
65.	Kota Tual	D
	Jumlah	65

Sumber : Kementerian PAN RB, 2012

**Tabel V.10 Perkembangan Integritas Sektor Publik Tingkat Nasional Tahun 2008 - 2012**

No.	Kategori	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Variabel Pengalaman Integritas	7,21	6,71	5,70	6,48	6,89
2.	Variabel Potensi Integritas	5,96	5,87	4,86	5,97	5,34
3.	Indeks Integritas nasional (IIN)	6,84	6,50	5,42	6,31	6,37

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , 2013

Tabel V.11 Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) Secara Nasional Tahun 2010 - 2011

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
1.	Prov.Aceh	13	2,2657	Tinggi	30	1,8100	Tinggi
2.	Kab. Aceh Barat	146	2,5639	Tinggi	250	2,3061	Tinggi
3.	Kab. Aceh Barat Daya	252	2,2431	Tinggi			
4.	Kab. Aceh Besar	256	2,2168	Tinggi	347	1,8203	Sedang
5.	Kab. Aceh Jaya	263	2,1507	Tinggi	321	1,9855	Sedang
6.	Kab. Aceh Selatan	223	2,3627	Tinggi	212	2,3981	Tinggi
7.	Kab. Aceh Singkil	238	2,2806	Tinggi	275	2,2113	Tinggi
8.	Kab. Aceh Tamiang	195	2,4580	Tinggi	269	2,2368	Tinggi
9.	Kab. Aceh Tengah				129	2,5859	Tinggi
10.	Kab. Aceh Tenggara	242	2,2708	Tinggi	346	1,8259	Sedang
11.	Kab. Aceh Timur	151	2,5535	Tinggi	231	2,3429	Tinggi
12.	Kab. Aceh Utara	270	2,1220	Tinggi	274	2,3137	Tinggi
13.	Kab. Bener Meriah	213	2,4024	Tinggi	179	2,4823	Tinggi
14.	Kab. Bireuen	254	2,2363	Tinggi	208	2,4093	Tinggi
15.	Kab. Gayo Lues	187	2,4799	Tinggi	271	2,2235	Tinggi
16.	Kab. Nagan Raya	320	1,7689	Sedang	107	2,6429	Tinggi
17.	Kab. Pidie	298	1,9644	Sedang	306	2,1010	Tinggi
18.	Kab. Pidie Jaya				230	2,3433	Tinggi
19.	Kab. Simeulue	305	1,9129	Sedang	332	1,9302	Sedang
20.	Kota Banda Aceh	33	2,6887	Tinggi	33	2,7862	tinggi
21.	Kota Langsa	56	2,5086	Tinggi	84	2,2392	tinggi
22.	Kota Lhokseumawe	61	2,4796	Tinggi	62	2,5005	tinggi
23.	Kota Sabang	74	2,2481	Tinggi	66	2,4352	tinggi
24.	Kota Subulussalam				89	2,0262	tinggi
25.	Prov. Sumatera Utara	16	2,2143	Tinggi	18	2,2898	tinggi
26.	Kab. Asahan	220	2,3655	Tinggi	140	2,5653	Tinggi
27.	Kab. Batubara				341	1,8429	Sedang
28.	Kab. Dairi	93	2,7421	Tinggi	172	2,5040	Tinggi
29.	Kab. Deli Serdang	219	2,3753	Tinggi	124	2,6095	Tinggi
30.	Kab. Humbang Hasundutan	90	2,7458	Tinggi	10	3,0876	Sangat tinggi
31.	Kab. Karo	296	1,9706	Sedang	222	2,3688	Tinggi
32.	Kab. Labuhan batu	194	2,4601	Tinggi	192	2,4444	Tinggi
33.	Kab. Labuhan batu Selatan						



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
34.	Kab. Labuhan batu Utara						
35.	Kab. Langkat	229	2,3208	Tinggi	244	2,3217	Tinggi
36.	Kab. Mandailing Natal	191	2,4663	Tinggi	198	2,4265	Tinggi
37.	Kab. Nias	271	2,1199	Tinggi	319	1,9877	Sedang
38.	Kab. Nias Barat						
39.	Kab. Nias Selatan	325	1,7062	Sedang	363	1,2347	Sedang
40.	Kab. Nias Utara						
41.	Kab. Padang Lawas				317	2,0078	Tinggi
42.	Kab. Padang Lawas Utara				309	2,0499	Tinggi
43.	Kab. Pakpak Bharat	206	2,4187	Tinggi	223	2,3666	Tinggi
44.	Kab. Samosir	138	2,5876	Tinggi	65	2,7658	Tinggi
45.	Kab. Serdang Bedagai	69	2,8059	Tinggi	68	2,7581	Tinggi
46.	Kab. Simalungun	323	1,7162	Sedang	264	2,2526	Tinggi
47.	Kab. Tapanuli Selatan	235	2,2889	Tinggi	218	2,3844	Tinggi
48.	Kab. Tapanuli Tengah	264	2,1491	Tinggi	185	2,4658	Tinggi
49.	Kab. Tapanuli Utara	110	2,6977	Tinggi	182	2,4771	Tinggi
50.	Kab. Toba Samosir	209	2,4116	Tinggi	300	2,1269	Tinggi
51.	Kota Binjai	69	2,3469	Tinggi	58	2,5507	tinggi
52.	Kota Gunung Sitoli						
53.	Kota Medan	35	2,6831	Tinggi	5	3,1165	sangat tinggi
54.	Kota Padang Sidempuan				83	2,2456	tinggi
55.	Kota Pematang Siantar	81	2,0519	Tinggi	86	2,1381	tinggi
56.	Kota Sibolga	66	2,3683	Tinggi	75	2,3606	tinggi
57.	Kota Tanjung Balai	53	2,5238	Tinggi	74	2,3620	tinggi
58.	Kota Tebing Tinggi	83	1,9463	Sedang	69	2,4094	tinggi
59.	Prov. Sumatera Barat	9	2,3447	Tinggi	25	2,0436	tinggi
60.	Kab. Agam	198	2,4464	Tinggi	123	2,6099	Tinggi
61.	Kab. Dharmasraya	280	2,0551	Tinggi	273	2,2170	Tinggi
62.	Kab. Kep. Mentawai	343	0,6972	Rendah	365	1,0356	Sedang
63.	Kab. Lima Puluh Kota	167	2,5092	Tinggi	139	2,5662	Tinggi
64.	Kab. Padang Pariaman	261	2,1682	Tinggi	217	2,3873	Tinggi
65.	Kab. Pasaman	245	2,2583	Tinggi	67	2,7613	Tinggi
66.	Kab. Pasaman Barat	208	2,4162	Tinggi	211	2,4012	Tinggi
67.	Kab. Pesisir Selatan	132	2,6058	Tinggi	108	2,6412	Tinggi
68.	Kab. Sijunjung	103	2,7122	Tinggi	177	2,4940	Tinggi
69.	Kab. Solok	95	2,7292	Tinggi	181	2,4774	Tinggi
70.	Kab. Solok Selatan	272	2,1035	Tinggi	228	2,3497	Tinggi
71.	Kab. Tanah Datar	85	2,7683	Tinggi	55	2,7950	Tinggi
72.	Kota Bukittinggi	51	2,5479	Tinggi	55	2,5769	tinggi
73.	Kota Padang	85	1,3585	Sedang	42	2,6659	tinggi
74.	Kota Padang Panjang	25	2,7689	Tinggi	45	2,6515	tinggi
75.	Kota Pariaman	60	2,4882	Tinggi	59	2,5375	tinggi
76.	Kota Payakumbuh	36	2,6763	Tinggi	43	2,6563	tinggi
77.	Kota Sawahlunto	70	2,3467	Tinggi	10	3,0257	sangat tinggi
78.	Kota Solok	31	2,7345	Tinggi	13	2,9974	tinggi
79.	Prov. Riau	12	2,2821	Tinggi	16	2,3479	tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
80.	Kab. Bengkalis	136	2,5903	Tinggi	213	2,3941	Tinggi
81.	Kab. Indragiri Hilir	214	2,4020	Tinggi	245	2,3209	Tinggi
82.	Kab. Indragiri Hulu	341	0,9555	Rendah	284	2,1766	Tinggi
83.	Kab. Kampar	100	2,7165	Tinggi	233	2,3419	Tinggi
84.	Kab. Kepulauan Meranti						
85.	Kab. Kuantan Singingi	324	1,7112	Sedang	162	2,2564	Tinggi
86.	Kab. Pelalawan	329	1,6373	Sedang	339	1,8833	Sedang
87.	Kab. Rokan Hilir	248	2,2555	Tinggi	296	2,1381	Tinggi
88.	Kab. Rokan Hulu	154	2,5497	Tinggi	301	2,1246	Tinggi
89.	Kab. Siak	150	2,5559	Tinggi	119	2,6176	Tinggi
90.	Kota Dumai	62	2,4743	Tinggi	50	2,6199	tinggi
91.	Kota Pekanbaru	76	2,1901	Tinggi	72	2,3997	tinggi
92.	Prov. Jambi	33	1,3106	Sedang	14	2,4166	tinggi
93.	Kab. Batang Hari	210	2,4074	Tinggi	189	2,4530	Tinggi
94.	Kab. Bungo	326	1,7035	Sedang	153	2,5407	Tinggi
95.	Kab. Kerinci	234	2,3032	Tinggi	196	2,4365	Tinggi
96.	Kab. Merangin	224	2,3621	Tinggi	237	2,3398	Tinggi
97.	Kab. Muaro Jambi	318	1,7772	Sedang	216	2,3893	Tinggi
98.	Kab. Sarolangun	287	2,0082	Tinggi	77	2,7340	Tinggi
99.	Kab. Tanjung Jabung Barat	335	1,4494	Sedang	351	1,7974	Sedang
100.	Kab. Tanjung Jabung Timur	327	1,6861	Sedang	336	1,9072	Sedang
101.	Kab. Tebo	134	2,5975	Tinggi	184	2,4659	Tinggi
102.	Kota Jambi				65	2,4889	tinggi
103.	Kota Sungai Penuh						
104.	Prov. Sumatera Selatan	5	2,4131	tinggi	10	2,4455	tinggi
105.	Kab. Banyuasin	338	1,3259	Sedang	187	2,4628	Tinggi
106.	Kab. Empat Lawang				201	2,4190	Tinggi
107.	Kab. Lahat	312	1,8508	Sedang	225	2,3590	Tinggi
108.	Kab. Muara Enim	112	2,6971	Tinggi	240	2,3341	Tinggi
109.	Kab. Musi Banyuasin	106	2,7092	Tinggi	131	2,5819	Tinggi
110.	Kab. Musi Rawas	186	2,4834	Tinggi	307	2,0780	Tinggi
111.	Kab. Ogan Ilir	120	2,6690	Tinggi	169	2,5141	Tinggi
112.	Kab. Ogan Komering Ilir	74	2,7899	Tinggi	98	2,6746	Tinggi
113.	Kab. Ogan Komering Ulu	80	2,7770	Tinggi	248	2,3163	Tinggi
114.	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	260	2,1812	Tinggi			
115.	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	179	2,4960	Tinggi	165	2,5263	Tinggi
116.	Kota Lubuk Linggau	27	2,7534	Tinggi	48	2,6323	tinggi
117.	Kota Pagaralam	58	2,4918	Tinggi	77	2,2970	tinggi
118.	Kota Palembang	75	2,7924	Tinggi	30	2,8250	tinggi
119.	Kota Prabumulih	67	2,3656	Tinggi	85	2,2028	tinggi
120.	Prov. Bengkulu	26	1,8237	sedang	28	1,9804	sedang
121.	Kab. Bengkulu Selatan	182	2,4932	Tinggi	142	2,5640	Tinggi
122.	Kab. Bengkulu Tengah				345	1,8261	Sedang
123.	Kab. Bengkulu Utara	163	2,5204	Tinggi	241	2,3334	Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
124.	Kab. Kaur	169	2,5058	Tinggi	190	2,4469	Tinggi
125.	Kab. Kapahiang	183	2,4889	Tinggi	203	2,4171	Tinggi
126.	Kab. Lebong	308	1,8951	Sedang	258	2,2668	Tinggi
127.	Kab. Muko muko	207	2,4167	Tinggi	161	2,5300	Tinggi
128.	Kab. Rejang Lebong	257	2,2156	Tinggi	200	2,4233	Tinggi
129.	Kab. Seluma	306	1,9115	Sedang	362	1,3742	Sedang
130.	Kota Bengkulu	37	2,6715	Tinggi	78	2,2924	tinggi
131.	Prov. Lampung	17	2,1884	Tinggi	24	2,0750	tinggi
132.	Kab. Lampung Barat	121	2,6684	Tinggi	242	2,3317	Tinggi
133.	Kab. Lampung Selatan	124	2,6574	Tinggi	152	2,5417	Tinggi
134.	Kab. Lampung Tengah	300	1,9492	Sedang	103	2,6576	Tinggi
135.	Kab. Lampung Timur	230	2,3154	Tinggi	299	2,1275	Tinggi
136.	Kab. Lampung Utara	181	2,4944	Tinggi	207	2,4128	Tinggi
137.	Kab. Mesuji						
138.	Kab. Pesawaran				313	2,0232	Tinggi
139.	Kab. Pringsewu						
140.	Kab. Tanggamus	337	1,4070	Sedang	267	2,2515	Tinggi
141.	Kab. Tulang Bawang	237	2,2833	Tinggi	235	2,3409	Tinggi
142.	Kab. Tulang Bawang Barat						
143.	Kab. Way Kanan	247	2,2568	Tinggi	361	1,4793	Sedang
144.	Kota Bandar Lampung	48	2,5705	Tinggi	64	2,4923	tinggi
145.	Kota Metro	39	2,6530	Tinggi	57	2,5656	tinggi
146.	Prov. Bangka Belitung	22	2,0939	Tinggi	12	2,4241	tinggi
147.	Kab. Bangka	83	2,7701	Tinggi	81	2,7265	Tinggi
148.	Kab. Bangka Barat	122	2,6637	Tinggi	148	2,5529	Tinggi
149.	Kab. Bangka Selatan	279	2,0606	Tinggi	206	2,4137	Tinggi
150.	Kab. Bangka Tengah	304	1,9129	Sedang	95	2,6856	Tinggi
151.	Kab. Belitung	165	2,5140	Tinggi	76	2,7343	Tinggi
152.	Kab. Belitung Timur	211	2,4057	Tinggi	56	2,7853	Tinggi
153.	Kota Pangkal Pinang	63	2,4226	Tinggi	47	2,6336	tinggi
154.	Prov. Kepulauan Riau	28	1,5576	Sedang	8	2,5164	Tinggi
155.	Kab. Bintan	201	2,4285	Tinggi	47	2,8179	Tinggi
156.	Kab. Karimun	278	2,0694	Tinggi	133	2,5764	Tinggi
157.	Kab. Kepulauan Anambas						
158.	Kab. Lingga	240	2,2767	Tinggi	232	2,3419	Tinggi
159.	Kab. Natuna	262	2,1508	Tinggi	197	2,4274	Tinggi
160.	Kota Batam	55	2,5115	Tinggi	60	2,5253	tinggi
161.	Kota Tanjung Pinang	57	2,5080	Tinggi	44	2,6553	tinggi
162.	Prov. DKI Jakarta	15	2,2454	Tinggi	13	2,4218	tinggi
163.	Prov. Jawa Barat	8	2,3489	Tinggi	4	2,6923	tinggi
164.	Kab. Bandung	21	2,9921	Tinggi	63	2,7692	tinggi
165.	Kab. Bandung Barat				166	2,5256	Tinggi
166.	Kab. Bekasi	176	2,5005	Tinggi	88	2,7042	Tinggi
167.	Kab. Bogor	10	3,0514	Sangat tinggi	16	3,0754	Sangat tinggi
168.	Kab. Ciamis	39	2,9074	Tinggi	87	2,7051	tinggi
169.	Kab. Cianjur	49	2,8605	Tinggi	104	2,6564	Tinggi
170.	Kab. Cirebon	92	2,7440	Tinggi	120	2,6169	Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
171.	Kab. Garut	29	2,9515	Tinggi	39	2,8425	Tinggi
172.	Kab. Indramayu	47	2,8656	Tinggi	147	2,5542	Tinggi
173.	Kab. Karawang	63	2,8178	Tinggi	83	2,7195	Tinggi
174.	Kab. Kuningan	91	2,7443	Tinggi	89	2,7024	Tinggi
175.	Kab. Majalengka	53	2,8483	Tinggi	54	2,7972	Tinggi
176.	Kab. Purwakarta	48	2,8644	Tinggi	128	2,5974	Tinggi
177.	Kab. Subang	27	2,9694	Tinggi	116	2,6205	Tinggi
178.	Kab. Sukabumi	13	3,0401	Sangat tinggi	45	2,8237	Tinggi
179.	Kab. Sumedang	55	2,8466	Tinggi	136	2,5742	Tinggi
180.	Kab. Tasikmalaya	231	2,3141	Tinggi	151	2,5436	Tinggi
181.	Kota Bandung	43	2,6318	Tinggi	12	3,0108	sangat tinggi
182.	Kota Banjar	21	2,8183	Tinggi	29	2,8259	tinggi
183.	Kota Bekasi	46	2,5860	Tinggi	40	2,6917	tinggi
184.	Kota Bogor				17	2,9456	tinggi
185.	Kota Cimahi	10	2,9238	Tinggi	6	3,0907	sangat tinggi
186.	Kota Cirebon	19	2,8450	Tinggi	25	2,8518	tinggi
187.	Kota Depok	8	2,9277	Tinggi	4	3,1486	sangat tinggi
188.	Kota Sukabumi	7	2,9330	Tinggi	23	2,8689	tinggi
189.	Kota Tasikmalaya	38	2,6670	Tinggi	54	2,6020	tinggi
190.	Prov. Jawa Tengah	2	2,7570	Tinggi	2	2,9208	Tinggi
191.	Kab. Banjarnegara	59	2,8359	Tinggi	62	2,7699	Tinggi
192.	Kab. Banyumas	33	2,9200	Tinggi	61	2,7718	Tinggi
193.	Kab. Batang	128	2,6275	Tinggi	84	2,7156	Tinggi
194.	Kab. Blora	88	2,7531	Tinggi	69	2,7475	Tinggi
195.	Kab. Boyolali	3	3,1252	Sangat tinggi	52	2,7998	Tinggi
196.	Kab. Brebes	225	2,3479	Tinggi	111	2,6269	Tinggi
197.	Kab. Cilacap	51	2,8513	Tinggi	71	2,7472	Tinggi
198.	Kab. Demak	79	2,7778	Tinggi	41	2,8397	Tinggi
199.	Kab. Grobogan	97	2,7271	Tinggi	36	2,8594	Tinggi
200.	Kab. Jepara	26	2,9728	Tinggi	9	3,0893	Sangat tinggi
201.	Kab. Karanganyar	4	3,0968	Sangat tinggi	50	2,8075	Tinggi
202.	Kab. Kebumen	23	2,9851	Tinggi	96	2,6848	Tinggi
203.	Kab. Kendal	67	2,8113	Tinggi	58	2,7798	Tinggi
204.	Kab. Klaten	78	2,7812	Tinggi	106	2,6475	Tinggi
205.	Kab. Kudus	64	2,8168	Tinggi	11	3,0829	Sangat tinggi
206.	Kab. Magelang	2	3,2293	Sangat tinggi	66	2,7651	Tinggi
207.	Kab. Pati	275	2,0789	Tinggi	51	2,8041	Tinggi
208.	Kab. Pekalongan	32	2,9288	Tinggi			
209.	Kab. Pemalang	77	2,7839	Tinggi	53	2,7981	Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
210.	Kab. Purbalingga	50	2,8550	Tinggi	5	3,1332	Sangat tinggi
211.	Kab. Purworejo	18	3,0219	Sangat tinggi	114	2,6215	Tinggi
212.	Kab. Rembang	65	2,8165	Tinggi	40	2,8421	Tinggi
213.	Kab. Semarang	45	2,8876	Tinggi	6	3,1177	Sangat tinggi
214.	Kab. Sragen	52	2,8487	Tinggi	79	2,7308	Tinggi
215.	Kab. Sukoharjo	9	3,0587	Sangat tinggi	27	2,9106	Tinggi
216.	Kab. Tegal	149	2,5562	Tinggi	134	2,5756	Tinggi
217.	Kab. Temanggung				48	2,8117	Tinggi
218.	Kab. Wonogiri	22	2,9863	Tinggi	126	2,6048	Tinggi
219.	Kab. Wonosobo	2	3,1578	Sangat tinggi	32	2,8801	Tinggi
220.	Kota Magelang				24	2,8629	tinggi
221.	Kota Pekalongan	2	3,1578	Sangat tinggi	35	2,7356	tinggi
222.	Kota Salatiga	12	2,9197	Tinggi	20	2,9094	tinggi
223.	Kota Semarang	4	3,1289	Sangat tinggi	11	3,0257	sangat tinggi
224.	Kota Surakarta	11	2,9232	Tinggi	7	3,0823	sangat tinggi
225.	Kota Tegal	22	2,8158	Tinggi	9	3,0785	sangat tinggi
226.	Prov. DI Yogyakarta	10	2,3356	Tinggi	5	2,6554	tinggi
227.	Kab. Bantul	17	3,0287	Sangat tinggi	13	3,0770	Sangat tinggi
228.	Kab. Gunung Kidul	41	2,8967	Tinggi	60	2,7727	tinggi
229.	Kab. Kulon Progo	7	3,0707	Sangat tinggi	15	3,0758	Sangat tinggi
230.	Kab. Sleman	1	3,1969	Sangat tinggi	8	3,0923	Sangat tinggi
231.	Kota Yogyakarta	1	3,2397	Sangat tinggi	3	3,1535	sangat tinggi
232.	Prov. Jawa Timur	1	2,7696	Tinggi	1	3,1482	tinggi
233.	Kab. Bangkalan	34	2,9195	Tinggi	38	2,8452	Tinggi
234.	Kab. Banyuwangi	161	2,5271	Tinggi	26	2,9464	Tinggi
235.	Kab. Blitar	153	2,5518	Tinggi	72	2,7448	Tinggi
236.	Kab. Bojonegoro	14	3,0395	Sangat tinggi	33	2,8692	Tinggi
237.	Kab. Bondowoso	25	2,9805	Tinggi	42	2,8358	Tinggi
238.	Kab. Gresik	56	2,8456	Tinggi	24	2,9754	Tinggi
239.	Kab. Jember	289	2,0022	Tinggi	94	2,6859	Tinggi
240.	Kab. Jombang	5	3,0872	Sangat tinggi	3	3,3756	Sangat tinggi
241.	Kab. Kediri	44	2,8904	Tinggi	23	3,0002	Sangat tinggi
242.	Kab. Lamongan	62	2,8204	Tinggi	25	2,9556	Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
243.	Kab. Lumajang	15	3,0321	Sangat tinggi	19	3,0555	Sangat tinggi
244.	Kab. Madiun	276	2,0768	Tinggi	37	2,8452	Tinggi
245.	Kab. Magetan	129	2,6259	Tinggi	29	2,9083	tinggi
246.	Kab. Malang	19	3,0004	Sangat tinggi	28	2,9086	Tinggi
247.	Kab. Mojokerto	190	2,4693	Tinggi	31	2,8990	Tinggi
248.	Kab. Nganjuk	113	2,6828	Tinggi	44	2,8337	Tinggi
249.	Kab. Ngawi	42	2,8906	Tinggi	20	3,0550	Sangat tinggi
250.	Kab. Pacitan	8	3,0631	Sangat tinggi	4	3,2124	Sangat tinggi
251.	Kab. Pamekasan	109	2,6996	Tinggi	12	3,0789	Sangat tinggi
252.	Kab. Pasuruan	24	2,9814	Tinggi	30	2,9006	Tinggi
253.	Kab. Pongoro	16	3,0314	Sangat tinggi	22	3,0153	Sangat tinggi
254.	Kab. Probolinggo	130	2,6171	Tinggi	57	2,7847	Tinggi
255.	Kab. Sampang	70	2,8057	Tinggi	21	3,0329	Sangat tinggi
256.	Kab. Sidoarjo	28	2,9541	Tinggi	17	3,0732	Sangat tinggi
257.	Kab. Situbondo	143	2,5803	Tinggi	43	2,8356	Tinggi
258.	Kab. Sumenep	86	2,7601	Tinggi	18	3,0661	Sangat tinggi
259.	Kab. Trenggalek	76	2,7844	Tinggi	34	2,8691	Tinggi
260.	Kab. Tuban	108	2,7011	Tinggi	1	3,4787	Sangat tinggi
261.	Kab. Tulungagung	35	2,9165	Tinggi	2	3,4298	Sangat tinggi
262.	Kota Batu	49	2,5620	Tinggi	31	2,8244	tinggi
263.	Kota Blitar	47	2,5791	Tinggi	22	2,8763	tinggi
264.	Kota Kediri	24	2,7909	Tinggi	19	2,9179	tinggi
265.	Kota Madiun	14	2,8974	Tinggi	2	3,2144	sangat tinggi
266.	Kota Malang	18	2,8485	Tinggi	14	2,9634	tinggi
267.	Kota Mojokerto	28	2,7467	Tinggi	8	3,0803	sangat tinggi
268.	Kota Pasuruan	54	2,5157	Tinggi	16	2,9458	tinggi
269.	Kota Probolinggo	34	2,6838	Tinggi	18	2,9234	tinggi
270.	Kota Surabaya	30	2,7346	Tinggi	21	2,8956	tinggi
271.	Prov. Banten	19	2,1687	Tinggi	23	2,1163	tinggi
272.	Kab. Lebak	322	1,7196	Sedang	100	2,6657	Tinggi
273.	Kab. Pandeglang	98	2,7268	Tinggi	86	2,7144	Tinggi
274.	Kab. Serang	184	2,4889	Tinggi	113	2,6258	Tinggi
275.	Kab. Tangerang	99	2,7258	Tinggi	49	2,8090	Tinggi
276.	Kota Cilegon	42	2,6464	Tinggi	32	2,7863	tinggi
277.	Kota Serang				49	2,6305	tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
278.	Kota Tangerang				1	3,2320	sangat tinggi
279.	Kota Tangerang Selatan						
280.	Prov. Bali	21	2,0951	Tinggi	27	1,9960	sedang
281.	Kab. Badung	144	2,5769	Tinggi			
282.	Kab. Bangli	268	2,1224	Tinggi	304	2,1168	Tinggi
283.	Kab. Buleleng	102	2,7139	Tinggi	130	2,5831	Tinggi
284.	Kab. Gianyar	82	2,7743	Tinggi	125	2,6078	Tinggi
285.	Kab. Jembrana	40	2,9006	Tinggi	70	2,7473	Tinggi
286.	Kab. Karangasem	193	2,5652	Tinggi	173	2,5032	Tinggi
287.	Kab. Klungkung	57	2,8410	Tinggi	168	2,5151	Tinggi
288.	Kab. Tabanan	60	2,8317	Tinggi	80	2,7273	Tinggi
289.	Kota Denpasar	82	1,9463	Sedang	15	2,9594	tinggi
290.	Prov. Nusa Tenggara Barat	6	2,4100	Tinggi	6	2,5824	tinggi
291.	Kab. Bima	177	2,4986	Tinggi	156	2,5353	Tinggi
292.	Kab. Dompu	283	2,0304	Tinggi	293	2,1398	Tinggi
293.	Kab. Lombok Barat	126	2,6343	Tinggi	110	2,6310	Tinggi
294.	Kab. Lombok Tengah	117	2,6779	Tinggi	253	2,2913	Tinggi
295.	Kab. Lombok Timur	96	2,7272	Tinggi	112	2,6267	Tinggi
296.	Kab. Lombok Utara				276	2,2035	Tinggi
297.	Kab. Sumbawa	61	2,8269	Tinggi	99	2,6745	Tinggi
298.	Kab. Sumbawa Barat	72	2,7922	Tinggi	115	2,6213	Tinggi
299.	Kota Bima	52	2,5392	Tinggi			
300.	Kota Mataram	29	2,7447	Tinggi	36	2,7355	tinggi
301.	Prov. Nusa Tenggara Timur	27	1,7052	Sedang	22	2,1500	tinggi
302.	Kab. Alor	168	2,5077	Tinggi	294	2,1396	Tinggi
303.	Kab. Belu	171	2,5034	Tinggi	194	2,4394	Tinggi
304.	Kab. Ende	313	1,8384	Sedang	256	2,2754	Tinggi
305.	Kab. Flores Timur	315	1,8124	Sedang	261	2,2595	Tinggi
306.	Kab. Kupang	118	2,6747	Tinggi	170	2,5096	Tinggi
307.	Kab. Lembata	266	2,1362	Tinggi	263	2,2528	Tinggi
308.	Kab. Manggarai	246	2,2580	Tinggi	246	2,3200	Tinggi
309.	Kab. Manggarai Barat	342	0,7810	Rendah	191	2,4469	Tinggi
310.	Kab. Manggarai Timur				826	2,2465	Tinggi
311.	Kab. Nagekeo				195	2,5368	Tinggi
312.	Kab. Ngada	226	2,3469	Tinggi	255	2,2804	Tinggi
313.	Kab. Rote Ndao	285	2,0238	Tinggi	308	2,0528	tinggi
314.	Kab. Sabu Raijua						
315.	Kab. Sikka	265	2,1461	Tinggi	236	2,3405	Tinggi
316.	Kab. Sumba Barat	258	2,2066	Tinggi	209	2,4087	Tinggi
317.	Kab. Sumba Darat Daya				337	1,9010	Sedang
318.	Kab. Sumba Tengah				288	2,1661	Tinggi
319.	Kab. Sumba Timur	292	1,9814	Sedang	298	2,1323	Tinggi
320.	Kab. Timor Tengah Selatan	282	2,0450	Tinggi	310	2,0438	Tinggi
321.	Kab. Timor Tengah Utara	244	2,2610	Tinggi	323	1,9739	Sedang



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
322.	Kota Kupang	78	2,1485	Tinggi			
323.	Prov. Kalimantan Barat	7	2,3931	Tinggi	7	2,5300	tinggi
324.	Kab. Bengkayang	212	2,4050	Tinggi	171	2,5066	Tinggi
325.	Kab. Kapuas hulu	164	2,5177	Tinggi	163	2,5272	Tinggi
326.	Kab. Kayong Utara				285	2,1728	tinggi
327.	Kab. Ketapang	228	2,3217	Tinggi	135	2,5742	Tinggi
328.	Kab. Kubu Raya				183	2,4663	Tinggi
329.	Kab. Landak	137	2,5885	Tinggi	210	2,4031	Tinggi
330.	Kab. Melawi	174	2,5022	Tinggi	243	2,3224	Tinggi
331.	Kab. Pontianak	72	2,2989	Tinggi	121	2,6149	Tinggi
332.	Kab. Sambas	148	2,5579	Tinggi	154	2,5405	tinggi
333.	Kab. Sanggau	205	2,4194	Tinggi	186	2,4629	Tinggi
334.	Kab. Sekadau	253	2,2393	Tinggi	193	2,4400	Tinggi
335.	Kab. Sintang	159	2,5318	Tinggi	118	2,6179	tinggi
336.	Kota Pontianak	156	2,5475	Tinggi	46	2,6457	tinggi
337.	Kota Singkawang	65	2,3749	Tinggi	63	2,4957	tinggi
338.	Prov. Kalimantan Tengah	20	2,1203	Tinggi	20	2,2176	tinggi
339.	Kab. Barito Selatan	204	2,4217	Tinggi	259	2,2651	Tinggi
340.	Kab. Barito Timur	259	2,1879	Tinggi	257	2,2739	Tinggi
341.	Kab. Barito Utara	135	2,5929	Tinggi	202	2,4186	Tinggi
342.	Kab. Gunung Mas	188	2,4776	Tinggi	215	2,3893	Tinggi
343.	Kab. Kapuas	71	2,7941	Tinggi	167	2,5249	Tinggi
344.	Kab. Katingan	166	2,5137	Tinggi	204	2,4155	Tinggi
345.	Kab. Kotawaringin Barat	89	2,7495	Tinggi	149	2,5485	Tinggi
346.	Kab. Kotawaringin Timur	157	2,5436	Tinggi	266	2,2519	Tinggi
347.	Kab. Lamandau	127	2,6386	Tinggi	155	2,5374	Tinggi
348.	Kab. Murung Raya	142	2,5822	Tinggi	318	1,9891	Sedang
349.	Kab. Pulang Pisang	202	2,4250	Tinggi	291	2,1515	Tinggi
350.	Kab. Seruyan	216	2,3862	Tinggi	278	2,1863	Tinggi
351.	Kab. Sukamara	196	2,4558	Tinggi	219	2,3822	Tinggi
352.	Kota Palangkaraya	32	2,7100	Tinggi	87	2,1026	tinggi
353.	Prov. Kalimantan Selatan	14	2,2650	Tinggi	19	2,2748	tinggi
354.	Kab. Balangan	115	2,6815	Tinggi	162	2,5286	Tinggi
355.	Kab. Banjar	281	2,0520	Tinggi	137	2,5720	Tinggi
356.	Kab. Barito Kuala	20	3,0002	Sangat tinggi	59	2,7741	Tinggi
357.	Kab. Hulu Sungai Selatan	152	2,5537	Tinggi	78	2,7337	Tinggi
358.	Kab. Hulu Sungai Tengah	75	2,7858	Tinggi	102	2,6578	Tinggi
359.	Kab. Hulu Sungai Utara	107	2,7067	Tinggi	74	2,7373	Tinggi
360.	Kab. Kotabaru	173	2,5024	Tinggi	160	2,5321	Tinggi
361.	Kab. Tabalong	145	2,5675	Tinggi	295	2,1388	Tinggi
362.	Kab. Tanah Bumbu	94	2,7384	Tinggi	117	2,6196	Tinggi
363.	Kab. Tanah Laut	175	2,5006	Tinggi	343	1,8388	sedang
364.	Kab. Tapih	155	2,5497	Tinggi	158	2,5327	Tinggi
365.	Kota Banjarbaru	40	2,6475	Tinggi	52	2,6122	tinggi
366.	Kota Banjarmasin	41	2,6475	Tinggi	38	2,7030	tinggi
367.	Prov. Kalimantan Timur	11	2,3294	Tinggi	9	2,5085	tinggi
368.	Kab. Berau	31	2,9314	Tinggi	97	2,6787	Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
369.	Kab. Bulungan	131	2,6087	Tinggi	109	2,6392	Tinggi
370.	Kab. Kutai Barat	125	2,6442	Tinggi	199	2,4234	Tinggi
371.	Kab. Kutai Kartanegara	140	2,5871	Tinggi	150	2,5446	Tinggi
372.	Kab. Kutai Timur	215	2,3930	Tinggi	265	2,2524	Tinggi
373.	Kab. Malinau	11	3,0410	Sangat tinggi	105	2,6501	Tinggi
374.	Kab. Nunukan	147	2,5587	Tinggi	91	2,6955	Tinggi
375.	Kab. Paser	267	2,1256	Tinggi	157	2,5342	Tinggi
376.	Kab. Penajam Paser Utara	344	0,6856	Rendah	93	2,6901	Tinggi
377.	Kab. Tana Tidung				350	1,8032	Sedang
378.	Kab. Balikpapan	13	2,8992	Tinggi	26	2,8486	tinggi
379.	Kota Bontang	20	2,8369	Tinggi	39	2,6979	tinggi
380.	Kota Samarinda	5	2,9815	Tinggi	27	2,8468	tinggi
381.	Kota Tarakan	45	2,5889	Tinggi			
382.	Prov Sulawesi Utara	4	2,4973	Tinggi	11	2,4341	tinggi
383.	Kab. Bolaang Mongondow	251	2,2518	Tinggi	359	1,5168	Sedang
384.	Kab. Bolaang Mongondow Selatan						
385.	Kab. Bolaang Mongondow Timur						
386.	Kab. Bolaang Mongondow Utara				281	2,1813	Tinggi
387.	Kab. Kepulauan Sangihe	249	2,2551	Tinggi	176	2,4948	Tinggi
388.	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro				305	2,1100	Tinggi
389.	Kab. Kepulauan Taulad	274	2,0890	Tinggi	270	2,2241	Tinggi
390.	Kab. Minahasa	87	2,7560	Tinggi	234	2,3410	Tinggi
391.	Kab. Minahasa Selatan	197	2,4549	Tinggi	226	2,3534	Tinggi
392.	Kab. Minahasa Tenggara				280	2,1832	Tinggi
393.	Kab. Minahasa Utara	160	2,5278	Tinggi	144	2,5626	Tinggi
394.	Kota Bitung	26	2,7571	Tinggi	41	2,6813	tinggi
395.	Kota Kotamobagu				90	2,7767	sedang
396.	Kota Manado	23	2,7890	Tinggi	70	2,4077	tinggi
397.	Kota Tomohon	79	2,1455	Tinggi	80	2,2644	tinggi
398.	Prov. Sulawesi Tengah	30	1,4939	Sedang	21	2,2094	tinggi
399.	Kab. Banggai	84	2,7686	Tinggi	145	2,5604	Tinggi
400.	Kab. Banggai Kepulauan	284	2,0277	Tinggi	297	2,1357	Tinggi
401.	Kab. Buol	328	1,6594	Sedang	349	1,8059	Sedang
402.	Kab. Donggala	185	2,4865	Tinggi	174	2,5053	Tinggi
403.	Kab. Morowali	180	2,4960	Tinggi	279	2,1841	Tinggi
404.	Kab. Parigi Moutong	255	2,2184	Tinggi	175	2,5003	Tinggi
405.	Kab. Poso	218	2,3774	Tinggi	205	2,4140	Tinggi
406.	Kab. Sigi						
407.	Kab. Tojo Una-Una	297	1,9683	Sedang	251	2,3053	Tinggi
408.	Kab. Tolitoli	334	1,4521	Sedang	353	1,7869	Sedang
409.	Kota Palu	44	2,6264	Tinggi	68	2,4131	tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
410.	Prov. Sulawesi Selatan	3	2,6403	Tinggi	3	2,7876	Tinggi
411.	Kab. Bantaeng	104	2,7112	Tinggi	143	2,5635	Tinggi
412.	Kab. Barru	141	2,5840	Tinggi	132	2,5788	Tinggi
413.	Kab. Bone	54	2,8467	Tinggi	85	2,7152	Tinggi
414.	Kab. Bulukumba	139	2,5872	Tinggi	159	2,5323	Tinggi
415.	Kab. Enrekang	36	2,9106	Tinggi	7	3,1016	Sangat tinggi
416.	Kab. Gowa	58	2,8395	Tinggi	64	2,7680	Tinggi
417.	Kab. Jenepono	189	2,4733	Tinggi	239	2,3392	Tinggi
418.	Kab. Kep. Selayar	114	2,6822	Tinggi	254	2,2895	Tinggi
419.	Kab. Luwu	203	2,4229	Tinggi	311	2,0288	Tinggi
420.	Kab. Luwu Timur	30	2,9421	Tinggi	46	2,8226	Tinggi
421.	Kab. Luwu Utara	6	3,0717	Sangat tinggi	14	3,0763	Sangat tinggi
422.	Kab. Maros	162	2,5212	Tinggi	127	2,6038	Tinggi
423.	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	170	2,5042	Tinggi	73	2,7396	Tinggi
424.	Kab. Pinrang	73	2,7901	Tinggi	90	2,6979	Tinggi
425.	Kab. Sindereng Rappang	46	2,8863	Tinggi	101	2,6630	Tinggi
426.	Kab. Sinjai	105	2,7095	Tinggi	138	2,5706	Tinggi
427.	Kab. Soppeng	111	2,6933	Tinggi	122	2,6108	Tinggi
428.	Kab. Takalar	133	2,5984	Tinggi	141	2,5648	Tinggi
429.	Kab. Tana Toraja	133	2,5984	Tinggi	82	2,7216	Tinggi
430.	Kab. Toraja Utara						
431.	Kab. Wajo	12	3,0408	Sangat tinggi	75	2,7360	Tinggi
432.	Kota Makassar	9	2,9256	Tinggi	28	2,8342	tinggi
433.	Kota Palopo	15	2,8863	Tinggi	51	2,6153	tinggi
434.	Kota Pare-Pare	17	2,8497	Tinggi	34	2,7574	tinggi
435.	Prov. Sulawesi Tenggara	29	1,5000	Sedang	31	1,7544	sedang
436.	Kab. Bombana	345	0,2811	Rendah	247	2,3186	Tinggi
437.	Kab. Buton	222	2,3631	Tinggi	302	2,1205	Tinggi
438.	Kab. Buton Utara				286	2,1677	Tinggi
439.	Kab. Kolaka	309	1,8687	Sedang	146	2,5578	Tinggi
440.	Kab. Kolaka Utara	172	2,5033	Tinggi	314	2,0220	Tinggi
441.	Kab. Konawe	339	1,1995	Sedang	348	1,8158	Sedang
442.	Kab. Konawe Selatan	346	0,2811	Rendah	221	2,3774	Tinggi
443.	Kab. Konawe Utara				358	1,5781	Sedang
444.	Kab. Muna	336	1,4194	Sedang	329	1,9453	Sedang
445.	Kab. Wakatobi	178	2,4077	Tinggi	164	2,5266	Tinggi
446.	Kota Bau-Bau	68	2,3648	Tinggi	53	2,6120	tinggi
447.	Kota Kendari	86	1,0537	Sedang	56	2,5710	tinggi
448.	Prov. Gorontalo	23	2,0812	Tinggi	26	2,0091	tinggi
449.	Kab. Boalemo	81	2,7747	Tinggi	214	2,3912	tinggi
450.	Kab. Bone Bolango	290	1,9938	Sedang	320	1,9873	sedang
451.	Kab. Gorontalo	68	2,8101	Tinggi	220	2,3804	tinggi
452.	Kab. Gorontalo Utara				354	1,7662	sedang
453.	Kab. Pohuwato	200	2,4376	Tinggi	92	2,6949	tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
454.	Kota Gorontalo	50	2,5498	Tinggi	71	2,4066	Tinggi
455.	Prov. Sulawesi Barat	18	2,1761	Tinggi	15	2,3691	tinggi
456.	Kab. Majene	233	2,3047	Tinggi	249	2,3072	Tinggi
457.	Kab. Mamasa	101	2,7164	Tinggi	188	2,4540	Tinggi
458.	Kab. Mamuju	116	2,6790	Tinggi	180	2,4791	Tinggi
459.	Kab. Mamuju Utara		2,2864	Tinggi	260	2,2649	Tinggi
460.	Kab. Polewali Mandar	66	2,8121	Tinggi	178	2,4912	Tinggi
461.	Prov. Maluku	24	1,9901	Sedang	17	2,2924	tinggi
462.	Kab. Buru	227	2,3450	Tinggi	252	2,3051	Tinggi
463.	Kab. Buru Selatan						
464.	Kab. Kepulauan Aru	340	1,1383	Sedang	355	1,7639	Sedang
465.	Kab. Maluku Barat Daya						
466.	Kab. Maluku Tengah	217	2,3821	Tinggi	283	2,1770	Tinggi
467.	Kab. Maluku Tenggara	331	1,5920	Sedang	334	1,9131	Sedang
468.	Kab. Maluku Tenggara Barat	192	2,4657	Tinggi	312	2,0254	Tinggi
469.	Kab. Seram Bagian Barat	303	1,9288	Sedang	333	1,9156	Sedang
470.	Kab. Seram Bagian Timur	310	1,8597	Sedang	322	1,9815	Sedang
471.	Kota Ambon	80	2,1364	Tinggi	79	2,2848	tinggi
472.	Kota Tual				88	2,0653	tinggi
473.	Prov. Maluku Utara	25	1,9731	Sedang	32	1,7535	sedang
474.	Kab. Halmahera Barat	43	2,8906	Tinggi	338	1,8976	Sedang
475.	Kab. Halmahera Selatan	158	2,5389	Tinggi	331	1,9435	Sedang
476.	Kab. Halmahera Tengah	295	1,9736	Sedang	289	2,1575	Tinggi
477.	Kab. Halmahera Timur	314	1,8192	Sedang	330	1,9450	Sedang
478.	Kab. Halmahera Utara	294	1,9761	Sedang	229	2,3462	Tinggi
479.	Kab. Kepulauan Sula	293	1,9799	Sedang	272	2,2219	Tinggi
480.	Kab. Pulau Morotai						
481.	Kota Ternate	64	2,4124	Tinggi	81	2,2605	tinggi
482.	Kota Tidore Kepulauan	77	2,1767	Tinggi	67	2,4318	tinggi
483.	Prov. Papua	32	1,4230	Sedang	28	1,8598	sedang
484.	Kab. Asmat	250	2,2519	Tinggi	327	1,9697	Sedang
485.	Kab. Baik Numfor	311	1,8517	Sedang	364	1,0889	Sedang
486.	Kab. Boven Digoel	316	1,8029	Sedang	344	1,8287	Sedang
487.	Kab. Deiyai						
488.	Kab. Dogiyai						
489.	Kab. Intan Jaya						
490.	Kab. Jayapura	243	2,2642	Tinggi	224	2,3629	Tinggi
491.	Kab. Jayawijaya	301	1,8469	Sedang	356	1,7604	Sedang
492.	Kab. Keerom	286	2,0101	Tinggi	316	2,0082	Tinggi
493.	Kab. Kepulauan Yapen	302	1,9352	Sedang	335	1,9100	Sedang
494.	Kab. Lanny Jaya						
495.	Kab. Memberamo Raya				360	1,4914	Sedang
496.	Kab. Memberamo Tengah						
497.	Kab. Mappi	332	1,5100	Sedang	315	2,0135	Tinggi
498.	Kab. Marauke	221	2,3649	Tinggi	287	2,1670	Tinggi
499.	Kab. Mimika	199	2,4430	Tinggi	282	2,1774	Tinggi
500.	Kab. Nabire	232	2,3139	Tinggi	292	2,1500	Tinggi



Lanjutan Tabel V.11

No.	Kabupaten/ Kota	2010			2011		
		Rank	Skor	Status	Rank	Skor	Status
501.	Kab. Nduga						
502.	Kab. Paniai	273	2,0973	Tinggi			
503.	Kab. Pegunungan Bintang	269	2,1220	Tinggi	328	1,9629	Sedang
504.	Kab. Puncak						
505.	Kab. Puncak Jaya	317	1,7786	Sedang	342	1,8391	Sedang
506.	Kab. Sarmi	239	2,2787	Tinggi			
507.	Kab. Supiori	299	1,9515	Sedang	303	2,1190	Tinggi
508.	Kab. Tolikara	307	1,8988	Sedang	352	1,7895	sedang
509.	Kab. Waropen	333	1,4721	Sedang	340	1,8558	Sedang
510.	Kab. Yahukimo	319	1,7734	Sedang	357	1,5840	Sedang
511.	Kab. Yalimo						
512.	Kota Jayapura	59	2,4886	Tinggi			
513.	Prov. Papua Barat	31	1,4392	Sedang			
514.	Kab. Fakfak	330	1,6335	Sedang	33	1,4074	sedang
515.	Kab. Kaimana	288	2,0080	Tinggi			
516.	Kab. Manokwari				325	1,9728	Sedang
517.	Kab. Maybrat						
518.	Kab. Raja Ampat	277	2,0742	Tinggi			
519.	Kab. Sorong	241	2,2767	Tinggi	326	1,9702	Sedang
520.	Kab. Sorong Selatan	321	1,7254	Sedang	238	2,3395	Tinggi
521.	Kab. Tambrau				324	1,9735	Sedang
522.	Kab. Teluk Bintuni						
523.	Kab. Teluk Wondama	291	1,9869	Sedang			
524.	Kota Sorong	71	2,3027	Tinggi	290	2,1534	Tinggi

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120-2818 Tahun 2013.

Tabel V.12 Peringkat Doing Business Negara ASEAN Tahun 2011 - 2013

No.	Negara	2011	2012	2013
1.	Singapura	1	1	1
2.	Thailand	16	17	18
3.	Malaysia	23	18	12
4.	Brunei	86	83	79
5.	Vietnam	90	98	99
6.	Indonesia	126	129	128
7.	Philipina	134	136	138
8.	Kamboja	138	138	133
9.	Laos			163

Sumber : Doing Business in a more transparent world, <http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013>



Tabel V.13 Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2008 - 2012

No.	Negara	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Singapura	9,2	9,2	9,3	9,2	87
2.	Brunei Darussalam	0	5,5	5,5	5,2	55
3.	Malaysia	5,1	4,5	4,4	4,3	49
4.	Thailand	3,5	3,4	3,5	3,4	37
5.	Indonesia	2,6	2,8	2,8	3,0	32
6.	Vietnam	2,7	2,7	2,7	2,9	31
7.	Philipina	2,3	2,4	2,4	2,6	34
8.	Kamboja	1,8	2	2,1	2,1	22
9.	Laos	2	2	2,1	2,2	21
10.	Myanmar	1,3	1,4	1,4	1,5	15

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara, 2010, Bappenas; *Corruption Perception Index 2011*, http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruption_perceptions_index_2011, *Corruption Perception Index 2012*, <http://www.transparency.org/cpi2012/results>.

Tabel V.14 Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Negara ASEAN Tahun 2008-2012

No.	Negara	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Singapura	4	3	1	5	5
2.	Malaysia	47	56	56	60	54
3.	Philipina	141	139	134	129	105
4.	Thailand	80	84	78	80	88
5.	Vietnam	121	120	116	112	123
6.	Indonesia	126	111	110	100	118
7.	Brunei Darussalam	-	39	38	44	46
8.	Laos				154	160
9.	Myanmar				180	172
10.	Kamboja				164	157

Sumber : Pengembangan Database Pembangunan Aparatur Negara 2010, Bappenas; *Corruption Perception Index 2011*, http://www.transparency.org/whatwedo/pub/corruptionperceptions_index_2011, *Corruption Perception Index 2012*, <http://www.transparency.org/cpi2012/results>

Tabel V.15 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Penanganan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Penyelidikan	67	54	78	77	44
2.	Penyidikan	37	40	39	48	37
3.	Penuntutan	32	32	40	36	12
4.	Inkracht	39	34	34	28	22
5.	Eksekusi	37	36	35	32	26
	Jumlah	212	196	226	221	141

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013

**Tabel V.16 Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh KPK Tahun 2009 - 2013**

No.	Jabatan	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Anggota DPR dan DPRD	8	27	5	16	7
2.	Kepala lembaga/ kementerian	1	2	-	1	-
3.	Duta besar	-	1	-	-	-
4.	Komisioner	-	-	-	-	-
5.	Gubernur	2	1	-	-	1
6.	Walikota/bupati dan wakil	5	4	4	4	1
7.	Eselon I, II dan III	14	12	15	8	5
8.	Hakim	-	1	2	2	1
9.	Swasta	11	8	10	16	13
10.	Lain-lain	4	9	3	3	6
	Jumlah	45	65	39	50	34

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013

Tabel V.17 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Dittipidkor Polri Tahun 2009 - 2013

No.	Jenis Penanganan	2009	2010	2011	2012
1.	P.21	204	285	498	610
2.	SP3	20	28	26	39
3.	Limpah	1	4	2	8
4.	Proses sidik	265	176	432	591
	Jumlah	490	493	958	1248

Sumber : Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, 2013

Catatan :

P.21 : Berkas dinyatakan lengkap dan dikirim ke kejaksaan

SP 3 : Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Limpah : Dilimpahkan ke Instansi Lain

Tabel V.18 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima oleh KPK Tahun 2008 - 2013

No.	Instansi	2008	2009	2010	2011	2012
1.	MPR/DPR	16	17	22	18	18
2.	DPRD	15	5	82	28	3
3.	DPD	-	1	-	-	1
4.	Kepresidenan	1	-	4	2	-
5.	Kementerian Koordinator	1	1	1	4	4
6.	Kementerian	43	37	66	61	74
7.	Kementerian Negara	1	3	5	8	-
8.	Lembaga Setingkat Kementerian	14	17	12	16	9
9.	LPND	6	12	41	19	10
10.	Lembaga ekstra struktural	-	2	1	6	44
11.	Pemerintah Daerah	81	166	48	106	75
12.	Yudikatif	9	1	5	9	3
13.	Inspektif (BPK)	15	10	10	-	-
14.	Lembaga Independen	47	54	57	39	23
15.	BUMN/BUMD	17	9	39	1057	894
	Jumlah	266	335	393	1373	1158

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013



Tabel V.19 Jumlah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang Diterima oleh KPK Tahun 2010 - 2013

No.	Bidang	Jenis	2010		2011		2012	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Eksekutif	Jumlah wajib lapor	102431	78%	139274	79%	170378	74%
		Jumlah yang melaporkan	79559		110218		126194	
2.	Legislatif	Jumlah wajib lapor	17339	99%	17458	99%	17467	99%
		Jumlah yang melaporkan	17157		17236		17219	
3.	Yudikatif	Jumlah wajib lapor	10381	90%	11241	87%	11602	87%
		Jumlah yang melaporkan	9354		9754		10149	
4.	BUMN/D	Jumlah wajib lapor	14406	85%	17422	86%	19827	87%
		Jumlah yang melaporkan	12270		15056		17168	

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013

Tabel V.20 Rangkings (Rank) dan Nilai (Value) Human Development Index (HDI) Negara ASEAN Tahun 2010 - 2012

No.	Negara	HDI Rank			HDI Values		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.	Singapura	27	26	18	0,846	0,866	0,895
2.	Brunei Darussalam	37	33	30	0,805	0,838	0,855
3.	Malaysia	57	61	64	0,744	0,761	0,769
4.	Thailand	92	103	103	0,654	0,682	0,690
5.	Philipina	97	112	114	0,638	0,644	0,654
6.	Indonesia	108	124	121	0,600	0,617	0,629
7.	Kamboja	124	139	138	0,494	0,523	0,543
8.	Myanmar	132	149	149	0,451	0,483	0,498
9.	Laos	122	138	138	0,497	0,524	0,543
10.	Vietnam	113	128	127	0,572	0,593	0,617

Sumber : Human Development Report UNDP, 2013



Tabel V.21 Nilai Komponen (components) Human Development Index (HDI) Negara ASEAN Tahun 2011-2012

No	Negara	Health		Education				Living Standard	
		Life Expectancy at birth		Mean Years of schooling		Expected Years of schooling		Gross National Income (GNI) per capita	
		2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
1.	Singapura	81,1	81,2	8,8	10,1	14,4	14,4	52.569	52.613
2.	Brunei Darussalam	78,0	78,1	8,6	8,6	14,1	15,0	45.753	45.690
3.	Malaysia	74,2	74,5	9,5	9,2	12,6	12,6	13685	13.676
4.	Thailand	74,1	74,3	6,6	6,6	12,3	12,3	7.694	7.722
5.	Philipina	68,7	69,0	8,9	8,9	11,9	11,7	3.478	3.752
6.	Indonesia	69,4	69,8	5,8	5,8	13,2	12,9	3.716	4.154
7.	Kamboja	63,1	63,6	5,8	5,8	9,8	10,5	1.848	2.095
8.	Myanmar	65,2	65,7	4,0	3,9	9,2	9,4	1.535	1.817
9.	Laos	67,5	67,8	4,6	4,6	9,2	10,1	2.242	2.435
10.	Vietnam	75,2	75,4	5,5	5,5	10,4	11,9	2.805	2.970

Sumber : Human Development Report UNDP, 2013



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR I
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NOMOR : 2641/PI.1/HKM.03.2/2013

TENTANG

TIM PELAKSANA
KAJIAN PENYUSUNAN BUKU/ DATABASE APARATUR TAHAP II

NO	NAMA	JABATAN
1.	Dr. H. Baban Sobandi, SE., M. Si.	Peneliti Madya
2.	Drs. Dayat Hidayat, M.Si	Peneliti Madya
3.	Drs. Syarifudin Hidayat, M. Si	Peneliti Muda
4.	Putri Wulandari, S.Si., ME.	Peneliti Pertama
5.	Krismiyati, ST., M.Ec.	Peneliti Pertama
6.	Dr. H. Joni Dawud, DEA	Peneliti Non Fungsional
7.	Rahmat, S.Pd., MA.	Peneliti Non Fungsional
8.	Dra. Enni Iriani, M. Ed.	Peneliti Non Fungsional
9.	Anita Ilyas, S.Sos.	Peneliti Non Fungsional
10.	Rosita Novi Andari, S.Sos	Peneliti Non Fungsional
11.	Shafiera Amalia, S.IP	Koordinator
12.	Budi Permana, S.Sos.	Sekretariat
13.	Indra Risni Utami, A.Md.	Sekretariat
14.	Tino Trisno Mulya, SAP	Sekretariat
15.	20 Orang	Narasumber Pakar/ Praktisi
16.	10 Orang	Narasumber Pejabat Esselon I
17.	15 Orang	Narasumber Pejabat Esselon II
18.	10 Orang	Narasumber Pejabat Esselon III ke Bawah

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 Juli 2013

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR I LAN,



Gering Supriyadi
NIP. 19540407 197501 1 001

